BADAN POM

LAPORAN KINERJA 2025



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh

KATA PENGANTAR



Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc
Kepala BBPOM di Aceh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dapat merampungkan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2025.

Dokumen ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan tugas sesuai dengan DIPA 2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada periode ini, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai angka 103,68 dengan predikat “Istimewa.” Hasil tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan sinergi antar unit atau fungsi yang berjalan dengan baik.

Anggaran Balai Besar POM Banda Aceh Tahun 2025 bersumber dari APBN sesuai DIPA No. SP DIPA-063.01.2.432790/2025 dengan pagu awal sebesar Rp. 20,121,653,000,-. Pada Juli 2025 dilakukan revisi anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai dan barang sehingga total anggaran menjadi Rp.19,936,291,000,-. Terhadap total pagu tahun 2025 terdapat anggaran yang di blokir sebesar Rp. 4,011,749,000,-, sehingga anggaran yang dapat direalisasikan menjadi Rp. 15,924,542,000,-. Realisasi anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp. 15,862,701,274,- atau **99,61** persen dan 79,57 persen terhadap pagu total.

Balai Besar POM di Banda Aceh telah mengikuti dan menuntaskan tahapan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam rangka pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan telah berhasil meraih predikat WBBM pada 11 Februari 2026 . Meski demikian, kami memahami

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bahwa capaian tersebut masih memerlukan penyempurnaan dan penguatan berkelanjutan pada berbagai aspek tata kelola dan kualitas pelayanan.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan produk Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, serta bermanfaat. Semua ini diperkuat melalui strategi preventif, pengawasan, penindakan, dan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi dengan semangat “KolaborAksi Siap WBBM”.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi dalam perencanaan strategis, penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani, serta menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita menuju masyarakat sehat dengan produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banda Aceh,



Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Balai Besar POM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan perwujudan akuntabilitas Balai Besar POM di Banda Aceh. Laporan ini memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang memadai atas capaian Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Pimpinan telah melakukan dialog kinerja kepada fungsi-fungsi di UPT sehingga kinerja organisasi dapat diukur dan dinilai dengan baik secara akuntabel.

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh pada tanggal 29 Agustus 2025 telah menandatangani Revisi Perjanjian Kinerja yang memuat 28 (Dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) untuk mencapai 8 (delapan) Sasaran Kegiatan. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di Triwulan IV sebesar **103,68** dengan predikat **Istimewa**.



Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik,** 12 (dua belas) indikator kinerja dengan kategori **Baik,** dan **5** (lima) indikator kinerja dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**.

CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS

Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan IV Tahun 2025 berhasil menunjukkan kinerja organisasi yang sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,68 dan memperoleh predikat **Istimewa**. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan pada triwulan berikutnya.



Kinerja strategis Balai Besar POM di Banda Aceh didukung oleh delapan Sasaran Kegiatan, di mana fokus utama pada Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan) memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian organisasi. Dari 15 indikator kinerja pada sasaran ini, 10 indikator dengan capaian kinerja berkategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target strategis telah tercapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian strategis ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antar bidang, pelaksanaan sampling berbasis risiko, serta komitmen pegawai dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan hasil uji meskipun menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan reagen dan perawatan alat laboratorium. Pengelolaan risiko dilakukan secara proaktif melalui pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian strategi pengawasan agar tetap efisien dan akuntabel.

Secara umum, hasil capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh telah berhasil melaksanakan mandat pengawasan Obat dan Makanan dengan efektivitas tinggi. Kinerja yang dicapai tidak hanya menggambarkan keberhasilan operasional, tetapi juga memperlihatkan komitmen institusi dalam mendukung prioritas nasional di bidang kesehatan dan ketahanan pangan. Dengan capaian ini, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis mampu

mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya sesuai Rencana Strategis Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT dilaksanakan untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga pengawasan iklan, guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Dari 15 indikator kinerja, terdapat 10 indikator berkategori Sangat Baik, 2 indikator Baik, dan 3 indikator Tidak Dapat Disimpulkan.

Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi efektif antara tim sampling dan pengujian, optimalisasi laboratorium regional, relaksasi anggaran pada triwulan II–IV, serta pengelolaan risiko yang terkendali meskipun terdapat kendala keterbatasan reagensia dan peralatan. Dengan realisasi anggaran sebesar 99,92% dan capaian indikator 103,90%, kinerja ini dinilai efisien. Secara keseluruhan, indikator ini memperkuat efektivitas pengawasan berbasis risiko oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dan menunjukkan kesiapan institusi dalam mencapai target Renstra secara berkelanjutan.

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO mencapai realisasi 26,66% dari target 26%, dengan capaian 102,54% (Sangat Baik), di mana 12 dari 45 fasilitas yang telah menerima KIE Farmakovigilans aktif melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) melalui sistem e-MESO. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi edukasi, pendampingan, dan monitoring yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mendukung implementasi farmakovigilans sesuai kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta menempatkan kinerja tahun pertama Renstra 2025–2029 pada jalur yang tepat menuju target 30% di tahun 2029 (88,86% dari target akhir, kategori “Akan Tercapai”), dengan pemanfaatan anggaran yang efisien (99,92%).

Secara keseluruhan, hasil capaian Sasaran Kegiatan 1 menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pencapaian ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerjanya.

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,25	93,77	103,90
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	26,66	102,54
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	97,32	114,49
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,50	102,94
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,3	85,78	102,98
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	99,85	103,20
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,8	99,20	110,47
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	95,80	119,75

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,69	105,69
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,00	79,60	109,04
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15,38	15,38	100

SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Realisasi indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 mencapai 75% (3 dari 4 sarana terdaftar), sesuai dengan target tahunan 75% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Baik. Dari tiga sarana yang diperiksa, satu sarana di Banda Aceh tidak lagi beroperasi dan direkomendasikan pencabutan izin, sementara dua sarana lainnya di Aceh Besar dan Bireuen memperoleh hasil Baik dan Sangat Baik (rating A) dengan hasil uji sampling memenuhi syarat. Dibandingkan target Renstra 2029 sebesar 100%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 75% dengan kategori “akan tercapai”, menunjukkan jalur kinerja yang progresif dan terkendali. Indikator ini merupakan indikator baru dalam Renstra 2025–2029, dengan target meningkat menjadi 100% pada tahun 2027 dan dipertahankan hingga 2029.

Dari aspek tata kelola, pencapaian indikator didukung oleh perencanaan pemeriksaan yang konsisten, monitoring dan evaluasi aktif, koordinasi lintas seksi dalam tindak lanjut rekomendasi regulatori, serta pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha. Efisiensi anggaran tercapai dengan realisasi sebesar 99,98% dari pagu Rp5.069.000 dan capaian indikator 100%, sehingga menunjukkan penggunaan sumber daya yang optimal dan efisien. Pengelolaan risiko, termasuk potensi fraud dan gratifikasi, telah dimitigasi melalui pakta integritas dan pengawasan internal yang ketat. Ke depan, penguatan komitmen petugas, evaluasi berkala, serta optimalisasi pembinaan akan menjadi kunci untuk meningkatkan cakupan hingga 100% sesuai target Renstra 2029.

Tabel 2. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2025

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	100,00

SASARAN KEGIATAN 3 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini, seluruh 4 indikator kinerja tahun 2025 berhasil mencapai target tahunan menunjukkan konsistensi perencanaan dan eksekusi program yang efektif. Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mencatat realisasi indeks 96,45% melampaui target 86,54%,. Capaian ini juga telah melampaui target Renstra 2029 sebesar 90% (107,17% terhadap target jangka menengah), serta menjadi yang tertinggi dibandingkan unit kerja sejenis. Hal ini mencerminkan kuatnya strategi komunikasi publik, inovasi media (tatap muka dan digital), serta efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan pemahaman dan manfaat KIE bagi masyarakat.

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan juga mencapai 100% terhadap target yang telah disesuaikan akibat efisiensi anggaran, dengan realisasi 5 sekolah intervensi penuh. Seluruh tahapan program (advokasi, sosialisasi, bimtek, monitoring, pengawalan) terealisasi 100% sesuai bobot progres. Walaupun secara kumulatif baru mencapai 83,33% dari target Renstra 2029 (10 dari 12 sekolah), capaian tahunan tetap optimal karena adanya penyesuaian pagu anggaran. Keberhasilan ini ditopang komitmen sekolah, integrasi program dengan UKS dan kantin sehat, serta sinergi aktif dengan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan daerah.

Pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, masing-masing terealisasi 100% terhadap target tahunan yang telah disesuaikan (1 desa dan 1 pasar). Namun secara perspektif Renstra 2029, capaian masih 50% untuk desa (4 dari target 8) dan 33,33% untuk pasar (1

dari target 3), sehingga memerlukan akselerasi pada tahun berikutnya. Kendati demikian, seluruh tahapan intervensi (advokasi, bimtek, monev, pengawalan) terlaksana 100%, serta didukung efektivitas pengendalian risiko yang menurunkan level risiko residu dari 11 menjadi 5. Hal ini menunjukkan tata kelola program berjalan baik meskipun ruang fiskal terbatas.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini ditandai oleh tiga faktor utama: (1) efektivitas strategi intervensi berbasis komunitas, (2) kolaborasi lintas sektor yang kuat, dan (3) efisiensi anggaran dengan realisasi rata-rata di atas 99% tanpa mengurangi kualitas output. Tantangan utama bukan pada kualitas pelaksanaan, melainkan pada keterbatasan anggaran yang mempengaruhi perluasan cakupan jangka menengah. Dengan penguatan replikasi program dan optimalisasi dukungan pemerintah daerah, proyeksi pencapaian target Renstra 2029 tetap berada pada jalur yang realistis dan terukur.

Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi kegiatan seperti Podcast “Berbisik BPOM Aceh”, program Sanger Ureung Aceh, serta kolaborasi dengan lintas sektor, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Selain itu, realisasi pembudayaan pengawasan keamanan pangan sekolah 83,75% dengan capaian 95,71%, penguatan Desa Pangan Aman (107,14%), dan pengembangan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (100%).

Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2025

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,54	96,45	111,45
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100
Jumlah desa pangan aman	4	4	100
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100

SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pada tahun 2025, indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan mencapai realisasi 19,40% sesuai target tahunan 19,40%, dengan capaian 100% (kategori Baik). Dari target 13 UMKM (11 pangan olahan, 1 OBA, 1 kosmetik), seluruhnya berhasil menyelesaikan tahapan pendampingan hingga memperoleh rekomendasi sertifikasi, bahkan pendampingan aktual menjangkau 21 UMKM melalui inovasi "Korporasi". Keberhasilan ini ditopang strategi adaptif atas keterbatasan anggaran melalui skema daring, kolaborasi dengan Orang Tua Asuh (OTA), dukungan laboratorium terakreditasi, serta sinergi lintas sektor dan perbankan untuk pembiayaan. Secara kumulatif terhadap target Renstra 2029 (100%), capaian baru 19,40% sehingga memerlukan akselerasi bertahap, namun kinerja tahunan menunjukkan tren konsisten dan efisien dengan serapan anggaran 99,41% oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2025

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19,40	19,40	100

SASARAN KEGIATAN 5 TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pada tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Balai Besar POM di Banda Aceh mencapai 88,75% dari target 92,50%, dengan tingkat capaian kinerja 95,95% (kategori Baik). Capaian ini dihitung berdasarkan pembobotan tahapan penyidikan (SPDP 15%, Tahap I 40%, P21 30%, Tahap II 15%) dan merefleksikan

penyelesaian 3 perkara hingga Tahap II, 1 perkara Tahap I, serta 1 perkara carry over yang diterbitkan SP3. Sebagai indikator baru dalam Renstra 2025–2029, realisasi tahun pertama telah mencapai 88,75% dari target akhir 2029 sebesar 100% dengan kategori “akan tercapai”, menunjukkan kinerja masih berada pada jalur yang terukur. Dibandingkan UPT sejenis, target Banda Aceh termasuk tertinggi kedua, dan meskipun realisasi sedikit di bawah salah satu UPT lain, capaian tetap kompetitif dengan selisih yang sangat tipis (<1%), menandakan kapasitas penindakan yang relatif kuat di tengah keterbatasan fiskal.

Dari aspek tata kelola, keberhasilan ini didukung oleh koordinasi intensif dengan Kepolisian dan Kejaksaan, optimalisasi patroli siber dan jejaring intelijen, serta partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan. Namun, dari sisi efisiensi anggaran, realisasi belanja mencapai 99,55% sementara capaian indikator 95,95%, sehingga tercatat belum efisien—dipengaruhi pengalihan anggaran untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun. Ke depan, peningkatan efektivitas dapat ditempuh melalui penguatan koordinasi lintas APH, strategi penanganan perkara berbasis prioritas risiko, serta penguatan mitigasi risiko operasional (termasuk potensi tersangka melarikan diri dan tidak ditemukannya barang bukti). Dengan langkah tersebut, peluang mencapai target optimal 100% pada akhir Renstra tetap realistis dan terkendali.

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2024

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,50	88,75	95,95

SASARAN KEGIATAN 6 TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pada tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada Balai Besar POM di Banda Aceh mencapai 100% dari target 90%, dengan capaian 111,11%. Kinerja ini ditopang oleh ketepatan waktu pelaporan 397 tautan patroli siber terindikasi pelanggaran, tindak lanjut 100% atas 9 rekomendasi Direktorat Cegah Tangkal, serta nilai 100% pada analisis kejahatan Semester II. Dibandingkan target Renstra 2029 sebesar 94%, realisasi tahun pertama telah mencapai 106,38% sehingga masuk kategori tercapai/melampaui. Sebagai indikator baru dalam Renstra 2025–2029, capaian ini menunjukkan kapasitas analisis dan fungsi cegah tangkal yang berjalan efektif serta selaras dengan performa UPT lain yang juga merealisasikan 100%.

Dari sisi efisiensi, realisasi anggaran sebesar 99,98% dengan capaian indikator 111,11% menunjukkan penggunaan sumber daya yang optimal dan efisien. Keberhasilan didukung perencanaan yang terstruktur, pengendalian tenggat waktu melalui sistem reminder, koordinasi intensif dengan Direktorat Cegah Tangkal, dukungan tim IT, serta monitoring rutin untuk mitigasi risiko keterlambatan pelaporan. Dengan penguatan konsistensi operasi siber, peningkatan kualitas analisis kewilayahan, dan pengawasan berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi, capaian kinerja berpeluang dipertahankan di atas standar hingga akhir periode Renstra.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2025

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	100,00	111,11

SASARAN KEGIATAN 7 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT tahun 2025 pada Balai Besar POM di Banda Aceh mencapai 4,96 dari target 4,70 atau sebesar 105,53% dengan kategori Pelayanan Prima (A), meningkat 0,06 poin dibanding tahun 2024 (4,90) dan melampaui target Renstra 2029 sebesar 4,90 (101,22%). Capaian ini menempatkan unit kerja sebagai peraih nilai tertinggi dibanding balai sejenis, serta melampaui target nasional 4,70. Penilaian IPP mengacu pada pedoman Kementerian PANRB melalui mekanisme PEKPPP yang mengukur enam aspek berbobot (kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, SIPP, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi), sehingga skor 4,96 mencerminkan kinerja komprehensif yang kuat pada seluruh dimensi pelayanan.

Keberhasilan ini ditopang oleh pemenuhan optimal enam aspek penilaian, hasil survei kepuasan masyarakat yang sangat memuaskan, serta inovasi layanan yang berdampak nyata, dengan efisiensi anggaran 99,78% dari pagu Rp112.285.000 dan capaian kinerja 105,53% (kategori efisien). Penguatan standar layanan, peningkatan profesionalitas SDM, digitalisasi layanan dan pengelolaan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan. Risiko operasional terkait potensi pemberhentian petugas layanan telah dimitigasi melalui penguatan kontrak kerja dan pengendalian internal, menurunkan level risiko residu dari 11 menjadi 5, sehingga keberlanjutan capaian Pelayanan Prima dapat terjaga.

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2025

Layanan Publik UPT yang prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,93	105,53

SASARAN KEGIATAN 8 TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan kinerja tata kelola yang kuat melalui capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebesar 90,24 dari target 90,25 (99,99%, kategori Baik) dan meningkat 2,75 poin dari tahun 2024, sekaligus berhasil meraih predikat WBBM dari Kementerian PANRB. Nilai AKIP mencapai 81,00 (97,85%, predikat A/Memuaskan) meskipun turun 0,48 poin akibat penurunan komponen capaian kinerja, namun masih berada pada jalur “akan tercapai” terhadap target Renstra 2029 (96,54%). Nilai Kinerja Anggaran mencapai skor konversi 5 (100%, kategori Sangat Baik) dengan realisasi nilai 92,37 yang ditopang IKPA 99,39 dan EKA 85,34, mencerminkan kualitas perencanaan dan kepatuhan pelaksanaan anggaran yang terjaga.

Sementara itu, Indeks Manajemen Risiko (IMR) terealisasi 2,906 dari target 3,20 (90,81%, kategori Baik), meningkat dari tahun sebelumnya (2,884) namun masih memerlukan penguatan integrasi risiko ke dalam siklus perencanaan dan evaluasi kinerja untuk mengejar target 2029 sebesar 3,70 (78,54%, kategori akan tercapai). Dari sisi efisiensi, pembangunan ZI (99,55%) dan kinerja anggaran (99,94%) tergolong efisien, sedangkan AKIP (99,62%) dan IMR (99,62%) dinilai belum sepenuhnya efisien karena output belum optimal dibanding input. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 mencerminkan konsistensi reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, serta tata kelola anggaran dan risiko yang semakin matang, dengan ruang perbaikan pada efektivitas pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas outcome kinerja.

Perlu upaya memperbaiki dan memperkuat sistem pemantauan serta evaluasi yang ada, dengan memastikan bahwa setiap rencana kerja dapat dipantau secara real-time dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua elemen instansi bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk mendukung pemantauan dan evaluasi akan sangat membantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Risiko lainnya yang muncul mencakup kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi,

ketidaktepatan data kinerja, serta metode pengumpulan data kinerja yang belum seragam.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2025

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optima

Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90,25	90,24	99,99
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82,78	81,00	97,85
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	5	100
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3,20	2,90	90,63

Untuk mengatasinya, dilakukan penguatan koordinasi, penjadwalan pelaporan yang ketat, dan pemanfaatan platform digital untuk konsistensi data.
Fokus peningkatan diarahkan pada konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan rencana aksi, dan penguatan sistem akuntabilitas agar tata kelola organisasi semakin transparan, responsif, dan berdaya saing.

REALISASI ANGGARAN

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2025 yang diterbitkan yang tanggal 2 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp20.121.623.000- (Dua puluh miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pada tanggal 7 Juli 2025 telah dilakukan revisi pemotongan anggaran sesuai surat dari Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 belanja pegawai sebesar Rp392.325.000.- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan belanja barang sebesar Rp5.993.000.- (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

sehingga total anggaran menjadi Rp19.936.291.000.- (Sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp15.868.279.994 atau 99,65% dari pagu efektif.Realisasi anggaran akhir tahun 2025 sebesar Rp15.862.701.274,- atau 79,57 persen terhadap pagu total.

HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025 guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.

Triwulan I



SINERGI UNTUK GIZI SEHAT: BPOM ACEH KAWAL KEAMANAN PANGAN MBG

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh turut menghadiri kegiatan Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung pada 06 Januari 2025. **Total penerima manfaat program ini mencapai 3.478 orang,** yang terdiri dari 574 anak TK, 2.017 siswa SD, 415 siswa SMP, 172 siswa SMA, serta 300 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.



MONEV PELAYANAN PUBLIK: BPOM ACEH DORONG INOVASI LAYANAN PENGUJIAN CEPAT

Peserta rapat terdiri dari 10 instansi pelayanan publik yang memiliki daftar kunjungan relatif rendah namun dengan potensi besar untuk menarik minat masyarakat. Inovasi ini **mencakup deteksi cemaran merkuri pada kosmetik, cemaran bahan berbahaya pada makanan, serta pengujian kandungan sildenafil** pada kopi.

SEKRETARIAT BADAN POM RI
DI BUMO SEURAMOE MEKKAH



KOLABORAKSI MENUJU WBBM: BPOM ACEH LIBATKAN SEMUA PIHAK

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) menggelar kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi (RB), Indeks Manajemen Risiko, serta Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 15 Januari 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan **BPOM Aceh terus berkomitmen melaksanakan perubahan** untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



DORONG EKONOMI LOKAL : KOLABORASI WUJUDKAN PRODUK PANGAN AMAN DAN BERKUALITAS

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh turut hadir dalam kegiatan pelatihan lokakarya (workshop) dan seminar pengolahan kuliner perikanan siap saji pada 17 Januari 2025. Dengan sinergi yang terus terjalin, diharapkan **perekonomian lokal dapat tumbuh secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Barat** dan sekitarnya.



BPOM ACEH DAMPINGI PERCEPATAN PENGAJUAN IP CPPOB, UMKM PANGAN SIAP NAIK KELAS

Bimtek dilaksanakan pada 13 Februari 2025 secara daring, Peserta kegiatan ini berasal dari pelaku usaha pangan olahan yang belum memiliki sertifikat IP CPPOB di berbagai kabupaten/kota dalam wilayah pengawasan BPOM Aceh. Melalui bimtek ini, diharapkan **para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk serta mendaftarkan produknya melalui e-reg RBA** untuk memperoleh NomorIzin Edar (NIE) dari BPOM.



BPOM DAN SAKA POM ACEH : PERMUDAH AKSES INFORMASI, KAWAL KEAMANAN PANGAN

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Banda Aceh menggelar kegiatan Tribakti Pangan Aman di lima warung kopi (warkop) pada 18 Februari 2025. Hasil uji sederhana menunjukkan bahwa **makanan yang diperiksa bebas dari bahan berbahaya,** seperti formalin dan boraks, sehingga aman untuk dikonsumsi.



Balai Besar POM di Banda Aceh mendapatkan penghargaan **"Satker dengan implementasi KKP terbaik I"**.



BPOM Aceh Pastikan Takjil Ramadan Aman, Ini Hasil Pengawasannya!

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan SAKA POM menggelar Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Ramadan (takjil) di Kota Banda Aceh pada 13 Maret 2025. Dari total 63 sampel takjil yang diuji, **seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat (MS),** tanpa adanya temuan bahan berbahaya maupun yang dilarang.

Triwulan II



UMKM ACEH NAIK KELAS! BPOM GELAR BIMTEKPRODUKSI DAN PERIZINAN OBA-KOSMETIK

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BPOM melalui Direktorat Registrasi Obat Bahan Alam dan Kosmetik telah **mengembangkan sistem pendaftaran produk yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).** "Penyederhanaan proses registrasi ini harus diiringi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk.



WUJUDKAN GENERASI EMAS: BPOM ACEH IKUT SUKSESKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI

BPOM Aceh menghadiri kegiatan Launching Pemberian Makan Bergizi Bersama Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anak Balita Gizi Kurang serta Pelayanan Kesehatan Puskesmas Keliling di Gampong pada 17 April 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Kompleks Masjid Al-Furqan, Gampong Beurawe ini bertujuan untuk **meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita, serta memperkuat layanan kesehatan** dasar langsung di tingkat gampong sebagai upaya nyata percepatan penurunan angka stunting di Kota Banda Aceh.



Kopi, Edukasi, dan Aksi! Kolaborasi BPOM dan Pramuka Bantu Wujudkan Pangan Aman

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) Aceh menggelar inovasi bertajuk "Sanger Ureueng Aceh" pada 24 April 2025. Melalui pendekatan yang menyenangkan dan edukatif di warkop, ruang nongkrong favorit masyarakat Aceh, kegiatan ini mengusung semangat Tribakti Pangan Aman, yang mencakup tiga aksi utama: **pemantauan sederhana, pengujian cepat, serta edukasi** langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha makanan dan minuman.



Kolaborasi Lintas Sektor, BPOM Aceh dan Pemko Kompak Sukseskan Program Prioritas Nasional

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyelenggarakan kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional (Pro PN) yang mencakup Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari hingga 30 April 2025 di Kota Banda Aceh. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk **menggalang dukungan dan memperkuat komitmen** Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh serta lintas sektor terkait dalam mendukung implementasi program keamanan pangan di seluruh titik rantai pangan sesuai peran masing-masing.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 08 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Balai Desa Alue Naga, Kota Banda Aceh, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PRO PN) "Desa Pangan Aman" yang bertujuan untuk **meningkatkan kapasitas masyarakat desa** dalam menjaga keamanan pangan demi mendukung upaya penurunan stunting. Melalui kegiatan ini, BPOM Aceh berharap para kader yang telah dilatih dapat menjadi agen perubahan di desanya masing-masing. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, para kader diharapkan mampu mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan serta berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh melaksanakan Sosialisasi SAPA Sekolah pada 09 Mei 2025 di Aula SMP Negeri 10 Banda Aceh. Melalui kegiatan ini, diharapkan SAPA Sekolah dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang **membudayakan keamanan pangan di lingkungan pendidikan** dan melalui pembekalan kepada komunitas sekolah, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak, serta lahirnya generasi cerdas yang sadar pangan aman sejak dini.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan Olahan secara hybrid pada 16 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal dari proses pendampingan UMKM setelah dilakukan penetapan target pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan **dengan pendampingan secara intensif di sarana** produksi masing-masing, hingga pelaku usaha berhasil memperoleh Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda bersama SAKA POM menggelar kegiatan inovatif bertajuk "Sanger Ureueng Aceh", pada 15 Mei 2025. Kegiatan ini menyasar lima warung kopi di wilayah Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya, BPOM Aceh juga membuka pojok konsultasi sebagai ruang interaksi dua arah

dengan masyarakat, untuk **memberikan informasi, menjawab pertanyaan, serta mendampingi proses registrasi produk**, khususnya bagi pelaku UMKM lokal.



POM Aceh Dukung Peluncuran Layanan Terpadu MPP: Akses Informasi UMKM Kini Lebih Mudah

BPOM Aceh turut hadir dan memberikan dukungan pada peluncuran Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik (MPP), MPP Care, dan One Stop Service (OSS) khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 19 Mei 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung MPP Kota Banda Aceh ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah untuk **menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi**, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Melalui sistem layanan terpadu ini, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi serta menghubungi instansi terkait tanpa harus berpindah-pindah tempat atau bingung dengan prosedur yang rumit.



Edukasi, Intervensi, dan Harapan Replikasi Wujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



Cetak Kader Keamanan Pangan: Jajanan Anak Aman, Sekolah Nyaman



Desa Alue Naga Bergerak! BPOM Aceh Latih Kader Tangani Keamanan Pangan dan Stunting

Balai Besar POM di Banda Aceh menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada 08 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Balai Desa Alue Naga, Kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk **meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam menjaga keamanan pangan** demi mendukung upaya penurunan stunting. Melalui kegiatan ini, BPOM Aceh berharap para kader yang telah dilatih dapat menjadi agen perubahan di desanya masing-masing.



SAPA Sekolah, BPOM Aceh Bangun Budaya Pangan Aman di Lingkungan Pendidikan

SAPA Sekolah yang digelar pada 09 Mei 2025 di Aula SMP Negeri 10 Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan Program Prioritas Nasional (PRO PN) yang bertujuan untuk **meningkatkan pemahaman dan pengetahuan komunitas sekolah** tentang pentingnya pengawasan dan pengawalan keamanan pangan di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat SD dan SMP.



KOLABORASI MASA KINI, EDUKASI DI WARUNG KOPI

Bersama SAKA POM, Balai Besar POM di Banda Aceh menggelar kegiatan inovatif bertajuk "Sanger Ureueng Aceh" pada 15 Mei 2025 yang menyasar 5 (lima) warung kopi di Banda Aceh. Melalui kegiatan ini diharapkan **memperkuat kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor** dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan UMKM Aceh.



POM Aceh Dukung Peluncuran Layanan Terpadu MPP: Akses Informasi UMKM Kini Lebih Mudah



Cetak Kader Keamanan Pangan: Jajanan Anak Aman, Sekolah Nyaman



Edukasi, Intervensi, dan Harapan Replikasi Wujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



Kolaborasi BPOM dan Pramuka Tingkatkan Kesadaran Keamanan Pangan di Aceh Besar

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama bersama Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) menggelar kegiatan inovatif bertajuk "Sanger Ureueng Aceh" pada 02 Juni 2025. Kegiatan merujuk 5 warung kopi di wilayah Aceh Besar. Dalam kegiatan ini, juga dibuka pojok konsultasi. Pengunjung bisa mendapatkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan berkonsultasi terkait proses registrasi produk, terutama bagi pelaku UMKM lokal.

Triwulan III



Kolaboraksi Korporasi: Bangun Kepercayaan Konsumen, Penuhi Regulasi Produk UMKM

BPOM Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha lokal melalui kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Center Aceh. BPOM Aceh berharap para pelaku UMKM semakin memahami pentingnya memenuhi regulasi, sehingga produk lokal tidak hanya diterima di pasar Aceh, tetapi juga mampu menembus pasar nasional hingga internasional.



BPOM Edukasi: Sekolah Sehat, Anak Hebat!

BPOM Aceh melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan dan pengujian pangan jajanan kantin sekolah di Yayasan Pendidikan Al Azhar Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional BPOM untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, serta mendukung tumbuh kembang anak melalui pangan yang layak konsumsi.



BPOM Aceh Bekali Petugas SPPG: Pastikan Pangan Sehat untuk Generasi Hebat!



Jamin Mutu dan Kualitas Produk Lewat Inovasi Korporasi



Bekali UMKM: BPOM Aceh Bongkar Kunci Sukses Tembus Pasar Lebih Luas!



Kolaborasi Masa Kini: Ajak Masyarakat Bijak Buang Sampah Obat

BPOM Aceh bersama Tim World Cleanup Day (WCD) Aceh menggelar kegiatan Diskusi Aspirasi Kota. Mengelola sampah obat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Jika dibuang sembarangan, obat kedaluwarsa bisa mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko penyalahgunaan,



Rahasia Skincare Aman! BPOM Aceh Bongkar Cara Jitu Pilih Kosmetik

Cek KLIK merupakan langkah sederhana namun sangat penting untuk memastikan keamanan kosmetik yang kita gunakan. Jangan mudah tergiur dengan promosi atau iklan berlebihan yang seringkali menyesatkan. Keamanan kulit dan kesehatan harus menjadi prioritas utama,"



Perkuat Kolaboraksi, Ciptakan Dapur SPPG Aman dan Bergizi



Bongkar Peredaran Obat Ilegal, Satu Tersangka Resmi Diserahkan ke Kejari Bireuen!



Ngopi di Aceh Kini Makin Tenang!



Bimtek Saryanfar : Perkuat Peran Apoteker dalam Pengelolaan Obat



Coaching dan Desk Registrasi: Solusi Praktis Pelaku Usaha Pangan Olahan Raih Izin Edar



ATM BPOM Pertama di Indonesia Diresmikan: Akses Informasi dan Sertifikasi Obat-Makanan Kian Mudah

BPOM Aceh bersama Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Langsa menyelenggarakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan peresmian inovasi Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM (ATM BPOM) pertama di Indonesia pada 04 Agustus 2025.



SAKA POM Aceh: Cetak Generasi Muda Cerdas Akan Obat dan Makanan



Gandeng Komunitas Disabilitas: Tingkatkan Akses Informasi Keamanan Obat dan Makanan



Dukung Penguatan IRTP Aceh Besar Lewat Bimtek CPPOB



Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi, Wujudkan Layanan PPID Lebih Optimal

Triwulan IV



Sinergi Hebat! Bersatu Kawal Keamanan Obat dan Makanan di Aceh

Pada tanggal 07 Oktober 2025 BPOM Aceh melaksanakan koordinasi dengan Polda Aceh untuk memperkuat kerjasama antara BPOM dan kepolisia dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.



Inovasi Korporasi: Strategi BPOM Aceh Cetak UMKM Tangguh dan Berdaya Saing

BBPOM Aceh melakukan pendampingan kepada lima pelaku usaha, meliputi pengolahan minuman botanical (Kuniyit Cinta), minuman berperisa (limun), kopi, dan frozen food di Kabupaten Pidie serta Bireuen. Pendampingan dilakukan secara langsung di sarana produksi guna memberikan masukan on site agar pelaku usaha memahami standar sarana produksi sesuai persyaratan CPPOB.



Inovasi Hebat! ATM BPOM Kedua Resmi Diluncurkan di Aceh Barat

Peresmian ATM BPOM ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, hingga melakukan konsultasi terkait obat, makanan, serta pengurusan izin edar produk tanpa harus datang langsung ke kantor BPOM yang jaraknya cukup jauh.



Tingkatkan Literasi: BPOM Aceh Ajak DWP BPKP Aceh Cerdas Memilih Kosmetik Aman

Penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau yang mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Karena itu, masyarakat perlu cerdas dan selektif dalam memilih produk yang digunakan.



BBPOM Aceh dan SAKA POM melaksanakan inovasi Sanger pada 5 warung kopi di Banda Aceh dang Aceh Besar tanggal 20 Oktober 2025. Kegiatan diawali dengan Tribakti Pangan Aman, meliputi pengujian sederhana terhadap pangan jajanan, pemantauan langsung terhadap kebersihan dan pengelolaan pangan di warung kopi, serta edukasi kepada pemilik usaha mengenai pentingnya penyajian pangan yang aman











BPOM Aceh terus memperkuat peran edukatifnya di tengah masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif untuk membangun lingkungan pangan yang aman, sehat, dan berdaya guna bagi kesejahteraan generasi mendatang.



Tingkatkan Daya Saing Produk: BPOM Aceh Hadir Beri Pembekalan Ekspor-Impor untuk UMKM Aceh Jaya

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku UKM dalam memenuhi persyaratan mutu dan regulasi demi meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membuka ruang konsultasi langsung, sehingga solusi yang diberikan dapat segera diterapkan dalam proses produksi dan pemenuhan regulasi.



Perkuat Garda MBG Aman: BPOM Aceh Latih 1.850 Penjamah Makanan

Dalam kegiatan ini, kehadiran BPOM Aceh memperkuat aspek pengawasan keamanan pangan melalui materi keamanan pangan, cemaran pada pangan, standar higienitas, serta praktik terbaik dalam pengolahan makanan yang aman dan bermutu.



SAKA POM Bergerak: Hadirkan Antiseptik dan Lotion Anti Nyamuk untuk Aksi Peduli Bencana

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan bakat dan minat anggota SAKA POM pada Krida Pengujian Obat dan Makanan, sekaligus wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Aceh.



Balai Besar POM di Banda Aceh mendapatkan penghargaan **"Satker dengan implementasi KKP terbaik I"**.

DAFTAR ISI

HIGHLIGHT KINERJA i

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GRAFIK xix

DAFTAR GAMBAR xxii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum Organisasi 3

1.3. Struktur Organisasi 5

BAB II 17

PERENCANAAN KINERJA 17

2.1 Rencana Strategis 17

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 24

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 29

BAB III 37

AKUNTABILITAS KINERJA 37

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 37

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 223

4.1 Kesimpulan 275

LAMPIRAN 276

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 15

Tabel 2.Target Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 18

Tabel 3.Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh 23

Tabel 4.Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 25

Tabel 5.Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 27

Tabel 6.Kategori Capaian Indikator Kinerja 34

Tabel 7. Nilai Kinerja Organisasi 38

Tabel 8. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 41

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 44

Tabel 10.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 48

Tabel 11.Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 50

Tabel 12.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 52

Tabel 13.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 54

Tabel 14.Target dan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 56

Tabel 15.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 58

Tabel 16.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 62

Tabel 17.Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT 64

Tabel 18.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 65

Tabel 19.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel KLB 67

Tabel 20.Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 69

Tabel 21.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 70

Tabel 22.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 73

Tabel 23.Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 75

Tabel 24.Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 77

Tabel 25.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Framasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti 80

Tabel 26. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....82

Tabel 27.Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 85

Tabel 28.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 87

Tabel 29.Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 88

Tabel 30. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 90

Tabel 31.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 92

Tabel 32.Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....94

Tabel 33.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 98

Tabel 34.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi 100

Tabel 35.Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....102

Tabel 36.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 104

Tabel 37.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan 106

Tabel 38.Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 108

Tabel 39.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029.....111

Tabel 40.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....114

Tabel 41.Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.....115

Tabel 42.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029.....117

Tabel 43.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan 119

Tabel 44.Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR 120

Tabel 45.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029.....121

Tabel 46.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.....123

Tabel 47.Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan 124

Tabel 48.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 126

Tabel 49.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik 127

Tabel 50.Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 129

Tabel 51.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 130

Tabel 52.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kab/Kota Pangan Aman.....132

Tabel 53.Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....134

Tabel 54.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 135

Tabel 55.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik 138

Tabel 56.Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT ..140

Tabel 57.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 141

Tabel 58.Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE.....143

Tabel 59.Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektivitas KIE.....144

Tabel 60.Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....145

Tabel 61.Bobot Progres Tahapan Program Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan.....147

Tabel 62.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 148

Tabel 63.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....151

Tabel 64.Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....152

Tabel 65.Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman 153

Tabel 66.Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 154

Tabel 67.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman 156

Tabel 68.Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....158

Tabel 69.Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 159

Tabel 70.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 160

Tabel 71.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman 162

Tabel 72.Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 164

Tabel 73.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 168

Tabel 74.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi 171

Tabel 75.Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....175

Tabel 76.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 176

Tabel 77.Realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 177

Tabel 78.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 179

Tabel 79.Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.....180

Tabel 80.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 181

Tabel 81.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase laporan análisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 183

Tabel 82.Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT.....185

Tabel 83.Kategori nilai Indeks Pelayanan Publik 186

Tabel 84.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 187

Tabel 85.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik 189

Tabel 86.Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh 191

Tabel 87.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029 193

Tabel 88.Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai pembangunan ZI.....196

Tabel 89.Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 198

Tabel 90.Kategori Penilaian SAKIP.....199

Tabel 91.Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2025 199

Tabel 92.Bobot Penilaian SAKIP.....200

Tabel 93.Hasil Evaluasi SAKIP 200

Tabel 94.Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target tahun 2029.....201

Tabel 95.Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP 202

Tabel 96.Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh 207

Tabel 97.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 209

Tabel 98.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 209

Tabel 99.Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran 212

Tabel 100.Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh 214

Tabel 101.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029 215

Tabel 102.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Manajemen Risiko 218

Tabel 103.Tindak lanjut rekomendasi 223



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 *Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun* 44

Grafik 2.Realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain 45

Grafik 3.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya.....51

Grafik 4.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 53

Grafik 5.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 58

Grafik 6.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain. 59

Grafik 7.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya 65

Grafik 8.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 66

Grafik 9.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya 70

Grafik 10.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 71

Grafik 11.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya 77

Grafik 12.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 78

Grafik 13.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 84

Grafik 14.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 85

Grafik 15.Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 89

Grafik 16.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 90

Grafik 17.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 97

Grafik 18.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 98

Grafik 19.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 104

Grafik 20.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 105

Grafik 21.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 111

Grafik 22.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 112

Grafik 23.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya 116

Grafik 24.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 117

Grafik 25.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 121

Grafik 26.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 122

Grafik 27.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya 125

Grafik 28.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 126

Grafik 29.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 130

Grafik 30.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain 130

Grafik 31.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 135

Grafik 32.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 136

Grafik 33.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya.....141

Grafik 34.Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.....142

Grafik 35.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya.....148

Grafik 36.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 149

Grafik 37.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya.....154

Grafik 38.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain. 155

Grafik 39.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya.....160

Grafik 40.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain. 160

Grafik 41.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya 167

Grafik 42.Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis 168

Grafik 43.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya 176

Grafik 44.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya.....181

Grafik 45.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain. 182

Grafik 46.Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 186

Grafik 47. realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain. 188

Grafik 48.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya.....192

Grafik 49.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 193

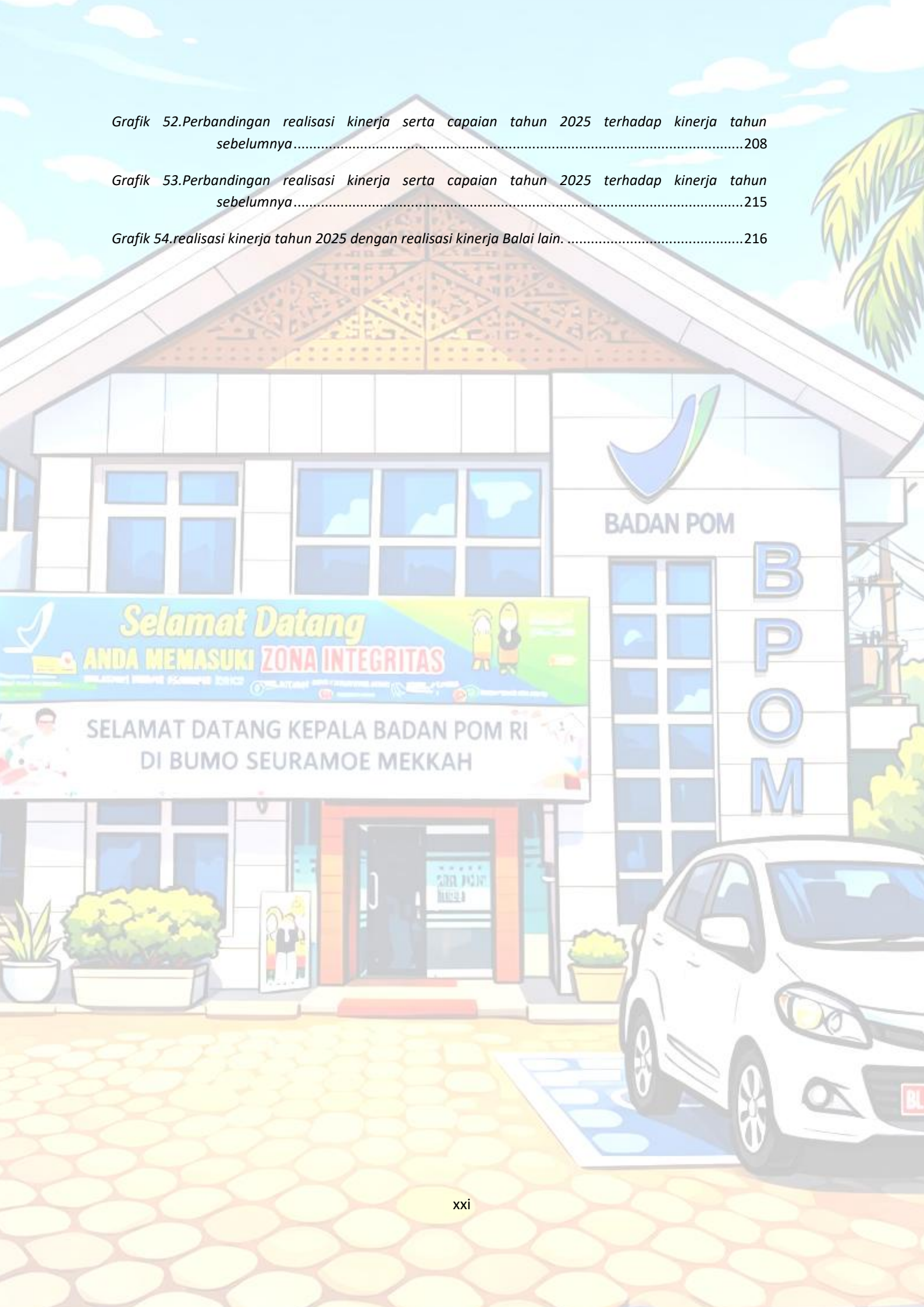
Grafik 50.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya.....200

Grafik 51.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 201

Grafik 52.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya 208

Grafik 53.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya 215

Grafik 54.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain. 216



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh 5

Gambar 2. Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh 8

Gambar 3. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 9

Gambar 4. Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh 11

Gambar 5. Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh 12

Gambar 6.Gambar Rencana Aksi Perjanjian kinerja tahun 2025 33

Gambar 7. NKO Balai Besar POM di Banda Aceh s.d Bulan Desember Tahun 2025 37



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi Aceh memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tahun 2025 merupakan tahun penting dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi fase awal penguatan transformasi tata kelola pengawasan Obat dan Makanan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko. Dinamika lingkungan strategis yang ditandai dengan percepatan inovasi produk, perkembangan teknologi digital, peningkatan peredaran produk lintas wilayah, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selain itu, dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia, seperti peningkatan gizi masyarakat dan penguatan keamanan pangan, menempatkan Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu faktor dalam menjamin keberhasilan kebijakan pemerintah di daerah.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh adalah:

a. Pemantauan dan Pengawasan: Pemantauan dan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Aceh dengan luas wilayah dan jangkauan yang jauh bisa

menjadi tugas yang rumit bila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari lintas sektor terkait di Kab/Kota.

b. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara *online*: Maraknya peredaran Obat dan Makanan yang diperjual belikan secara *online* melalui media sosial dan banyak diminati oleh golongan muda, menjadi tantangan serius yang memerlukan konsistensi dalam pengawasannya melalui peningkatan *siber patrol* dan informasi dari masyarakat.

c. Kepatuhan pelaku usaha: Memastikan produk yang dihasilkan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pelaku usaha berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku guna melindungi masyarakat dari produk obat, dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi standar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh ini, sangat dibutuhkan adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal Obat dan Makanan aman di Provinsi Aceh.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax. (0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh sebagai berikut:

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.

c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Maknan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obatdan Makanan.
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 17 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Banda Aceh yang mengawal pencapaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 Fungsi serta kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Fungsi Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:
   - Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
   - Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
   - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

b. Fungsi Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:
   - Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
   - Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
   - Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
   - Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
     - Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
     - Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Fungsi Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Fungsi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:
   - Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   - Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   - Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
   - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:
   - Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
   - Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
   - Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
   - Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
   - Pelaksanan urusan kepegawaian.
   - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
   - Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
   - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
     - Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana,

program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

- Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

1.4. Isu Strategis

1.4.1. Aspek Strategis Organisasi

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m2 dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m2, listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatrografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatrografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya serta Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 3700:2016.



Gambar 2. Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh

Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM

di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Balai Besar POM di Banda Aceh termasuk salah satu UPT Badan POM RI dengan cakupan wilayah pengawasan sebanyak 13 Kabupaten/Kota, dengan 9 Kabupaten dan 4 Kota, yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang.



Gambar 3. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara 010 58’ 37,2”-060 04’ 33,6” LU dan 940 57’ 57,6”-980 17’ 13,2” BT. dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km². Untuk cakupan wilayah pengawasan dari 3 (tiga) UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh (yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

- **Balai Besar POM di Banda Aceh**

  Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 9 Kabupaten dan 4 Kota (13 Kab/Kota). Dari 13 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 1 (satu) Kota merupakan daerah kepulauan yaitu Kota Sabang.

- **Loka POM Aceh Selatan**

  Cakupan pengawasan Loka Aceh Selatan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue (merupakan pulau terluar).

- **Loka POM Aceh Tengah**

  Untuk Loka Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 5 (lima) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Nagan Raya.

Balai Besar POM di Banda Aceh berfokus pada penguatan fondasi organisasi untuk mewujudkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

Aspek strategis organisasi pada Tahun 2025 diarahkan pada penguatan pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko. Perkembangan inovasi produk, meningkatnya peredaran Obat dan Makanan melalui platform digital, serta dinamika distribusi lintas wilayah menuntut Balai Besar POM di Banda Aceh untuk

mengoptimalkan pemetaan risiko, pemanfaatan data dan informasi, serta peningkatan kualitas pengawasan pre-market dan post-market secara terintegrasi.

Selain penguatan pengawasan, aspek strategis lainnya adalah peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja. Balai Besar POM di Banda Aceh terus mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten melalui perencanaan kinerja yang selaras dengan sasaran strategis, pelaksanaan program yang terukur, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi.

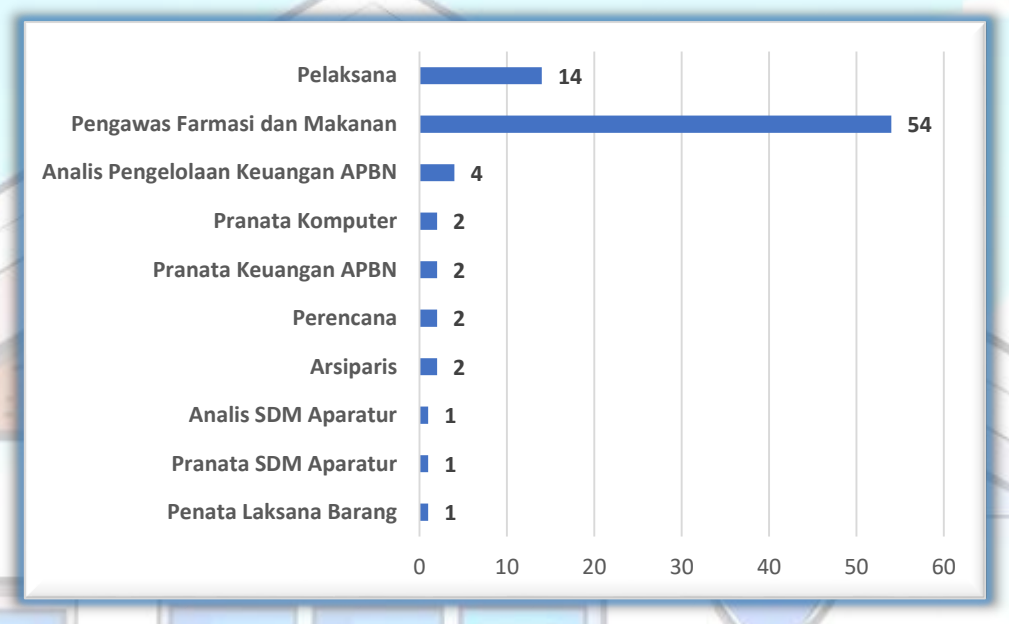
Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi aspek strategis penting pada Tahun 2025. Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pegawai melalui pengembangan kapasitas, peningkatan budaya kinerja, serta penguatan integritas aparatur. SDM yang profesional dan berintegritas diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan responsif terhadap tantangan di lapangan.



Gambar 4. Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh

(Sumber: SIASN BPOM per Januari 2026)

Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2026, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh saat ini adalah 85 orang yang terdiri atas, 68 PNS dan 17 PPPK. Sebanyak 54 orang menduduki jabatan fungsional Farmasi dan Makanan (PFM), 15 orang jabatan fungsional tertentu lainnya dan 14 orang pelaksana.



Gambar 5. Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh

Selanjutnya, penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi aspek strategis yang tidak terpisahkan. Balai Besar POM di Banda Aceh menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Sinergi ini diperlukan untuk memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat perlindungan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek strategis tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh pada Tahun 2025 berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya sistem pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.

3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. **Regionalisasi Laboratorium Pengujian**

   Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian laboratorium, telah diterapkan sistem regionalisasi laboratorium, konsep regionalisasi laboratorium ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Tim Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsep dasar dari regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan region dan spesialisasi pengujian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Model ini tetap mengutamakan validitas dan kecepatan dalam hal pelaksanaan pengujian yang tentunya akan mempercepat tindak lanjut yang perlu dilakukan.

2. **Kompleksitas Peredaran Obat dan Makanan yang Semakin Tinggi**

   Perkembangan inovasi produk Obat dan Makanan serta meningkatnya peredaran melalui platform digital dan jalur distribusi lintas wilayah menimbulkan tantangan dalam pengawasan. Kondisi ini meningkatkan potensi beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk produk tanpa izin edar, tidak sesuai standar mutu, dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

3. **Peningkatan Risiko Keamanan Pangan di Masyarakat**

   Masih ditemukannya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khususnya pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan dan kegiatan masyarakat berskala besar, menunjukkan perlunya penguatan pengawasan pangan berbasis risiko serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap keamanan pangan.

4. **Kepatuhan Pelaku Usaha yang Belum Merata**

   Tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, terhadap ketentuan perizinan dan standar produksi Obat dan Makanan

masih bervariasi. Hal ini berdampak pada masih ditemukannya pelanggaran administrasi maupun teknis yang memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

5. **Keterbatasan Optimalisasi Sumber Daya dalam Pengawasan**

   Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis tertentu, serta keterbatasan dukungan sarana dan prasarana pengawasan, menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan secara optimal dan merata.

6. **Keterbatasan Optimalisasi Sumber Daya dalam Pengawasan**

   Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis tertentu, serta keterbatasan dukungan sarana dan prasarana pengawasan, menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan secara optimal dan merata.

7. **Pemanfaatan Data dan Informasi yang Belum Maksimal**

   Pengelolaan dan pemanfaatan data hasil pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pengawasan berbasis risiko, sehingga efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan.

8. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang Masih Memerlukan Peningkatan**

   Implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh masih memerlukan penguatan, khususnya dalam keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact).

9. **Koordinasi Lintas Sektor yang Perlu Dioptimalkan**

   Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan memerlukan dukungan dan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Namun demikian, koordinasi lintas sektor masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyelarasan peran, kewenangan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	**Sarana**
2.	Apotek	411	**Sarana**
3.	Toko Obat	474	**Sarana**
4.	Klinik	239	**Sarana**
5.	Rumah Sakit	62	**Sarana**
6.	Puskesmas	306	**Sarana**
7.	GFK	17	**Sarana**
8.	Distribusi Makanan	2289	**Sarana**
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	901	**Sarana**
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	320	**Sarana**
	TOTAL SARANA DISTRIBUSI	**5046**	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	**Sarana**
2.	Industri Obat Tradisional	0	**Sarana**
3.	UMOT	18	**Sarana**
4.	UKOT	11	**Sarana**
5	Industri Kosmetik	7	**Sarana**
6.	Industri Makanan (MD)	83	**Sarana**
7.	PIRT	1469	**Sarana**
	TOTAL SARANA PRODUKSI	1588	Sarana



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh.

Tahun 2025 merupakan awal implementasi Renstra 2025-2029, pada tahun ini juga terjadi beberapa perubahan nomenklatur sasaran kegiatan dan indikator kinerja sehingga fokus utama diarahkan pada penguatan fondasi pencapaian sasaran kinerja. Dalam Renstra, Balai Besar POM di Banda Aceh menetapkan sasaran kegiatan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

Pada Renstra juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 diarahkan tidak hanya pada pencapaian output, tetapi juga pada hasil dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Renstra 2025–2029 menggarisbawahi penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor pendukung utama pencapaian kinerja. Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya meningkatkan kompetensi

aparatur, memperkuat budaya kinerja dan integritas, serta mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi pengawasan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis risiko.

Tabel 2.Target Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025-2029
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IK.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		IK.2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		IK.3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		IK.4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		IK.5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		IK.6 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.30
		IK.7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95
		IK.8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		IK.9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		IK.10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		IK.11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.80
		IK.12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		IK.13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		IK.14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73
		IK.15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IK.16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IK.17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pengawasan	86.54

	di masing-masing wilayah Kerja di UPT pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IK.18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10
		IK.19 Jumlah desa pangan aman	4
		IK.20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IK.21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19.40
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IK.22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IK.23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	Layanan Publik UPT yang prima	IK.24 Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IK.25 Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25
		IK.26 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78
		IK.27 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5
		IK.28 Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2025-2029 yaitu:

VISI

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

Misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a) **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

b) **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

c) **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

d) **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem

pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini menegaskan komitmen Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas
2) **Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3) **Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.** Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4) **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Tujuan ini menekankan peran Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5) **Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.** Tujuan ini merupakan komitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam memberikan layanan publik yang prima.

Pada penyusunan Renstra periode tahun 2020-2024, BPOM menggunakan pendekatan Balance Corecard dengan pendekatan perspektif baik dari Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective maupun Learning and Growth Perspective. Namun, pada penyusunan Renstra 2025-2029 direviu sesuai dengan pedoman maupun Permen PPN Nomor 10 tahun 2023. Perumusan Sasaran Strategis sekarang disesuaikan berdasarkan Logical Framework yang menggambarkan cascading/penjenjangan kinerja BPOM mulai dari level sasaran strategis, sasaran program hingga sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan logical frame work BPOM yang merupakan cascading dari sasaran strategis BPOM hingga level Rincian Output pada UPT.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029 yang selaras dengan kebijakan dan arah strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perencanaan ini berorientasi pada penguatan sistem pengawasan obat dan makanan yang komprehensif, responsif, dan berbasis risiko guna menjamin perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Aceh.

Tabel 3.Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	90
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2.	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71
6.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10

		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90
8.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
9.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah laporan análisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	88.85
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	81.58
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	91.44
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.4

Nomenklatur dan target pada sasaran kegiatan serta indikator kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan setelah dilakukan desk dan penyusunan Perjanjian Kinerja di Bulan Januari dan Februari 2025. Hal ini mengakibatkan terdapat perbedaan pada Rencana Kinerja Tahunan yang disusun pada Bulan Oktober 2024. Rencana Kinerja merupakan dasar acuan penetapan target dan indikator kinerja sehingga bersifat sementara dan dapat berubah ketika penyusunan perjanjian kinerja.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025-2029 dan DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah

anggaran awal Rp. 20.121.623.000,- (Dua puluh milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029.

Pada awal tahun 2025 Perjanjian Kinerja memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 25 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang seharusnya dapat terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tabel 4.Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00

		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90.3
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
7.	Terlaksananya kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2

Pada akhir Bulan Agustus 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025. Perubahan meliputi:

Semula	Menjadi	Perubahan
9 Sasaran Kegiatan	**8 Sasaran Kegiatan**	Pemindahan Indikator kinerja Nilai Pemenuhan Lab, semula pada sasaran kegiatan 3 menjadi sasaran kegiatan 1
25 Indikator Kinerja	**28 Indikator Kinerja**	Penambahan 3 Indikator kinerja baru yang meliputi Persentase label tembakau, pengendalian AMR dan Persentase Kab/Kota yang didampingi
Target indikator kinerja mengacu dengan kesepakatan target dan DIPA Awal tahun	**Target indikator kinerja mengacu hasil kesepakatan desk pemutakhiran target tanggal 25-26 Juni 2025**	Perubahan kenaikan target pada 6 indikator kinerja (Persentase sampel Sediaan Farmasi, Sarana produksi Sediaan Farmasi, Sarana produksi Pangan Olahan, Sarana distribusi PO, Iklan dan UMKM)

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 setelah revisi pada dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00
		Persentase Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.8
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19.4
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5

	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7.	Terlaksananya kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada bulan berikutnya. Perubahan pada RAPK/RHPK selama tahun 2025, meliputi:

a) Pada Bulan Mei 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan revisi target bulanan pada RHPK (Rencana Hasil Pelaksanaan Kegiatan) indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
b) Terjadi perubahan perhitungan pada Bulan Agustus 2025 untuk Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
c) Revisi tahapan target pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang semula kumulatif berubah menjadi flat dimulai dari Bulan Agustus sampai Desember 2025.
d) Alokasi anggaran 2025 semula Rp. 20.121.623.000,- (Dua puluh milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp. 19.936.291.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 setelah revisi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	613,168,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	43,550,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	300,269,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22,755,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	22,755,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	74	75	76	77	78	78.5	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	13,333,750
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	95	95	95	95	95	13,333,750
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	13,333,750
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	328,454,700
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	328,454,700
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	308,453,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	28,120,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	95,110,750
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			71	71	71	71.5	71.5	71.5	72.8	72.8	72.8	73	2,992,448,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												15.38	25,398,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		25	25	25	25	50	50	50	75	75	75	75	5,069,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	272,181,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				40	50	60	62.5	77.5	87.5	97.5	100	10	436,427,000
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	25	50	50	60	70	90	100	4	709,656,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	50	75	100	100	100	100	1	140,558,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	8	18	28	38	42	47	57	67	77	82	19.4	48,359,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	14	22	31	42	51	68	71	74	82	92.5	473,984,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	73,305,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	diselesaikan sesuai standar													
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	112,285,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.25	480,974,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.78	110,271,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	11,901,644,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.2	22,640,000
														Total	19,936,291,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Banda Aceh, 01 October 2025

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

RIYANTO

Gambar 6.Gambar Rencana Aksi Perjanjian kinerja tahun 2025

2.5 Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6.Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	< 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90	
Kurang	< 60%	

Kategori capaian indikator kinerja tabel di atas digunakan untuk penilaian pada point a BAB III dan tabel capaian kinerja di bawah untuk digunakan pada penilaian point c di BAB III.

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) terdiri dari NKO periodik (triwulan) dan NKO Tahunan (akhir tahun).

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% ≤ x ≤ 60	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/tahunan) untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai Besar POM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.

1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.
2. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada aplikasi Sigarang secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), monev Bappenas, RHPK dan Aplikasi e-performance.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance pada SIMETRIS.
5. Reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB III

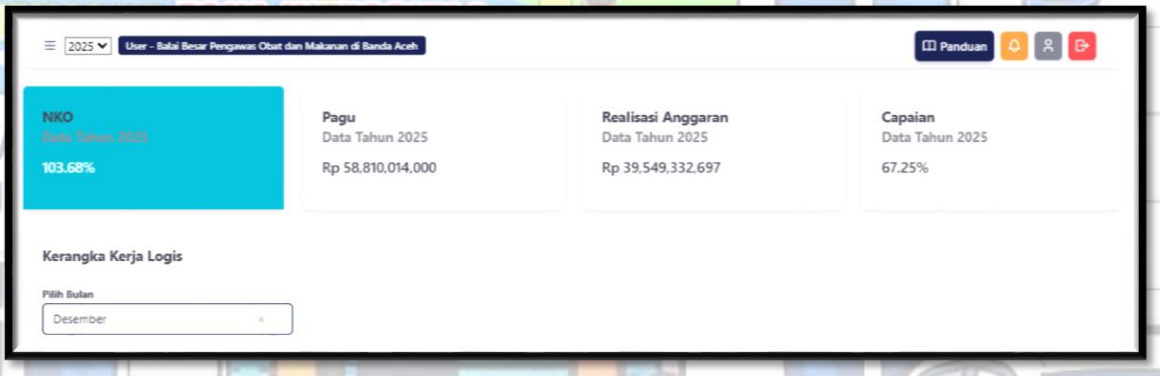
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan Balai lain yang sejenis dengan target nasional, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.



Gambar 7. NKO Balai Besar POM di Banda Aceh s.d Bulan Desember Tahun 2025

Balai Besar POM di Banda Aceh di Tahun 2025 berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan capaian **103.68% dengan Predikat Istimewa.** Capaian ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, namun melampaui ekspektasi kinerja organisasi. Meskipun terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak memenuhi target tetapi untuk nilai capaiannya masih berpredikat baik. Capaian Indikator kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Nilai Kinerja Organisasi

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2025	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian Dinormalisasi (%)	Kategori
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 103,82 dengan Predikat Istimewa								
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	93.77	103.90	**103.90**	**Sangat Baik**
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26.66	102.54	**102.54**	**Sangat Baik**
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.32	114.49	**110.00**	**Tidak dapat disimpulkan**
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	**100.00**	**Baik**
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	**102.94**	**Sangat Baik**
		IKSK6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.30	85.78	102.98	**102.98**	**Sangat Baik**
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100	105.26	**105.26**	**Sangat Baik**
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	**109.89**	**Sangat Baik**
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.85	103.20	**103.20**	**Sangat Baik**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2025	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian Dinormalisasi (%)	Kategori
		IKSK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	**109.89**	**Sangat Baik**
		IKSK 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.80	99.20	110.47	**110.00**	**Tidak dapat disimpulkan**
		IKSK 12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	95.8	119.75	**110.00**	**Tidak dapat disimpulkan**
		IKSK 13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105.69	105.69	**105.69**	**Sangat Baik**
		IKSK 14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00	79.60	109.04	**109.04**	**Sangat Baik**
		IKSK 15	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	15.38	15.38	100	**100.00**	**Baik**
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100	**100.00**	**Baik**
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	96.45	111.45	**110.00**	**Tidak dapat disimpulkan**
		IKSK 18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100	**100.00**	**Baik**
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100	**100.00**	**Baik**
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	**100.00**	**Baik**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2025	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian Dinormalisasi (%)	Kategori
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	19.40	19.40	100	**100.00**	**Baik**
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	88.75	95.95	**95.95 (Dikecualikan dari NKO)**	**Baik**
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	100	111.11	**110.00**	**Tidak dapat disimpulkan**
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.96	105.53	**105.53**	**Sangat Baik**
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25	90.24	99.99	**99.99**	**Baik**
		IKSK 26	Nilai AKIP UPT	82.78	81.00	97.85	**97.85**	**Baik**
		IKSK 27	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100	**100.00**	**Baik**
		IKSK 28	Indeks Manajemen Risiko	3.20	2.90	90.63	**90.63**	**Baik**

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik,** 12 (dua belas) indikator kinerja dengan kategori **Baik,** dan 5 (lima) indikator kinerja yang berkategori **Tidak dapat disimpulkan.** Kategori sangat baik dan tidak dapat disimpulkan menunjukkan bahwa indikator kinerja telah mencapai target tahun 2025.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dikecualikan, Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disebabkan oleh kondisi bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh pada tahun 2025. Sesuai dengan Nota Dinas Nomor PR.09.01.64.01.26.01 tanggal 02 Januari 2026 tentang Persetujuan Kompensasi Nilai Kinerja Penindakan dari Direktur Penyidikan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 15 (lima belas) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan melampaui target

Indikator Kinerja

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 8. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	93.77	103.90	**Sangat Baik**

Sediaan farmasi berisiko yang dimaksud dalam indikator ini meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling dan dilakukan pengujian berdasarkan analisis risiko. Sampel dipilih berdasarkan analisis risiko dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: (A+B+C+D) / 4

$$\frac{(A+B+C+D)}{4} x\ 100\%$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
B. Persentase sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
C. Persentase sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
D. Persentase sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kriteria sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Kesesuaian perencanaan sampling mencakup kesesuaian dengan target sampel, renlak kategori sampel dan renlak kategori kelas terapi. 2). Kesesuaian pelaksanaan sampling mencakup kesesuaian dengan renlak periode/waktu sampling dan ketentuan evaluasi penandaan. 3). Kesesuaian pelaksanaan pengujian mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai pedoman sampling yang berlaku. 4). Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling. 5). Kesesuaian pelaporan monitoring penarikan.

Kriteria sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3). Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Kriteria sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3). Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Kriteria sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kesesuaian pelaksanaan sampling. 3). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 4). Ketepatan dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Selama tahun 2025, jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh yang masuk ke laboratorium sendiri maupun ke laboratorium regional dengan total sebanyak 893 sampel terdiri dari 261 sampel obat, 215 sampel obat bahan alam dan 51 sampel suplemen kesehatan, 366 sampel kosmetik. Semua sampel sudah selesai diuji, dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Jumlah sampel obat yang diuji sesuai dengan parameter uji pada ketentuan pedoman sampling, baik sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh maupun yang disampling balai regional selama tahun 2025 sebanyak 461 sampel dari keseluruhan sampel yang masuk ke laboratorium hingga capaian kesesuaian pelaksanaan pengujian sampel obat adalah 100%. Jumlah sampel yang diuji oleh Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW IV sebanyak 110 sampel yang berasal dari balai sendiri sebanyak 18 sampel, Aceh Selatan 5 sampel, Aceh Tengah 8 sampel dan sampel dari balai regional sebanyak 79 sampel. Jumlah sampel di sampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW IV adalah 43 sampel dimana sampel ini diperiksa kemudian pengujiannya dilakukan di laboratorium anggota regional Medan sesuai kelas terapi yang menjadi tanggung jawabnya. Dari hasil uji sampel yang dilaporkan pada TW IV semua sampel dilaporkan sesuai ketentuan sehingga capaian untuk poin ini adalah sebanyak 100%. Demikian juga Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian tahun 2025 dari 259 sampel yang disampling semua sampel dilaporkan sesuai, baik kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian serta kesesuaian waktu pelaporan sehingga capaian adalah 100%.

Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan baik yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dan Loka POM Aceh Tengah dan Aceh Selatan sebanyak 333 sampel Obat Bahan Alam dan 85 sampel

Suplemen Kesehatan, seluruhnya telah selesai diuji sesuai dengan pedoman sampling.

Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium Kosmetik baik yang disampling Balai Besar POM di Banda Aceh dan Loka POM Aceh Tengah dan Aceh Selatan sebanyak 597 sampel dan telah selesai diuji sesuai dengan pedoman sampling.

Capaian Indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 103.90% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	90.25	91.25	92.25	93.25	94.25
Realisasi	0	93.77				
Capaian	0.00	103.90				

Grafik 1 ***Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya***

Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya, baru dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang meningkat setiap tahunnya.

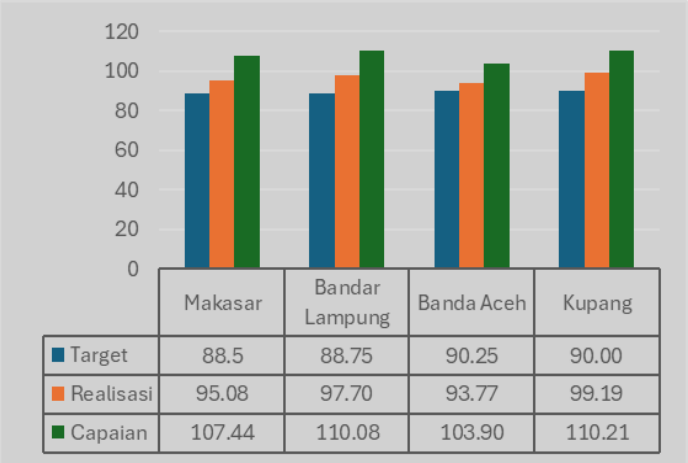
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25	93.77	**99.49**	**Akan Tercapai**

Perbandingan realisasi kinerja sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 93.77% mendekati angka terhadap target tahun 2029 yaitu sebesar 94.25%. Capaian indikator kinerja ini sebesar 99.49% dengan kategori akan tercapai. Berdasarkan capaian ini, dengan rencana kerja yang baik, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis dapat memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	88.5	88.75	90.25	90.00
Realisasi	95.08	97.70	93.77	99.19
Capaian	107.44	110.08	103.90	110.21

Grafik 2.Realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai sudah mencapai target dengan realisasi yang berbeda dan capaian di atas 100%. Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 93,77% dengan capaian sebesar 103,90% dari target yang ditetapkan yaitu 90,35%, sehingga indikator kinerja sudah melampaui target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi indikator persentase sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan tahun 2025 dengan nilai 93.77%. Selama triwulan I terdapat efisiensi anggaran dan mulai triwulan II, III dan IV terdapat relaksasi anggaran sehingga persentase sediaan farmasi berisiko yang disampling menjadi target semula. Sampel sediaan farmasi telah disampling selama tahun 2025 sebanyak 893 sampel. Seluruh sampel yang disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang telah direncanakan dan dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, ketepatan waktu pengambilan, pengujian, pelaporan dan tanggapan atas surat tindak lanjut.

Komoditi obat yang disampling selama TW IV sebanyak 43 sampel yang dikirim ke balai tujuan regional dan diuji di laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh. Lokasi sampling komoditi obat selama triwulan IV tidak terbatas hanya di kota Banda Aceh seperti selama efisiensi anggaran pada triwulan I, sampling juga dilakukan di kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Besar dan Kota Langsa melalui perjalanan dinas sampling di kabupaten / kota provinsi Aceh.

Kendala pengujian yang dialami laboratorium obat Balai Besar POM di Banda Aceh selama tahun 2025 adalah keterbatasan reagensia, suku cadang dan perawatan alat rusak. Walaupun secara keseluruhan pengujian sampel obat terpenuhi sesuai dengan ketentuan pedoman sampling baik pemenuhan parameter uji dan ketepatan waktu pengujian, tetapi dibutuhkan effort yang lebih dari para penguji. Antrian alat akibat kerusakan alat menyebabkan penguji harus bekerja di luar jam kerja, walaupun diberlakukan *clock off* sampel karena kerusakan alat, penguji lebih memilih untuk lembur demi menghindari penumpukan sampel yang akan masuk lagi ke laboratorium pada bulan berikutnya. Kendala lainnya adalah beberapa balai/loka tidak memenuhi komitmen dimana sampel harus sudah masuk laboratorium paling lambat tanggal 10 di setiap bulannya, sehingga penguji harus menunggu sampel agar pengujian sampel yang sediaannya sama dapat dilakukan sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, reagensia dan optimalisasi penggunaan instrumen pengujian. Pengkondisian terhadap kendala-kendala tersebut menyebabkan sebagian masalah teratasi sehingga target pengujian obat dapat tercapai. Faktor lain yang menunjang keberhasilan capaian pelaksanaan pengujian di laboratorium obat adalah perencanaan suku cadang alat lebih awal sehingga ketika terjadi kerusakan alat beberapa sparepart sudah tersedia. Hal lainnya adalah pengadaan kolom yang lebih murah sehingga dapat diadakan tiga kolom, hal ini mengurangi waktu untuk mengkondisikan kolom yang memang sudah jenuh/performanya menurun karena usia pemakaian. Walaupun jumlahnya masih kurang namun setidaknya sudah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian sampel obat adalah 100%.

Komoditi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu selama tahun 2025 sebanyak 418 sampel. Lokasi sampling secara luring tidak terbatas hanya di kota Banda Aceh, telah dilakukan sampling di

wilayah selain kota Banda Aceh melalui perjalanan dinas sampling. Pembelian sampel secara secara daring melalui e-commerce dari daerah Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Bireuen dan Aceh Besar. Penetapan daerah tersebut sebagai lokasi sampling daring berdasarkan analisis kajian risiko yang merupakan wilayah rawan peredaran sampel Tanpa Izin Edar (TIE).

Kendala pengujian yang dialami laboratorium obat bahan alam dan suplemen kesehatan Balai Besar POM di Banda Aceh selama tahun 2025 adalah antrian alat, kerusakan alat yang disebabkan oleh suku cadang yang telah habis masa pakai dan banyaknya variasi parameter uji yang harus dilakukan. Pengujian sampel selesai 100% namun penguji sering harus melakukan pengujian di hari libur. Untuk selanjutnya laboratorium merencanakan akan membuat perencanaan pembelian suku cadang dan menjadwalkan maintenance alat dengan teknisi serta menggunakan metode analisis dengan instrumen yang bervariasi untuk meminimalkan antrian dan penggunaan instrumen lain, serta akan melakukan koordinasi dengan tim sampling untuk menyesuaikan variasi parameter uji yang harus dilakukan.

Komoditi Kosmetik yang disampling selama tahun 2025 sebanyak 366 sampel. Lokasi sampling secara luring selama tahun 2025 tidak terbatas hanya di kota Banda Aceh, telah dilakukan sampling di wilayah selain kota Banda Aceh melalui perjalanan dinas sampling seperti ke daerah Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat dan Sabang. Pembelian sampel secara daring juga dilakukan melalui platform e-commerce seperti shopee di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pengujian laboratorium kosmetik terjadi peningkatan terkait pelaporan tepat waktu yang sebelumnya pada TW III hanya sekitar 67.04% meningkat menjadi 75.14% di TW IV. Kenaikan ini adanya sistem pengelompokkan kategori dengan parameter uji yang sama di uji secara serentak sehingga sampel tersebut bisa diuji dan dilaporkan cepat dan valid, ini juga didukung komitmen, kerjasama, komunikasi tim yang sangat baik. Namun pencapaiannya ini harus didukung sarana prasarana yang memadai yaitu pemeliharaan alat secara berkala, ketersediaan suku cadangan untuk menjaga kestabilan dan kontinuitas pengujian, serta berimbas kepada efisiensi waktu dan anggaran karena mengurang pengujian berulang-ulang.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menunjang keberhasilan pada indikator ini dengan dilakukan antara lain:

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling setelah adanya relaksasi anggaran sesuai dengan Pedoman Sampling dengan kembali menjadi target awal.
2. Koordinasi yang efektif antara ketua tim inspeksi dengan ketua tim pengujian terkait sampling baik di lingkungan Balai Besar POM Banda Aceh, regional Medan dan Lab Pengujian Produk Biologi P3OMN.
3. Petugas secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi sesuai dengan renlak terbaru (buka blokir), pedoman sampling dan definisi operasional indikator kinerja.
4. Komunikasi yang baik dengan tim sampling terkait kemampuan uji dan secara konsisten memantau ketersediaan reagen serta sarana pengujian lainnya.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 10.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efesiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	613.168.000	612.668.318	99.92	103.90	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Penguatan kinerja dilakukan melalui peningkatan kemampuan personil yang melakukan sampling dan pengujian baik secara daring maupun luring secara berkala. Kegiatan evaluasi internal dilakukan setiap triwulan untuk memastikan efektivitas sampling dan pengujian berjalan sesuai dengan renlak yang telah direncanakan. Beberapa upaya peningkatan kinerja pada indikator ini dengan dilakukan antara lain:

1. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk bulan selanjutnya.
2. Melakukan koordinasi intensif antara bidang inspeksi dan pengujian serta dengan laboratorium regional terkait pelaksanaan sampling dan pengujian menghindari risiko sampel tidak dapat diuji dan terlambat pelaporan sesuai Pedoman Sampling dikarenakan adanya instrumen rusak maupun reagen yang belum tersedia.
3. Selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi terkait waktu pelaporan sampel dan tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat melalui SIPT.
4. Merencanakan pengadaan suku cadang, reagen, baku pembanding dengan baik.

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Laporan kinerja tahunan ini juga digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja pada triwulan tahun berikutnya baik pada persentase sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik berisiko dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Laporan ini juga digunakan untuk menyusun rencana kerja yang lebih optimal sehingga setiap proses tahapan pada capaian indikator kinerja akan selalu tercapai.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul

sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dan dapat digunakan untuk membuat perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Resiko terkait Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 11.Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26.66	102.54	**Sangat Baik**

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diperoleh menggunakan formula:

$$\frac{A}{B} \text{ x } 100\%$$

Kriteria nilai A dan B yaitu:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi

pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan yaitu tahun 2025. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Pada bulan Desember, capaian kinerja pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) oleh fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan hasil yang positif. Dari total 45 fasilitas yang telah diberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans oleh UPT BPOM sepanjang tahun berjalan, sebanyak 12 fasilitas telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi mencapai 26,66 persen, melampaui target indikator yang ditetapkan sebesar 26 persen. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Secara keseluruhan, pencapaian ini menjadi bukti bahwa upaya edukasi dan pendampingan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil sangat baik, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat strategi agar lebih banyak fasilitas kesehatan dapat terlibat dalam pelaporan farmakovigilans di masa mendatang.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	26	27	28	29	30
Realisasi	0	26.66				
Capaian	0.00	102.54				

Grafik 3.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya.

Indikator ini belum dapat dibandingkan, karena indikator kinerja ini merupakan IK baru pada renstra 2025-2029, sehingga perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya baru dapat dilakukan untuk kinerja tahun 2026. Dari data dapat diketahui bahwa target untuk IK ini meningkat setiap tahun hingga akhir renstra 2029.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 12.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

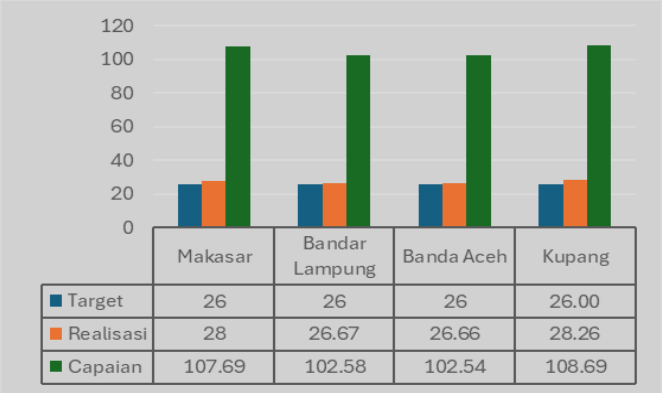
Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	26.66	88.86	**Akan Tercapai**

Realisasi kinerja pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2025 menunjukkan tren yang cukup positif. Dengan capaian sebesar 26,66 persen, kinerja ini telah mencapai 88,86 persen dari target Renstra 2029 yang ditetapkan sebesar 30 persen. Artinya, dalam kurun waktu empat tahun menuju akhir periode Renstra, capaian sudah mendekati target akhir dan berada dalam kategori "akan tercapai." Tren ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh BPOM mulai memberikan hasil nyata, ditandai dengan meningkatnya partisipasi fasilitas kesehatan dalam pelaporan farmakovigilans.

Namun demikian, masih terdapat gap sebesar 3,34 persen antara realisasi tahun 2025 dengan target Renstra 2029. Gap ini relatif kecil, tetapi tetap memerlukan perhatian agar target dapat benar-benar dicapai dan dipertahankan. Tantangan utama terletak pada konsistensi pelaporan dari fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya aktif. Jika tren peningkatan partisipasi dapat dijaga dan diperkuat melalui strategi intensifikasi KIE, penguatan sistem pelaporan digital, serta pemberian insentif atau apresiasi bagi pelapor aktif, maka gap tersebut dapat ditutup lebih cepat bahkan berpotensi melampaui target Renstra.

Dengan demikian, analisa tren menunjukkan arah yang positif menuju pencapaian target, sementara gap yang tersisa menjadi ruang perbaikan yang realistis untuk ditangani dalam periode mendatang.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	26	26	26	26.00
Realisasi	28	26.67	26.66	28.26
Capaian	107.69	102.58	102.54	108.69

Grafik 4.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Realisasi kinerja pelaporan KTD/ESO oleh BBPOM di Banda Aceh pada tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 26,66 persen dari target yang ditetapkan sebesar 26 persen. Pencapaian ini merefleksikan tingkat keberhasilan sebesar 102,54 persen, yang berarti indikator kinerja telah melampaui target. Jika dibandingkan dengan balai lain dalam klaster, posisi Banda Aceh berada pada kategori menengah. BBPOM Makassar dan Kupang mencatat capaian lebih tinggi, masing-masing 107,69 persen dan 108,69 persen, sementara BBPOM Bandar Lampung menunjukkan hasil yang hampir identik dengan Banda Aceh, yakni 102,58 persen.

Analisis perbandingan ini menempatkan Banda Aceh sebagai balai dengan kinerja stabil, melampaui target namun belum mencapai tingkat capaian tertinggi dalam klaster. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pelaporan farmakovigilans di Banda Aceh telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar capaian dapat lebih mendekati balai dengan performa tertinggi. Dengan demikian, posisi Banda Aceh dalam klaster dapat dikategorikan sebagai konsisten dan berpotensi untuk terus ditingkatkan melalui penguatan intervensi strategis di masa mendatang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Selanjutnya untuk menunjang kinerja, terdapat beberapa aksi yang telah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan Kegiatan Pelaksanaan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM di periode interim Triwulan I. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh

tenaga kesehatan/tenaga medis di catchment area Balai Besar POM di Banda Aceh yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

2. Jumlah peserta KIE yang diundang adalah 45 peserta. yang terdiri dari 20 Rumah Sakit, 17 Puskesmas dan 8 Klinik. Kepada peserta telah diberikan akun e-MESO yang digunakan untuk pelaporan KTD/ESO.
3. Pemahaman peserta diukur dengan nilai pre-test dan post-test. Seluruh peserta memenuhi syarat mendapatkan sertifikat dengan nilai post-test minimal 70.
4. Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan pemantauan pelaporan KTD/ESO dari seluruh sarana pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE mulai April – Desember 2025.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seluruh peserta KIE diberikan akses ke sistem pelaporan digital e-MESO, sebagai sarana pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi. BBPOM Banda Aceh akan melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO dari seluruh peserta KIE mulai April hingga Desember 2025, guna memastikan keberlanjutan dan konsistensi pelaporan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 13.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	43.550.000	43.208.860	99.92	102.54	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media

mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Upaya peningkatan kinerja

Petugas mengunjungi sarana yang telah diberikan KIE dan melakukan pendampingan pelaporan kepada personil yang menjadi PIC pelaporan KTD/ESO. Hasil pemantauan pelaporan sepanjang 2025 menunjukkan bahwa upaya ini efektif dalam meningkatkan jumlah pelaporan sehingga mencapai target sebanyak 12 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO.

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2025 sehingga belum ada Laporan Kinerja yang digunakan sebagai bahan atau referensi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja di triwulan I. Analisa kinerja dan informasi yang dipaparkan di laporan kinerja triwulan III telah digunakan sebagai informasi kinerja bagi pelaksanaan kegiatan di triwulan IV. Diantaranya adalah upaya peningkatan kinerja melalui pemantauan pelaporan KTD/ESO dari peserta KIE tahun 2025 sehingga jumlah laporan tercapai sesuai target.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Masih rendahnya jumlah laporan KTD/ESO yang diterima dari sarana pelayanan kesehatan menjadi risiko yang diidentifikasi di tahun 2025 ini. Penyebab yang telah diidentifikasi adalah kurangnya kesadaran dan keaktifan petugas sarana pelayanan kesehatan terkait pelaporan KTD/ESO dan sarana pelayanan kesehatan telah mempunyai sistem pelaporan KTD/ESO secara mandiri yang belum semuanya terintegrasi dengan e-MESO Badan POM. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan KIE Farmakovigilans di triwulan I pada 25 Maret 2025 dan telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO oleh

sarana pelayanan kesehatan yang telah dilakukan KIE sepanjang April hingga Desember 2025.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 14.Target dan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.32	114.49	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Pangan Olahan berisiko yang dimaksud dalam indikator ini adalah adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko, diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian target sampel UPT;
B. Kesesuaian parameter uji;
C. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
D. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
E. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
F. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya.

Kerangka Sampling dalam indikator ini meliputi:

1. Sampel pangan berdasarkan proporsi sampling, dilakukan pada kategori pangan 1 sampai 16 (kecuali kategori pangan 10 telur dan produk-produk telur) dan BTP.

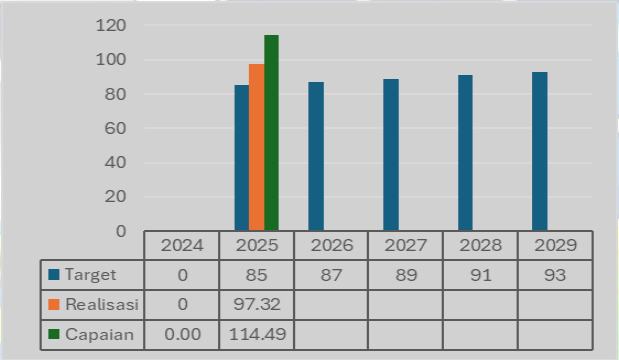
Penetapan proporsi berdasarkan kriteria pembobotan data produk beredar, trend temuan produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS), temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label, kategori risiko produk, risiko konsumsi pada kelompok konsumen tertentu (antara lain: anak, balita, ibu hamil dan menyusui, lansia) dan munculnya isu baru pada pangan (seperti Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), etilen glikol/dietilen glikol (EG/DEG), penggunaan BTP yang belum diatur, isu residu pestisida, dll), serta berdasarkan kajian mendalam Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terhadap implementasi pedoman sampling.

2. Sampel pangan fortifikasi, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional percepatan perbaikan gizi masyarakat. Sampling pangan fortifikasi merupakan sampling yang bertujuan untuk memonitor implementasi fortifikasi pada pangan fortifikasi, meliputi sampel garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, yang diambil di sarana produksi dan peredaran.
3. Sampel Kemasan Pangan, pengambilan sampel terhadap produk pangan terdaftar di peredaran dengan fokus pada kemasan yang digunakan. Kemasan yang disampling merupakan bagian integral dari produk pangan yang bersangkutan, sehingga tidak memiliki proporsi khusus. Sampel kemasan pangan merupakan bagian dari sampel pada kategori pangannya, seperti ikan dalam kaleng, air minum dalam kemasan (AMDK) berbahan PC, maupun AMDK berbahan PET. Tujuan sampling ini adalah untuk memastikan keamanan kemasan pangan yang digunakan serta kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku
4. Sampel Kajian, dilakukan terhadap produk pangan olahan dan dilakukan pengujian terhadap parameter uji kajian. Sampel ini bertujuan untuk mengawal kebutuhan penyusunan kebijakan/regulasi terhadap isu terkini dan posisi Indonesia pada forum internasional.

Hingga triwulan IV, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan sampling pangan olahan berbasis risiko sebanyak 302 sampel dengan total sebanyak 681 sampel (termasuk sampel dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan) yang masuk ke laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling dan telah

dilaporkan ke pusat serta ditindak lanjuti sesuai ketentuan dengan persentase sebesar 97,32% dari target 85%. Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 114,49% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan. Hasil Uji TMS sampel pangan olahan selama tahun 2025 berjumlah 28 sampel, terdiri dari 4 TMS Kimia dan 24 TMS Mikrobiologi. Sampel TMS selama tahun 2025 telah dibahas bersama Ditwas PO dan PPPOMN, dan telah mendapat konfirmasi untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 5.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini baru dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dan seterusnya dengan target yang meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

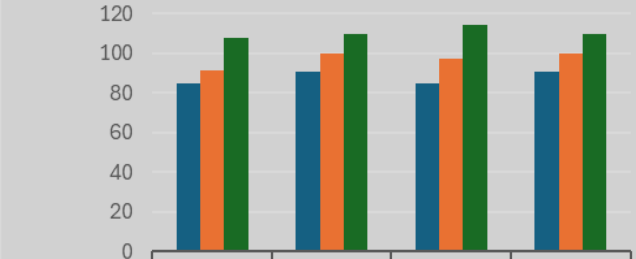
Tabel 15.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	97.32	104.64 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sudah mencapai dan melewati target. Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 104,64%. Berdasarkan

Capaian di tahun 2025 ini Balai Besar POM di Banda Aceh optimis terus mencapai target tahun renstra tahun 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	85	91	85	91.00
Realisasi	91.31	100.00	97.32	100
Capaian	107.42	109.89	114.49	109.89

Grafik 6.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan realisasi target dari empat UPT Badan POM, Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki target yang sama dengan BPOM Makasar yaitu 85% dengan realisasi Balai Besar POM di Banda Aceh lebih tinggi sebesar 97,32% sehingga capaian target Balai Besar POM di Banda Aceh juga lebih tinggi yaitu sebesar 114,49% dibandingkan dengan BPOM Makasar sebesar 107,42%. Sedangkan BPOM Bandar Lampung dan Kupang memiliki target dan realisasi yang sama sehingga capaian dengan angka besaran yang sama.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Target awal DIPA untuk sampel pangan olahan berbasis resiko adalah sebanyak 302 sampel. Pada TW I terdapat efisiensi anggaran, sedangkan mulai TW II, III dan IV terdapat relaksasi untuk pengawasan produk pangan olahan kembali menjadi target semula. Hingga TW IV sebanyak 302 sampel pangan olahan telah disampling berdasarkan analisis resiko. Percepatan pelaksanaan sampling selama TW IV dilakukan dengan menyesuaikan kembali rencana pelaksanaan sampling balai dengan Laboratorium Regional. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kadaluarsa untuk menentukan apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun tidak. Lokasi Sampling selama tahun 2025 tidak terbatas hanya pada kota Banda Aceh

tetapi sampling juga sudah dilakukan melalui perjalanan dinas sampling di kabupaten /kota selain Banda Aceh.

Untuk kesesuaian parameter uji, pada tahun 2025 dilakukan dengan strategi yaitu sampling disesuaikan dengan kondisi baku dan reagen yang tersedia di laboratorium dengan berpedoman pada Pedoman Sampling 2025 sehingga dapat memenuhi semua parameter wajib yang telah ditetapkan. Agar kesesuaian parameter uji dapat terpenuhi tetap akan dilakukan koordinasi dengan tim sampling terkait kelengkapan parameter uji untuk proses selanjutnya.

Karena sampel yang diuji telah memenuhi semua parameter yang telah ditetapkan pada Pedoman Sampling, maka pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji sudah sesuai. Adapun hal-hal yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi kesalahan pengambilan Kesimpulan Pengujian diantaranya adalah:

a. Ketepatan pemilihan Metode Analisa
b. Ketepatan proses pengujian terkait metode analisa, baku pembanding, reagen, instrumen, serta analisa hasil pengujian dengan instrumen
c. Kesesuaian kompetensi penguji dengan jenis pengujian
d. Ketepatan pengisian hasil uji pada Lembar Catatan Pengujian (LCP) oleh penguji dan verifikasi oleh Ketua Tim
e. Ketepatan pengisian hasil uji pada SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) baik dari penguji maupun Ketua Tim.
f. Pada sampel TMS telah dilakukan analisa dengan menjalankan analisa HULS (Hasil Uji diluar Spesifikasi) sesuai prosedur sehingga kesalahan penarikan kesimpulan dapat diminimalisir.

Selama tahun 2025 terdapat 28 sampel pangan olahan terdaftar yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Tindak lanjut yang dilakukan berupa pembinaan kepada sarana distribusi pangan olahan untuk selalu menjaga mutu pangan yang diedarkan, sedangkan tindak lanjut terkait mutu produk pangan olahan yang terdaftar di Badan POM akan ditindaklanjuti dengan melaporkan produk yang TMS ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan olahan dengan tembusan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, serta menyampaikan laporan perihal produk TMS lintas UPT dimana sarana produksi produk

TMS tersebut berada antara lain Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Medan, Loka Aceh Tengah dan Balai POM di Tangerang. Tindak lanjut untuk produk TMS dengan sarana produksi berlokasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh dilakukan dengan pemeriksaan sarana produksi tersebut untuk memastikan pemenuhan aspek - aspek CPPOB diterapkan secara konsisten. Komitmen dari petugas, penguji dan ketua tim kerja terkait indikator kinerja ini sangat diperlukan untuk pemenuhan setiap tahapan sesuai pedoman agar dapat mencapai nilai maksimal sehingga target yang ditetapkan dapat selalu dicapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling setelah adanya relaksasi anggaran sesuai dengan Pedoman Sampling dengan kembali menjadi target awal.
2. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium kurang dari 5 hari kerja sejak sampel disampling oleh petugas.
3. Pemeriksaan sampel disertai komitmen petugas sampling dalam melakukan penginputan data sampel sesuai dengan Pedoman Sampling.
4. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan.
5. Monitoring dan evaluasi terkait kompetensi penguji, sehingga kesalahan hasil uji dapat dihindari dan ketepatan waktu uji juga dapat dipenuhi.
6. Monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan PPK dan teknisi terkait kondisi instrumen laboratorium seperti HPLC, ICP OES, ELISA Reader, Spektrofotometer, dll, baik kalibrasi/verifikasi alat maupun suku cadang dan spare part yang harus diganti serta pemeliharaan alat, serta percepatan perbaikan alat yang mengalami kerusakan.
7. Monitoring dan evaluasi pengadaan reagen dan baku pengujian, terutama untuk yang pengadaannya inden dengan waktu tertentu seperti baku Aflatoksin, Okratoksin, Deoksivalenol, dan lain-lain.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 16.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	306.277.200	281.374.628	91.87	114.49	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain:

1. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi intensif antara bidang pemeriksaan dengan pengujian, dan juga dengan Laboratorium regional terkait pelaksanaan sampling dan pengujian menghindari risiko sampel tidak dapat diuji dan terlambat pelaporan sesuai Pedoman Sampling dikarenakan adanya instrumen rusak maupun reagen yang belum tersedia.
3. Selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi terkait waktu pelaporan sampel dan tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat.
4. Untuk menghindari kesalahan pada pemilihan Parameter Uji maka dimulai dari ketepatan pemilihan Kategori sampel.
5. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait sarana prasarana pengujian agar Pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling.
6. Ketelitian dalam pemilihan Kesimpulan Hasil Uji pada SIPT.

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh. Keberhasilan pada pencapaian pada indikator ini terutama dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan dapat dijadikan dasar pengusulan perubahan target kinerja untuk tahun berikutnya. Laporan kinerja ini juga untuk melihat kendala - kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja tahunan ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini hingga tetap mencapai target pada akhir tahun dan perencanaan yang baik kedepannya mulai dari tahap kesesuaian target sampling, penetapan parameter pengujian, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan serta tindak lanjut sesuai pedoman. Setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik. Kendala dalam ketepatan waktu sampling serta didukung komitmen setiap petugas perlu menjadi perhatian khusus agar tidak menghambat pencapaian indikator ini selanjutnya.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Resiko terkait Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 17.Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	**Baik**

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus:

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$= \frac{Jumlah\ Sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{Total\ jumlah\ sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ dikirim\ atau\ diuji\ ke\ BPOM} x\ 100\%$$

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar yang dimaksud dalam indikator ini adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian

Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Selama tahun 2025 terdapat 8 sampel KLB yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar sebanyak 3 sampel selama triwulan II dan dari Aceh Utara sebanyak 5 sampel selama triwulan IV. Sampel yang diterima telah diuji sesuai dengan kajian epidemiologis laporan KLB KP yang diterima, walaupun kondisi sampel yang diterima tidak sesuai standar Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan.

Dengan demikian capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 7.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya. Indikator ini akan dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dan tahun berikutnya dengan target yang tetap sama setiap tahunnya hingga tahun 2029 yaitu 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 18.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	**Tercapai**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sudah mencapai target tahun 2029. Selama tahun 2025 terdapat 8 sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar berdasarkan kajian epidemiologi dengan capaian 100%. Untuk tahun selanjutnya tidak dapat dipastikan apakah sampel KLB keracunan pangan akan ada penambahan sampel atau tidak, namun demikian, apabila terdapat penambahan sampel KLB KP akan diupayakan diuji sesuai standar sehingga target tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100
Capaian	100.00	100.00	100.00	100.00

Grafik 8.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai lain memiliki realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar yang sama dan sudah mencapai target dengan nilai capaian yang sama yaitu sebesar 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi terhadap target dari indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar dikarenakan tidak adanya sampel terkait KLB keracunan pangan baik dari lintas sektor dinas kesehatan maupun hasil penelusuran yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terkait adanya informasi KLB keracunan pangan.

Tim pemeriksaan maupun tim pengujian selalu siap apabila terdapat sampel KLB KP yang diterima dari dinas kesehatan kabupaten/kota dengan memprioritaskan penginputan data, pengujian (ketersediaan reagen, baku dan instrumen) serta pelaporan sesuai ketentuan, sehingga apabila pada tw berikutnya terdapat sampel KLB Keracunan Pangan, target pada indikator ini dapat tercapai 100%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian terkait indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar selama tahun 2025 adalah 100 %, adapun beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi aktif petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan tim gerak cepat KLB Keracunan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia.
3. Peningkatan kompetensi petugas yang menangani sampel KLB Keracunan Pangan melalui Bimbingan Teknis Penanganan KLB Keracunan Pangan yang diadakan oleh BPOM pada tanggal 9-11 Juli 2025 secara daring.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 19.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel KLB

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	613.168.000	612.668.318	99.92	103.90	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk tetap dapat mencapai target kinerja maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi petugas dalam menangani KLB KP baik secara terpusat ataupun secara mandiri melalui Ideas.

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi agar informasi Penanganan KLB KP sesuai standar sesuai tugas Lintas Sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan dan BPOM.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan/Dinas Kesehatan untuk menindak lanjuti hasil pengujian terhadap sampel KLB keracunan pangan untuk mencegah kasus serupa terjadi dimasa yang akan datang. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya Balai Besar POM di Banda Aceh juga menjadi informasi yang sangat bermanfaat agar capaian terhadap indikator ini dapat selalu terpenuhi apabila terdapat sampel KLB Keracunan Pangan. Informasi epidemiologi yang jelas sangat diperlukan agar sampel KLB KP dapat diuji sesuai dengan standar yang ditetapkan karena minimnya informasi kajian epidemiologi dapat menyulitkan dalam penetapan parameter pengujian. Selain itu koordinasi lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan harus terjalin baik untuk percepatan penanganan sampel dan dan pencegahan terjadinya KLB.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh khususnya sampel KLB Keracunan Pangan yang utama adalah terkait koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar sampel yang dikirimkan sudah memenuhi unsur penetapan KLB dan masih layak untuk dilakukan pengujian, sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala lain yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan memenuhi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Sampai saat ini, resiko yang mungkin menghambat pencapaian indikator ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 20.Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	**Sangat Baik**

Pada indikator ini, sampel PIRT yang disampling mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan. Penetapan proporsi per kategori untuk PIRT yang disampling ditentukan dengan risk-based bersama pakar sebagaimana telah dilakukan untuk pangan MD/ML, berdasarkan beberapa aspek:

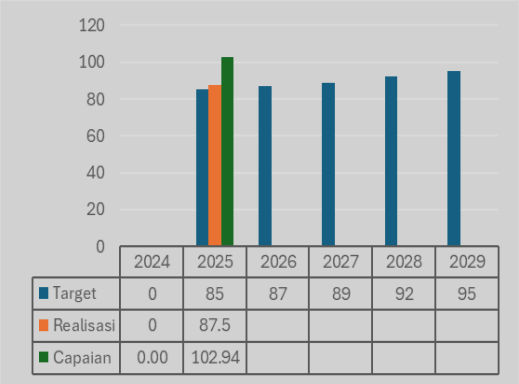
1. PIRT yang beredar, dimana sampling dilakukan dengan mempertimbangkan peredaran produk yang akan dikonsumsi masyarakat.
2. Potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan yang rentan terhadap kontaminasi bakteri patogen, seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Pengolahan yang tidak higienis atau penyimpanan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko ini.
3. Rekam jejak temuan produk Tidak Memenuhi Syarat Rekam dimana merupakan pendekatan spesifik di masing-masing wilayah. Rekam jejak temuan ini mengidentifikasi produk yang memiliki potensi risiko lebih tinggi. Data yang digunakan pada kategori ini mengacu pada data rekam jejak pengujian nasional.
4. Produk yang berpotensi dengan BTP maksimum level BTP adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, seperti pengawetan, penambah rasa, atau pewarna. Pada produk PIRT penggunaan BTP seringkali dilakukan tanpa penimbangan sehingga berpotensi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.
5. Potensi penggunaan Bahan Berbahaya/Bahan yang tidak diizinkan pada pangan Potensi penggunaan bahan berbahaya atau bahan yang tidak diizinkan digunakan pada pangan merupakan isu dalam keamanan pangan, terutama untuk produk PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, contohnya penambahan formalin pada produk perikanan, sedangkan

untuk bahan yang tidak diizinkan pada pangan contohnya penggunaan bahan kimia obat (BKO) pada produk kopi.

6. Potensi terhadap target konsumen tertentu Potensi terhadap konsumen tertentu dimaksudkan pada produk PIRT yang dikonsumsi untuk kalangan usia yang rentan, contohnya untuk produk dalam kategori pangan gula, kembang gula/ permen dan coklat seringkali dikonsumsi oleh konsumen anak-anak.

Selama tahun 2025 telah dilakukan sampling pangan PIRT berbasis risiko sebanyak 28 sampel yang dilakukan sampling pada triwulan I dan triwulan II, serta sebanyak 21 sampel dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan. Sampel yang masuk ke laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling yang telah selesai dilaporkan ke pusat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan persentase sebesar 87.50% dari target 85%. Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 102,94% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 9.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya, baru dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang meningkat setiap tahunnya.

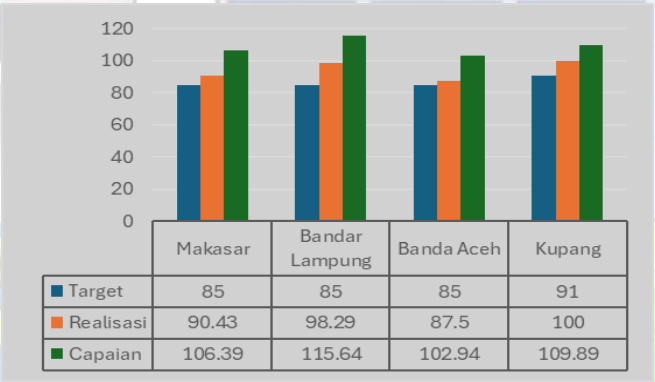
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 21.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	87.50	92.10	**Akan Tercapai**

Realisasi Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 namun belum mencapai target 2029 yaitu sebesar 95%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target 2029 maka capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 92,10% dengan kategori akan tercapai. Pemenuhan setiap tahapan untuk pencapaian indikator ini harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang efektif. Untuk itu perlu komitmen dan strategi yang lebih baik lagi agar Balai Besar POM di Banda Aceh mampu mempertahankan dan memenuhi target 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	85	85	85	91
Realisasi	90.43	98.29	87.5	100
Capaian	106.39	115.64	102.94	109.89

Grafik 10.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai memiliki target yang sama yaitu UPT Makasar, Bandar Lampung dan Banda Aceh target sebesar 85%. Realisasi Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 87,5% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kedua balai lainnya yaitu Makasar sebesar 90,43% dan Bandar Lampung 98,29%. Namun setiap balai sudah mencapai target yang ditetapkan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 102,94%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan selama tahun 2025. Target awal DIPA untuk sampel PIRT berisiko adalah sebanyak 28 sampel dan telah disampling dan telah diuji seluruhnya. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kadaluarsa untuk menentukan apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun tidak. Sampling produk PIRT yang dilakukan tidak terbatas pada produk PIRT yang

diproduksi dari wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, tetapi juga produk PIRT dari wilayah lain yang banyak beredar di wilayah Balai Besar POM di Banda Aceh.

Berdasarkan data evaluasi tim pusat, ketepatan waktu pengambilan sampel tidak memenuhi bobot maksimal yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 39,29% dimana 11 sampel yang disampling pada TW I dibandingkan dengan target setahun sebanyak 28 sampel. Sebanyak 16 sampel yang disampling selama TW II sudah tidak dihitung masuk dalam ketepatan waktu pengambilan sampel, dikarenakan seharusnya seluruh sampel PIRT sebanyak 28 sampel sudah harus selesai disampling pada TW I, tetapi pada TW I terjadi efisiensi anggaran sehingga hanya 11 sampel yang tersampling pada bulan Januari, sedangkan pada Februari dan Maret sudah tidak dilakukan sampling produk PIRT. Sampling yang dilakukan terhadap produk PIRT tidak terbatas pada wilayah kota Banda Aceh tetapi juga dilakukan sampling dari kabupaten / kota lainnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Berdasarkan Surat dari Plt. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan no T PW.04.03.54.07.25.1104 tanggal 2 Juli 2025 mengenai Evaluasi Pengawasan PIRT TW I TA 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi Kelengkapan Parameter Uji dan 2 sampel yang tidak Memenuhi Pengujian sesuai Pedoman Sampling (1 sampel tidak lengkap Parameter Uji dan 1 sampel salah Kategori Sampel). Karena jumlah ini akumulasi maka sampai dengan TW 2 untuk Kelengkapan Parameter Uji yang memenuhi adalah 27 sampel dan Ketepatan Pengambilan Kesimpulan adalah 26 sampel. Untuk Ketepatan waktu pelaporan yaitu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya pada TW 2 sampel yang telah selesai uji sebanyak 28 sampel dengan ketepatan waktu Pelaporan ada 16 sampel.

Adapun kendala pada penyelesaian pengujian sampel adalah:

1. Antrian waktu pengujian Mikrobiologi untuk sampel bulan April dan Mei karena pengujian mikro mengutamakan uji OBASKK dan Kos untuk mencapai 15 HK.
2. Pengujian Mikrobiologi Pangan dilakukan 5 plo sehingga membutuhkan alat gelas dan alat yang lebih banyak dan antri pada penggunaan inkubator.
3. Antrian HPLC karena di Lab. Kimia ada 3 HPLC, tapi 1 HPLC rusak dan perlu perbaikan.

Selama tahun 2025 hanya terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Tindak lanjut telah diberikan kepada unit pelaksana Teknis di Tangerang dikarenakan produk PIRT yang TMS merupakan produksi dari sarana PIRT yang berada di wilayah kerja UPT Tangerang. Koordinasi dengan lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan juga telah dilakukan dengan memberi informasi terkait sampel PIRT yang telah disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh agar tidak dilakukan sampling ulang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat dana untuk sampling dan uji produk PIRT.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

a. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan buka blokir anggaran yang sebelumnya terdampak efisiensi.
b. Koordinasi tim pemeriksaan dengan tim penguji terkait ketersediaan sumber daya termasuk reagen dan peralatan untuk menghindari sampel tidak dapat diuji sesuai ketentuan pada Pedoman Sampling.
c. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium maksimal 5 hari kerja terhitung dari waktu sampling dilakukan oleh petugas.
d. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan.
e. Untuk menghindari kesalahan pada pemilihan Parameter Uji maka dimulai dari ketepatan pemilihan Kategori sampel.
f. Berkoordinasi dengan tim sampling terkait sarana prasarana pengujian agar Pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling.
g. Ketelitian dalam pemilihan Kesimpulan Hasil Uji pada SIPT.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 22.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22.630.900	22.629.093	99.99	102.94	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan upaya-upaya peningkatan antara lain:

1. Komitmen dan kepatuhan tim pemeriksaan dalam melakukan sampling sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara tim pemeriksaan dan pengujian sampling PIRT untuk menghindari sampel yang tidak dapat diuji sesuai pedoman, serta mengurangi kesalahan dalam penetapan parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan.

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Sampel PIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian selama tahun 2025 terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat hasil uji mikrobiologi. Tidak terdapat sampel PIRT yang disampling tidak memiliki izin edar, rusak, maupun kadaluarsa. TIndak lanjut terhadap sampel TMS telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan UPT terkait dimana sarana produksi produk PIRT tersebut berada, dan akan dipantau tindak lanjutnya kembali. Koordinasi dengan lintas sektor terkait sampling produk PIRT dan pembinaan sarana produksi PIRT juga terus dilakukan agar produk-produk PIRT yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang aman dan bermutu.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian produk PIRT pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh terutama berhubungan dengan operasional baik mengenai sarana prasarana, perencanaan, maupun pelaporan secara terpadu melalui SIPT. Resiko yang teridentifikasi telah dimitigasi dengan efektif sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 23.Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3	85.78	102.98	**Sangat Baik**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus:

$$\frac{(A + B)/2}{A = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ pelaku\ usaha}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ pelaku\ usaha} x\ 100\%}$$

$$B = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ lintas\ sektor}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ lintas\ sektor} x\ 100\%$$

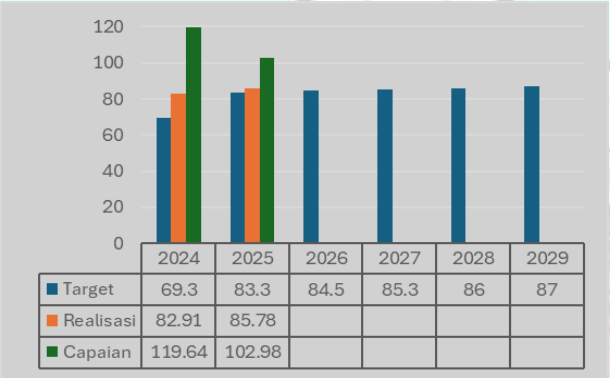
Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi

obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha (badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan).

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penertiban keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 262 surat rekomendasi (235 surat hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan 27 surat rekomendasi kepada lintas sektor terkait). Dari surat yang diterbitkan sebanyak 226 pelaku usaha dan lintas sektor yang memberikan respon tindak lanjut/feedback (203 respon dari pelaku usaha dan 23 respon dari lintas sektor). Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 85,78% dibandingkan dengan target 2025 memiliki nilai capaian sebesar 102,98% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 11.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan target tahun 2025 lebih tinggi sebesar 83,3% dibandingkan target tahun 2024 yaitu sebesar 69,3%. Peningkatan target pada tahun 2025 didasarkan pada realisasi pada tahun 2024 dengan nilai yang tinggi sehingga persentase capaian masuk dalam kategori dapat disimpulkan.

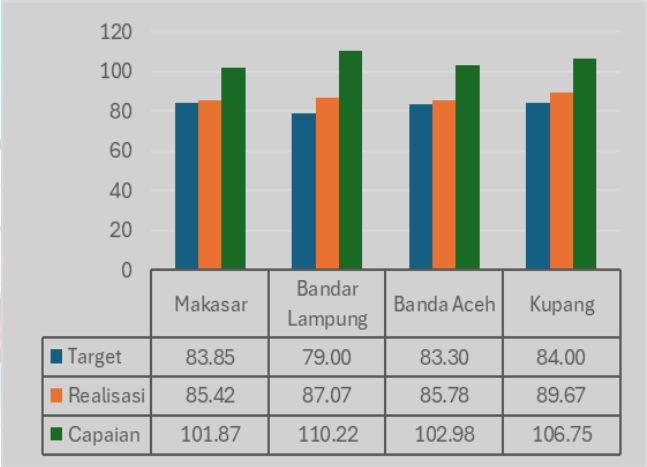
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 24.Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87.00	85.78	98.60	**Akan Tercapai**

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sudah mencapai target tahun 2025 namun belum mencapai target tahun 2029 yaitu sebesar 87%. Jika dibandingkan realisasi 2025 dengan target 2029 maka capaian indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2025 sebesar 98,60% dengan kategori akan tercapai. Berdasarkan capaian tersebut Balai Besar POM di Banda Aceh optimis tetap dapat mencapai target tahun 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	83.85	79.00	83.30	84.00
Realisasi	85.42	87.07	85.78	89.67
Capaian	101.87	110.22	102.98	106.75

Grafik 12.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa keempat Balai memiliki target dan realisasi yang berbeda sehingga memiliki nilai capaian yang berbeda pula. Balai Besar POM di Makassar dan Kupang memiliki target yang mendekati dengan Balai Besar POM di Banda Aceh dan diantara kedua balai tersebut, realisasi Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada posisi menengah dengan nilai sebesar 85,78%. Namun demikian setiap balai sudah mencapai target yang ditetapkan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melampaui target dengan capaian sebesar 102,98%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Selama tahun 2025, capaian indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sudah mencapai target yang ditetapkan. Stakeholder atau pemangku kepentingan yang dimaksud pada indikator ini terdiri dari pelaku usaha dan lintas sektor. Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, produksi dan distribusi pangan olahan. Sampai dengan triwulan IV jumlah surat yang dikirimkan kepada pelaku usaha sarana sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 235 surat dan surat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 203 surat yang berasal dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produksi pangan olahan. Beberapa pelaku usaha tidak dapat dihubungi pada saat menyampaikan surat tindak lanjut dan kurangnya pemahaman pelaku usaha dan penanggung jawab dalam membuat CAPA sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menindaklanjuti permintaan CAPA.

Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif dengan cara menghubungi melalui WA. Pada sarana produksi, komunikasi aktif akan terus dilakukan petugas dengan pelaku usaha agar dapat mengetahui kendala dan kemajuan pembuatan CAPA serta memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif komunikasi melalui *whatsapp* dan telepon maupun tatap muka langsung ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.

Monitoring terkait pembuatan CAPA kepada setiap APJ sarana yang mendapatkan surat TL melalui WA, telepon maupun email setelah 1 minggu surat diterima sarana. Keputusan hasil inspeksi sarana distribusi makanan, kosmetika dan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dilakukan pembuatan penyelesaian CAPA di sarana langsung dengan melengkapi dokumen tindak lanjut dengan Berita Acara Pemusnahan, Berita Acara Serah Terima, Surat Pernyataan dan Lembaran Penilaian CAPA. Sehingga capaian persentase keputusan hasil inspeksi untuk sarana distribusi ini bisa diupayakan dengan optimal.

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sampai dengan triwulan IV sebanyak 23 surat yang ditindaklanjuti dari total 27 surat yang dikirim oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh kepada instansi terkait sarana sediaan farmasi komoditi obat dan pangan. Pimpinan instansi terkait lama memberikan respon terhadap surat tindak lanjut yang dikirim. Untuk dapat terus meningkatkan serta mempertahankan capaian terhadap indikator ini petugas akan melakukan komunikasi aktif dan intensif dengan lintas sektor/instansi terkait baik kepada pimpinan maupun tim teknis secara formal maupun informal agar capaian indikator ini tercapai dan meningkat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah:

1) Pendampingan pembuatan CAPA pelaku usaha secara intensif komunikasi melalui Whatsapp dan telepon maupun tatap muka langsung ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.
2) Monitoring dan evaluasi oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha apakah sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atau tidak sesuai timeline yang diberikan melalui menghubungi atau mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut.
3) Advokasi dan koordinasi berkesinambungan kepada lintas sektor secara intensif baik kepada pimpinan atau tim teknis untuk meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan terkait hasil pengawasan sarana maupun produk di kabupaten/kota terkait.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 25.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Framasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	13.333.750	13.304.343	99.78	102.98	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasi pada triwulan berikutnya.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk tetap dapat mencapai target indikator ini hingga akhir tahun, diperlukan upaya - upaya peningkatan antara lain:

1. Komitmen dan kepatuhan tim pemeriksaan untuk menghubungi sarana yang diberikan surat tindak lanjut secara intensif melalui *Whatsapp*/Telepon.
2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp, telepon dan tatap muka langsung ke kantor.
3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara petugas dengan lintas sektor instansi terkait.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target tahun 2025 Capaian ini akan terus ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor dengan melakukan komunikasi aktif untuk meminta respon yang ditindaklanjuti secara administratif. Dengan meningkatnya capaian indikator ini merupakan perwujudan dari kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi, demikian juga dengan lintas sektor, dengan koordinasi yang baik diharapkan kedepannya semakin aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Komunikasi aktif pelaku usaha dan koordinasi dengan lintas sektor yang semakin baik diharapkan tetap dapat dipertahankan agar Indikator ini tetap dapat dicapai pada tahun berikutnya.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian kinerja indikator ini telah mencapai target dengan kategori baik sebesar 102.94%, yang mana mencerminkan bahwa risiko - risiko yang ada pada indikator ini telah dikendalikan dengan efektif. Faktor risiko eksternal terkait kurangnya kepatuhan pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan telah dikendalikan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas, kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam menindaklanjuti CAPA dikendalikan dengan pemberian bimbingan pembuatan CAPA, serta peran petugas yang aktif dalam melakukan monitoring pelaku usaha dan lintas sektor yang belum menindaklanjuti rekomendasi telah dimitigasi dengan baik.

Kemungkinan risiko ini akan muncul kedepannya tetaplah ada, walaupun demikian, berbagai strategi dan upaya pengendalian yang lebih efektif juga akan dilakukan agar resiko-resiko akibat kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan stakeholder dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dapat diminimalisir.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 26. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100	105.26	**Sangat Baik**

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terdiri dari perhitungan:

$$= \frac{\%\ Sarprod\ Obat + \%\ Sarprod\ Obat\ Bahan\ Alam\ dan\ Suplemen\ Kesehatan + \%\ Sarprod\ Kosmetik}{3}$$

Beberapa kategori dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Persentase Sarana produksi Obat = A+B+C / 3

Keterangan :

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ sasaran\ dan\ cakupan\ renlak\ tahunan}{Jumlah\ sasaran\ dan\ cakupan\ target\ renlak} x\ 100\%$$

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana\ yang\ telah\ dilakukan\ dalam\ kurun\ waktu\ setahun}{Jumlah\ target\ tahunan} x\ 100\%$$

Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Persentase Sarprod OBA dan SK = A+B+C+D / 4

Keterangan:

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{Jumlah\ \ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak} x\ 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa} x\ 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ benar}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa} x\ 100\%$$

a. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindaklanjut} x\ 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Persentase Sarprod Kosmetik = A+B+C+D / 4

Keterangan:

A. Pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{Jumlah\ \ target\ \ sesuai\ Renlak} x\ 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa} x\ 100\%$$

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa} x\ 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindaklanjut} x\ 100\%$$

Sarana produksi (sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi sarana produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit); Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yaitu yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan

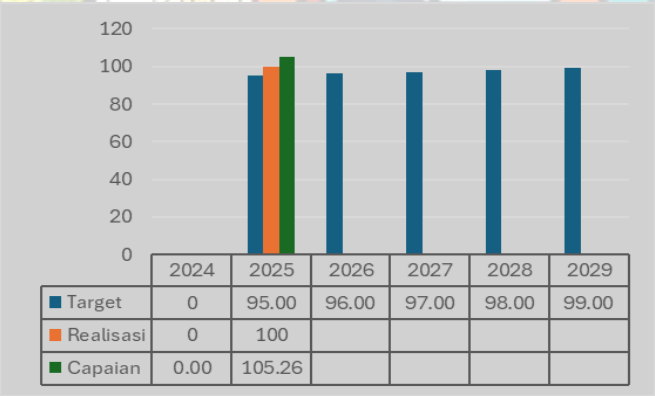
alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), industri suplemen kesehatan; dan Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Proses diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang baik dan konsisten dilakukan sehingga menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada sarana produksi obat bahan alam dan kosmetik sebanyak 11 sarana. Semua sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100% dari target 93%. Dengan demikian capaian persentase pada indikator ini di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target yaitu 105.26 dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00
Realisasi	0	100				
Capaian	0.00	105.26				

Grafik 13.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja yang baru di tahun 2025

sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya. Indikator ini baru dapat dibandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2029.

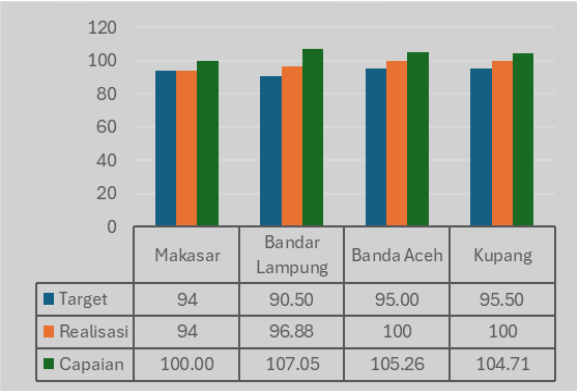
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 27.Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.00	100	101.01	**Tercapai/ Melampaui** ▲

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sudah mencapai target tahun 2029 dengan capaian sebesar 101,01%. Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target renstra tahun 2029 dengan kriteria tercapai/melampaui. Walaupun demikian masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar target tahun 2029 tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 14.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa setiap Balai memiliki target dan realisasi yang berbeda. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki target sebesar 95% yang hampir sama dengan Balai Makassar dan Kupang yaitu 94% dan 95,50%. Realisasi Balai Besar POM di Banda Aceh sama dengan balai Kupang dan lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Makassar dan Balai Bandar Lampung. Setiap UPT sudah mencapai target yang ditetapkan dengan balai Makasar capaian sebesar 100% serta ketiga balai lainnya capaian diatas 100%. Balai Besar POM

di Banda Aceh telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 105,26%, lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Besar POM di Makassar dan Balai Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk selama tahun 2025. Sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam dan kosmetik. Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/ laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa.

Selama tahun 2025, sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa sarana obat bahan alam sebanyak 8 sarana dan sarana kosmetik sebanyak 3 sarana yang telah dilaporkan melalui pelaporan terpadu SIPT. Sarana produksi Obat Bahan Alam yang diperiksa merupakan sarana yang terletak di Bireuen, Pidie Jaya dan Banda Aceh yaitu sarana UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) dan sarana UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional). Hasil pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam yaitu keempat sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan. Kesulitan dalam pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam yaitu dari 4 sarana UKOT/UMOT yang diperiksa, keempatnya tidak melakukan kegiatan produksi OT, karena 3 diantaranya telah habis masa berlaku CPOTB dan 1 sarana dengan penanggung jawab telah mengundurkan diri.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko.
2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam berupa sarana UMOT dan sarana UKOT.
3. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 28.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.333.750	13.304.343	99.78	105.26	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan:

1. Melakukan koordinasi dengan tim sertifikasi dan pendataan sarana produksi sediaan farmasi komoditi Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang masih aktif dan tidak aktif.
2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan analisis resiko dan ketentuan yang berlaku.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, pencapaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 101.01%. Seluruh tahapan terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 29.Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	**Sangat Baik**

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} x\ 100\%$$

Sarana produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD dan juga izin edar IRTP. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan
2. Ketepatan tindak lanjut termasuk koordinasi dengan
3. Kesesuaian grading

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 44 sarana produksi pangan olahan MD yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Sebanyak 44 sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi sebesar 100% dari target 91%, sehingga capaian indikator ini sebesar 109,89% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
Realisasi	0	100				
Capaian	0.00	109.89				

Grafik 15.Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki

pembanding di tahun sebelumnya. Indikator ini baru dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

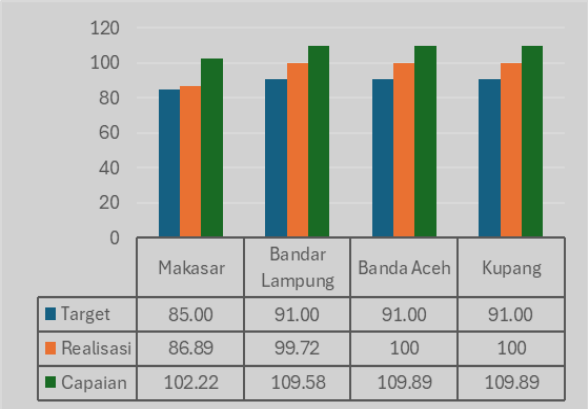
Tabel 30. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100	105.26	**Tercapai/ Melampaui** ▲

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sudah mencapai target tahun 2029 dengan capaian sebesar 105,26%. Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target renstra tahun 2029 dengan kriteria tercapai/melampaui. Walaupun demikian monitoring dan evaluasi tetap harus dilakukan agar realisasi maksimal ini tetap dapat diperoleh hingga tahun berikutnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis

Grafik 16.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.



Berdasarkan data di samping diketahui bahwa terdapat dua memiliki target yang sama dengan Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Kupang target sebesar 91%. Realisasi Balai Besar POM di Banda Aceh sama dengan Balai Kupang yaitu 100% dan lebih tinggi dibandingkan dengan kedua balai lainnya. Ketiga balai tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian diatas 100%. Balai Besar POM di Banda Aceh telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 109,89%, lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Besar POM di Makassar dan Bandar Lampung.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Target sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan selama TW II sudah merupakan target semula untuk setahun sebanyak 44 sarana produksi. Pemilihan target sarana produksi pangan olahan berdasarkan riwayat hasil pemeriksaan sarana, sarana yang belum pernah diperiksa, dan juga sarana yang diperoleh informasi terkait aktivitas sarana produksi pangan olahan baik tutup, pindah alamat, hasil uji TMS ataupun pengaduan masyarakat.

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebanyak 40 sarana produksi pangan olahan MD dan 4 sarana produksi PIRT yang telah dilaporkan melalui pelaporan terpadu SIPT dengan tepat waktu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022. Hasil pemeriksaan dari 44 sarana yang diperiksa yaitu 13 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, 28 sarana produksi Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 sarana direkomendasikan pencabutan izin karena tidak sudah pindah alamat dan tidak beroperasional. Hasil pemeriksaan juga telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan sarana produksi pangan olahan yaitu Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana untuk sarana TMK dengan rating C/D diberikan sanksi administratif berupa Peringatan, dan untuk sarana MK dengan rating B diberikan tindak lanjut berupa permintaan CAPA hasil pemeriksaan. Pemberian tindak lanjut sesuai pedoman kepada pelaku usaha produksi pangan olahan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta pemenuhan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik secara konsisten dilakukan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pencapaian indikator ini.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Penyusunan rencana dan pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko.
- Percepatan penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan sarana
- Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.
- Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan baik secara mandiri melalui Ideas dan terpadu oleh pusat, yaitu pelatihan Food Inspectur di TW I dan II tahun 2025.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 31.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.333.750	13.304.343	99.78	109.89	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
2. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana produksi.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai perencanaan dan berdasarkan analisis resiko.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti telah mencapai target yang ditetapkan. Dari laporan kinerja sebelumnya diperoleh informasi bahwa capaian TW I dan TW II berada pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengusulan kenaikan target agar capaian masuk dalam kategori Sangat Baik dan tetap dapat dicapai hingga akhir tahun. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA oleh pelaku usaha. Seluruh tahapan proses terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan akan semakin menantang, pelaku usaha UMK semakin banyak yang

memproduksi produk risiko rendah dengan kemudahan pengurusan izin edar OSS RBA berupa evaluasi dokumen dan audit lapangan dilakukan satu tahun setelah izin terbit akan menjadi tantangan kembali untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi pangan olahan yang aman dan bermutu. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 32.Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.85	103.20	**Sangat Baik**

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus =

(A+B+C)/3

Keterangan:

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{Pemenuhan\ Target\ Pemeriksaan\ (a) + Kesesuaian\ Tindaklanjut\ (b)}{2} x100\%$$

a) Pemenuhan target pemeriksaan ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT dengan rumus (A/B) dimana A merupakan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada

periode tahun berjalan x 100% dan B merupakan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut, kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan, diperoleh dengan rumus:

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= (a+b+c+d)/4

Keterangan:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{jumlah\ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ benar}{jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindaklanjut}\ x\ 100\%$$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= (a+b+c+d)/4

Keterangan:

a. Pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{jumlah\ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak} x\ 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa} x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai}{jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa} x\ 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindaklanjut} x\ 100\%$$

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa Balai Besar POM di Banda Aceh meliputi sarana distribusi obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, kosmetik, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Pemilihan sarana fasilitas distribusi sediaan farmasi yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa.

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sebanyak 528 sarana yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Semua sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga realisasi sampai dengan akhir desember sebesar 99.85% dari target 96.75%. Dengan demikian capaian persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 103.20% dengan kategori **sangat baik.**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	96.75	97.50	98.25	99.00	99.50
Realisasi	0	99.85				
Capaian	0.00	103.20				

Grafik 17.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya, baru dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang meningkat setiap tahunnya.

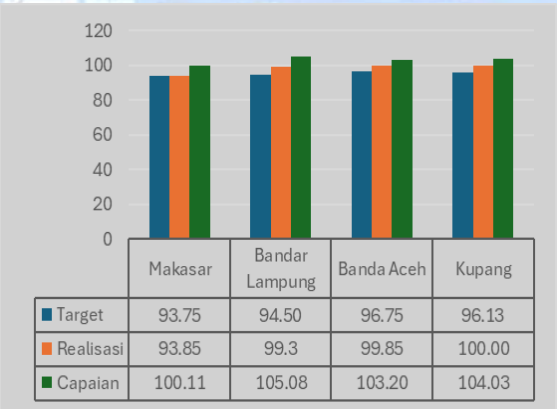
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 33.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.50	99.85	100.35	**Tercapai/ Melampaui** ▲

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sudah mencapai target tahun 2029 dengan capaian sebesar 100,35%. Realisasi persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target renstra tahun 2029 dengan kriteria tercapai/melampaui. Walaupun demikian petugas Balai Besar POM di Banda Aceh akan selalu melakukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif sehingga indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti dan dilaporkan tepat waktu ini dapat dicapai hingga tahun berikutnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 18.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai lain memiliki target dan realisasi yang berbeda, Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki target tertinggi diantara ketiga balai lainnya yaitu sebesar 96,75%. Realisasi Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 99,85% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Makassar dan Balai Bandar Lampung yaitu sebesar 93,85% dan 99,3%. Seluruh balai yang diperbandingkan sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian diatas 100%. Balai Besar POM di Banda Aceh telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,20%, dengan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Besar POM di Makassar dan Bandar Lampung.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sampai akhir tahun 2025 dengan kriteria sangat baik. Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi sebanyak 528 sarana. Lokasi pemeriksaan tidak hanya berada di daerah kota Banda Aceh, namun dilakukan juga ke Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT Balai Besar POM di Banda Aceh. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian dengan total 245 sarana terdiri atas pemeriksaan pada PBF, apotek, toko obat, Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas dan klinik. Masih terdapat sarana distribusi obat dan saryanfar yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan sarana melakukan pengelolaan obat tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan obat narkotika dan psikotropika yang tidak baik, penyaluran yang tidak tertelusur, pengelolaan produk CCP yang tidak baik dan faktor mayor dan kritis yang dapat menurunkan mutu produk.

Pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik selama tahun 2025 telah dilakukan terhadap 283 sarana yang tidak hanya di daerah Kota Banda Aceh namun berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Pemeriksaan pada sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 34 sarana, pemeriksaan pada sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 7 sarana, pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetik sebanyak 242 sarana. Sarana distribusi yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik disebabkan masih banyaknya produk - produk tanpa izin edar karena tren kosmetik kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri, dan juga bertambahnya sarana-sarana distribusi baru yang belum pernah mendapat pembinaan dari Balai Besar POM di Banda Aceh.

Selama tahun 2025 seluruh sarana yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi administratif dan akan menjadi prioritas target pengawasan untuk dipantau kembali kepatuhan pelaku usaha pada rencana pemeriksaan tahun berikutnya.

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik capaian sebesar 103.20%. Walaupun demikian, masih sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan dalam pencapaian indikator ini.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu (petugas pengawas obat melakukan zoom meeting dengan Ditwasdisyanfar) terkait pengawasan sarana dan ketentuan tindak lanjut yang sesuai.
3. Monitoring dan evaluasi ketua tim kerja terkait rencana pelaksanaan, ketepatan tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu *timeline*.
4. Komitmen petugas pengawas fasilitas distribusi sediaan farmasi untuk melakukan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, menindaklanjuti dan melaporkan tepat waktu sesuai *timeline* melalui SIPT dan defisini operasional (DO).
5. Melakukan bimbingan teknis kepada distributor Obat Bahan Alam terkait Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) pada tanggal 15 September 2025 yang dihadiri oleh 23 pemilik gerobak jamu se kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi distributor OBA yang memegang peranan penting dalam rantai distribusi OBA khususnya di wilayah Aceh.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 34.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	613.168.000	612.668.318	99.92	103.90	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun selanjutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sesuai perencanaan.
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi secara berkelanjutan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian indikator kinerja ini tercapai sebesar 103.20%, dengan demikian seluruh proses terkait pemeriksaan distribusi fasilitas sediaan farmasi sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi fasilitas sediaan farmasi TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA dari pelaku usaha oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung

dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 35.Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	**Sangat Baik**

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

A + B + C

Keterangan:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

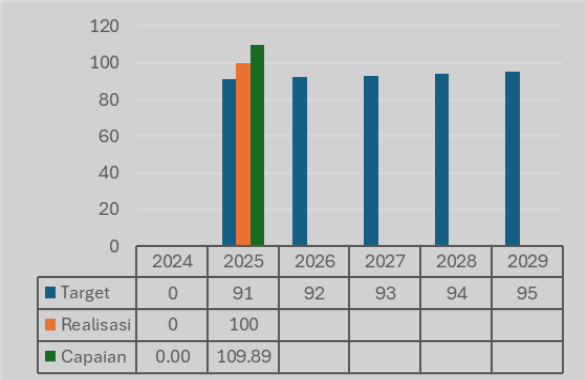
1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa.
2. Ketepatan waktu pelaporan.
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Pemilihan sarana distribusi pangan olahan yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa. Sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pengawasan yaitu sarana retail modern, sarana retail tradisional, dan distributor pangan, sedangkan untuk sarana importir pangan belum menjadi target pemeriksaan karena tidak ada importir pangan aktif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Hingga akhir tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 107 sarana dari target 107 sarana selama setahun dan seluruhnya

telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan peredaran pangan olahan sehingga realisasi sebesar 100% dari target 91%. Dengan demikian capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 109.89% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 19.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya. Indikator ini baru dapat dibandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

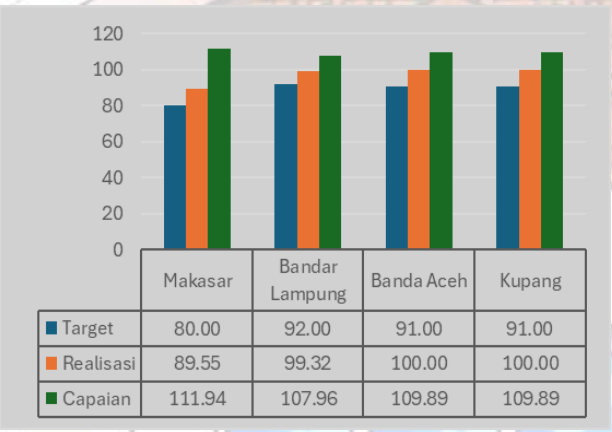
Tabel 36.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100	105.26	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2029 yaitu dengan kategori Tercapai/Melampaui. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sudah mencapai target tahun 2029 dengan capaian sebesar 105,26%. Balai Besar POM di Banda Aceh akan selalu melakukan peningkatan strategi

dalam pengawasan dengan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif agar target tahun berikutnya dapat terus dicapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	80.00	92.00	91.00	91.00
Realisasi	89.55	99.32	100.00	100.00
Capaian	111.94	107.96	109.89	109.89

Grafik 20.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai lain memiliki realisasi dan target yang berbeda, Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki target dan realisasi yang sama dengan Balai Besar POM di Kupang yaitu 91% dan 100% sehingga memiliki capaian yang sama yaitu sebesar 109,89%. Ketiga balai tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian di atas 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2025, pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan telah dilakukan sebanyak 107 sarana dengan rincian 40 sarana distribusi retail tradisional, 61 sarana retail modern dan 6 sarana distributor pangan olahan. Dari 107 sarana yang diperiksa terdapat 95 sarana Memenuhi Ketentuan dan 12 sarana distribusi pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang TMK yaitu 5 sarana distribusi pangan retail tradisional dan 7 sarana retail modern. Seluruh sarana yang diperiksa ini telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan sanksi administratif dan akan menjadi prioritas target pengawasan untuk dipantau kembali kepatuhan pelaku usaha pada rencana pemeriksaan tahun berikutnya.

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik dengan capaian sebesar 109.89%, hal ini karena seluruh tahapan penilaian untuk perhitungan indikator ini telah terpenuhi dengan maksimal sehingga realisasi menjadi 100% dari target sebesar 91%. Walaupun demikian, masih

sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan dalam pencapaian indikator ini.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja indikator ini antara lain:

1. Peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan olahan berupa Pelatihan Inspektur Pangan yang diadakan oleh pusat maupun pembelajaran mandiri melalui aplikasi IDEAS.
2. Komitmen petugas pengawas sarana distribusi pangan olahan untuk melakukan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, menindaklanjuti dan melaporkan tepat waktu sesuai timeline.
3. Monitoring dan evaluasi ketua tim kerja terkait rencana pelaksanaan, ketepatan tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu sesuai timeline.
4. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 37.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	335.793.600	332.129.219	98.91	109.89	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai perencanaan
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian indikator ini telah melampaui target tahunan dengan capaian sebesar 109.89%. Walaupun sudah mencapai target tahun 2025, tetapi tantangan untuk pemenuhan ketentuan terhadap pencapaian indikator ini tetap harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang ketat. Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha distribusi pangan olahan juga sangat diperlukan, dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan. Untuk itu masih sangat diperlukan berbagai upaya yang untuk mempertahankan capaian ini dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta komitmen dari petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai ketentuan.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian pada indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai untuk target tahun 2025 dengan kategori sangat baik. Berbagai risiko yang mungkin muncul dan risiko yang juga telah terjadi dapat dikendalikan dengan efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku usaha

saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Resiko fraud seperti adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan serta gratifikasi telah dimitigasi dengan sosialisasi sanksi yang akan diterima apabila risiko fraud terjadi. Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko-risiko yang menghambat pencapaian indikator ini telah dimitigasi dan akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih sesuai dan relevan untuk kondisi yang akan datang.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 38.Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.8	99.20	110.47	**Sangat Baik**

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan rumus = **(A+B+C+D+E)/5**

Keterangan:

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$= \frac{a+b}{2}$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

= (a+b+c)/3

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ pengawasan\ sesuai\ Renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$= \frac{Jumlah\ keputusan\ hasil\ pengawasan\ iklan\ yang\ sesuai}{Jumlah\ seluruh\ keputusan\ hasil\ pengawasan} \times 100\%$$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

= (a+b+c)/3

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ pengawasan\ sesuai\ Renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$= \frac{Jumlah\ keputusan\ hasil\ pengawasan\ iklan\ yang\ sesuai}{Jumlah\ seluruh\ keputusan\ hasil\ pengawasan} \times 100\%$$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

= (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$= \frac{Jumlah\ \%\ capaian\ pengawasan\ iklan\ yang\ diawasi\ pada\ media\ sesuai\ target}{Jumlah\ media\ (4)} \times 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$= \frac{Capaian\ jumlah\ iklan\ per\ media}{Jumlah\ target\ per\ media} \times 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$= \frac{\%\ rerata\ capaian\ evaluasi\ dan\ verifikasi\ Operator\ UPT + \%\ rerata\ capaian\ pelaporan\ ke\ Operator\ Pusat}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ evaluasi\ dan\ verifikasi\ oleh\ Operator\ UPT\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ dievaluasi} \times 100\%$$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ ke\ Operator\ Pusat\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ dievaluasi} \times 100\%$$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ sesuai\ renlak} \times 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$= \frac{(Jumlah\ iklan\ yang\ diawasi\ per\ media\ iklan/jumlah\ iklan\ yang\ diawasi)}{Proporsi\ target\ media} \times 20\%$$

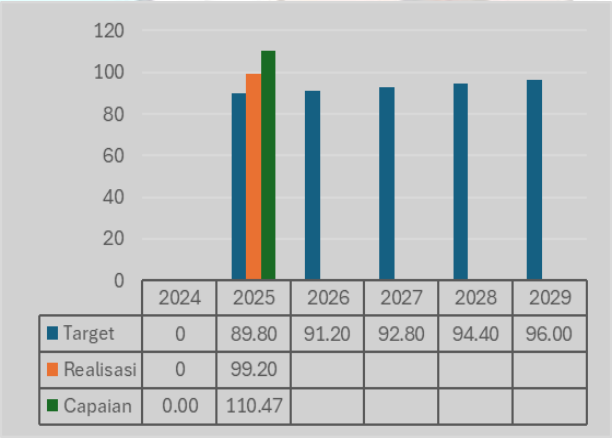
c. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ diawasi} \times 40\%$$

Poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100% Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Selama tahun 2025, telah dilakukan pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan total sebanyak 887 iklan yang diawasi sesuai pedoman dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu. Iklan sediaan farmasi yang diawasi terdiri dari iklan obat sebanyak 156, iklan kosmetik sebanyak 333, iklan Obat Bahan Alam sebanyak 87, iklan Suplemen Kesehatan sebanyak 39 dan iklan pangan olahan sebanyak 272 iklan. Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 110.47% dengan kategori **sangat baik**. Telah dilakukan desk pada akhir Juni terkait pengusulan revisi untuk kenaikan target tahun 2025 agar capaian yang diperoleh dapat masuk dalam kategori yang dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 21.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya. Indikator ini baru dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang meningkat setiap tahunnya.

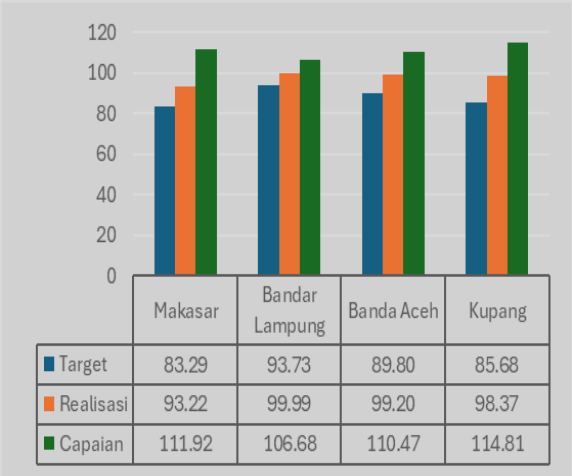
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 39.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	96.00	99.20	103.33 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sudah mencapai target tahun 2029 dengan capaian sebesar 103,33%. Realisasi persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2029 yaitu dengan kategori Tercapai/Melampaui. Berdasarkan capaian ini, monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan disertai peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif sehingga target tahun selanjutnya dapat dicapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 22.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai lain memiliki realisasi dan target yang berbeda. Ketiga balai tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian diatas 100%. Balai Besar POM di Banda Aceh mencapai target dengan realisasi sebesar 99,20% dan capaian sebesar 110,47% lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu sebesar 106,68%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan selama tahun 2025. Seluruh iklan yang diawasi dilakukan sesuai dengan perencanaan iklan yang sudah diatur dengan kategori media dan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman komoditi masing-masing dan dilaporkan melalui SIPT.

Iklan komoditi obat yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama tahun 2025 sebanyak 156 iklan dengan persentase 100%. Pengawasan iklan obat membutuhkan waktu yang ketelitian petugas untuk mencari database yang sesuai di SIAPIk sehingga iklan yang dilaporkan sesuai.

Iklan komoditi kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT sampai dengan akhir desember sebanyak 333 iklan dengan persentase 100%. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak, media luar ruang, media online dan media elektronik. Pengawasan iklan komoditi kosmetik pada media elektronik yaitu video TV membutuhkan waktu atau durasi yang panjang merekam iklan untuk mendapatkan iklan yang sesuai dengan kriteria target pengawasan. Perlu adanya satu alat atau perangkat yang digunakan untuk merekam iklan media elektronik dalam waktu yang

lama.

Iklan komoditi Obat Bahan Alam yang selesai diawasi selama tahun 2025 sebanyak 87 iklan sedangkan jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 81 iklan dari target 87. Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai sebanyak 87 iklan dari target 87 iklan, sehingga persentase iklan komoditi OBA sebesar 97.70%. Hal tersebut menyebabkan turunnya bobot penilaian iklan pada komoditi Obat Bahan Alam selama triwulan III sehingga mempengaruhi realisasi indikator kinerja ini. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak maupun media penyiaran yaitu TV nasional.

Iklan komoditi suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama tahun 2025 sebanyak 39 iklan dari target 39 iklan, jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai sebanyak 37 iklan dari target 39 iklan, sehingga persentase iklan komoditi suplemen kesehatan sebesar 98.29%. Hal tersebut terjadi karena terdapat pengambilan keputusan iklan yang tidak sesuai. Koordinasi dengan komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan pada media penyiaran lokal agar lebih beragam telah dilakukan pada 19 Agustus 2025.

Iklan komoditi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama tahun 2025 sebanyak 272 iklan. Jumlah iklan yang diawasi sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak, media online, media penyiaran dan media luar ruang. Pada tanggal 18 bulan Februari diterbitkan Surat Edaran Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Olahan Tahun 2025 yang mewajibkan untuk mengawasi iklan dari setiap media pada setiap bulan. Komitmen dan keaktifan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengawasi iklan tidak terbatas pada saat jam dinas juga diperlukan sehingga target iklan yang ditetapkan selalu tercapai tahun 2025.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait pelaksanaan pengawasan iklan sesuai ketentuan.
2. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan

memenuhi semua komponen penilaian yang ada pada definisi operasional setiap komoditi.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 40.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	314.715.550	311.519.218	98.98	110.47	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun berikutnya, berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal.
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pengawasan iklan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, memenuhi semua komponen penilaian dan melaporkan tepat waktu melalui SIPT.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pelaksanaan pengawasan iklan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses

realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025-2029, sehingga laporan kinerja interim triwulan II ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target pengawasan iklan, pemenuhan target media iklan, kesesuaian penarikan kesimpulan dan ketepatan waktu pelaporan. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Resiko terkait persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 41.Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	95.8	119.75	**Tidak dapat disimpulkan**

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diperoleh dengan rumus:

$$\frac{A + B}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi/Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100% Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

Selama tahun 2025, telah dilakukan pengawasan label produk tembakau sebanyak 204 label. Hasil penilaian untuk komponen A adalah 100% dan komponen B adalah 91.70%. Realisasi indikator ini diperoleh sebesar 95.83% dengan target 80%. **Capaian pada tahun 2025 melampaui target dengan nilai 119.75%.**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
Realisasi	0	95.83				
Capaian	0.00	119.79				

Grafik 23.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dan baru dapat dilakukan untuk kinerja tahun 2026. Dari data dapat diketahui bahwa target untuk IK ini meningkat setiap tahun hingga akhir renstra 2029.

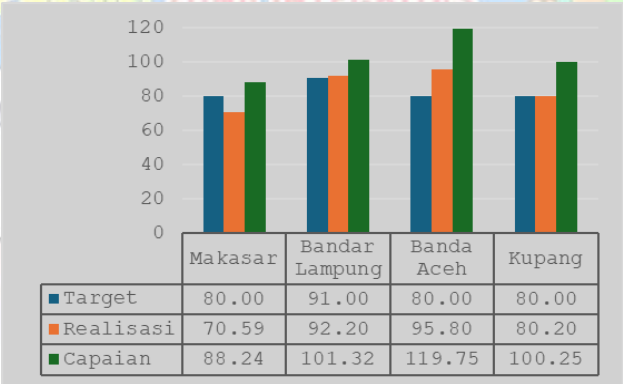
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 42.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84.00	95.8	114.05	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di tahun 2025 sebesar 95.8%. Jika dibandingkan dengan target Renstra di akhir 2029 sebesar 84.00%, maka capaian tahun 2025 adalah 114.05% dan jauh melampaui target Renstra.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 24.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Di antara empat UPT, Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan realisasi kinerja yang paling tinggi. Dengan target 80%, realisasi mencapai **95.8%** yang jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program di Balai Besar POM di Aceh.

Balai Besar POM di Bandar Lampung juga berhasil melampaui target. Dari target 91%, realisasi mencapai 92.2%, menunjukkan capaian yang stabil dan sesuai dengan ekspektasi.

Balai Besar POM di Kupang berada sedikit di atas target. Dengan target 80, realisasi tercatat 80,20. Walaupun selisihnya tipis, hal ini tetap menunjukkan bahwa target

dapat dicapai.

Sebaliknya, Balai Besar POM di Makassar belum memenuhi target. Dari target 80, realisasi hanya 70,59, sehingga terdapat gap sekitar 9,41 poin. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, tiga UPT berhasil mencapai atau melampaui target, dengan Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai pencapaian tertinggi. Sementara Balai Besar POM di Makassar menjadi satu-satunya wilayah yang masih perlu melakukan perbaikan agar kinerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung untuk pencapaian realisasi pada indikator kinerja ini antara lain:

a. Penetapan Target yang Terukur

Indikator ini mulai diterapkan di UPT pada Agustus 2025. Mulai bulan Agustus, indikator pengawasan memiliki target 80% sebagaimana yang diusulkan oleh KMEI pada Mei 2025. Target 80% dinilai sebagai target yang terukur mengingat bahwa Indikator ini baru diterapkan di dan perlu penyesuaian terlebih dahulu. Kegiatan dapat direncanakan dan dieksekusi secara lebih tepat.

b. Monitoring dan Evaluasi

Komponen Jumlah label yang diawasi mencapai 140 di Agustus, meningkat menjadi 157 di September, kemudian secara konsisten bertambah di Desember hingga jumlah target pengawasan label terpenuhi 100% sebesar 204 sesuai target jumlah tahun 2025. Komponen ketepatan waktu berhasil dicapai sebesar 91.70%. Penilaian terhadap dua komponen tersebut diperoleh realisasi sebesar 95.8% yang melampaui target 80%. Capaian kinerja sebesar 119.75% berhasil diraih di tahun ini dan menunjukkan efektivitas pelaksanaan teknis di lapangan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selama tahun berjalan, capaian optimal di tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam pemenuhan target jumlah dan pelaporan tepat waktu. Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan Peningkatan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan teknis dan manajerial dan monitoring berkala terhadap pencapaian indikator kinerja.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 43.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	7.380.000	7.186.100	97.37	119.79	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal.

h. Upaya peningkatan kinerja

Dalam rangka memastikan pencapaian indikator kinerja secara optimal, dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. **Penetapan target yang terukur**, sehingga kegiatan dapat direncanakan dan dieksekusi dengan lebih tepat sesuai kapasitas awal penerapan indikator.
2. **Monitoring dan evaluasi berkala**, yang memastikan peningkatan jumlah label pengawasan secara konsisten hingga mencapai target tahunan, serta menjaga ketepatan waktu pelaksanaan.
3. **Penguatan efektivitas pelaksanaan teknis di lapangan**, terbukti dari capaian realisasi yang melampaui target awal dan menghasilkan kinerja di atas ekspektasi.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja tahun 2025 akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya sepanjang tahun 2025 hingga 2029. Seluruh proses pengawasan berjalan sesuai standar, mulai dari verifikasi label hingga pelaporan hasil pengawasan. Melalui data capaian dan kendala yang terdapat dalam Laporan kinerja TW III tahun 2025, BBPOM Banda Aceh dapat menilai efektivitas pelabelan produk rokok sesuai standar. Dengan pelaporan yang tepat waktu dan terukur, pengawasan rokok menjadi lebih responsif dan berdampak nyata bagi perlindungan konsumen. Adanya capaian yang sangat tinggi di tahun 2025 ini akan menjadi bahan reviu pelaksanaan pengawasan di tahun 2026 sehingga penetapan target lebih terukur.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh menyadari bahwa keberhasilan indikator kinerja tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada kemampuan mengantisipasi dan merespons risiko operasional. Dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik, risiko ketidaktercapaian target jumlah pengawasan dan ketepatan waktu pelaporan menjadi tantangan yang harus dikelola secara sistematis. Pengawasan sampel dilakukan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir bulan sehingga mengurangi risiko keterlambatan dalam pelaporan.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 44.Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105.69	105.69	**Sangat Baik**

Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR realisasi di akhir tahun. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah

UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A);

2) Pelaksanaan Bimtek (B)

3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan

4) Pelaksanaan Publikasi (D).

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25%D

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 25.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Belum dapat dibandingkan, karena indikator kinerja ini merupakan IK baru pada renstra 2025-2029, sehingga perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya baru dapat dilakukan untuk kinerja tahun 2026.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 45.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105.69	105.69 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Nilai Capaian Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR dapat direalisasikan di akhir tahun dengan nilai 105.69 dan telah mampu melampaui target renstra 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 26.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Capaian Kinerja BBPOM di Banda Aceh berada **di atas BBPOM di Makassar dan BBPOM di Kupang** (yang hanya mencapai target), namun sedikit **di bawah capaian BBPOM di Bandar Lampung** yang mencatat capaian tertinggi (**106,14%**).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan untuk mendukung pencapaian realisasi pada indikator kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan Apotek dengan menggunakan tools AMR sesuai ketentuan.
2. Melakukan publikasi hasil pengawasan Apotek terkait penggunaan antibiotik dengan resep dokter di media sosial.
3. Pelaksanaan Bimtek AMR di Bulan Agustus.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka memperkuat efektivitas pengawasan dan pencapaian indikator kinerja, Balai Besar POM di Banda Aceh terus melakukan berbagai upaya peningkatan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Pengawasan bukan hanya soal memenuhi target, tetapi tentang membangun sistem yang adaptif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Beberapa langkah konkret yang perlu terus dilakukan berkesinambungan, antara lain:

1. Publikasi hasil pengawasan terkait pengendalian AMR.
2. KIE kepada masyarakat untuk bijak menggunakan antibiotik.
3. Joint Inspection dengan lintas sektor terkait.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 46.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	94.911.000	94.728.809	99.81	105.69	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal.

h. Upaya peningkatan kinerja

Edukasi terhadap pelaku usaha mengenai pengendalian AMR diperkuat. Kegiatan inspeksi dan evaluasi internal dilakukan setiap triwulan untuk memastikan pengendalian AMR berhasil dilaksanakan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya. Laporan kinerja pengendalian resistensi antimikroba (AMR) bukan sekadar dokumentasi capaian, tetapi menjadi instrumen strategis dalam perbaikan sistem pengawasan dan advokasi kebijakan kesehatan. BBPOM di Banda Aceh telah memanfaatkan laporan ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan empat komponen utama: penggunaan tools pengawasan AMR, pelaksanaan Bimtek, advokasi kebijakan, dan publikasi hasil pengawasan.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Untuk memastikan seluruh komponen indikator dapat tercapai secara optimal, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menerapkan strategi pengelolaan risiko sebagai berikut:

1. **Identifikasi risiko sejak awal** melalui pemetaan kegiatan dan analisis hambatan potensial.
2. **Mitigasi risiko teknis** dengan menerapkan pelaporan yang efektif penggunaan Tools AMR pendampingan teknis bagi petugas pengawasan.
3. **Penguatan koordinasi lintas sektor**, khususnya dengan Dinas Kesehatan Aceh, untuk penguatan pengawasan.
4. **Monitoring berkala capaian indikator**, untuk mendeteksi deviasi dan segera melakukan koreksi.

Hasilnya, seluruh komponen indikator mendapatkan progress yang sangat baik. Upaya yang telah dilaksanakan: Bimtek AMR, advokasi kebijakan kepada lintas sektor terkait, publikasi, dan pengawasan sarana Apotek menggunakan tools AMR mencapai 100%.

14. Nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 47.Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00	79.60	109.04	**Sangat Baik**

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM, yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar

Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium dan metoda analisa yang terverifikasi. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, komponen standar kemampuan laboratorium sebagai berikut:

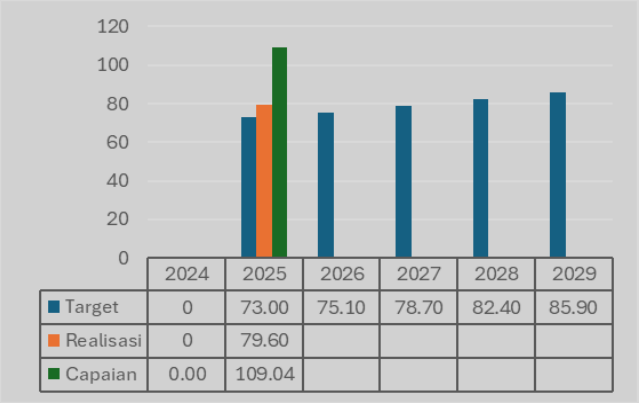
- Standar Lingkup Pengujian 50%.
- Standar Peralatan 20%.
- Standar Kompetensi 20%.
- Standar Metoda Terverifikasi 10%.

Hasil penilaian terhadap komponen standar kemampuan laboratorium pada TW 4 sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup 84.7 %.
- Standar Peralatan 80,2 %.
- Standar Kompetensi 80%.
- Standar Metoda Terverifikasi 51,8 %.

Total capaian nilai SKL 79,6 %, target SKL TW IV 73,00%, nilai SKL terhadap target 109,04 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 27.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Capaian kinerja Persentase *pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* di tahun 2025 sebesar 109,04%. Capaian tahun 2024 sebesar 100,86% dengan 3 indikator yaitu persentase pemenuhan SRL (%), persentase pemenuhan kompetensi (%) dan persentase pemenuhan peralatan. capaian di tahun 2025 lebih meningkat dari tahun 2025 dimana indikator di tahun 2025 terdiri dari 4 komponen yaitu pemenuhan SRL (%),

persentase pemenuhan kompetensi (%) dan persentase pemenuhan peralatan dan persentase metoda analisa yang diverifikasi.

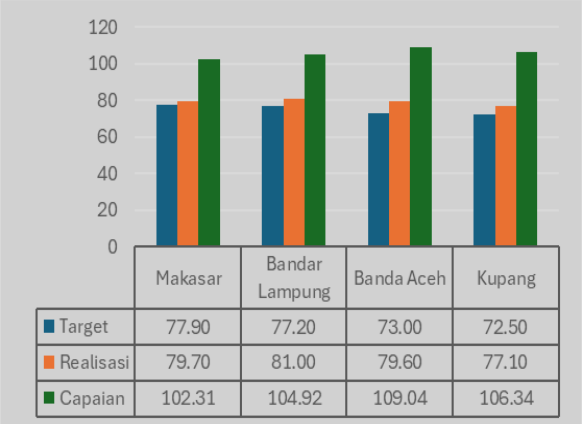
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 48.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85.9	79.60	92.66	**Akan Tercapai**

Realisasi tahun 2025 sebesar 79.60 % dari target tahunan 2029 sebesar 85.9 % dengan kategori akan tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 28.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai memiliki realisasi indeks pengelolaan data dan informasi yang sama dan sudah mencapai target nasional (3.00).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Keberhasilan laboratorium dalam pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Internal bidang pengujian.
2. Verifikasi Metoda Analisa.
3. Pemeliharaan dan Maintenance alat Lab.
4. Pengadaan Baku pembanding.
5. Pengadaan alat-alat gelas.
6. Pengadaan reagensia, suku cadang.

7. Kalibrasi internal dan eksternal alat laboratorium.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya peningkatan terus dilakukan, melalui:

- Peningkatan pengetahuan terhadap kemampuan penguji dengan pelatihan internal secara luring maupun daring.
- Maintenance dan perbaikan alat laboratorium.
- Pemanfaatan inovasi laboratorium MasterIn (Master Instrumen), Vision (Video Singkat Tutorial Penggunaan Instrumen), INTERPOL (Instrument Trouble & Problem Solving).

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target

Tabel 49.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.992.226.000	2.989.248.482	99.90	109.04	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator dapat dicapai realisasi anggaran tahun 2025 dapat terserap dengan efisien. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Upaya peningkatan kinerja

Penguatan kinerja dilakukan melalui peningkatan pelatihan internal secara luring di laboratorium maupun pelatihan yang dilakukan secara daring. Pelatihan dilakukan bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan skill personil pengujian melakukan uji sesuai dengan parameter uji dan juga kemampuan operasional alat laboratorium. selain pelatihan kegiatan lainnya adalah alokasi anggaran untuk pengadaan suku cadang alat lab mengingat alat lab rata - rata umur sudah tua dan sering rusak karena penggunaan dengan frekuensi tinggi.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan indikator yang terdapat pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025-2029, sehingga laporan kinerja interim TW IV ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target, pemenuhan target. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terdapat pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Resiko terkait Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium banyak terkait dengan operasional baik mengenai Sarana

Prasarana Laboratorium, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 50.Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38	15.38	100	**Baik**

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

- Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah.
- Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
- Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan.
- Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

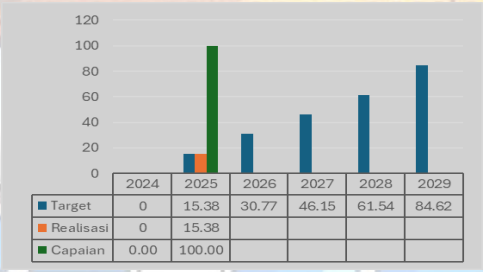
Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman.
- Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT.

- Jumlah target dihitung secara kumulatif.
- Formula Perhitungan.

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 29.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Merupakan indikator baru di tahun 2025 dan tidak pembanding di tahun sebelumnya.

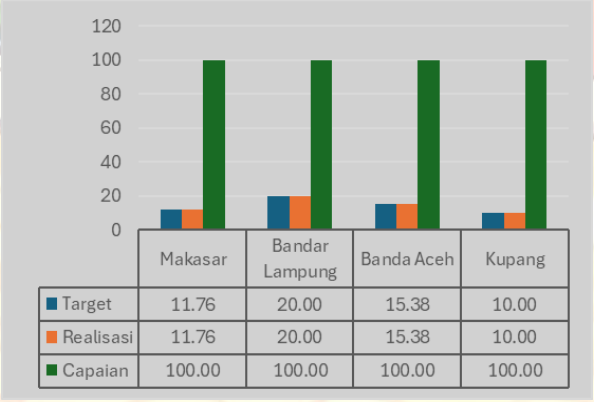
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 51.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	84.62	15.38	18.17	Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman TW IV tahun 2025 sebesar 15.38% dengan capaian 100%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 30.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain

Berdasarkan grafik di samping, bahwa realisasi persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 untuk Balai Besar POM Bandar Lampung (20),

Balai Besar POM di Banda Aceh (15.38), Balai Besar POM di Makassar (11.76) dan Balai Besar POM di Kupang (10) dengan nilai capaian sama yaitu 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyiapan NSPK berjalan baik.
2. SKPD yang berkaitan perizinan PSAT, PSAH, PSAI, POSS dan PIRT berkontribusi dengan baik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya strategis yang dilakukan meliputi:

1. Pemetaan dan Penetapan Daerah Prioritas
   - Mengidentifikasi kabupaten/kota yang memiliki potensi dan komitmen tinggi terhadap penerapan keamanan pangan.
   - Menyusun peta risiko keamanan pangan sebagai dasar penentuan prioritas pendampingan.
2. Pendampingan Teknis dan Supervisi Intensif
   - Memberikan asistensi teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, regulasi, dan kelembagaan pangan aman.
   - Melakukan kunjungan lapangan dan supervisi berkala untuk memastikan tindak lanjut dan implementasi program berjalan sesuai target.
3. Penguatan Kapasitas SDM Daerah
   - Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan kader pangan aman, dan edukasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan lainnya).
   - Memberdayakan kader pangan aman dan Saka POM untuk mendukung kegiatan edukasi di tingkat masyarakat.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor

- Membangun sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat dalam pembentukan ekosistem pangan aman.
- Menjalin komitmen bersama melalui *MoU* dan forum koordinasi pangan aman daerah.

5. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja
   - Menetapkan indikator kinerja untuk mengukur peningkatan persentase kabupaten/kota yang telah didampingi.
   - Melakukan evaluasi tahunan guna melihat progres capaian dan menentukan langkah perbaikan di tahun berikutnya.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 52.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kab/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	19.638.000	19.362.463	98.60	100	**Efisien**

Pelaksanaan kegiatan program Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman telah dilakukan secara efisien. Hal ini tercermin dari pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia secara optimal, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa pemborosan. Optimalisasi koordinasi, sinergi dengan pemangku kepentingan daerah, serta pemanfaatan sumber daya internal turut berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

h. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui:

1. **Penguatan Komitmen dan Tata Kelola Daerah**
   - Mendorong penetapan kebijakan daerah terkait pangan aman.

- Penguatan peran tim terpadu lintas sektor.

2. **Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas dan Pelaksana**
   - Pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas daerah terkait keamanan pangan.
   - Pendampingan teknis berkelanjutan dalam penerapan standar dan indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman.
3. **Pendampingan Terfokus Berbasis Risiko**
   - Pemetaan sarana dan lokasi pangan berisiko (pasar, sekolah, UMKM pangan).
   - Pendampingan prioritas pada titik kritis yang belum memenuhi indikator.
4. **Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan**
   - Intensifikasi pengawasan pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan.
   - Pembinaan pelaku usaha pangan agar memenuhi persyaratan keamanan pangan.
5. **Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**
   - Edukasi masyarakat, pelaku usaha, dan sekolah terkait pangan aman.
   - Pemanfaatan media lokal dan digital untuk kampanye keamanan pangan.
6. **Monitoring, Evaluasi, dan Umpan Balik Berkala**
   - Monitoring capaian indikator secara periodik.
   - Pemberian rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi.
7. **Sinergi Program dan Inovasi Daerah**
   - Integrasi program pangan aman dengan program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah.
   - Mendorong inovasi daerah dalam pengawasan dan edukasi pangan aman.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada Renstra 2025-2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Resiko untuk IKU persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum diidentifikasi.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan sesuai target.

Indikator Kinerja

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 53.Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100.00	**Baik**

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$= \frac{Jumlah\ Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ keseluruhan\ yang\ berada\ di\ wilayah\ UPT} x\ 100\%$$

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan

pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 3 sarana dari 4 sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi cakupan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Realisasi indikator ini diperoleh sebesar 75% dengan target tahun 2025 75% dengan capaian 100% kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 31.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Indikator Kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya. Indikator ini baru dapat diperbandingkan untuk kinerja tahun 2026 dengan target yang sama sampai tahun 2026 yaitu 75% dan target meningkat pada tahun 2027 sebesar 100% dan tetap sama sampai tahun 2029 yaitu 100%.

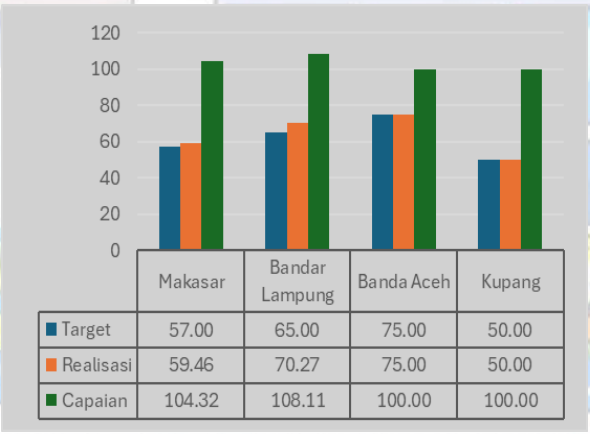
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 54.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	75.00	75.00	**Akan Tercapai**

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 namun belum mencapai target 2029 yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target 2029 maka capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 75% dengan kategori akan tercapai. Pemenuhan setiap tahapan untuk pencapaian indikator ini harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang efektif. Untuk itu perlu komitmen dan strategi yang lebih baik lagi agar Balai Besar POM di Banda Aceh mampu mempertahankan dan memenuhi target 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	57.00	65.00	75.00	50.00
Realisasi	59.46	70.27	75.00	50.00
Capaian	104.32	108.11	100.00	100.00

Grafik 32.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki target dan realisasi tertinggi dibandingkan dengan tiga UPT lainnya yaitu sebesar 75%. Namun setiap balai sudah mencapai target yang ditetapkan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Cakupan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan data sarana produksi pangan fortifikasi terdaftar hingga tahun 2023 yaitu sebanyak 4 sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi garam konsumsi beryodium. Untuk tahun 2025, target cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yaitu sebanyak 3 sarana dan target bersifat akumulatif hingga akhir tahun 2025. Hingga akhir tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan 3 sarana produksi pangan fortifikasi garam konsumsi beryodium yang berlokasi di kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireuen. Hasil pemeriksaan yaitu 1 sarana produksi garam yang berlokasi di Banda Aceh sudah tutup dan tidak melakukan produksi karena sarana produksi yang terdaftar merupakan sarana sewa dan sudah

beralih fungsi menjadi rumah tinggal. Pemilik izin edar sudah tidak melakukan produksi dan tidak terdapat stok produk, sedangkan izin edar produk masih berlaku hingga 31 Agustus 2027. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi garam konsumsi beryodium ini tetap dilakukan dengan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dilaporkan melalui SIPT dengan tindak lanjut rekomendasi Pencabutan Izin Penerapan CPPOB dan Pencabutan Izin Edar an UKM Garam Get. Untuk sarana produksi fortifikasi yang berada di Aceh Besar memperoleh rating hasil pemeriksaan Baik. Sampling terhadap produk fortifikasi sebagaimana yang tertuang dalam manual indikator kinerja ini hanya dilakukan pada sarana produksi garam di Aceh Besar sebanyak 1 sampel dengan hasil uji terhadap kandungan fortifikan Memenuhi Syarat. Hasil pemeriksaan sarana fortifikasi garam beryodium di Kabupaten Bireuen yaitu Sangat Baik dengan rating A, sampling juga dilakukan terhadap produk garam produksi dengan merek Milhy sebanyak 2 bets dengan hasil Memenuhi Ketentuan.

Sebanyak 3 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditargetkan untuk TW III, sehingga realisasi pada tahun 2025 sesuai dengan target yaitu sebanyak 3 sarana dengan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75% dengan hasil capaian terhadap target tahun 2025 adalah 100%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung untuk pencapaian realisasi pada indikator kinerja ini antara lain:

1. Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sarana pangan fortifikasi yang dilaksanakan dengan konsisten.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan ketentuan.
3. Koordinasi dan komunikasi efektif antara seksi inspeksi dengan seksi sertifikasi terkait rekomendasi pencabutan IP CPPOB dan NIE produk terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan.
4. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk selalu mematuhi

peraturan terkait CPPOB.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 55.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	5.069.000	5.068.000	99.98	100	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. PadDengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk terus dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator ini terdapat berbagai upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai perencanaan
2. Komitmen setiap petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan, melaporkan tepat waktu dan menindaklanjuti sesuai pedoman.
3. Monitoring dan evaluasi aktif dari ketua tim terkait hasil pemeriksaan sarana produksi.
4. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat uji terkait fortifikan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya. Sarana produksi pangan fortifikasi yang telah

diperiksa ini merupakan sarana yang akan dipertimbangkan untuk diperiksa kembali kepatuhannya. Untuk sarana yang direkomendasi pencabutan IP CPPOB dan NIE produk, maka sarana tersebut tidak akan masuk dalam target cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi untuk tahun selanjutnya. Pembinaan berkelanjutan juga akan terus dilakukan kepada pelaku usaha agar menghasilkan pangan olahan fortifikasi yang memenuhi syarat dan sesuai ketentuan.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Pengelolaan berbagai risiko yang muncul baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia, dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko terkait adanya fraud/penyalahgunaan wewenang dan adanya gratifikasi juga telah dikendalikan secara efektif dengan membuat pakta integritas dan pengenaan sanksi tegas bagi petugas yang terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran. Risiko - risiko baru yang mungkin muncul akan selalu diidentifikasi serta pengendalian yang telah dilakukan akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Indikator Kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, jumlah desa pangan aman dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Semua indikator pada sasaran kegiatan ini memenuhi target tahun 2025.

Indikator Kinerja

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 56.Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	96.45	111.45	**Tidak dapat disimpulkan**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam.

KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

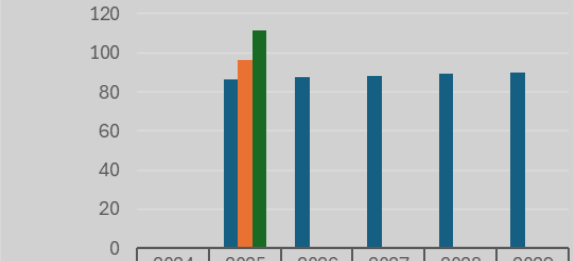
1. Sumber atau Narasumber KIE.
2. Konten atau Informasi KIE.
3. Pemahaman Audiens KIE.
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE.

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan survei Efektifitas KIE triwulan IV dengan jumlah responden 597 orang (indeks KIE 96.45) dengan perincian responden KIE Tatap muka sebanyak 328 orang (indeks 96.7) dan responden KIE media sebanyak 269 orang (indeks 96.21). Realisasi tingkat efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan triwulan IV di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 97.45 dan capaian tingkat efektifitas KIE yaitu 111.45 % dengan kategori **"Tidak dapat disimpulkan".**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	86.54	87.40	88.27	89.13	90.00
Realisasi	0	96.45				
Capaian	0.00	111.45				

Grafik 33.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah UPT merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya.

SELAMAT DATANG KEPALA BADAN POM RI
DI BUMO SEURAMOE MEKKAH

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

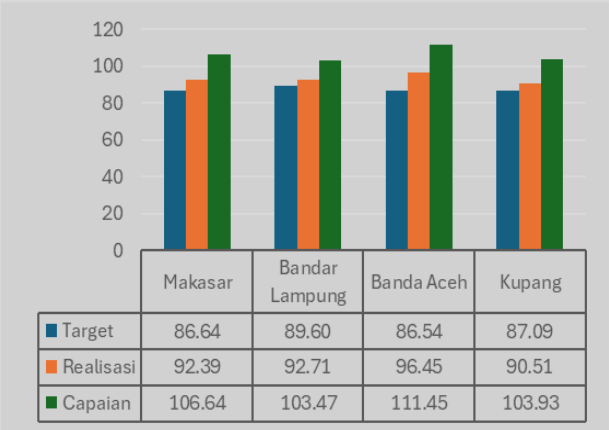
Tabel 57.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90.00	96.45	107.17	**Melampaui/ Tercapai** ▲

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan IV telah mencapai target Renstra tahun 2029 dengan target indeks 90.00 dan % capaian sebesar 107.17% dengan kategori "Tercapai/melampaui". Hal ini menunjukkan masyarakat semakin peduli dan paham kegiatan KIE BPOM. Hal ini tidak lepas dari peran dan kontribusi seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh dalam

menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait Obat dan Makanan aman, bermutu, berkhasiat dan berdaya saing.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 34.Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2025 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh (96.45) diikuti Balai Besar POM di Bandar Lampung (92.71) dan Balai Besar POM di Makassar (92.39) dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Kupang (90.51).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada triwulan IV tahun 2025, hal ini disebabkan kegiatan KIE dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya yaitu KIE di warung kopi melalui inovasi Sanger Ureung Aceh yang berkolaborasi dengan SAKA POM, KIE untuk pencegahan stunting kepada ibu hamil KEK dan balita dan KIE untuk program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Untuk kegiatan KIE melalui media telah dilaksanakan dengan membuat konten-konten secara mandiri di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh dan membuat inovasi Podcast Berbisik BPOM (Berbincang Asik Bersama BPOM). Podcast ini mengundang narasumber terpercaya dari luar dan narasumber Balai Besar POM di Banda Aceh dipandu oleh host dengan tema yang menarik setiap bulannya.

Analisis penyebab keberhasilan kinerja adalah:

1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik.
2. Kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, universitas, dan lintas sektor lainnya.
3. Pemilihan tema dan materi yang menarik dan mudah dipahami.
4. Narasumber yang kompeten dan komunikatif.
5. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan indeks efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan IV tahun 2025 pada Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh 96.45 (Sangat Efektif) dengan metode survey menggunakan kobotoolbox (17 pertanyaan survey). Metode ini tidak lagi memuat rincian indeks per indikator, namun berisi interpretasi efektivitas dengan 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 58.Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan inovasi Jawab Netizen (Janet) dalam bentuk Podcast Berbisik BPOM Aceh yang tayang setiap bulan.
2. Kolaborasi dengan akun lintas sektor di media sosial untuk meningkatkan jangkauan informasi.
3. Berkolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, komunitas masyarakat untuk melaksanakan KIE tatap muka dengan *sharing* anggaran.

4. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 59.Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektivitas KIE

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.642.000	85.556.351	99.90	111.45	**Efisien**

Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada indikator Tingkat Efektivitas KIE telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi anggaran dicapai melalui pemilihan metode KIE yang tepat sasaran, pemanfaatan media luring dan media sosial, serta sinergi dengan pemangku kepentingan dan komunitas sasaran. Optimalisasi sumber daya yang ada memungkinkan peningkatan jangkauan dan kualitas pesan KIE tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, sehingga capaian indikator dapat diraih secara efektif dengan penggunaan anggaran yang proporsional.

h. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

a. Materi yang disampaikan menarik dan mudah dipahami.
b. Narasumber yang kompeten dan komunikatif.
c. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta.
d. Adanya inovasi Sanger Ureung Aceh dan Podcast Berbisik BPOM Aceh.
e. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan

Makanan, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini adalah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa risiko yang diidentifikasi yaitu pemberitaan terkait Kinerja KIE Obat dan makanan di berbagai media cetak/online, elektronik dan media sosial berkonotasi negatif. Penyebab resikonya adalah media tidak mendapatkan sumber informasi yang valid sehingga berdampak kepercayaan publik terhadap Balai Besar POM di Banda Aceh menurun dengan level risiko inheren 10. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Menyebarluaskan informasi strategis BPOM kepada media dan masyarakat serta lebih terbuka.
2. Ragam Media KIE yang disampaikan dalam tools penilaian terlalu banyak atribut Pengendalian berupa Laporan Tingkat Efektifitas KIE per triwulan.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 7. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 60.Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100	**Baik**

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah.

4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 61.Bobot Progres Tahapan Program Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi (%)	% Capaian
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25 %	Jan - April	25 %	100 %
Sosialisasi Keamanan Pangan	20 %	Maret - Mei	20 %	100 %
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25 %	Maret - Mei	25 %	100 %
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25 %	Juni - Juli	25 %	100 %
Pengawalan	5 %	Feb - Des	5 %	100 %
Total Skor	**100 %**			

Pada tahun 2025 program PJAS ini telah masuk dalam tagging tematik Anggaran Responsif Gender (PUG). Pada tahun 2025 realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 100% dengan kategori **"Baik".**

Jumlah target sekolah pada awal tahun 10 sekolah namun realisasi pelaksanaan hanya 5 sekolah, karena adanya efisiensi berupa sebagian pemblokiran anggaran kegiatan. Hal ini telah disampaikan melalui surat justifikasi kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dengan nomor surat B-PM.02.04.1A.12.25.1459 tanggal 30 Desember 2025. Dimana anggaran yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang tersedia setelah pemblokiran anggaran hanya mencukupi untuk intervensi di 5 sekolah.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 35.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

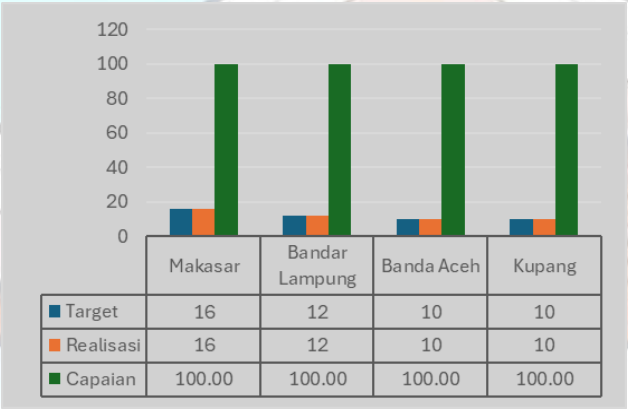
Tabel 62.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	10	83.33	**Akan Tercapai**

Realisasi jumlah sekolah yang akan diintervensi untuk melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025 sebesar 10 sekolah dengan kategori “Akan Tercapai” dan belum mencapai target Renstra tahun 2029.

Target jumlah sekolah yang akan diintervensi untuk melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 sebanyak 5 (lima) sekolah dengan lingkup SD dan SMP di wilayah Kota Banda Aceh, yaitu SDN 1 Banda Aceh, SDN 51 Banda Aceh, SDN 58 Banda Aceh, SMPN 10 Banda Aceh dan SMP Swasta Bhayangkari Banda Aceh. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan perubahan target jumlah sekolah yang diintervensi yang semula 10 (sepuluh) sekolah menjadi 5 (lima) sekolah dan dilaksanakan di dalam Kota Banda Aceh. Target ini tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW IV) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 36.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan grafik di samping, bahwa realisasi jumlah sekolah yang akan diintervensi untuk melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 untuk Balai Besar POM Bandar Lampung (12), Balai Besar POM di Banda Aceh (10), Balai Besar POM di Makassar (16) dan Balai Besar POM di Kupang (10) dengan nilai capaian sama yaitu 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pihak Sekolah

Adanya komitmen kuat dari kepala sekolah dan jajaran pendidik menjadi fondasi utama keberhasilan. Sekolah secara aktif mendukung penerapan pembudayaan keamanan pangan melalui kebijakan internal, pengaturan kantin, serta pengawasan jajanan di lingkungan sekolah.

2. Pendampingan dan Pembinaan Berkelanjutan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Pendampingan teknis dan edukatif yang dilakukan secara konsisten oleh Balai Besar POM di Banda Aceh meningkatkan pemahaman sekolah mengenai prinsip keamanan

pangan. Pembinaan yang berkelanjutan memudahkan sekolah dalam memenuhi indikator pembudayaan keamanan pangan secara bertahap dan terukur.

3. Sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan

Koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Banda Aceh, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta komite sekolah memperkuat implementasi program dan memastikan keberlanjutan kegiatan di sekolah.

4. Integrasi Keamanan Pangan dalam Kegiatan Sekolah

Keamanan pangan diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran, UKS, kantin sehat, dan aktivitas ekstrakurikuler. Integrasi ini mendorong terbentuknya kebiasaan dan budaya pangan aman di lingkungan sekolah.

5. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kantin dan Pedagang

Pelatihan dan pembinaan kepada pengelola kantin serta pedagang jajanan sekolah meningkatkan kepatuhan terhadap standar *higiene* dan sanitasi pangan, sehingga pangan yang tersedia di sekolah lebih aman untuk dikonsumsi.

6. Partisipasi Aktif Siswa dan Warga Sekolah

Keterlibatan siswa sebagai agen perubahan, melalui edukasi dan praktik langsung, mendorong internalisasi perilaku memilih pangan aman. Dukungan guru, tenaga kependidikan, dan orang tua memperkuat keberhasilan pembudayaan ini.

7. Monitoring dan Evaluasi yang Konsisten

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan sekolah melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek yang belum memenuhi standar, sehingga pelaksanaan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan optimal.

f. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

Melibatkan Dinas Pendidikan dan DP3AKB dalam pengawalan pembudayaan keamanan pangan pada sekolah binaan ramah anak dan sekolah adiwiyata.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 63.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	35.017.000	35.016.010	100	100	**Efisien**

Efisiensi anggaran pada indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dicapai melalui optimalisasi perencanaan, pemilihan sasaran prioritas, dan integrasi pelaksanaan kegiatan. Pembudayaan keamanan pangan di sekolah dilaksanakan dengan memanfaatkan pendekatan edukatif berjenjang, pemanfaatan media KIE yang telah tersedia, serta sinergi dengan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait. Strategi ini memungkinkan perluasan cakupan sekolah sasaran dan pencapaian target indikator secara optimal dengan realisasi anggaran yang efisien, tanpa mengurangi kualitas pembinaan dan keberlanjutan penerapan budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah.

h. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Melaksanakan program Sekolah sinergi dengan lintas sektor terkait, yang beririsan dengan program Desa dan Pasar.
2. Sinergi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh (Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan DP3AKB) dalam mengawal Program Prioritas Nasional berjalan sesuai tahapan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa risiko yang diidentifikasi yaitu sekolah yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program PJAS. Penyebab resikonya adalah pergantian atau mutasi kepala sekolah dan guru sebagai penanggungjawab kegiatan sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PJAS tidak berjalan dengan level risiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah. Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Tim Keamanan Sekolah
2. Laporan monitoring sekolah

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

19. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 64.Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100	**Baik**

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa

berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrase dengan program lain).

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

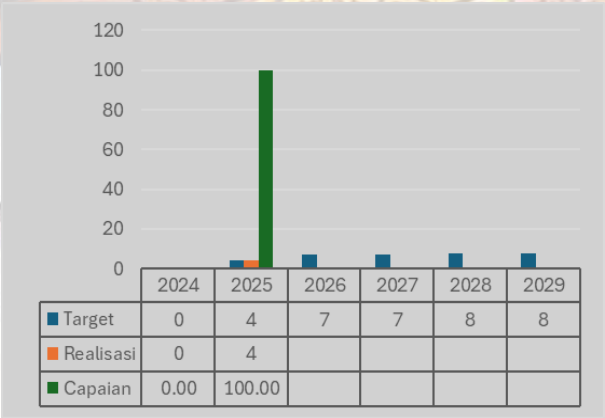
Tabel 65.Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi	% Capaian
Advokasi	25%	Februari – April	25 %	100 %
Pelatihan kader	25%	Maret-April	25 %	100 %
Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni	20 %	100 %
Monev	20%	Juli	20 %	100 %
Pengawalan	10%	Februari – November	10 %	100 %
Total Skor	**100 %**			

Jumlah target desa pada awal tahun 2025 semula 4 desa namun realisasi pelaksanaan hanya 1 desa, tidak dapat tercapai sesuai dengan target karena adanya efisiensi berupa pemblokiran anggaran kegiatan. Hal ini telah disampaikan melalui surat justifikasi kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dengan nomor surat B-PM.02.04.1A.12.25.1459 tanggal 30

Desember 2025. Dimana anggaran yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang tersedia setelah pemblokiran anggaran hanya mencukupi untuk intervensi di 1 desa.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 37.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 66.Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	8	4	50.00	**Perlu Upaya Keras**

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025 yaitu (4 desa) dengan kategori “Perlu upaya keras” dan belum mencapai target Renstra tahun 2029.

Target jumlah desa pangan aman yang akan diintervensi tahun 2025 sebanyak 1 (satu) desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kota Banda Aceh, yaitu Desa Alue Naga Banda Aceh. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan perubahan target jumlah sekolah yang diintervensi yang semula 4 (empat) desa menjadi 1 (satu) desa dan dilaksanakan di dalam Kota Banda Aceh. Target ini tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW IV) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 38.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan grafik di atas, bahwa realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2025 untuk Balai Besar POM Bandar Lampung (5), Balai Besar POM di Banda Aceh (4), Balai Besar POM di Makassar (4) dan Balai Besar POM di Kupang (4) dengan nilai capaian sama yaitu 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh:

1. Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah

Adanya komitmen kuat dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, termasuk dukungan kebijakan serta penganggaran, menjadi faktor utama keberhasilan. Pemerintah daerah secara aktif mendorong desa untuk berpartisipasi dan memenuhi indikator Desa Pangan Aman.

2. Pendampingan Intensif dan Berkelanjutan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan pendampingan teknis secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, pemenuhan indikator, hingga evaluasi. Pendampingan ini membantu desa memahami standar keamanan pangan dan menyelesaikan kendala di lapangan secara tepat sasaran.

3. Sinergi Lintas Sektor di Tingkat Daerah

Terbangunnya koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Banda Aceh dengan perangkat daerah terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, DPMG, TP PKK, dan aparat desa) memperkuat pelaksanaan program dan memastikan peran masing-masing pihak berjalan optimal.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa

Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur desa, kader kesehatan, dan pelaku usaha pangan desa meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap prinsip keamanan pangan, sehingga penerapan di lapangan berjalan lebih efektif.

5. Penerimaan dan Partisipasi Aktif Masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan perilaku pangan aman, termasuk pengelolaan pangan rumah tangga dan jajanan, berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan desa mencapai status Desa Pangan Aman.

6. Integrasi dengan Program Pembangunan Desa

Program Desa Pangan Aman diintegrasikan dengan kegiatan desa lainnya seperti Posyandu, UKS, dan pemberdayaan UMKM pangan. Integrasi ini membuat program lebih berkelanjutan dan tidak berjalan secara parsial.

7. Monitoring dan Evaluasi yang Terstruktur

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap kekurangan dan percepatan tindak lanjut perbaikan, sehingga capaian Desa Pangan Aman dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan Loka POM Aceh Selatan dalam melaksanakan pengawalan desa di 3 Kabupaten/Kota (Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil).
2. Berpartisipasi dengan Posyandu Desa terutama penyiapan PMT posyandu.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 67.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	83.926.000	83.829.573	99.89	100	**Efisien**

Efisiensi anggaran pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman dicapai melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya yang terencana dan efektif. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan pendekatan terintegrasi, pemanfaatan media KIE yang tersedia, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan lintas sektor. Strategi tersebut mendukung pencapaian target indikator secara optimal dengan realisasi anggaran yang proporsional, tanpa mengurangi kualitas implementasi program dan dampaknya terhadap peningkatan kesadaran keamanan pangan di tingkat desa.

h. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

Melaksanakan program Desa sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN, DP3AKB, Dinas Kesehatan, dan Bappeda), yang beririsan dengan program Sekolah dan Pasar terkait Penerapan Keamanan Pangan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program Desa Pangan Aman dapat berjalan dan desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program Desa Pangan Aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa. Dengan demikian, semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu Desa yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Penyebab resikonya adalah Desa tidak menjalankan Rencana aksi dan program berkelanjutan yang telah disusun bersama saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi sehingga berdampak Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Membentuk Tim Keamanan Pangan Desa.

2. Membentuk Kader Keamanan Pangan Desa.

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Tim Keamanan Pangan Desa.

2. SK Kader Keamanan Pangan Desa.

3. Laporan Program Desa Pangan Aman.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 68.Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100	**Baik**

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pasar yang

diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

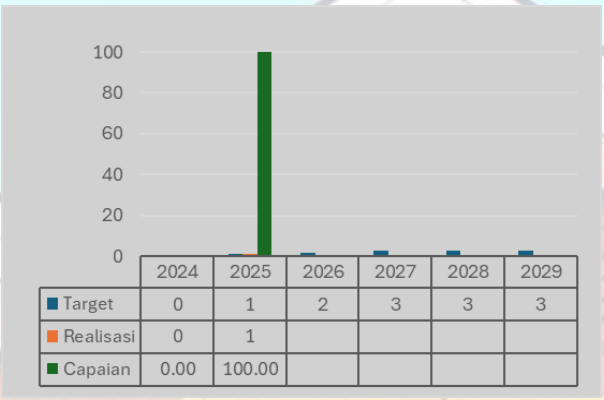
Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Tabel 69.Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi	% Capaian
Forum advokasi Komitmen Pemda dan lintas sektor pasar	25 %	Jan - April	25 %	100 %
Bimtek dan Penyuluhan komunitas pasar	25 %	Maret - Juni	25 %	100 %
Sosialisasi Keamanan pangan kepada komunitas pasar	20%	Maret - Juni	20%	100%
Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi	20%	Mei - Juni	20%	100%
Pengawalan	10 %	Februari - Juli	10 %	100 %
Total Skor	**100 %**			

Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang akan diintervensi tahun 2025 sebanyak 1 (satu) pasar di wilayah Kota Banda Aceh, yaitu Pasar Seutui Banda Aceh.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 39.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan Indikator kinerja yang baru di tahun 2025 sehingga belum memiliki pembanding di tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 70.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	3	1	33.33	**Perlu Upaya Keras**

Realisasi Jumlah Pasar Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025 yaitu (1 pasar) dengan kategori "Perlu upaya keras" dan belum mencapai target Renstra tahun 2029. Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang akan diintervensi tahun 2025 sebanyak 1 (satu) pasar di wilayah Kota Banda Aceh, yaitu Pasar Seutui Banda Aceh.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 40.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan grafik di atas, bahwa realisasi program Pasar Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 untuk Balai Besar POM Bandar Lampung (1), Balai Besar POM di Banda Aceh (1), Balai Besar POM di Makasar (1) dan Balai Besar POM di Kupang (1) dengan nilai capaian sama yaitu 100%.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis penyebab keberhasilan program Pasar Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pengelola Pasar dan Pemerintah Daerah

Dukungan aktif dari pengelola pasar serta pemerintah daerah, baik melalui kebijakan, fasilitasi sarana prasarana, maupun penguatan kelembagaan pasar, menjadi faktor penting dalam mewujudkan pasar yang aman dari pangan berisiko.

2. Pendekatan Berbasis Komunitas yang Partisipatif

Pelibatan komunitas pasar—pedagang, pengelola, asosiasi pedagang, dan konsumen—mendorong rasa kepemilikan terhadap program. Pendekatan ini meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap prinsip keamanan pangan karena program dijalankan bersama, bukan semata pengawasan eksternal.

3. Pendampingan Intensif oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pendampingan teknis secara berkelanjutan melalui bimbingan, pembinaan, dan pengawasan. Pendampingan ini membantu pasar memahami dan memenuhi indikator Pasar Aman Berbasis Komunitas secara bertahap.

4. Peningkatan Kapasitas Pedagang dan Kader Pasar

Pelatihan dan edukasi kepada pedagang pangan segar, pangan olahan, serta kader keamanan pangan pasar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan higiene dan sanitasi pangan.

5. Sinergi Lintas Sektor di Tingkat Daerah

Koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Banda Aceh, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, serta pihak pengelola pasar memperkuat pelaksanaan program dan memastikan dukungan berkelanjutan.

6. Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Pelaksanaan KIE secara masif dan berkelanjutan di lingkungan pasar meningkatkan kesadaran pedagang dan konsumen akan pentingnya memilih dan menjual pangan yang aman.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut yang Konsisten

Monitoring dan evaluasi rutin memungkinkan identifikasi dini terhadap permasalahan di lapangan serta percepatan tindak lanjut perbaikan, sehingga capaian Pasar Aman Berbasis Komunitas dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan UPTD Pasar dalam rangka pengawalan keamanan pangan pasar.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 71.Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	22.708.000	22.707.900	100	100	**Efisien**

Efisiensi anggaran pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman dicapai melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya yang terencana, terfokus, dan efektif. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan media KIE yang tersedia, serta kolaborasi dengan pengelola pasar dan lintas sektor terkait. Strategi tersebut mendukung pencapaian target indikator secara optimal dengan realisasi anggaran yang proporsional, tanpa mengurangi kualitas pembinaan dan keberlanjutan penerapan praktik keamanan pangan di pasar.

h. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

Melaksanakan program Pasar sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas Perindustrian Perdagangan, UPTD Pasar, Dinas Kesehatan, Bappeda dan dinas LIngkungan Hidup) yang beririsan dengan program Sekolah dan Desa.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan dan tahunan, dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Diharapkan para pedagang pada pasar yang intervensi akan terus menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, dan menjaga Pangan terbebas dari Bahan Berbahaya yang dilarang pada pangan.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu masih ditemukan bahan berbahaya pada pangan yang dijual pada pasar yang diintervensi. Penyebab resikonya adalah tindak lanjut temuan dari Balai Besar POM di Banda Aceh kepada Pemerintah Daerah/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat belum optimal sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PPABK tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Fasilitator Pasar Aman.

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Fasilitator Pasar Aman.
2. Laporan Monev Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Sasaran Kegiatan ini didukung 1 (satu) indikator kinerja. Pada tahun 2025 target indikator ini sudah memenuhi target.

Indikator Kinerja

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 72.Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19.40	19.40	100	**Baik**

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sudah tercapai seluruh tahapan pendampingan dan fasilitasi dengan tujuan akhir sarana UMKM memperoleh sertifikat IP CPPOB untuk sarana pangan olahan, SPA CPKB untuk sarana kosmetik dan SPA CPOBAB untuk sarana Obat Bahan Alam, sehingga capaian sampai pada TW IV sudah memenuhi target. Untuk program kegiatan pendampingan pelaku usaha ini juga sudah dilakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan jadwal terpusat. Dengan demikian, capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan berada pada kriteria adalah 100% (baik).

Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan perhitungan pada IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB menjadi IKU 18.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB. Pada perubahan ini terdapat cara perhitungan yang berbeda dengan lebih detail pada capaian perhitungan per UMKM pendampingan. Hal ini sesuai dengan Surat Nota Dinas dari Sestama Nomor: PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025. Defenisi Operasional Rincian Output UPT Balai/ Balai Besar masih sama dengan pada tahapan dan pembobotan seperti di awal program, sebagai berikut:

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2) Obat Bahan Alam

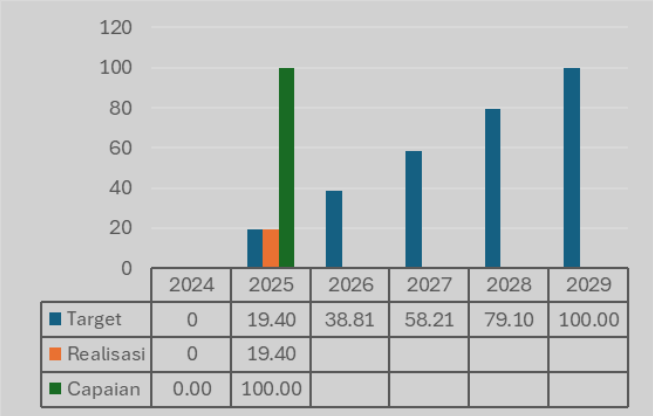
No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi II

3) Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi II

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Perhitungan target tahunan (B12):** ((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100% **Perhitungan target B1 - B11:** ((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100% **Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	19.40	38.81	58.21	79.10	100.00
Realisasi	0	19.40				
Capaian	0.00	100.00				

Grafik 41.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Capaian kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat di tahun 2024 sebesar 100%, dan capaian di tahun 2025 ini juga adalah 100%. Target pendampingan untuk pelaku usaha ini tercapai dengan predikat baik. Jumlah pelaku UMKM yang didampingi baik itu pelaku usaha Pangan, OBA, dan Kosmetik tahun 2025 cukup banyak tahun 2025, target pendampingan sebanyak 13 tetapi jumlah yang didampingi mencapai 21 pelaku usaha, yang dilaporkan pendampingan yang sesuai juknis ada 13, sementara sisanya menjadi pendampingan dalam Inovasi Korporasi. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki inovasi pendampingan pelaku usaha yang disebut dengan Inovasi Korporasi sehingga untuk pendampingan ini sudah menjadi konsentrasi kami dalam rangka mendukung dan meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh. Realisasi kinerja selama 5 tahun ini kategori baik, walaupun terjadi pemotongan anggaran yang sangat signifikan dalam pendampingan pelaku usaha ini yang cukup menyulitkan staf dalam pendampingan tetapi fungsi sertifikasi BBPOM di Banda Aceh mencari cara solusi

atas pemotongan anggaran ini dengan melakukan kegiatan secara daring dan lebih intensif dalam berkomunikasi kepada pelaku usaha sehingga pendampingan tidak terkendala. Kondisi ini memang dibutuhkan usaha dan effort yang luar biasa dari tim sertifikasi. Berhasilnya capaian ini didukung oleh laboratorium yang terakreditasi yang membantu pelaku usaha dalam melakukan pengujian sampel UMKM, dan BBPOM di Banda Aceh juga memberikan pengujian gratis dan diskon sesuai ketentuannya, sehingga sangat meringankan pelaku usaha yang terkendala di permodalan.

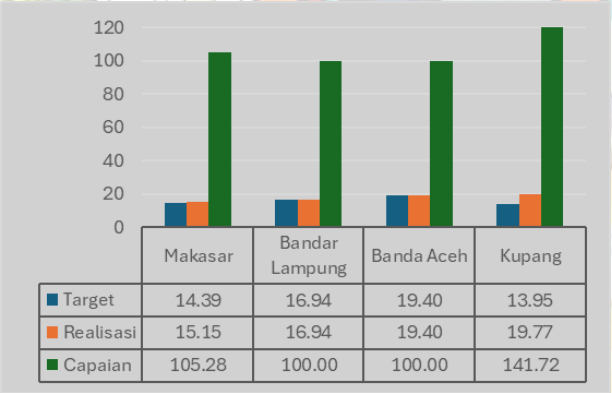
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 73.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100	19.40	19.40	**Perlu Upaya Keras**

Dilihat dari tabel di atas tahapan capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 19,40% dengan kategori Perlu Upaya Keras dari target 100% di target 5 tahunan yaitu 100%. Target ini tidak bisa dibandingkan dengan target 5 tahun ke depan, karena memang akan secara bertahap nilai target ini diperoleh yang akan dihitung secara kumulatif. Target 100% ini optimis akan tercapai di tahun 2029 karena target tahunan dicapai 100%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 42.Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis

Capaian Kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan unit kerja lain seperti Makasar, Bandar lampung dan Kupang maka capaian kinerja Banda Aceh lebih rendah dari Kupang dan Makassar yang berada

di atas 100%, dan sama dengan Bandar Lampung yaitu 100%. Banda Aceh jika dilihat dari target mencapai 100% namun sebenarnya capaian jauh melebihi dari target tersebut cuma capaian ini dimasukkan sebagai capaian Inovasi Korporasi. Jadi capaian Banda Aceh masih dalam kategori baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan layanan pendampingan terhadap 13 UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar dimana 11 UMKM pangan, dan masing masing 1 UMKM untuk Obat Bahan Alam (OBA) dan 1 UMKM Kosmetik. Capaian selama tahun 2025 telah memenuhi memenuhi standar pada UMKM Pangan, OBA dan Kosmetik sebesar 100%. Tahapan pendampingan telah dilakukan dengan baik melalui tahapan sesuai juknis untuk UMKM pangan olahan terdiri dari Sosialisasi/KIE Keamanan Obat dan Makanan, Penetapan target UMKM Pangan Olahan, Bimtek CPPOB dan Fasilitasi pendampingan; sampai dengan sertifikasi sudah tercapai.

Analisa penyebab keberhasilan capaian ini disebabkan komitmen yang tinggi petugas pelaksana yang secara aktif melakukan koordinasi dan pendampingan pelaku usaha, walaupun tahapan pendampingan di TW I sebelumnya belum tercapai dapat dikejar di TW II, seperti pelaksanaan bimtek CPKB, CPOBAB dapat dilaksanakan di April 2025 secara daring karena adanya pemblokiran anggaran, sementara bimtek CPPOB terlaksana di Mei 2025 secara hybrid dengan sharing anggaran antara BBPOM di Banda Aceh, dengan Orang Tua Angkat (OTA) serta pelaku usaha. Khusus untuk pendampingan UMKM Pangan dibantu fasilitasi oleh Orang Tua Asuh (OTA) yang dikoordinir oleh Direktorat PMPU PO yang direncanakan dilaksanakan pada Mei 2025, dengan adanya sharing anggaran ini memberikan dampak yang bagus kepada pelaku usaha, dimana dapat meningkatkan komitmen dan keseriusan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi sarananya. Strategi untuk dapat terus meningkatkan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OBA dan kosmetik yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan proses registrasi pada sistem terintegrasi.
b. Pembinaan dan pendampingan melalui fasilitasi pelaku usaha baik secara langsung dengan tatap muka ataupun tidak langsung melalui telepon dan group whatsapp.
c. Pendampingan secara berkesinambungan dalam desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan.
d. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh

   Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Proses perjalanan organisasi yang dinamis juga menuntut adanya rotasi pegawai sehingga pertukaran posisi petugas di sertifikasi juga berubah oleh karena itu maka pelatihan ini juga harus diikuti setiap tahunnya untuk mengupgrade ilmu pengetahuan yang diikuti perubahan peraturan yang sangat dinamis juga. Pelatihan yang diperlukan berkaitan dengan sertifikasi produk obat dan makanan dalam hal ini pangan, kosmetik dan Obat Bahan Alam dengan menjadi fasilitator UMKM pangan, OBA dan Kosmetik, dan pelatihan untuk auditor distribusi Obat dan Makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program - program yang telah dilakukan selama tahun 2025 untuk mencapai realisasi maksimal pada indikator kinerja ini antara lain:

a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan Fasilitator CPOTB dan CPKB, pelatihan Fasilitator IP CPPOB serta pelatihan auditor junior CDOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait perizinan di OSS sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui OSS RBS yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing

masing. Selain itu dengan adanya kolaborasi dengan instansi terkait yang sama-sama memiliki pembinaan kepada pelaku usaha seperti dinas kesehatan, dinas perindustrian dengan BPOM Aceh saling memberi informasi pelaku usaha yang menjadi binaan instansi terkait.

c. Kolaborasi dengan lintas sektor seperti perbankan, melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dari sisi hilirisasi produk, dimana pelaku usaha dapat meminjam modal dan mendapat pelatihan terkait bagaimana melakukan promosi produk kepada masyarakat melalui media sosial, media elektronik, dan lain lain.

d. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OBA) sesuai target sarana produksi OBA, Kosmetik dan Pangan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 74.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	33.000.000	32.806.298	99.41	100	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Pada tahun 2025 telah dilakukan beberapa solusi atas pemblokiran anggaran seperti permintaan dana dari orang tua asuh (OTA) melalui PIC pusat dan Banda Aceh memperoleh bantuan pendanaan pelaksanaan Bimtek dan juga narasumber langsung dengan pelaku usaha sehinga pelaku usaha Aceh sangat termotivasi.

h. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja di Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1) Melakukan pembinaan kinerja antara ketua tim dan anggota tim. Pembinaan ini dimaksudkan mencari solusi jika ada permasalahan terkait kinerja petugas di lapangan. Terjadi komunikasi dua arah diskusi solusi atas permasalah yang terjadi. Pembinaan ini juga dapat meningkatkan hubungan humanis sesama petugas.
2) Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan Fasilitator CPOTB dan CPKB, pelatihan Fasilitator IP CPPOB serta pelatihan auditor junior CDOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
3) Kolaborasi dengan lintas sektor dan SKPD pemerintah Aceh seperti perizinan di OSS sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui OSS RBA. Adanya kolaborasi dengan instansi terkait yang sama-sama memiliki pembinaan kepada pelaku usaha seperti dinas kesehatan, dinas perindustrian, dinas koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, dan lain lain.
4) Kolaborasi dengan lintas sektor seperti perbankan, melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dari sisi hilirisasi produk, dimana pelaku usaha dapat meminjam modal dan mendapat pelatihan terkait bagaimana melakukan promosi produk kepada masyarakat melalui media sosial, media elektronik, dan lain lain.

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Interim triwulan IV dapat digunakan sebagai laporan pada pelaksanaan layanan kepada masyarakat dalam hal pendampingan kepada pelaku usaha salah satu inovasi pelayan publik. Selain itu juga menjadi salah bukti komitmen UPT Balai Besar POM di Banda Aceh dalam hal memenuhi standar pelayanan sehingga apa yang dibahas pada saat pelaksanaan Forum Komunitas Publik terverifikasi dengan baik yang merupakan komitmen nyata dari petugas sertifikasi.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait pendampingan UMKM Pangan, OBA dan Kosmetik seperti yang terdapat pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu:

1. Petugas menerima gratifikasi atas layanan yang diberikan pada, risiko ini dapat diatasi dengan menolak gratifikasi yang diberikan secara langsung dan memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa tidak dibenarkan memberikan gratifikasi kepada petugas dalam hal menjaga integritas dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada konsumen, selain itu juga menempelkan stiker anti gratifikasi di sarana produksi.
2. Pelaku usaha kosmetik dan OBA tidak dapat menyelesaikan CAPA audit sertifikasi SPA CPKB/SPA CPOTB dikarenakan:
    1. biaya renovasi sarana atas rekomendasi petugas, sampai saat ini belum ditemukan risiko terkait jadi tidak mengganggu proses pendampingan kepada pelaku usaha.
    2. pelaku usaha belum memahami cara pembuatan dokumen mutu, terkait risiko ini juga masih berjalan dengan baik sehingga risiko ini masih bisa diatasi.
    3. Lay out sarana produksi belum sesuai standar, hal ini disebabkan pelaku usaha tidak memiliki biaya untuk renovasi sarana produksi sesuai rekomendasi. Untuk risiko ini di atasi dengan melakukan koordinasi dan audiensi ke lembaga perbankan terkait bantuan pembiayaan, sehingga bisa dibantu permodalan dengan kredit di bank yang sesuai untuk pelaku usaha dalam hal ini kami menjalin komunikasi dengan BSI UMK center dan BI.
    4. Pelaku usaha pangan tidak memenuhi persyaratan nilai minimal pada form penilaian mandiri, hal ini disebabkan oleh Pelaku usaha tidak dapat menyusun dokumen mutu dengan benar. Risiko ini sampai saat ini masih bisa di atas dengan melakukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha pangan secara intensif dengan penunjukan fasilitator pendamping.
    5. Pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan permohonan sertifikasi SPA CPKB/CPOTB, hal ini dikarenakan pelaku usaha belum memiliki tenaga kefarmasian sebagai penanggung jawab, besarnya gaji yang harus disiapkan dan ketersediaan ini menjadi penyebab risiko ini, namun kami dapat atasi dengan

Memfasilitasi pelaku usaha untuk berkoordinasi dengan Asosiasi Profesi Tenaga Kefarmasian terkait (IAI/PAFI).

6. Petugas tidak dapat memproses pengajuan di e-sertifikasi karena aplikasi sertifikasi mengalami gangguan sehingga dapat menjadi kendala pada proses pengajuan sertifikasi. Untuk risiko ini juga masih dapat diatasi karena aplikasi masih berjalan normal secara umum, sehingga tidak menjadi kendala dalam proses pendampingan perizinan kepada pelaku usaha.
7. Pemalsuan laporan hasil sertifikasi sarana produksi pangan olahan/OT/Kosmetik, terkait risiko ini belum pernah ditemukan namun kami tetap antisipasi dengan Supervisi dari ketua tim Penandatanganan pakta Integritas oleh semua petugas inspeksi mensosialisasikan ke pelaku usaha tentang saluran pengaduan gratifikasi/penyalahgunaan wewenang, memberikan hukuman disiplin kepada petugas yang melakukan pelanggaran integritas
8. UMKM membutuhkan waktu yang lama untuk sertifikasi CPPOB, CPKB dan CPOTB, terkait risiko ini dapat disebabkan oleh Pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM pada saat proses sertifikasi tidak optimal sehingga risiko ini kami antisipasi dengan pendampingan yang lebih insentif terhadap pelaku UMKM produksi Pangan olahan, OT dan Kosmetik dan merekrut Fasilitator UMK untuk pendampingan door to door". Terkait fasilitator ini kami mengajukan dan mendapatkan 3 orang dari magang hub sehingga sangat terbantu sekali dalam pendampingan langsung ke pelaku usaha.

Sasaran Kegiatan 5
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 5 didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dan sudah memenuhi target tahun 2025.

Indikator Kinerja

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 75.Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	88.75	95.95	**Baik**

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

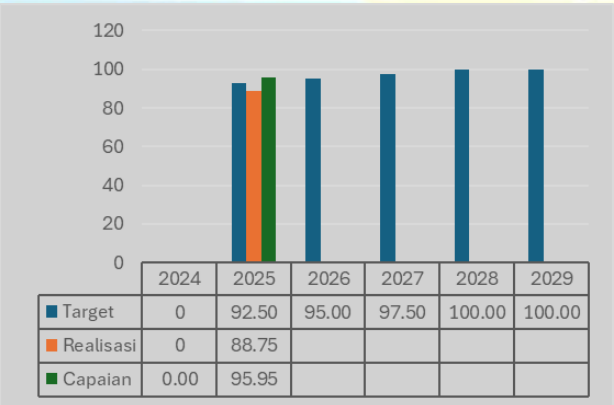
[(Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara] x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025 adalah 88,75 % dari target 92,50 %. Realisasi tersebut dihitung dari perkara di tahun berjalan sebanyak 3 (tiga) perkara yang sudah Tahap II dan 1 (satu) perkara pada tahap 1 (pengiriman berkas ke Kejaksaan). Sehingga capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 95.55 % dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 43.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

IK ini merupakan IK baru pada renstra 2025-2029, sehingga perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya baru dapat dilakukan untuk kinerja tahun 2026. Dari data dapat diketahui bahwa target untuk IK ini meningkat setiap tahun hingga akhir renstra 2029.

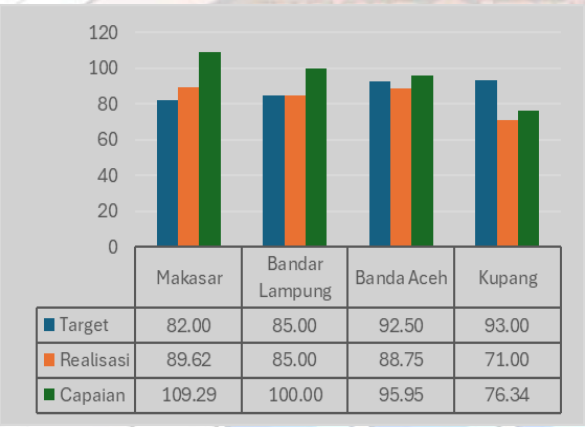
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 76.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	88.75	88.75	**Akan Tercapai**

Dengan kategori “akan tercapai” mengindikasikan, bahwa proses masih *on the track* untuk menuju target akhir Renstra sampai tahun 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Tabel 77.Realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan realisasi dan target dari empat UPT Badan POM, UPT Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki target tertinggi kedua setelah Balai Besar POM di Kupang dengan selisih target sebesar 0,75 %. Sedangkan pada pada tingkat ketiga tertinggi adalah UPT Bandar Lampung sebesar 85,50 % dengan selisih target sebesar 6,75 %. Dengan gap target tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh masih mampu merealisasikan kinerja sebesar 88,75 % yang berarti lebih rendah 0.87 % dari realisasi BPOM Makassar (target 82,00%).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2025, Kelompok Fungsi Penindakan Balai Besar POM di Banda Aceh telah menyelesaikan 3 (tiga) perkara sampai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2), 1 (satu) perkara sampai penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (Tahap I), dan 1 (satu) perkara carry over diterbitkan Penghentian Penyidikan. Sehingga capaian kinerja sebesar 95,95 % mendapatkan kriteria kinerja “Baik”. Terdapat beberapa faktor yang menunjang pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1) Perencanaan berbasis anggaran

   Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menjadi kendala bagi Kelompok Fungsi Penindakan melakukan kegiatan penegakkan hukum, terutama

di wilayah jauh dari Kantor. Sehingga, disiasati dengan mengungkap perkara di wilayah terjangkau disesuaikan dengan anggaran yang ada.

2) Koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam proses penindakan, khususnya saat proses penangkapan dan penahanan tersangka. Dengan adanya dukungan dari pihak Kepolisian baik Resor maupun Polda, proses penangkapan sampai melakukan penahanan terhadap tersangka dapat berjalan dengan baik.
3) Koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam penyelesaian berkas perkara. Penyidik melakukan komunikasi intensif dengan Kejaksaan, sehingga penyidik dapat segera menyelesaikan perkara.
4) Pelonggaran terhadap anggaran kegiatan.

   Pada Triwulan II tahun 2025, pengetatan anggaran pada Triwulan I telah diatur kembali sehingga beberapa mata anggaran terkait kegiatan Penindakan dibuka kembali. Hal ini membuka ruang gerak bagi Kelompok Fungsi Penindakan untuk mengungkap dan menyelesaikan perkara yang telah ditargetkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Empat perkara yang berhasil diungkap oleh BPOM Aceh terdiri dari 2 (dua) perkara peredaran kosmetika ilegal, 1 (satu) perkara peredaran Obat-obat Tertentu (OOT) dan 1 (satu) perkara peredaran Obat Bahan Alam (OBA) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Keberhasilan pengungkapan keempat perkara tersebut didukung oleh beberapa hal, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dan saluran pengaduan

   Partisipasi masyarakat yang didukung oleh saluran pengaduan yang mudah diakses, turut memberikan andil bagi keberhasilan BPOM Aceh mengungkap kasus-kasus pelanggaran dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Aceh pada tahun 2025.
2. Jejaring Intelijen Obat dan Makanan

   Pengungkapan kejahatan obat dan makanan juga diperoleh baik dari jejaring internal maupun dari eksternal BPOM.
3. Upaya Patroli Siber dan Profilling melalui sarana Daring

Kegiatan Patroli Siber maupun profilling memberikan informasi awal dari kejahatan obat dan makanan memberikan manfaat bagi petugas untuk melakukan kegiatan tindak lanjut di lapangan.

4. Kegiatan dan/atau operasi intelijen

Kegiatan dan/atau operasi intelijen dapat memberikan kepastian informasi terhadap target terduga pelaku tindak pidana obat dan makanan, sehingga dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan dalam proses penindakan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 78.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	473.984.000	471.847.500	99.55	95.95	**Tidak Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran tahun 2025. Hal ini disebabkan karena anggaran dialihkan untuk kepentingan penanggulangan bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Aceh pada akhir tahun 2025.

h. Upaya peningkatan kinerja

Berdasarkan nilai capaian indikator kinerja yang telah dicapai, sebesar 95,95 % dengan kategori baik, masih ada peluang untuk mencapai nilai optimal. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kinerja agar mencapai nilai optimum tersebut melalui upaya peningkatan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian baik dalam forum-forum formal maupun non formal, baik ditingkat bawah maupun di tingkat pimpinan.

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Dari capaian kinerja yang baik pada indikator keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal, dan selain itu Laporan juga dapat dimanfaatkan pihak eksternal dalam memantau kinerja penindakan.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Beberapa resiko kegiatan penyidikan yang dilakukan pada tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Petugas tidak menemukan barang bukti di TKP

   Pengelolaan terhadap risiko ini adalah dengan melakukan penahanan terhadap tersangka yang berpotensi akan melarikan diri.

2. Tersangka melarikan diri,

   Pengelolaan terhadap risiko ini adalah dengan memperkuat investigasi di lapangan maupun pemantauan akun media sosial milik terduga pelaku, hal ini dimaksudkan agar petugas mendapatkan timing yang tepat saat penindakan.

Sasaran Kegiatan 6
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Sasaran Kegiatan 6 dicapai dengan capian 100 dan kategori Baik.

Indikator Kinerja

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 79.Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

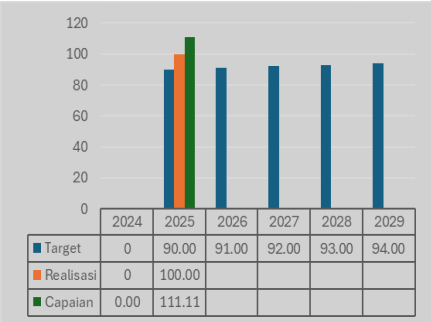
Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	100	111.11	**Tidak dapat disimpulkan**

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT yang terdiri dari:

1) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25%);
2) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun (50%);
3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT (25%).

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90.00% sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2025 sebesar 100.00% dengan berkategori "Tidak dapat disimpulkan".

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 44.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Belum dapat dibandingkan, karena indikator kinerja ini merupakan IK baru pada renstra 2025-2029, sehingga perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya baru dapat dilakukan untuk kinerja tahun 2026. Dari data dapat diketahui bahwa target untuk IK ini meningkat setiap tahun hingga akhir renstra 2029.

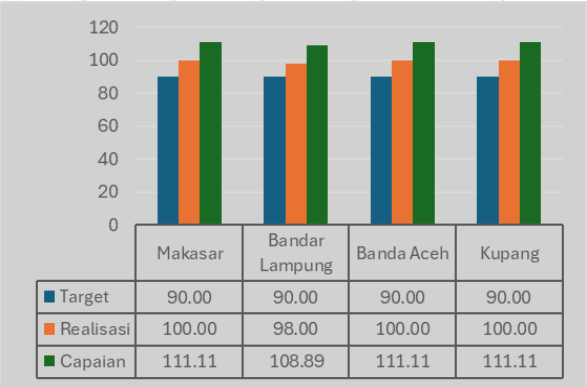
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 80.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94.00	100	106.38	**Tercapai/ Melampaui**

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 94,00%. Realisasi yang tercapai pada tahun 2025 sebesar 100,00 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas dibandingkan terhadap target tahunan adalah sebesar 106,38%. Dengan capaian tersebut, maka pada indikator kinerja ini, Balai Besar POM di Banda aceh sudah melampaui target Renstra.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	90.00	90.00	90.00	90.00
Realisasi	100.00	98.00	100.00	100.00
Capaian	111.11	108.89	111.11	111.11

Grafik 45.realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Pada tahun 2025, dari keempat UPT yang dibandingkan, rata-rata memiliki realisasi yang sama, yaitu sebesar 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir semua UPT yang dibandingkan memiliki kemampuan untuk memenuhi target, bahkan melampaui target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2025, capaian kinerja indikator Balai Besar POM di Banda Aceh sudah melampaui yaitu sebesar 100 % dari target sebesar 90%, dimana capaian pada tahun 2025 tersebut berasal dari laporan patroli siber sebanyak 397 tautan terindikasi melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan telah dilaporkan tepat waktu, kemudian dari 9 rekomendasi analisis dari Direktorat Cegah Tangkal telah dilakukan tindak lanjut semua, selain itu pada Semester II Tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dan mendapatkan nilai 100%. Pencapaian kinerja melampaui tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang cukup baik, sehingga tenggat waktu yang diberikan dapat diselesaikan

2. Menyepakati jumlah target dan deadline penyelesaian Operasi Siber dan Profiling.
3. Melaporkan secara rutin seluruh informasi yang mengandung unsur kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.
4. Membuat reminder batas waktu operasi dan pelaporan yang bertujuan agar tidak melewati tenggat waktu yang ditetapkan.
5. Adanya dukungan dari tim IT UPT dalam mendukung kelancaran kegiatan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Melakukan operasi siber dan profiling secara rutin sebelum batas waktunya serta Mengisi secara benar dan lengkap data hasil Operasi Siber dan Profiling.
2. Mengisi dengan benar dan lengkap data kerawanan yang ada dan dilaporkan tepat waktu.
3. Mengumpulkan data untuk penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan.
4. Memeriksa kembali daftar rekomendasi analisis dari Direktorat Cegah Tangkal, sehingga rekomendasi yang belum dilaksanakan dapat segera dilaksanakan. Dan rekomendasi yang sudah dilaksanakan, dapat dilengkapi data dukungnya.
5. Koordinasi dan komunikasi yang cepat dengan penanggung jawab dari Direktorat Cegah Tangkal dalam monitoring pelaporan, sehingga kekurangan data dapat segera diperbaiki sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 81.Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase laporan análisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	48.865.000	48.856.179	99.98	111.11	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sudah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025.

h. Upaya peningkatan kinerja

1. Melakukan operasi siber dan profiling secara rutin sebelum batas waktunya yang ditentukan
2. Membuat perencanaan dan mengumpulkan data sejak awal tahun untuk memudahkan penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan, sehingga didapatkan kualitas analisis kejahatan obat dan makanan yang sesuai dengan kriteria penilaian, selain itu analisis dapat disampaikan tepat waktu.
3. Melakukan monitoring secara rutin terhadap daftar rekomendasi analisis dari Direktorat Cegah Tangkal, serta melakukan koordinasi dengan PIC Dir. Cegah Tangkal, sehingga pemenuhan rekomendasi dapat dipenuhi secara benar.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dari capaian kinerja yang sudah melampaui pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk tahun-tahun mendatang, sehingga target-target interim selanjutnya dapat tercapai sesuai perencanaan.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Salah satu resiko yang menghambat pencapaian indikator kerja ini keterlambatan pelaporan hasil Patroli Siber, sehingga pengelolaan resikonya adalah monitoring pelaksanaannya dilakukan oleh ketua tim setiap tanggal 20 bulan bersangkutan.

Sasaran Kegiatan 7

Layanan Publik UPT yang Prima

Sasaran Kegiatan 7 didukung 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT dan telah memenuhi target tahun 2025.

Indikator Kinerja

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 82.Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53	**Sangat Baik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

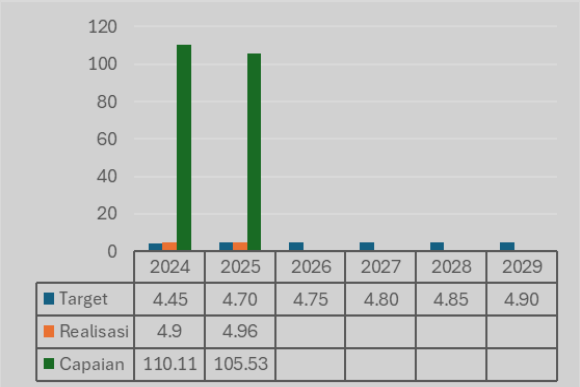
Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 2 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai hasil pembobotan formulir F02 dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori, yaitu:

Tabel 83.Kategori nilai Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 - 1.00	F	Gagal
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 - 2.00	D	Buruk
2.01 - 2.50	C-	Cukup (dengan catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
3.01 - 3.50	B-	Baik (dengan catatan)
3.51 - 4.00	B	Baik
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan unit kerja sehingga dapat melihat mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh akan diperoleh pada akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya



Grafik 46.Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian **Indeks Pelayanan Publik UPT** Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan pada periode tahun 2024–2025. Pada tahun 2024, nilai indeks tercatat sebesar **4,90** dengan target 4.45 dan meningkat

menjadi **4,96** dengan target 4.70 pada tahun 2025 dengan kategori **Pelayanan Prima**. Peningkatan sebesar **0,06 poin** ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan serta efektivitas langkah-langkah peningkatan kualitas layanan yang telah dilaksanakan.

Kenaikan nilai indeks tersebut didukung oleh penguatan penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pelayanan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian layanan turut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan yang dilakukan UPT telah berjalan secara konsisten dan terukur, sejalan dengan sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk mempertahankan kinerja pelayanan pada kategori **Pelayanan Prima** serta mendorong inovasi dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

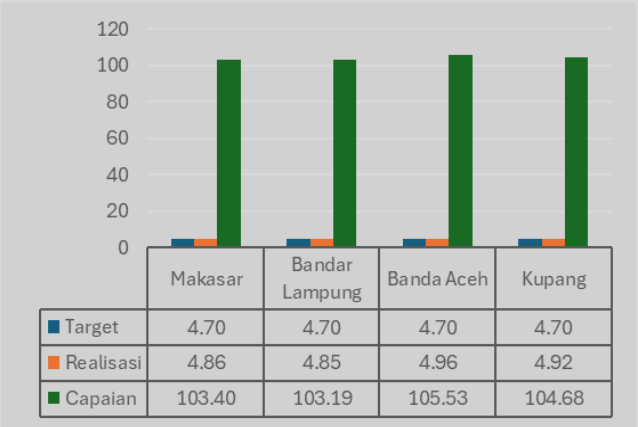
Tabel 84.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.90	4.96	101.22	**Tercapai/Melampaui**

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 yaitu 4.96 dengan kategori "Tercapai/Melampaui" dan mencapai target Renstra tahun 2029.

Dengan capaian ini, Balai Besar POM di Banda Aceh tetap terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu melengkapi data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data/informasi di SIPP.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



	Makasar	Bandar Lampung	Banda Aceh	Kupang
Target	4.70	4.70	4.70	4.70
Realisasi	4.86	4.85	4.96	4.92
Capaian	103.40	103.19	105.53	104.68

Grafik 47. realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan gambar di atas, realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 yang tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 4,96 (Pelayanan Prima) diikuti oleh Balai Besar POM di Kupang 4,92 (Pelayanan Prima), Balai Besar POM di Makasar 4,86 (Pelayanan Prima) dan Balai Besar POM di Bandar lampung 4,85 (Pelayanan Prima). Dari keempat balai yang dibandingkan seluruhnya telah melebihi target nasional (4,70). Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya dan meningkatkan pelayanan untuk dapat mempertahankan predikat pelayanan prima di tahun selanjutnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya peningkatan & penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhi seluruh aspek penilaian kinerja pelayanan publik (Nilai maksimal 5 untuk 6 aspek penilaian);
2) Hasil survei dari responden penerima layanan sangat memuaskan;
3) Inovasi pelayanan publik memberikan dampak maksimal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Peningkatan Aspek Profesionalisme SDM meliputi waktu pelayanan, kode etik, motivasi, penghargaan dan budaya pelayanan
2. Inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan

3. Capaian Pelayanan Prima

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 85.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik UPT	112.285.000	112.034.660	99.78	105.53	**Efisien**

Efisiensi anggaran pada pencapaian **Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP)** di Balai Besar POM di Banda Aceh tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kualitas layanan publik yang memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Pencapaian nilai IPP yang efisien karena mampu menghasilkan kualitas pelayanan publik yang optimal, responsif, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *value for money* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

h. Upaya peningkatan kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** Balai Besar POM di Banda Aceh secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya perbaikan yang berfokus pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diawali dengan penguatan **standar pelayanan** melalui peninjauan dan pemutakhiran SOP layanan agar selaras dengan ketentuan terbaru serta kebutuhan pengguna layanan.

Balai Besar POM di Banda Aceh juga meningkatkan **kompetensi dan integritas petugas layanan** melalui pembinaan internal, penguatan budaya pelayanan prima, serta peningkatan pemahaman terhadap prinsip transparansi, responsivitas, dan kepastian waktu layanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap layanan diberikan secara profesional, ramah, dan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Pemanfaatan **teknologi informasi dalam pelayanan publik** terus dioptimalkan, antara lain melalui pengembangan dan pemaksimalan layanan berbasis digital, penyediaan informasi layanan yang mudah diakses, serta pengelolaan sistem pengaduan masyarakat secara cepat dan terintegrasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses layanan, tetapi juga mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh secara rutin melaksanakan **survei kepuasan masyarakat** serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan. Hasil survei dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat capaian Indeks Pelayanan Publik.

Melalui sinergi antara penguatan regulasi internal, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta komitmen terhadap pelayanan prima, Balai Besar POM di Banda Aceh diharapkan mampu meningkatkan kinerja Indeks Pelayanan Publik secara berkelanjutan dan mendukung terwujudnya layanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

BADAN POM
SELAMAT DATANG KEPALA BADAN POM RI
DI BUMO SEURAMOE MEKKAH

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa risiko yang diidentifikasi yaitu pemecatan petugas pelayanan publik. Penyebab resikonya adalah Petugas pelayanan melanggar aturan/kriteria yang ditetapkan pada kontrak sehingga berdampak Pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh terganggu dengan level risiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membuat kontrak kerja yang berisi syarat dan aturan yang jelas. Atribut Pengendalian berupa Dokumen Kontrak kerja.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

25.Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 86.Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25	90.24	99.99	Baik

Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

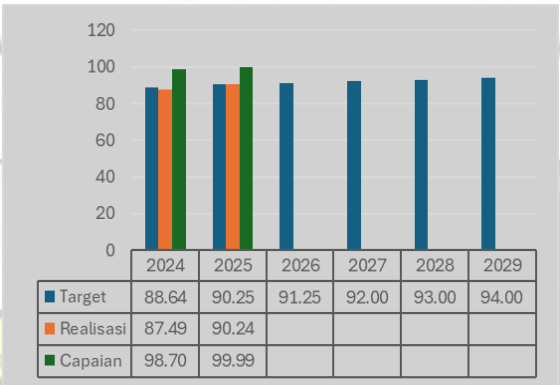
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan

evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 8%; Penataan Tatalaksana: bobot 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Birokrasi Bersih dan Akuntabel: bobot 22,5%; Pelayanan Publik yang Prima: bobot 17,5%.

Pada tahun 2025 nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 90.24 dengan capaian 99.99 dan berkategori **Baik.**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	88.64	90.25	91.25	92.00	93.00	94.00
Realisasi	87.49	90.24				
Capaian	98.70	99.99				

Grafik 48.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Pada tahun 2024 Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh 87.49 dan meningkat tahun 2025 menjadi 90.24. Meskipun belum memenuhi target 2025, Nilai Pembangunan ZI naik sebesar 2.75 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan terjadinya perubahan monitoring dan evaluasi kegiatan yang semula dilakukan triwulan menjadi setiap bulan, adanya konsistensi dan komitmen Balai Besar POM di Banda Aceh sehingga pada tahun 2025 dapat meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenPANRB.

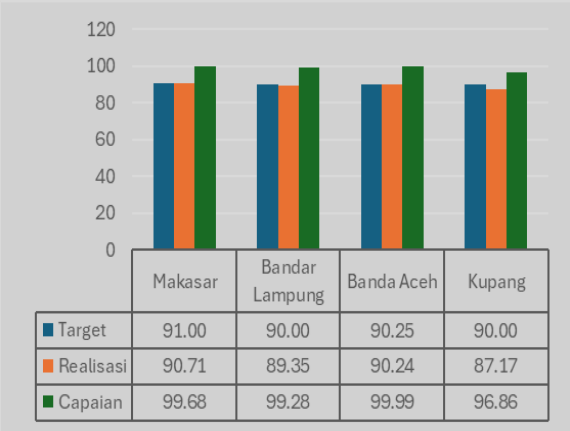
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 87.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	94.00	90.24	96.00	**Akan Tercapai**

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2029, Nilai pembangunan ZI tahun 2025 sebesar 96% dan akan tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola telah berjalan efektif dan konsisten. Dengan sisa gap yang relatif kecil, serta didukung oleh keberlanjutan komitmen pimpinan, penguatan pengendalian internal, dan perbaikan kualitas layanan, target Nilai Pembangunan ZI sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 dinilai realistis dan sangat berpotensi untuk tercapai tepat waktu.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 49.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada peringkat kedua dengan realisasi 90.24. Peringkat pertama Balai Besar POM di Makassar dan ketiga dan keempat oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Kupang.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun, tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari KemenPANRB. Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen organisasi dalam membangun Zona Integritas secara berkelanjutan serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai kebijakan Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Keberhasilan meraih WBBM mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Berbagai inovasi pelayanan, digitalisasi proses bisnis, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi SDM menjadi faktor kunci dalam mendukung pencapaian tersebut.

Selain itu, keberhasilan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap integritas dan profesionalisme Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Predikat WBBM tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga menjadi indikator bahwa budaya kerja berorientasi hasil, pelayanan prima, dan pengendalian gratifikasi telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ke depan, predikat WBBM akan menjadi landasan untuk terus menjaga konsistensi kinerja, memperkuat inovasi pelayanan publik, serta memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Adapun Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait budaya kerja dan pola pikir melalui:
    a. Inovasi KURSI (Kuis Reformasi Birokrasi) yang dilakukan setiap hari senin secara daring setelah Apel Nasional Badan POM.
    b. Parrkir (Pantun hari krida olahraga), dilakukan setiap hari kamis untuk mengingatkan dan mengajak pegawai untuk berolahraga pada hari Jumat.
2. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik di Balai Besar POM di Banda Aceh (melalui media sosial Balai), melalui inovasi:
    a. Rasa dari Hati, pengisian data sampel untuk komoditi pangan, kosmetik dan obat oleh Fungsi Pengujian dan Pemeriksaan. Aplikasi ini mengalami perkembangan dan perubahan nama menjadi Rekam Jejak Aksi Pengujian Andalan Indonesia (RAPA'I).
    b. E-SPRINT (Elektronik Surat Perintah Tugas), pembuatan surat tugas melalui aplikasi.
    c. Masterin (Master Instrument), Vision (Video Singkat Tutorial Penggunaan Instrumen), Interpol (Instrument Trouble & Problem Solving), AKU BPOM

(Akses Masyarakat Mengukur Kinerja BPOM Aceh), KUIS TIMBA (Tambah Informasi bersama BPOM Aceh).

d. ATM BPOM, pelayanan publik jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui inovasi REPOST (Reward and Punishment) dengan menentukan pegawai teladan dan telatan setiap bulan yang dinilai dari SKP dan Perilaku 360. Pada Bulan Juni 2025 sudah dilakukan penambahan inovasi RENCONG (Reminder Coaching & Mentoring) merupakan penjadwalan pembinaan kinerja seluruh pegawai berdasarkan prioritas hasil mentoring dan evaluasi capaian kinerja siklus pendek.
4. Melakukan peningkatan nilai kinerja dan anggaran melalui inovasi internal Aplikasi SIGARANG (Sistem Informasi Pagu Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran) yang memuat pagu alokasi, jenis kegiatan, jenis belanja, laporan FA detail, link capaian output, RHPK dan usulan revisi anggaran.
5. Melakukan pembekalan dan sosialisasi tentang gratifikasi, whistle blowing system, benturan kepentingan dan manajemen risiko terhadap seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh melalui inovasi SIMELAN (Siap Menindaklanjuti Laporan Anda).
6. Memberikan kuis seputar Obat dan Makanan yang disajikan dalam bentuk TTS, susun kata, true or false dan lainnya melalui inovasi Kuis TIMBA (Tambah Informasi Bersama BPOM Aceh) ditujukan untuk para followers Instagram BPOM Aceh agar menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatkan engagement sehingga jumlah followers di Instagram BPOM Aceh bertambah.
7. Gerakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan energi selama bekerja di kantor melalui inovasi HEALING (Hemat Energi Air, Listrik dan Konservasi Lingkungan) dan LAHKETUKER (Langkah Kecil Untuk Perubahan).
8. Inovasi APATU (Apresiasi Ulang Tahun) berupa ucapan selamat ulang tahun kepada pegawai melalui voice speaker kantor dalam rangka meningkatkan nilai-nilai harmonis dan loyal di lingkungan kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.
9. Inovasi E-Jamee (buku layanan tamu), meningkatkan efektifitas layanan

penerimaan tamu secara digital.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Konsisten dan rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait rencana aksi tindak lanjut atas kendala dan menceritakan progres tindak lanjutnya pada pelaporan periode selanjutnya.
2. Melakukan penajaman dan analisis dampak terhadap semua inovasi yang ada pada setiap pokja RB.
3. Meningkatkan inovasi layanan yang berbasis kebutuhan masyarakat, memperluas kanal layanan digital serta memastikan setiap pelayanan dilengkapi dengan standar pelayanan yang jelas, transparan dan terpublikasi.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 88.Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai pembangunan ZI

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	33.243.000	33.092.486	99.55	99.99	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena pelaksanaan pembangunan ZI didukung oleh optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan anggaran yang terintegrasi dengan kegiatan rutin, serta penggunaan teknologi informasi tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

h. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pembangunan Zona Integritas Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dilakukan melalui penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam penerapan budaya integritas dan pelayanan prima. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas manajemen kinerja dan pengendalian internal melalui

monitoring dan evaluasi berkala. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan peran agen perubahan, serta perbaikan berkelanjutan pada standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam mendorong peningkatan nilai pembangunan ZI secara berkelanjutan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Informasi kinerja pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi atas efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada enam area perubahan. Data dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap standar integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, serta untuk mengidentifikasi area yang telah berjalan optimal maupun yang masih memerlukan penguatan.

Laporan kinerja indikator Nilai Pembangunan ZI juga dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam merumuskan tindak lanjut perbaikan, khususnya dalam penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan, pengendalian gratifikasi, dan penguatan pengawasan internal.

Pemanfaatan laporan kinerja indikator Nilai Pembangunan ZI mendukung sinergi antara sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas, serta menjadi instrumen pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian target ZI sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025–2029 dan upaya berkelanjutan menuju predikat WBK/WBBM.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Untuk mengatasi risiko terhadap pemantauan dan evaluasi rencana kerja yang belum dilaksanakan secara konsisten, kampanye pembangunan Zona Integritas (ZI) yang belum dilakukan secara masif, dan inovasi yang dikembangkan yang belum memberikan dampak nyata kepada masyarakat, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Langkah pertama adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pemantauan serta evaluasi yang ada, dengan memastikan bahwa setiap rencana kerja dapat dipantau secara real-time dan dievaluasi secara berkala

untuk memastikan bahwa semua elemen instansi bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk mendukung pemantauan dan evaluasi akan sangat membantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah terkait kampanye pembangunan ZI, penting bagi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk merancang kampanye yang lebih luas dan inklusif, yang dapat menjangkau berbagai kalangan stakeholder dan masyarakat. Kampanye ini perlu melibatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu media sosial, media massa, atau kegiatan tatap muka seperti seminar dan diskusi publik, agar informasi tentang ZI tersebar secara efektif. Agar kampanye ini sukses, perlu ada strategi yang matang untuk mengedukasi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya ZI dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik.

Terkait dengan inovasi yang belum memberikan dampak nyata, Balai Besar POM di Banda Aceh harus memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh publik. Ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan inovasi, serta terus memantau dampak yang dihasilkan untuk memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, feedback dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap setiap inovasi yang ada.

26. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 89.Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78	81.00	97.85	**Baik**

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 90.Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Tabel 91.Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2025

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2020	75.91	Sangat Baik (BB)
2021	75.96	Sangat Baik (BB)
2022	79.16	Sangat Baik (BB)
2023	79.48	Sangat Baik (BB)
2024	81.48	Memuaskan (A)
2025	81.00	Memuaskan (A)

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Tabel 92.Bobot Penilaian SAKIP

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	**24**
Pengukuran Kinerja	25	30	**24**
Pelaporan Kinerja	15	15	**12**
Evaluasi Internal	10	25	**20**
Capaian Kinerja	20	-	**20**

Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 93.Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Tahun 2025	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	20.16
2.	Pengukuran Kinerja	24	19.68
3.	Pelaporan Kinerja	12	9.48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15.20
5.	Capaian Kinerja	20	16.48
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**81.00**
	Predikat		**A**

Pada tahun 2025 nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 81%, mengalami penurunan 0.48 poin dan masih dalam kategori **Baik.**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 50.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 81.48% dan mengalami penurunan sebesar 0.48 poin di tahun 2025 dengan realisasi 81%. Penurunan ini dikarenakan adanya komponen pada capaian kinerja yang membandingkan realisasi tahun 2023 dan 2024.

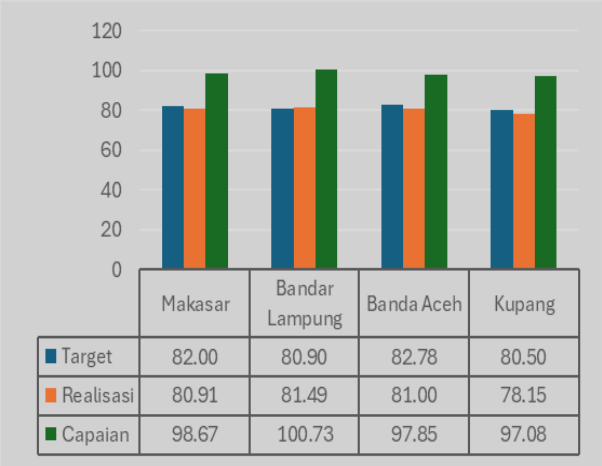
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 94.Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan target tahun 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	83.90	81.00	96.54	**Akan Tercapai**

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2029, Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh masuk dalam kategori akan tercapai. Dengan adanya komitmen dari pimpinan dan pegawai serta dilakukan perbaikan berkelanjutan diharapkan target tahun 2029 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 51.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa Balai Besar POM di Banda Aceh berada di peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dari keempat Balai yang diperbandingkan, Balai Besar POM di Kupang yang memiliki realisasi terendah.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025 dengan realisasi 81% mengalami penurunan sebesar 0,48 poin dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 81,48%. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya nilai pada komponen capaian kinerja sebesar 1,68 poin, yang berdampak terhadap nilai AKIP secara keseluruhan.

Meskipun demikian, kondisi ini menjadi dasar evaluasi untuk melakukan penguatan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tetap diperlukan upaya perbaikan yang terencana dan konsisten melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja, serta penguatan komitmen

pimpinan dan seluruh pegawai agar nilai AKIP dapat kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1) Sumber data yang valid untuk memastikan pengukuran kinerja, sehingga tidak terjadi perbedaan data kinerja pada aplikasi SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja.
2) Memastikan kesesuaian pagu dan realisasi anggaran pada laporan kinerja dan laporan evaluasi internal.
3) Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjut pada setiap indikator kinerja setiap bulannya.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 95.Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	1.476.313.050	1.470.764.596	99.62	97.85	**Tidak Efisien**

Berdasarkan hasil analisis kinerja Tahun 2025, penggunaan sumber daya dalam pencapaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh **belum sepenuhnya efisien**. Hal ini tercermin dari capaian Nilai AKIP yang **belum mencapai target yang ditetapkan**, meskipun realisasi sumber daya, baik anggaran maupun dukungan sumber daya manusia, telah dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa output dan outcome yang dihasilkan belum sebanding dengan input yang digunakan.

Ketidakefisienan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya penyelarasan antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, sehingga pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas SAKIP. Selain itu, masih terdapat kegiatan yang kurang berdampak signifikan

terhadap pencapaian indikator Nilai AKIP, serta keterbatasan dalam pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fokus penggunaan sumber daya pada kegiatan yang berorientasi hasil, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pemanfaatan data kinerja agar penggunaan sumber daya ke depan lebih efisien dan berdampak langsung terhadap peningkatan Nilai AKIP.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan Nilai AKIP, dilakukan penguatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas pelaporan kinerja melalui penyajian analisis capaian termasuk analisis efisiensi dan efektivitas program. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP sebagai dasar pengambilan keputusan, serta peningkatan kompetensi SDM dalam penerapan SAKIP juga menjadi fokus utama guna mendorong perbaikan nilai AKIP secara berkelanjutan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil penilaian AKIP tahun 2025 dengan capaian 81% menjadi cerminan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di Balai Besar POM di Banda Aceh. Dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 81,48%, terjadi penurunan yang bersumber dari melemahnya nilai pada komponen capaian kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan hasil kinerja memerlukan penguatan tidak hanya pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk mengidentifikasi area perbaikan dan menyusun langkah peningkatan kinerja secara lebih terarah. Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi seluruh pegawai, perbaikan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode penilaian berikutnya.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Dalam penyelenggaraan AKIP yang maksimal diperlukan komitmen seluruh ketua tim kerja dan anggota tim. Namun, terdapat risiko yang dihadapi seperti ketua tim kerja dan anggota tim yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menindaklanjuti rekomendasi sehingga rekomendasi perbaikan kinerja tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan ketua tim kerja terkait, agar masalah tidak kembali terulang dan menghambat kinerja organisasi.

Selain itu, data kinerja dari tim terkait tidak lengkap atau tidak akurat sehingga terlambat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja sehingga mengakibatkan pelaporan evaluasi kinerja tidak dilaporkan tepat waktu. Untuk mengatasi risiko ini, diberikan batas waktu pengumpulan data kepada penanggung jawab data untuk selanjutnya disusun dalam bentuk laporan.

Metode pengumpulan data tidak konsisten juga dapat menjadi risiko yang mengakibatkan data realisasi kinerja yang ditampilkan berubah-ubah (tidak valid). Untuk itu, diperlukan membuat media pengumpulan data yang dapat diakses secara online seperti google worksheet untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data dan menindaklanjuti rekomendasi.

Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evalusasi SAKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	**Perencanaan Kinerja**					
a.	Menyusun kertas kerja dan matriks reviu target dengan menyajikan penetapan target final dan diformalkan oleh Pimpinan Satker	Triwulan II			a. Belum dilakukan penyusunan kertas kerja.	a. Sudah dilakukan penyusunan kertas kerja perubahan/ penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta diformalkan oleh Pimpinan

b.	Mengupayakan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Triwulan II			b. Belum dilakukan penyelarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	b. Sudah dilakukan penyelarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada c. dokumen SAKIP
2.	**Pengukuran Kinerja**					
a.	Menyempurnakan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada prosedur pengumpulan data dan perbaikan data.	Triwulan I			a. Belum dibuatnya dilakukan penyempurnaan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada prosedur pengumpulan data dan perbaikan data	a. Sudah dilakukan penyempurnaan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada prosedur pengumpulan data dan perbaikan data
b.	Mendokumentasikan dengan baik arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian pada notulen rapat internal	Triwulan II			b. Masih belum terdapat notulen rapat dengan mencantumkan indikator yang tidak tercapai dan rencana aksinya serta arahan dari pimpinan	b. Membuat notulen rapat dengan mencantumkan indikator yang tidak tercapai dan rencana aksinya serta arahan dari pimpinan
c.	Mendokumentasikan dokumen monev secara baik sebagai sumber data dalam perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja agar memudahkan penelusuran capaian	Triwulan II			c. Belum membuat kertas kerja yang dilampirkan pada link RHPK internal agar memudahkan penelusuran capaian	c. Sudah dilakukan pembuatan kertas kerja yang dilampirkan pada link RHPK https://bit.ly/RHPKBPOMACEH2025 internal agar memudahkan penelusuran capaian
d.	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Triwulan II			d. Belum membuat link RHPK internal untuk memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja dan memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	d. Membuat link RHPK internal https://bit.ly/RHPKBPOMACEH2025 untuk memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja dan memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja

e.	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim	Triwulan II			e. Belum membuat rencana tindak lanjut/rencana aksi dan menjadikan satu laporan sebagai acuan agar terjadi keselarasan dalam penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi melalui link RHPK internal	e. Sudah membuat rencana tindak lanjut/rencana aksi dan menjadikan satu laporan sebagai acuan agar terjadi keselarasan dalam penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi melalui link RHPK internal
f.	Menyusun analisis capaian kinerja berupa identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai	Triwulan II			f. Belum menyusun kendala dan rencana tindak lanjut pada Aplikasi SIMETRIS secara tertib	f. Menyusun kendala dan rencana tindak lanjut pada Aplikasi SIMETRIS secara tertib
3.	**Pelaporan Kinerja**					
a.	Menyusun laporan kinerja interim dengan menjelaskan penambahan indikator kinerja, rekomendasi/rencana aksi dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Triwulan I			a. Belum melakukan penyusunan laporan kinerja interim dengan menjelaskan penambahan indikator kinerja, rekomendasi/rencana aksi dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	a. Sudah dilakukan penyusunan laporan kinerja interim dengan menjelaskan penambahan indikator kinerja, rekomendasi/rencana aksi dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya
b.	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	Triwulan II			b. Belum membuat link RHPK internal untuk memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	b. Sudah membuat link RHPK internal https://bit.ly/RHPKBPOMACEH2025 untuk memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja
c.	Menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran	Triwulan I			c. Belum menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP terkait analisis	c. Sudah menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP terkait analisis

Selamat Datang ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS
SELAMAT DATANG KEPALA BADAN POM RI DI BUMO SERAMOE MEKKAH

	dan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai				efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran dan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai	efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran dan menyajikan informasi pemanfaatan laporan kinerja secara memadai
4.	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**					
a.	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya	Tahun 2025 (TW I s/d IV)			a. Belum melakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya	a. Sudah melakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
b.	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan kendala dan rekomendasi/ rencana aksi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja	Tahun 2025 (TW I s/d IV)			b. Belum melakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan kendala dan rekomendasi/ rencana aksi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja	b. Sudah dilakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan kendala dan rekomendasi/ rencana aksi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja
c.	Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya	Tahun 2024 (TW I s/d IV)			b. Belum tertib menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya.	c. Sudah dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya

27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 96.Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	5	100	**Sangat Baik**

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus: (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50 %). Nilai EKA sebesar 85.34 dari aplikasi Smart dan nilai IKPA 99.39 dari Aplikasi Omspan dengan perhitungan (85.34 x 50%) + (50% x 99.39) sehingga diperoleh realisasi nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 adalah 92.37 dengan kategori sangat baik.

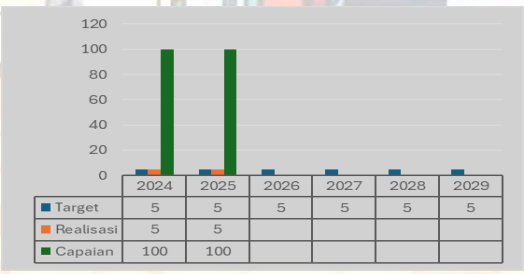
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 52.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Berdasarkan data diperoleh informasi bahwa Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sama dengan tahun 2025 dengan nilai 5 sudah mencapai target yang ditetapkan, dan target sama hingga tahun 2029. Walaupun demikian, terjadi penurunan capaian

nilai kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 92.37 dibandingkan tahun 2024 sebesar 95.37 dengan kategori konversi nilai kinerja anggaran 5 kategori sangat baik (nilai 90.01 s.d.100). Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 nilai EKA sebesar 85.25 sedangkan Tahun 2024 nilai EKA adalah 92.31 yang diperoleh dari nilai efisiensi SBK tahun 2025 dan 2024 sebesar 2.25 dan 48.25.

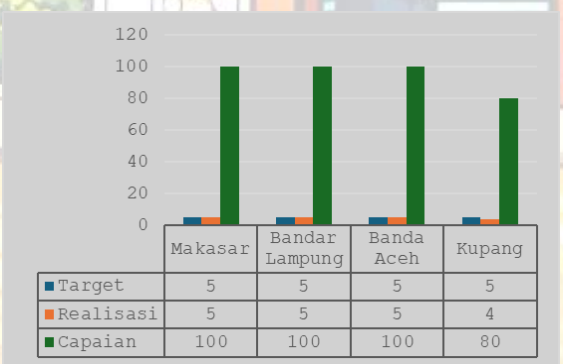
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 97.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	5	100	Tercapai

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran sudah tercapai jika dibandingkan dengan target Renstra 2029. Tercapainya target tahun 2029 mengindikasikan adanya peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi penyerapan anggaran tanpa mengabaikan kualitas output dan outcome. Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi internal turut berkontribusi dalam menjaga konsistensi antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi dalam pengelolaan anggaran, penguatan manajemen risiko, serta sinergi lintas fungsi, sehingga nilai kinerja anggaran tidak hanya memenuhi target kuantitatif Renstra, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Tabel 98.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai memiliki realisasi NKA yang sama. Namun, untuk Balai Besar POM di Kupang Nilai Kinerja Anggaran 4.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian nilai kinerja anggaran Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh, dipengaruhi oleh beberapa komponen:

1. Revisi DIPA

   Indikator revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semester dan tidak bersifat kumulatif.

   Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh kementerian keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Balai Besar POM di Banda Aceh.

2. Deviasi Halaman III DIPA

   Indikator ini mengukur selisih antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam DIPA. Ambang batas deviasi bulanan sebesar 5 persen untuk memperoleh nilai maksimal 100.

   Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100 dikarenakan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA.

3. Penyerapan Anggaran

   Indikator ini mengukur persentase realisasi anggaran terhadap total anggaran yang ditetapkan dalam target indikator pelaksanaan anggaran. Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan bobot nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap jenis belanja.

   Tahun 2025 nilai penyerapan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh turun menjadi 96.95, dikarenakan adanya efisiensi dan pemblokiran anggaran sehingga berakibat nilai penyerapan anggaran tidak maksimal.

4. Belanja Kontraktual

   Belanja kontraktual dihitung berdasarkan perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya selesai tahun anggaran berjalan dan kontraknya telah didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh sudah menyelesaikannya di Triwulan 1 sehingga memperoleh nilai 100.

5. Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal berita acara serah terima (BAST) atau berita acara pembayaran pekerjaan (BAPP). Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

6. Pengelolaan UP/TUP

Indikator ini mengukur efektivitas pengelolaan UP dan TUP oleh Satker dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GUTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan. Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

7. Capaian Output

Indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan nilai kinerja capaian RO sehingga Balai Besar POM di Banda Aceh.Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh nilai 100.

8. Dispensasi SPM

Indikator ini mengukur persentase SPM yang mendapatkan dispensasi atau izin keterlambatan penilaiannya dilakukan di akhir tahun. Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh tidak ada dispensasi SPM.

Nilai Efisiensi pada EKA yang rendah

Komponen penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimana salah satu komponen yang dinilai adalah Efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran akan bernilai tinggi apabila anggaran yang direalisasikan rendah dan capaian output yang dihasilkan tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh target yang harus dicapai oleh satuan kerja yaitu di atas 99%, dengan demikian apabila capaian output mencapai 100% maka nilai efisiensi hanya tercapai mendekati angka normal yaitu 0, sehingga nilai efisiensi tidak bisa mencapai nilai efisiensi tertinggi pada aplikasi yaitu -20.

Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran di atas 99% dapat mendongkrak nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala

  Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP.
- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan

  Tahun 2025 pengelola keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh mengikuti bimtek terkait IKPA yang diselenggarakan oleh direktorat perbendaharaan setiap triwulan.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

  Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan 11 (sebelas) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA dan 24 (dua puluh empat) kali revisi POK.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 99.Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	7.381.565.250	7.377.464.179	99.94	100	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2025. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Badan POM RI nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 3 Nopember 2025 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas Presiden RI yaitu Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Upaya peningkatan kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya untuk mengawal agar Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 dapat mencapai target dengan cara:

1. Melakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian EKA dan IKPA.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan DJP Wilayah Aceh Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 memenuhi target, namun tahun 2026 tetap diperlukan perbaikan dalam pencapaian target kinerja.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Manajemen risiko terkait nilai kinerja anggaran adalah upaya untuk mengelola risiko yang dapat berdampak pada kinerja anggaran. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan RPD Halaman III DIPA merupakan salah satu faktor risiko yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dikarenakan kondisi internal dan eksternal sehingga berakibat terjadi deviasi pada halaman III dIPA +/- 5% dan mempengaruhi nilai IKPA satker.

Efisiensi anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran rendah sehingga berakibat target nilai kinerja anggaran menjadi rendah. Selain itu capaian output triwulan tidak sesuai target juga menjadi ancaman yang dapat mengurangi nilai IKPA dan kualitas kinerja anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk itu diperlukan upaya melakukan monev anggaran triwulan serta komitmen pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai perencanaan guna menjaga nilai kinerja anggaran sesuai target.

28. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 100.Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.20	2.906	90.81	**Baik**

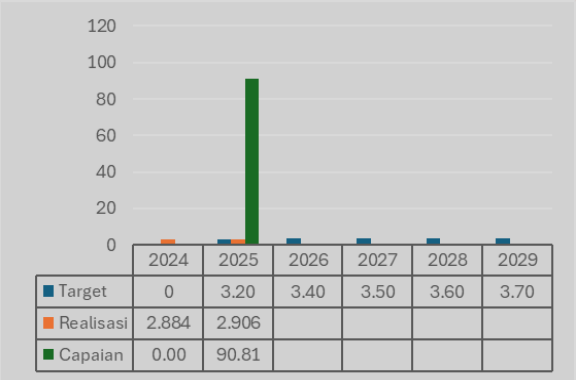
Indeks Manajemen Risiko (IMR) merupakan indeks yang mengukur tingkat kematangan (maturitas) penerapan manajemen risiko dalam suatu unit kerja. Manajemen risiko didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang mencakup budaya, proses, dan struktur organisasi untuk menangani risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tingkat maturitas dibagi menjadi 5 (Lima) Kategori yaitu:

1. Risk Naive (Skor 0–16): Risiko ditangani secara individual, belum ada sistem formal.
2. Risk Aware (Skor 17–32): Kesadaran risiko ada, tapi proses belum terstruktur.
3. Risk Defined (Skor 33–48): Proses penanganan risiko mulai teratur dan diprioritaskan.
4. Risk Managed (Skor 49–64): Proses manajemen risiko sudah terintegrasi dan terukur.
5. Risk Enabled (Skor 65–80): Risiko menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis.

Hasil Realisasi penilaian Manrisk tahun 2025 adalah 2.906 dari target 3.20 yang ditetapkan. Realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 yakni 2.884. Namun

belum mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	0	3.20	3.40	3.50	3.60	3.70
Realisasi	2.884	2.906				
Capaian	0.00	90.81				

Grafik 53.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2025 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Realisasi kinerja Manajemen Risiko pada tahun 2024 belum dapat dihitung dalam bentuk persentase karena target tidak ditetapkan, meskipun realisasi dicapai mencapai 2,884. Pada tahun 2025, target Manajemen Risiko mulai ditetapkan sebesar 3,20 dengan realisasi sebesar 2,906, sehingga capaian kinerjanya mencapai 90,81%.

Jika dibandingkan antara kedua tahun tersebut, realisasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, meskipun capaian persentase tampak lebih rendah karena pada tahun 2025 target kinerja sudah ditetapkan dan lebih tinggi. Dengan kata lain, realisasi yang meningkat pada tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target, sehingga persentase capaian masih berada pada angka 90,81%.

Perbaikan kinerja pada tahun 2025 ini tidak terlepas dari penguatan proses penerapan Manajemen Risiko, termasuk peningkatan pemahaman unit kerja terhadap pedoman penilaian risiko, pendampingan yang lebih intensif, serta perbaikan dokumentasi risiko di lingkungan satuan kerja. Upaya-upaya ini mendorong peningkatan kualitas implementasi Manajemen Risiko meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu peningkatan mutu laporan juga diupayakan maksimal dengan melibatkan seluruh Pegawai dengan menampilkan risiko masing-masing di Sasaran Kinerja Pegawai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2029

Tabel 101.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dan target Renstra 2029

Indikator Kinerja	Target 2029 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.70	2.906	78.54	**Akan Tercapai**

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 terhadap target tahun 2029 menunjukkan realisasi sebesar 2.906%, yang masih berada di bawah target tahun 2029 yaitu 3,70. Realisasi indikator kinerja ini termasuk dalam kategori Akan Tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh perlu melakukan penguatan implementasi manajemen risiko, termasuk peningkatan kualitas identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko agar dapat mengejar target kinerja pada periode selanjutnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit kerja lain yang sejenis



Grafik 54.realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain.

Berdasarkan data pada grafik tersebut diketahui bahwa keempat Balai memiliki tingkat realisasi Indeks Manajemen Risiko yang berbeda-beda. Dari keseluruhan satker, hanya Balai POM Makassar yang realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Balai POM Bandar Lampung, Balai Besar POM di Banda Aceh, dan Balai POM Kupang memiliki realisasi yang masih berada di bawah target nasional, sehingga capaian ketiganya belum mencapai 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Indeks Manajemen Resiko diukur melalui kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang Menjalankan tahapan-tahapan mengidentifikasi risiko dan menentukan aktivitas pengendalian yang akan mengurangi atau meniadakan Resiko yang akan mempengaruhi target kinerja Balai

Besar POM di Banda Aceh. Secara umum penyebab keberhasilan dari tercapainya Indeks Manajemen Resiko Balai Besar POM yaitu:

1. Komitmen Pimpinan

   Adanya dukungan aktif dari pimpinan unit kerja dalam mendorong implementasi manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

2. Pemahaman SDM yang Meningkat

   Pegawai mulai memahami pentingnya identifikasi dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas.

3. Tersedianya Dokumen dan Prosedur

   Penyusunan dokumen pendukung seperti daftar risiko, rencana mitigasi, dan sistem pelaporan risiko membantu proses berjalan lebih sistematis.

4. Koordinasi dan Pemantauan yang Konsisten

   Adanya monitoring dan evaluasi berkala serta keterlibatan unit pengawasan internal dalam proses evaluasi maturitas risiko.

5. Keikutsertaan seluruh pegawai.

Adapun penyebab kegagalan atau penurunan kinerja untuk Indeks Manajemen Risiko adalah:

1. Masih ada beberapa kesalahan terkait penyusunan dan pelaporan manajemen risiko.
2. Reviu Manajemen Risiko belum terdokumentasi dengan maksimal.
3. Masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Evaluasi Manajemen Risiko.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan agar menunjang pencapaian indeks Manajemen Resiko:

1. Rutin melakukan Sosialisasi terkait manajemen risiko.
2. Mengadakan rapat pembahasan yang diikuti seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh terkait penentuan risk event dan tindak lanjut pengendalian dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.

3. Lebih melibatkan Ketua Tim dalam mengidentifikasi Risk Event masing-masing fungsi.
4. Melakukan evaluasi secara berkala.
5. Rutin melakukan Pengujian terhadap terhadap aktivitas pengendalian terhadap risiko inheren dengan selera risiko besar atau sama dengan 16 sesuai Juklak yang berlaku.
6. Melakukan dokumentasi kertas kerja reviu risiko secara memadai.
7. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan Analisa risiko sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM.
8. Melakukan reviu terhadap respon risiko agar selaras dengan deskripsi tindakan mitigasi.
9. Melakukan pengisian progress atas pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu secara lengkap di aplikasi SAPA APIP.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 102.Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Manajemen Risiko

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	984.208.700	980.509.731	99.62	90.63	**Tidak Efisien**

Pelaksanaan Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh **belum sepenuhnya efisien** dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini tercermin dari capaian nilai Manajemen Risiko yang **belum optimal**, meskipun sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, waktu, maupun anggaran, telah dialokasikan dan digunakan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan input belum sepenuhnya menghasilkan output dan outcome yang sebanding.

Ketidakefisienan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi Manajemen Risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, identifikasi dan mitigasi risiko belum sepenuhnya difokuskan pada risiko strategis yang

berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja, sehingga penggunaan sumber daya masih tersebar dan kurang terarah. Pemanfaatan hasil pemantauan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan juga belum maksimal, yang menyebabkan upaya pengendalian risiko belum sepenuhnya memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan Manajemen Risiko yang lebih terintegrasi dan berbasis prioritas agar penggunaan sumber daya ke depan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.

h. Upaya peningkatan kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya untuk mengawal agar Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 dapat mencapai target dengan cara:

1. Melakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian EKA dan IKPA.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan DJP Wilayah Aceh Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja Manajemen Risiko dimanfaatkan sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian penerapan Manajemen Risiko di Balai Besar POM di Banda Aceh, serta untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pelaksanaannya. Laporan Kinerja ini juga menjadi sumber informasi penting dalam peningkatan kualitas pengelolaan risiko pada tahun berikutnya, baik terkait proses identifikasi, analisis, penilaian, maupun mitigasi risiko di seluruh unit kerja.

Melalui laporan ini, pimpinan dan tim Manajemen Risiko dapat menyusun langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran, sehingga penerapan Manajemen Risiko semakin efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya, sehingga setiap tahapan dalam proses Manajemen Risiko

dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkontribusi pada peningkatan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh berfungsi untuk mengurangi dan mengatasi kendala yang berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja. Melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dilakukan secara berkala, setiap aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko dapat berjalan lebih terarah sehingga realisasi kinerja dapat dicapai secara optimal.

Pengelolaan risiko ini juga memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya hambatan pada periode berikutnya. Adapun risiko terkait pencapaian Indeks Manajemen Risiko umumnya berkaitan dengan aspek operasional seperti ketersediaan sumber daya, kualitas dokumentasi risiko, konsistensi pelaporan, serta pemahaman unit kerja terhadap proses manajemen risiko. Namun hingga saat ini, risiko-risiko tersebut masih dapat dikendalikan secara efektif melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, dan perbaikan mekanisme pengawasan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Bulan Oktober 2025

Tabel 103.Tindak lanjut rekomendasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	93.15	103.21	Realisasi pada akhir September sebesar 92,48% dari target 90,25 %. (Persentase capaian 102,47%)	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak dan ketentuan DO	Melakukan sampling sesuai perencanaan dan DO	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan dan DO	November	1.Pelaksanaan Sampling Oktober 2. Koordinasi tim sampling dan pengujian 3. Melakukan koordinasi dengan Lab regional dengan cara mengupdate kemampuan uji melalu link yang kemampuan Uji Balai regional 4. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Melaksanakan koordinasi antara inspeksi dan pengujian	November			IK1_datduk Oktober
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26.66	102.54	Realisasi pada akhir September 2025 adalah 22.22 % dari target 26 % (Persentase capaian 85.46%)	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	Seluruh kegiatan yang menunjang keberhasilan agar tetap dilakukan pada tahun berikutnya.	Tahun 2026	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	Selesai	-			IK2
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.69	114.93	1. Realisasi pada akhir Agustus sebesar 97,39% dari target 85 %. (Persentase capaian 114,58%) 2. Terdapat peningkatan realisasi penyelesaian pengujian sesuai timeline	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten kecuali terhadap 3 sampel yang tidak dapat memenuhi uji BPA pada kemasan PC karena oven di laboratorium rusak dan belum ada kepastian dapat digunakan kembali. 3. Terjadi peningkatan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena sudah dilakukan percepatan penyelesaian pengujian sesuai timeline.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	November	1. Pelaksanaan Sampling Oktober 2. Renlak sampling bulan Oktober 3. Koordinasi tim inspeksi dan pengujian dalam rangka melaksanakan pengujian dan pelaporan SIPT 4. Melakukan koordinasi dengan lab regional	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Melaksanakan koordinasi bidang inspeksi dan pengujian 3. Melakukan koordinasi dengan Lab regional 4. Melakukan Monev hasil pelaporan SIPT	November		Open	IK3_DatdukOktober
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	Pada bulan September tidak ada pengujian KLB KP	Pengujian Pangan yang diduga penyebab KLB KP telah dilakukan sesuai pedomaan tatalaksana Pengujian KLB KP sesuai informasi yang diperoleh dari Surat Keterangan KLB KP dari Dinas Kesehatan	Pada bulan Oktober sudah dilakukan pengujian terhadap 5 sampel MBG yang diduga penyebab KLB KP yang berasal dari Dinas Keshatan Kabupaten Aceh Utara. Pengujian telah dilakukan sesuai in formasi dari surat keterangan KLB KP yang telah dikirimkan bersama sampel.	-	-	1. Membuat jejaring dengan SPPI BGN. 2. Membuat video penanganan sampel KLB dan menayangkan di media sosial	-	-		Open	IK4_DatdukOktober
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	Realisasi sampai September sebesar 87.5%, sebanyak 28 sampel telah disampling dan diuji di laboratorium dan target masih tercapai	1. Seluruh target sampel PIRT telah selesai disampling dan diperiksa. 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu sampling berdasarkan evaluasi pusat, karena seluruh sampel PIRT sebanyak 28 sampel wajib disampling TW I, sedangkan realisasi TW I hanya 11 sampel yang disampling dampak efisiensi. Sebanyak 17 sampel disampling pada TW II. 4. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena terdapat sampel yang diroleback karena berdasarkan evaluasi Ditwas terdapat beberapa sampel yang harus diperbaiki dan sudah ditindaklanjuti.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	Melakukan monev hasil sampling dan pengujian berdasarkan evaluasi pusat	November	1. Melakukan Koordinasi pemeriksaan dan pengujian terkait capaian indikator 2. Melaksanakan Monev waktu pelaporan pengujian 3. Monev hasil pengujian dan menindaklanjuti hasil uji TMS	Melakukan monev penyesuaian dengan evaluasi pusat	November		Open	IK5_DatdukOktober
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.30	88.94	106.77	Realisasi pada akhir September 2025 adalah 85.16 % (Capaian 102.23 %)	1. Menghubungi sarana yang diberikan surat tindak lanjut secara intensif melalui WA/Telp 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp, telepon dan tatap muka langsung ke kantor. 3. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan. 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.	November	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	Rencana aksi tetap dilakukan berkesinambungan sampai akhir tahun	November			IK6_DatdukOktober

		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	101.79	107.15	Realisasi pada akhir September 2025 adalah 100 % (Capaian 105,26%)	1. Melakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi hingga akhir Oktober sebanyak 11 sarana (3sarana produksi Kosmetik dan 8 sarana produksi obat bahan alam). 2. Kesulitan dalam pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam, dari 4 sarana UKOT/UMOT yang diperiksa, keempatnya tidak melakukan kegiatan produksi OT, karena 3 diantaranya telah habis masa berlaku CPOTB dan 1 sarana penanggung jawab telah menggundurkan diri 3. Pelaku usaha UKOT/UMOT kurang komitmen dalam mengurus CPOTB	Melakukan pendataan kembali kondisi sarana produksi OT-Kosmetik	Melanjutkan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif	November	Melanjutkan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi TW IV 2. Melakukan pendataan sarana produksi sediaan farmasi (OBA-Kosmetik) yang masih aktif dan tidak aktif 3. Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha UKOT/UMOT tentang komitmen mereka dalam pengurusan dan penerapan CPOTB 4. Melakukan sampling produk dari sarana UKOT/UMOT yang bermasalah.	November			Open	IK7.Daduk Oktober

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	Sampai akhir September, realisasi sebesar 100% dengan sarana yang diperiksa sebanyak 24 sarana MD dan 3 sarana PIRT yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana produksi hingga Oktober sebanyak 32 sarana produksi MD dan 3 sarana PIRT yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai pedoman pengawasan produksi pangan olahan.	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Monev ketua tim 3. Adanya komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu	1. Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	November	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana bulan Oktober 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sampai Bulan Oktober	1. Melaksanakan pemeriksaan untuk target bulan November (TW IV) 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di Bulan November	November		Open	IK8. DadukOktober
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.88	103.24	Realisasi sampai Bulan September adalah 99.86%. (Persentase Capaian 103.21 %)	1. Tercapainya semua komponen penilaian IKU yang ada pada DO untuk semua komoditi yang diawasi 2. Melakukan Monev pelaksanaan inspeksi distribusi sediaan farmasi, kesesuaian tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan melalui SIPT	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Monev pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	1. Melaksanakan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Monev pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	November	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Monev pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	1. Rencana aksi terus dilakukan secara berkesinambungan 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	November		Open	IK9. Datduk Oktober
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	Realisasi sampai September tercapai 100%, dimana sebanyak 80 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dari target 107 sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampai Oktober, sebanyak 92 sarana distribusi pangan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Melaksanakan Monev ketua tim 3. Adanya Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	1. Penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. 2. Melakukan monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	November	1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Oktober 2. Melakukan moniev hasil pemeriksaan sampai Bulan Oktober	1. Melakukan pemeriksaan sarana pada Bulan November 2. Melaksanakan monev hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	November		Open	IK10. DatdukOktober
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.80	98.78	110.00	Realisasi pada akhir September 2025 adalah 98.74 %. (Persentase capaian 109.96 %)	Pelaksanaan pengawasan iklan telah sesuai dengan komponen penilaian pada DO	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Pelaksanaan pengawasan iklan telah memenuhi semua komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	1. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Melaksanakan Monev Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan iklan sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	November	1. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Melaksanakan pengawasan iklan sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi 4. Melakukan koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal	Pengawasan iklan yang menjadi target bulan Oktober	November		Open	IK11. daduk Oktober 2025
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	100	125.00	Realisasi di akhir September 100 % (Persentase Capaian 125%), untuk pemenuhan target dan ketepatan waktu pelaporan.	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik telah sesuai DO	1. Ketepatan jumlah label yang diawasi sesuai dengan target 2. Ketepatan waktu pelaporan selama pengawasan bulan Oktober	1. Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai DO 2. Untuk target tahun berikutnya akan diusulkan kenaikan berdasarkan capaian tahun 2025, sehingga persentase capaian memenuhi kriteria (maks 110 %)	November	1. Melakukan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan label sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektrik yang menjadi target bulan November	November			IK12. DatdukOktober
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		Akhir Tahun		1. Telah melakukan Bimtek AMR pada Agustus 2025 2. Telah melakukan audiensi dan advokasi ke Gubernur Aceh dan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh terkait penerbitan SE Gubernur tentang pengendalian AMR di Provinsi Aceh. Penerbitan SE sedang dalam proses di Dinas Kesehatan Aceh. 3. Telah melakukan publikasi hasil pengawasan penggunaan Antibiotik berdasarkan resep dokter 4. Melaksanakan pengawasan sarana Apotek menggunakan tools AMR telah dilakukan 100 %	1. Pelaksanaan pengawasan Apotek dengan menggunakan tools AMR sesuai ketentuan 2. Melakukan publikasi hasil pengawasan Apotek terkait penggunaan antibiotik dengan resep dokter telah sesuai DO 3. Pelaksanaan Bimtek AMR sesuai DO	1. Pelaksanaan pengawasan Apotek dengan menggunakan tools AMR sesuai ketentuan 2. Melakukan publikasi hasil pengawasan Apotek terkait penggunaan antibiotik dengan resep dokter telah sesuai DO 3. Pelaksanaan Bimtek AMR sesuai DO	1. Pengawasan Apotek menggunakan tools AMR agar selalu dilaksanakan 100 % 2. Melaksanakan Publikasi dan KIE terkait pengendlaian AMR secara berkesinambungan 3. Melakukan Joint Inspection dengan lintas sektor terkait	November	1. Pengawasan rutin Apotek menggunakan tools AMR 2. Publikasi hasil pengawasan terkait pengendalian AMR sampai TW 3 3. Bimtek AMR kepada Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek	1. Publikasi hasil pengawasan terkait pengendalian AMR 2. KIE kepada masyarakat untuk bijak menggunakan antibiotik 3. Joint Inspection dengan lintas sektor terkait	November			IK13.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.8	79.3	108.93	Penilaian Realisasi pada setiap Triwulan Realisasi pada TW 3 = 79.3 % dengan target 72.8 % (capaian 108.93 %) Rincian capaian (4) Komponen pada TW 3 sebagai berikut: **Standard Ruang Lingkup: 84.5** **Peralatan : 80.2** **Standar Kompetensi Laboratorium: 80** **Standar Metode Terverifikasi: 50.2** Nilai Pemenuhan SKL TW 3 (%): 79.3 Target Nilai SKL TW 2 (%): 72.8 Target Tahunan SKL: 73 Pemenuhan thd Target TW 3 (%) : 108.93	Capaian pada TW 3 = 79,3 (108.93%) , target TW3 = 72.8 **Persentase Pemenuhan SRL (%) = 84.5** **Persentase Pemenuhan Peralatan (%) = 80,2** **Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) = 80** **Persentase Pemenuhan MA Terverifiksi (%) = 50.2** Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%) = 79.3 Kenaikan Capaian disebabkan adanya penambahan pada RL pengujian, verifikasi MA dan nilai kompetensi **PenambahanSRLTW3 sebanyak5ztaktif** 1. Lab Kosmetik Penambahan SRL pada TW3 (1) MA : Verifikasi MA Isopropil M. Cresol 2. Mikrobiologi (2) MA : verifikasi Shegella dalam Obat Kuat Kuasi sediaan oral Verifikasi salmonella dalam sedian obat kuasi oaral 3. Lab Obat (1) MA : Verifikasi Pregabalin kapsul 4. Lab Pangan (1) : Verifikasi Natamisin dalam produk keju penambahan SRL secara otomatis meningkatkan nilai kompetensi **PenambahanVerifikasiMA (16) MetodaAnalisa** Lab Kosmetik (4) MA : Diphenhidramin Hcl, 2. Terbinafine 3. PK. Allura 4. PK. Sodium Propionat Lab MBM : (2) Verif. MA 1. MA Kualitatif Deteksi E. Coli dalam sirup, 2. Verifikasi P.Aeroginosa dalam obat sediaan topikal Lab OBASKK (1) . Verifikasi Sibutramin, dkk secara GCMS Lab Obat (7) 1. Verifikasi Diazepam injeksi, 2. Meloksikam Tab 3. Tramadol Tab 4. Ketorolak injeksi 5. Olanzapin Tab 6. Piroksikam tab 7. Tramadol injeksi Lab Pangan : (2) MA : 1. Natamisin 2. PK Kloramfencol secara ELISA **PengembanganKompetensi** Penambahan SRL secara Otomatis menambah nilai pada kompetensi **Peralatan** : tidak ada penambahan nilai sama dengan TW2	1. Pelatihan Internal 2. Verifikasi Metoda Analisa 3. Pemeliharaan dan Maintanance alat Lab 4. Pengadaan Baku pembanding 5. Pengadaan alat -alat gelas 6. Pengadaan reagensia , suku cadang	Kegiatan akan terus ditingkatkan	ovember - Desember 202	Program Kalibrasi alat Pengadaaan alat gelas Usulan anggaran untuk alat, concumable part, suku cadang TA 2026	**5 pelatihan internal yang akan dilaksanakan pada TW 4 yaitu dari Lab Obat, Lab Kos dan Lab Pangan yaitu sebagai berikut :** 1. Bimbingan Teknis Harmonized Uncertainty Labelling System (HULS) dan pengukuran ketidakpastian (Uncertainty) di Laboratorium Obat (DARING) 2. Bimbingan Teknis Kalibrasi Instrumen Disolusi: Mechanical Calibration dan PVT (Performance Verification Testing) dan Verifikasi Disolusi Fenitoin Na dalam sediaan Tablet) / OBAT LURING 3. Bimbingan Teknis Penetapan Kadar 1,4-Dioksan dalam Sediaan Kosmetik secara Kromatografi Gas Headspace Detektor Spektrometri Massa (01/KO/MA-PPOMN/22) KQS (LURING) 4. Bimbingan teknis Penetapan kadar Aflatoksin M1 pada susu dan turunannya serta Penetapan Kadar Aflatoksin BG pada bumbu Pangan (Luring) 5. Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Metode Analisis dan Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran dalam Sediaan Kosmetik (LURING)	Nov -Des 2025	Akan lebih ditingkatkan pada Tw 4	Close	IK13_DatdukSeptember
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38	15.38	100	Pengumpulan data NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), mencakup Perencanaan, pelaksanaan pengawasan pre dan post market oleh Pemda serta Inovasi dalam tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (Agustus s.d September 2025)	1. Advokasi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan secara Daring pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Luring pada tanggal 25 September 2025, 2. Pendampingan pengisian Tools di Kabupaten Aceh Jaya 25 September 2025; 3. Pendampingan pengisian tools penilaian mandiri di Kabupaten Pidie Jaya 29 September 2025	1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyiapan NSPK berjalan baik 2. SKPD yang berkaitan perizinan PSAT, PSAH, PSAI, POSS dan PIRT berkontribusi dengan baik.	Advokasi dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota lainnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	September s.d Desember 2025	1. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah 2. Pendampingan pengisian tools mandiri oleh Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie Jaya (target Tahun 2025) 3. Pendampingan pengisian tools mandiri oleh Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Sabang (target tahun 2026) 4. Pemantauan pengisian tools dan validitas data dukung yang dilampirkan oleh Kabupaten/Kota	Laporan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman yang menjadi tanggungjawabnya (Laporan terdiri dari 2 Laporan / Agustus, September capaian kegiatan dan 1 Laporan keseluruhan pendampingan kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan)	Oktober sd November 2025	Penilaian oleh Tim Juri KPPA	Open	IK15
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100	Sampai akhir Agustus telah dilakukan pemeriksaan 2 sarana fortifikasi garam	Hingga September telah dilakukan pemeriksaan 3 sarana fortifikasi garam konsumsi di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireuen. Saat pemeriksaan sarana fortifikasi garam di Banda Aceh tutup permanen (permohonan pembatalan NIE) sarana di Aceh Besar tidak aktif melakukan produksi garam konsumsi beryodium, dan hanya sarana produksi garam di Bireuen yang aktif melakukan sarana produksi	Pemeriksaan sarana dilakukan sesuai perencanaan yaitu 1 sarana di bulan September	Pemeriksaan sarana fortifikasi telah selesai dilaporkan, akan dilakukan perencanaan dan pendataan sarana fortifikasi yang aktif untuk tahun berikutnya	Tahun 2026	Pemeriksaan 1 sarana fortifikasi garam konsumsi beryodium di Bireuen	-	-	Sebanyak 3 sarana fortifikasi telah diperiksa sesuai target dari 4 sarana fortifikasi dengan cakupan sebesar 75%		IK16_DatdukOktober

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	97.05	112.14	Nilai efektivitas KIE hingga Triwulan III adalah 97,05 (jumlah responden 546 orang) dengan target 86,54, terdiri atas: 1. Nilai Efektivitas KIE tatap muka sebesar 96.93 (297 orang responden) 2. Nilai Efektivitas KIE melalui media sebesar 97.18 (249 orang responden)	1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik 2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan pemerintah daerah 3. Pemilihan tema dan materi yang menarik dan mudah dipahami 4. Narasumber yang kompeten dan komunikatif 5. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.	1. Melaksanakan inovasi Jawab Netizen (Janet) dalam bentuk Podcast Berbisik BPOM Aceh yang tayang setiap bulan 2. Kolaborasi dengan akun lintas sektor di media sosial untuk meningkatkan jangkauan informasi 3. Berkolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, komunitas masyarakat untuk melaksanakan KIE tatap muka dengan *sharing* anggaran 4. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI	Melaksanakan KIE tatap muka dengan anggaran/sharing anggaran dari pihak luar	November 2025	1. Melaksanakan kegiatan KIE sesuai Juknis KIE 2. Melaksanakan inovasi Janet Podcast Berbisik BPOM Aceh bulan Oktober 2025 3. Melaksanakan KIE tentang Pencegahan Stunting di Kab. Pidie pada tanggal 30 Oktober 2025 (kolaborasi dengan Gampong Kampong Blang, Pidie) 3. Menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh sekolah, DWP BPKP dan Dinkes Aceh Besar 4. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI 5. Melaporkan kegiatan KIE sesuai timeline	-	-			IK17_DatdukOktober
		18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (5 Sekolah)	97.5	100.00	102.56	Target Realisasi pada Bulan September 87,5 % dan dapat dicapai dengan realisasi 83.75 %	Sesuai DO dan Petunjuk Teknis Kegiatan Sekolah tahapan pengawalan dilaksanakan sampai dengan TW IV. Pada Bulan Oktober seluruh tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah selesai baik pengawalan sekolah maupun monitoring sertifikasi sekolah.	Melibatkan Dinas Pendidikan dan DP3AKB dalam pengawalan pembudayaan keamanan pangan pada sekolah binaan ramah anak dan sekolah adiwiyata	Melaksanakan program Sekolah sinergi dengan lintas sektor terkait, yang berirsan dengan program Desa dan Pasar	Oktober s.d Desember 2025	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimbingan Teknis Kader KP Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 4. Pengawalan 4 sekolah di Kabupaten Simeulue pada tanggal 22 Juli 2025 5. Pengawalan di Kabupaten Aceh Selatan, Singkil dan Subulussalam dilaksanakan secara daring dan pengiriman laporan mandiri dari sekolah yang diintervensi 6. Monitoring dan sertifikasi sekolah aman dilaksanakan pada 21 s/d 23 Oktober 2025	Penyerahan sertifikat sekolah aman	November s.d Desember 2025	Penyerahan sertifikat dilaksanakan bersamaan dengan Monev Desa Pangan Aman	Pelaporan kegiatan sekolah dikirim terpusat melalui SAPA Sekolah 2025 pada https: //linkktr. ee/PJAS2025	IK18_DatdukOktober
		19. Jumlah desa pangan aman (1 Desa)	90.00	80.00	88.89	Target Realisasi pada Bulan September 70 % dan dapat dicapai dengan realisasi 71.40 %	Sesuai DO dan Petunjuk Teknis Kegiatan Desa tahapan pengawalan dilaksanakan sampai dengan TW IV. Pengawalan desa dilakukan oleh Loka Aceh Selatan dan pendampingan pelaporan dilakukan secara daring	1. Melibatkan Loka POM Aceh Selatan dalam melaksanakan pengawalan desa di 3 Kab/kota (Aceh Selatan, Subulussalam dan Singkil) 2. Berpartisipasi dengan Posyandu Desa terutama penyiapan PMT posyandu	Melaksanakan program Desa Pangan Aman sinergi dengan lintas sektor terkait, yang berirsan dengan program Sekolah	November s.d Desember 2025	1. Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimtek Komunitas Desa telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 4. Pengawalan 1 Desa tanggal 22 Juli 2025 5. Pengawalan 6 Desa pada tanggal 14 sd 17 Oktober 2025	Monitoring dan Evaluasi Desa	November s.d Desember 2025	Berproses ketahapan selanjutnya pengawalan dan Monev	Open	IK19_DatdukOktober
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (1 Pasar)	100.00	100.00	100.00	Capaian realisasi s.d Bulan Juli sudah mencapai 100 %	Seluruh tahapan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK) telah diselesaikan pada Bulan Juli 2025 (TW III) mengikuti Surat Edaran Nomor : PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.	Melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan UPTD Pasar dalam rangka pengawalan keamanan pangan pasar	Melaksanakan program Pasar sinergi dengan lintas sektor terkait yang berirsan dengan program Sekolah dan Desa pada tahun berikutnya	Tahun 2026	1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 3. Sosialisasi KP bagi Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025 4. Pengawasan KP pasar 5. Pengawalan Pasar Aman pada tanggal 15 Juli 2025	-	-	Tahapan PPABK tahun 2025 sudah selesai seluruhnya	Close	IK20_DatdukOktober
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	77.00	94.23	122.38	Realisasi melebihi target, realisasi pada bulan sebelumnya sudah mencapai 94 %, tahapan yang belum selesai tinggal monev dan pelaporan pada bulan November dan Desember.	Tingkat realisasi jauh melebihi target yang disebabkan penetapan target yang terlalu rendah.	Pendampingan UMKM dilakukan secara intesif	Melakukan monev dan pelaporan	November-Desember 2025	Melaksanakan fasilitasi pendampingan dan sertifikasi	Monev dan pelaporan	Nov-Des 2025	fasilitasi dan sertifikasi sudah selesai seluruhnya	open	IK21_DatdukOktober
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	74.00	68.00	91.89	Pada bulan Oktober capaian penyelesaian perkara hanya 95,77 persen. Hal ini disebabkan karena pada bulan ini ada 2 perkara dengan status tahap 2, 1 perkara dengan status P-21 dan satu perkara carry over pada tahap 1. Sedangkan untuk mencapai target pola minimal harus ada 3 perkara baru dengan status sudah tahap 2.	a. Hal ini karena perkara yang carry over sedang proses konsultasi dengan Jaksa peneliti dan Korwas PPNS b. Satu perkara yang status P-21 baru bisa dilaksanakan tahap-2 pada awal November disebabkan adanya kegiatan Jaksa yang tidak dapat ditinggalkan.	a. Mengintenskan pengumpulan berbagai informasi dari Inspeksi dan infokom sebagai bahan awal b. Mengintenskan pengumpulkan berbagai informasi dari medsos dan marketplace sebagai bahan awal c. Melakukan pendalaman informasi hasil pengumpulan informasi baik dengan operasi Siber maupun ke lapangan berupa kegiatan intelijen/investigasi d. Melaporkan secara rutin hasil pendalaman informasi kepada pimpinan untuk mendapatkan keputusan apakah ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau tidak. e. Mengintesifkan koordinasi dengan Jaksa Peneliti dan Korwas untuk penyelesaian perkara yang Carry Over. f. Berkoordinasi dengan Jaksa Peneliti untuk penyelesaian berkas perkara hingga terbit P-21 tanpa terbit P-19.	a. Melakukan operasi penindakan b. Melakukan operasi intelijen berdasarkan data awal yang diperoleh c. Berkoordinasi dengan Jaksa peneliti dan Korwas untuk penyelesaian perkara yang Carry Over d. Berkoordinasi dengan Jaksa Peneliti untuk pelaksanaan tahap-2 perkara yang sudah P-21	November	1. Berkoordinasi dengan Jaksa peneliti dan Korwas terkait penyelesaian perkara yang carry over 2. Berkoordinasi dengan jaksa peneliti untuk pelaksanaan tahap-2 perkara yang telah P-21 3. Operasi intelijen bulan Oktober 1 kali	1. Operasi penindakan 2. Operasi Intelijen 3. Pelaksanaan tahap-2 perkara yang telah P-21 4. Koordinasi dengan Jaksa dan Korwas untuk penyelesaian Perkara carry over.	1. November 2025 2. November 2025 3. awal November 2025 4. awal November 2025			IK_19_Datkung PenyelesaianPerkara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	Petugas secara disiplin melakukan kegiatan Siber dan profilling, dan melaporkannya ke aplikasi yang telah ditentukan.	Adanya sistem reminder berupa catatan di papan pengumuman internal maupun pengingat oleh sesama tim	Melakukan kegiatan Siber dan Profilling secara rutin dan disiplin serta memperhatikan tenggat waktu	Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada bulan November	November 2025	1. Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada Bulan September. 2. Melakukan pelaporan kerawanan bulan September. 3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari Direktorat Cekal 4. Melakukan analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh	1. Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada Bulan November. 2. Melakukan pelaporan kerawanan bulan November. 3.Mengumpulkan data dukung tindak lanjut rekomendasi SM II dari Direktorat Cekal 4. Mengumpulkan data dukung analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh tahun 2025	1. November 2025 2. November 2025 3. Nov-Des 2025 4. Nov-Des 2025			IK.20 DatukAnalisa Kejahatan
7	Layanan Publik UPT yang prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53	Penerapan yang konsisten terhadap 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (Kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan)	1. Terpenuhi seluruh aspek penilaian kinerja pelayanan publik (Nilai maksimal 5 untuk 6 aspek penilaian; 2. Hasil survei dari responden penerima layanan sangat memuaskan; 3. Inovasi pelayanan publik memberikan dampak maksimal	1. Peningkatan Aspek Profesionalisme SDM meliputi waktu pelayanan, kode etik, motivasi, penghargaan dan budaya pelayanan 2. Inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan 3. Capaian Pelayanan Prima	Sistem Informasi Pelayanan Publik ditingkatkan terutama memaksimalkan pemutakhiran berita internal di subsite resmi secara harian dan konsisten dengan meningkatkan varian informasi kegiatan yang telah dilakukan seluruh tim kerja baik lingkup internal maupun eksternal	November s.d Desember 2025	1. Upload data dukung F.01 serta Desk wawancara dengan tim penilai 08 Agustus 2025; 2. Melengkapi data dukung tambahan pada 21 s.d 25 Agustus 2025; 3. Exit meeting serta penandatangan berita acara pada 17 September 2025	-	-	Menunggu penyerahan sertifikat pelayanan prima pada saat REN		Datduk IPP
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		26. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun													
		28. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun			1. Melakukan penyusunan dan identifikasi risiko semester I dan II tahun 2025 . 2. Melakukan sosialisasi daftar risiko semester I kepada seluruh pegawai pada bulan Maret dan September 2025	1. Penyusunan identifikasi risiko dilakukan terhadap semua sasaran strategis tahun 2025-2029, melibatkan Pimpinan dan seluruh ketua tim 2. peran aktif dari auditor inter dalam mereview daftar risiko yang telah disusun 3. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan daftar risiko	1. Monitoring dari pimpinan 2. Keterlibatan Ketua tim sebgai pemilik risiko tekecil dalam penyusunan daftar risiko			1. Melakukan identifikasi risiko semester I dan II tahun 2025 2. Melakukan sosialisasi Sosialisasi penetapan tujuan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dan daftar risiko semester I dan II tahun 2025 3. Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 pada tanggal 15-30 September 2025					

Bulan November 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum: Rencana aksi yang belum selesai	Belum: *Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*1*	*13*	*14*	*1*	*16*	*17*
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	93.67	103.79	Realisasi pada akhir Oktober sebesar 93,15% dari target 90,25 %. (Persentase capaian 103,21%)	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak dan ketentuan DO	Melakukan sampling sesuai perencanaan dan DO	Melakukan sampling sesuai perencanaan dan DO	Desember	1.Pelaksanaan Sampling Oktober 2. Koordinasi tim sampling dan pengujian 3. Melakukan koordinasi dengan Lab regional dengan cara mengupdate kemampuan uji melalu link yang kemampuan Uji Balai regional	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Melaksanakan koordinasi antara inspeksi dan pengujian	Desember		Open	IK1_Daduknovember
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	Akhir Tahun		Realisasi pada akhir Oktober 2025 adalah 22.66 % dari target 26 % (Persentase capaian102,54%)	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	Seluruh kegiatan yang menunjang kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO	Tahun 2026	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e- Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO	Selesai	-			IK2
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.94	115.22	1. Realisasi pada akhir Oktober sebesar 97,69% dari target 85 %. (Persentase capaian 114,93%) 2. Terdapat peningkatan realisasi penyelesaian pengujian sesuai timeline	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten kecuali terhadap 3 sampel yang tidak dapat memenuhi uji BPA pada kemasan PC karena oven di laboratorium rusak dan belum ada kepastian dapat digunakan kembali. 3. Pada bulan November terjadi bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan listrik dan sinyal , sehingga parameter yang belum selesai uji di hold dahulu sampai kondisi listrik stabil untuk menjaga kondisi instrumen agar tidak terjadi kerusakan. Total sampel yang belum selesai uji ada 20 sampel.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	November	1. Pelaksanaan Sampling November 2. Renlak sampling bulan November 3. Koordinasi tim Inspeksi dan pengujian dalam rangka melaksanakan pengujian dan pelaporan SIPT 4. Melakukan koordinasi dengan lab regional	1. Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya 2. Melaksanakan koordinasi bidang inspeksi dan pengujian 3. Melakukan koordinasi dengan Lab regional 4. Melakukan Monev hasil pelaporan SIPT	Desember		Open	IK3_DatdukNpvember
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	Pada bulan Oktober terdapat pengujian diduga penyebab KLB KP dari MBG yang berasal dari Aceh Utara sebanyak 5 sampel	Pengujian Pangan yang diduga penyebab KLB KP telah dilakukan sesuai pedomaan tatalaksana Pengujian KLB KP sesuai informasi yang diperoleh dari Surat Keterangan KLB KP dari Dinas Kesehatan	Pada bulan Oktober sudah dilakukan pengujian terhadap 5 sampel MBG yang diduga penyebab KLB KP yang berasal dari Dinas Keshatan Kabupaten Aceh Utara. Pengujian telah dilakukan sesuai in formasi dari surat keterangan KLB KP yang telah dikirimkan bersama sampel.	-	-	1. Membuat jejaring dengan SPPI BGN. 2. Membuat video penanganan sampel KLB dan menayangkan di media sosial	-	-		Open	IK4_DatdukNovember
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	Realisasi sampai Oktober sebesar 87.5%, sebanyak 28 sampel telah disampling dan diuji di laboratorium dan target masih tercapai	1. Seluruh target sampel PIRT telah selesai disampling dan diperiksa. 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu sampling berdasarkan evaluasi pusat, karena seluruh sampel PIRT sebanyak 28 sampel wajib disampling TW I, sedangkan realisasi TW I hanya 11 sampel yang disampling dampak efisiensi. Sebanyak 17 sampel disampling pada TW II. 4, Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena terdapat sampel yang diroleback karena berdasarkan evaluasi Ditwas terdapat beberapa sampel yang harus diperbaiki dan sudah ditindaklanjuti.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratoriium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	Melakukan monev hasil sampling dan pengujian berdasarkan evaluasi pusat	Desember	1. Melakukan Koordinasi pemeriksaan dan pengujian terkait capaian indikator 2. Melaksanakan Monev waktu pelaporan pengujian 3. Monev hasil pengujian dan menindaklanjuti hasil uji TMS	Melakukan monev penyesuaian dengan evaluasi pusat	Desember		Open	IK5_DatdukNovember
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.30	89.35	107.26	Realisasi pada akhir Oktober 2025 adalah88.94 % (Capaian 106. 77 %)	1. Menghubungi sarana yang diberikan surat tindak lanjut secara intensif melalui WA/Telp 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp, telepon dan tatap muka langsung ke kantor. 3. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan. 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.	Desember	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	Rencana aksi tetap dilakukan berkesinambungan sampai akhir tahun	Desember			IK6_DatdukOktober

		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100.00	105.26	Realisasi pada akhir Oktober 2025 adalah 101.79 % (Capaian 107,15%)	1. Melakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi hingga akhir Oktober sebanyak 11 sarana (3sarana produksi Kosmetik dan 8 sarana produksi obat bahan alam) 2. Kesulitan dalam pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam, dari 4 sarana UKOT/UMOT yang diperiksa, keempatnya tidak melakukan kegiatan produksi OT, karena 3 diantaranya telah habis masa berlaku CPOTB dan 1 sarana penanggung jawab telah menggundurkan diri 3. Pelaku usaha UKOT/UMOT kurang komitmen dalam mengurus CPOTB	Melakukan pendataan kembali kondisi sarana produksi OT-Kosmetik	Melanjutkan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif	Desember	Melanjutkan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi TW IV 2. Melakukan pendataan sarana produksi sediaan farmasi (OBA-Kosmetik) yang masih aktif dan tidak aktif 3. Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha UKOT/UMOT tentang komitmen mereka dalam pengurusan dan penerapan CPOTB 4. Melakukan sampling produk dari sarana UKOT/UMOT yang bermasalah.	Desember		open	IK7.DadukOktober

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Sampai akhir Oktober, realisasi sebesar 100% dengan sarana yang diperiksa sebanyak 32 sarana MD dan 3 sarana PIRT yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana produksi hingga November sebanyak 40 sarana produksi MD dan 3 sarana PIRT yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai pedoman pengawasan produksi pangan olahan.	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Monev ketua tim 3. Adanya komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu	Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman	November	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana bulan November 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sampai Bulan November	Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di Bulan November	Desember		Open	IK8.DadukNovember
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.95	103.31	Realisasi sampai Bulan Oktober adalah 99.88%. (Persentase Capaian 103.24 %)	1. Tercapainya semua komponen penilaian IKU yang ada pada DO untuk semua komoditi yang diawasi 2. Melakukan Monev pelaksanaan inspeksi distribusi sediaan farmasi, kesesuaian tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan melalui SIPT	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Monev pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	1. Melaksanakan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Monev pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	Desember	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Monev pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	1. Rencana aksi terus dilakukan secara berkesinambungan 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	Desember		Open	IK9.DatdukNovember
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Realisasi sampai Oktober tercapai 100%, dimana sebanyak 92 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dari target 107 sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampai November, sebanyak 107 sarana distribusi pangan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Melaksanakan Monev ketua tim 3. Adanya Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	Melakukan monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Desember	1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi November 2. Melakukan monev hasil pemeriksaan sampai Bulan November	Melaksanakan monev hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Desember		Open	IK10_DatdukNovember
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.80	98.79	110.01	Realisasi pada akhir Oktober 2025 adalah 98.78 %. (Persentase capaian 110.00 %)	Pelaksanaan pengawasan iklan telah sesuai dengan komponen penilaian pada DO	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Pelaksanaan pengawasan iklan telah memenuhi semua komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	1. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Melaksanakan Monev Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan iklan sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	Desember	1. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan iklan sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi 4. Melakukan koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal	Pengawasan iklan yang menjadi target bulan November	Desember		Open	IK11.dadukOktober2025
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	100.00	125.00	Realisasi di akhir Oktober 100 % (Persentase Capaian 125%), untuk pemenuhan target dan ketepatan waktu pelaporan.	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik telah sesuai DO	1. Ketepatan jumlah label yang diawasi sesuai dengan target 2. Ketepatan waktu pelaporan selama pengawasan bulan Oktober	1. Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai DO 2. Untuk target tahun berikutnya akan diusulkan kenaikan berdasarkan capaian tahun 2025, sehingga persentase capaian memenuhi kriteria (maks 110 %)	Desember	1. Melakukan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Monev Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan label sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektrik yang menjadi target bulan November	November			IK12_DatdukOktober
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	Akhir Tahun		1. Telah melakukan Bimtek AMR pada Agustus 2025 2. Telah melakukan audiensi dan advokasi ke Gubernur Aceh dan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh terkait penerbitan SE Gubernur tentang pengendalian AMR di Provinsi Aceh. Penerbitan SE sedang dalam proses di Dinas Kesehatan Aceh. 3. Telah melakukan publikasi hasil pengawasan penggunaan Antibiotik berdasarkan resep dokter 4. Melaksanakan pengawasan sarana Apotek menggunakan tools AMR telah dilakukan 100 %	1. Pelaksanaan pengawasan Apotek dengan menggunakan tools AMR sesuai ketentuan 2. Melakukan publikasi hasil pengawasan Apotek terkait penggunaan antibiotik dengan resep dokter telah sesuai DO 3. Pelaksanaan Bimtek AMR sesuai DO	1. Pelaksanaan pengawasan Apotek dengan menggunakan tools AMR sesuai ketentuan 2. Melakukan publikasi hasil pengawasan Apotek terkait penggunaan antibiotik dengan resep dokter telah sesuai DO 3. Pelaksanaan Bimtek AMR sesuai DO	1. Pengawasan Apotek menggunakan tools AMR agar selalu dilaksanakan 100 % 2. Melaksanakan Publikasi dan KIE terkait pengendlaian AMR secara berkesinambungan 3. Melakukan Joint Inspection dengan lintas sektor terkait	November	1. Pengawasan rutin Apotek menggunakan tools AMR 2. Publikasi hasil pengawasan terkait pengendalian AMR sampai TW 3 3. Bimtek AMR kepada Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek	1. Publikasi hasil pengawasan terkait pengendalian AMR 2. KIE kepada masyarakat untuk bijak menggunakan antibiotik 3. Joint Inspection dengan lintas sektor terkait	November		Selesai	IK13

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.8	79.50	109.20	Penilaian Realisasi pada setiap Triwulan Realisasi pada TW 3 = 79.3 % dengan target 72.8 % (capaian 108.93 %) Rincian capaian (4) Komponen pada TW 3 sebagai berikut: **Standard Ruang Lingkup: 84.5** **Peralatan : 80.2** **Standar Kompetensi Laboratorium: 80** **Standar Metode Terverifikasi: 51.8** Nilai Pemenuhan SKL TW 3 (%): 79.5 Target Nilai SKL TW 4 (%): 73.0 Target Tahunan SKL: 73 Pemenuhan terhadap Target TW 4 (%) : 108.9	Capaian pada TW 3 = 79,3 (108.93%) , target TW3 = 72.8 **Persentase Pemenuhan SRL (%) = 84.5** **Persentase Pemenuhan Peralatan (%) = 80,2** **Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) = 80** **Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%) = 51.8** Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%) = 79.5 Kenaikan Capaian disebabkan adanya penambahan pada RL pengujian, verifikasi MA dan nilai kompetensi **PenambahanSRLTW3 sebanyak5ataktif** 1. Lab Kosmetik Penambahan SRL pada TW3 (1) MA : Verifikasi MA Isopropil M. Cresol 2. Mikrobiologi (2) MA : verifikasi Shegella dalam Obat Kuat Kuasi sediaan oral Verifikasi salmonella dalam sediaan obat kuasi oaral 3. Lab Obat (1) MA : Verifikasi Pregabalin kapsul 4. Lab Pangan (1) : Verifikasi Natamisin dalam produk keju penambahan SRL secara otomatis meningkatkan nilai kompetensi **PenambahanVerifikasiMA (16) MetodaAnalisa** Lab Kosmetik (4) MA : Diphenhidramin Hcl, 2. Terbinafine 3. PK. Allura 4. PK. Sodium Propionat Lab MBM : (2) Verif. MA 1. MA Kualitatif Deteksi E. Coli dalam sirup, 2. Verifikasi P.Aeroginosa dalam obat sediaan topikal Lab OBASKK (1) . Verifikasi Sibutramin, dkk secara GCMS Lab Obat (7) 1. Verifikasi Diazepam injeksi, 2. Meloksikam Tab 3. Tramadol Tab 4. Ketorolak Injeksi 5. Olanzapin Tab 6. Piroksikam tab 7. Tramadol injeksi Lab Pangan : (2) MA : 1. Natamisin 2. PK Kloramfencol secara ELISA **PengembanganKompetensi** Penambahan SRL secara Otomatis menambah nilai pada kompetensi **Peralatan** : tidak ada penambahan di TW4	1. Pelatihan Internal 2. Verifikasi Metoda Analisa 3. Pemeliharaan dan Maintanance alat Lab 4. Pengadaan Baku pembanding 5. Pengadaan alat-alat gelas 6. Pengadaan reagensia , suku cadang	Kegiatan akan terus ditingkatkan	November - Desember 2025	Program Kalibrasi alat Pengadaaan alat gelas Usulan anggaran untuk alat, concumable part, suku cadang TA 2026 Pelatihan Laboratorium	Semua target pelatihan terlaksana baik yang direncanakan secara daring maupun luring	Nov -Des 2025	Target tahunan tercapai sudah	Close	https://linktr.ee/SKL2025_Tingkat3_dan_Tingkat4
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38	Akhir Tahun		Pengumpulan data NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), mencakup Perencanaan, pelaksanaan pengawasan pre dan post market oleh Pemda serta Inovasi dalam tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (Agustus s.d September 2025)	1. Advokasi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan secara Daring pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Luring pada tanggal 25 September 2025, 2. Pendampingan pengisian Tools di Kabupaten Aceh Jaya 25 September 2025; 3. Pendampingan pengisian tools penilaian mandiri di Kabupaten Pidie Jaya 29 September 2025	1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyiapan NSPK berjalan baik 2. SKPD yang berkaitan perizinan PSAT, PSAH, PSAI, PDSS dan PIRT berkontribusi dengan baik.	Advokasi dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota lainnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	September s.d Desember 2025	1. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah 2. Pendampingan pengisian tools mandiri oleh Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie Jaya (target Tahun 2025) 3. Pendampingan pengisian tools mandiri oleh Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Sabang (target tahun 2026) 4. Pemantauan pengisian tools dan validitas data dukung yang dilampirkan oleh Kabupaten/Kota	Laporan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman yang menjadi tanggungjawabnya (Laporan terdiri dari 2 Laporan / Agustus, September capaian kegiatan dan 1 Laporan keseluruhan pendampingan kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan)	Oktober sd November 2025	Penilaian oleh Tim Juri KPPA	Open	IK15
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100	Sampai akhir Agustus telah dilakukan pemeriksaan 2 sarana fortifikasi garam	Hingga September telah dilakukan pemeriksaan 3 sarana fortifikasi garam konsumsi di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireuen. Saat pemeriksaan sarana fortifikasi garam di Banda Aceh tutup permanen (permohonan pembatalan NIE) sarana di Aceh Besar tidak aktif melakukan produksi garam konsumsi beryodium, dan hanya sarana produksi garam di Bireuen yang aktif melakukan sarana produksi	Pemeriksaan sarana dilakukan sesuai perencanaan yaitu 1 sarana di bulan September	Pemeriksaan sarana fortifikasi telah selesai dilaporkan, akan dilakukan perencanaan dan pendataan sarana fortifikasi yang aktif untuk tahun berikutnya	Tahun 2026	Pemeriksaan 1 sarana fortifikasi garam konsumsi beryodium di Bireuen	-	-		Open	IK16_DatdukNovember
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	97.05	112.14	Nilai efektivitas KIE hingga Triwulan III adalah 97,05 (jumlah responden 546 orang) dengan target 86,54, terdiri atas: 1. Nilai Efektivitas KIE tatap muka sebesar 96.93 (297 orang responden) 2. Nilai Efektivitas KIE melalui media sebesar 97.18 (249 orang responden)	1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik 2. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan pemerintah daerah 3. Pemilihan tema dan materi yang menarik dan mudah dipahami 4. Narasumber yang kompeten dan komunikatif 5. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.	1. Melaksanakan inovasi Jawab Netizen (Janet) dalam bentuk Podcast Berbisik BPOM Aceh yang tayang setiap bulan 2. Kolaborasi dengan akun lintas sektor di media sosial untuk meningkatkan jangkauan informasi 3. Berkolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, komunitas masyarakat untuk melaksanakan KIE tatap muka dengan *sharing* anggaran 4. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI	Melaksanakan KIE tatap muka dengan anggaran/sharing anggaran dari pihak luar	Desember 2025	1. Melaksanakan kegiatan KIE sesuai Juknis KIE 2. Melaksanakan inovasi Janet Podcast Berbisik BPOM Aceh bulan November 2025 3. Melaksanakan KIE tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Banda Aceh pada tanggal 10 November 2025 (kolaborasi dengan BNNP Aceh) 4. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI 5. Melaporkan kegiatan KIE sesuai timeline	-	-			IK17_DatdukNovember

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum: Rencana aksi yang belum selesai	Belum: *Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (5 Sekolah)	100.00	100.00	100.00	Target awal masih dihitung sebagai capaian realisasi sementara target pelaksanaan program sekolah berdasarkan anggaran effisiensi	Semua tahapan Sekolah dilaksanakan sesuai timeline yang ditentukan	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimbingan Teknis Kader KP Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 4. Pengawalan 4 sekolah di Kabupaten Simeulu pada tanggal 22 Juli 2025 5. Monitoring sekolah pada 5 sekolah intervensi di Kota Banda Aceh pada tanggal 21 sd 22 Agustus 2025 6. Sertifikasi sekolah dilaksanakan bersamaan dengan Monev terpadu Desa dan Pasar aman pada tanggal 18 November 2025	1. Sertifikasi sekolah aman di Banda Aceh dan diupayakan sekolah mendapatkan sertifikat laik sehat	Desember 2025	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimbingan Teknis Kader KP Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 4. Pengawalan 4 sekolah di Kabupaten Simeulu pada tanggal 22 Juli 2025 5. Monitoring sekolah pada 5 sekolah intervensi di Kota Banda Aceh pada tanggal 21 sd 22 Agustus 2025 6. Sertifikasi sekolah dilaksanakan bersamaan dengan Monev terpadu Desa dan Pasar aman pada tanggal 18 November 2025	-	-	Seluruh tahapan sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan telah selesai dilaksanakan	close	IK18_DatdukNovember
		19. Jumlah desa pangan aman (1 Desa)	100.00	100.00	100.00	Target awal masih dihitung sebagai capaian realisasi sementara target pelaksanaan program desa berdasarkan anggaran effisiensi	Tahapan kegiatan dilakukan sesuai timeline yang ditentukan	1. Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimtek Komunitas Desa telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 4. Pengawalan 1 Desa tanggal 22 Juli 2025	1. Melakukan monev Desa 2. Pengawalan Desa di 3 Kab/kota diupayakan dilakukan oleh Loka POM Aceh Selatan	November 2025	1. Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimtek Komunitas Desa telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 4. Pengawalan 1 Desa tanggal 22 Juli 2025 5. Monitoring dan Evaluasi Desa 18 November 2025	-	-	Seluruh tahapan sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan telah selesai dilaksanakan	close	IK19_DatdukNovember
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (1 Pasar)	100.00	100.00	100.00	Pelaksanaan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PABK) mengikuti progres tahapan effisiensi, dimana seluruh tahapan pasar aman telah diselesaikan pada Bulan Juli 2025	Tahapan kegiatan Pasar Aman dilakukan sebelum bulan Juli 2025	1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 3. Sosialisasi KP bagi Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025 4. Pengawasan KP pasar 5. Pengawalan Pasar Aman pada tanggal 15 Juli 2025	-	-	1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 3. Sosialisasi KP bagi Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025 4. Pengawasan KP pasar 5. Pengawalan Pasar Aman pada tanggal 15 Juli 2025	-	-	Tahapan PPABK tahun 2025 sudah selesai seluruhnya	Close	IK20_DatdukNovember
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82.00	94.23	114.91	Realisasi melebihi target, realisasi pada bulan sebelumnya sudah mencapai 94.%, tahapan yang belum selesai tinggal monev dan pelaporan pada bulan Desember.	Tingkat realisasi jauh melebihi target yang disebabkan penetapan target yang terlalu rendah.	Pendampingan UMKM dilakukan secara intesif	Melakukan monev dan pelaporan	Desember 2025	Melaksanakan fasilitasi pendampingan dan sertifikasi	Monev dan pelaporan	Des 2025	Fasilitasi dan sertifikasi sudah selesai seluruhnya	close	IK21_DatdukNovember
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82.00	78.75	96.04	Pada Bulan November capaian penyelesaian perkara hanya 96,04 persen. Hal ini disebabkan karena pada bulan ini ada 3 perkara dengan status sudah tahap 2, 1 perkara dengan status SPDP dan satu perkara carry over sudah SP3. Idealnya minimal 3 perkara tahap-2 dan 1 perkara sudah tahap-1.	1. Tidak tercapainya target dikarenakan proses penyelesaian berkas perkara keempat membutuhkan waktu yang tidak cepat terutama dalam hal proses penerbitan persetujuan sita dan geledah dari Pengadilan Negeri setempat yang memanfaatkan jaringan internet, disebabkan terjadinya bencana banjir bandang di hampir seluruh wilayah Aceh yang menyebabkan terganggunya aliran listrik dan jaringan internet pada minggu-minggu akhir November. 2. Pada sisi lain, perkara carry over telah selesai berproses dan Penyidik telah menerbitkan SP3.	1. Mengintesifkan koordinasi dengan Jaksa Peneliti dan Korwas untuk penyelesaian perkara yang Carry Over hingga penerbitan SP3 dapat dilakukan dengan baik 2. Berkoordinasi dengan ekspedisi yang mengirimkan barang target sehingga informasi yang diperoleh valid dan operasi penindakan berhasil dilaksanakan. 3. Berkoordinasi dengan Korwas dan Polres Aceh Barat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Penindakannya.		Desember 2025	1. Penerbitan SP3 untuk perkaran Carry Over. 2. Operasi penindakan 3. Gelar Kasus 4. Penerbitan SPDP 5. Operasi intelijen bulan November 1 kali	1. Pemberkasan	1. Desember 2025		Open	IK.19_DatkungPenyelesaian Perkara
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	Petugas secara disiplin melakukan kegiatan Siber dan profiling, dan melaporkannya ke aplikasi yang telah ditentukan.	Adanya sistem reminder berupa catatan di papan pengumuman internal maupun pengingat oleh sesama tim	Melakukan kegiatan Siber dan Profilling secara rutin dan disiplin serta memperhatikan tenggat waktu	Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada bulan November	November 2025	1. Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada Bulan November. 2. Melakukan pelaporan kerawanan bulan November.	1. Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada Bulanan. 2. Melakukan pelaporan kerawanan bulanan. 3.Mengumpulkan data dukung tindak lanjut rekomendasi SM II dari Direktorat Cekal 4. Mengumpulkan data dukung analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh tahun 2025	Seluruhnya bulan Desember 2025		Open	IK.20_DadukAnalisa Kejahatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
7	Layanan Publik UPT yang prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53	Penerapan yang konsisten terhadap 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (Kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan)	1. Terpenuhi seluruh aspek penilaian kinerja pelayanan publik (Nilai maksimal 5 untuk 6 aspek penilaian; 2. Hasil survei dari responden penerima layanan sangat memuaskan; 3. Inovasi pelayanan publik memberikan dampak maksimal	1. Peningkatan Aspek Profesionalisme SDM meliputi waktu pelayanan, kode etik, motivasi, penghargaan dan budaya pelayanan 2. Inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan 3. Capaian Pelayanan Prima	Sistem Informasi Pelayanan Publik ditingkatkan terutama memaksimalkan pemutakhiran berita internal di subsite resmi secara harian dan konsisten dengan meningkatkan varian informasi kegiatan yang telah dilakukan seluruh tim kerja baik lingkup internal maupun eksternal	Desember 2025	1. Upload data dukung F.01 serta Desk wawancara dengan tim penilai 08 Agustus 2025; 2. Melengkapi data dukung tambahan pada 21 s.d 25 Agustus 2025; 3. Exit meeting serta penandatangan berita acara pada 17 September 2025	-	-	Menunggu penyerahan sertifikat pelayanan prima pada saat REN		Datduk IPP
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25	Akhir Tahun												
		26. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78	Akhir Tahun												
		27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	Akhir Tahun												
		28. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2	Akhir Tahun		1. Melakukan penyusunan dan identifikasi risiko semester I dan II tahun 2025 . 2. Melakukan sosialisasi daftar risiko semester I kepada seluruh pegawai pada bulan Maret dan September 2025 3. Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 pada tanggal 15-30 September 2025	1. Penyusunan identifikasi risiko dilakukan terhadap semua sasaran strategis tahun 2025-2029, melibatkan Pimpinan dan seluruh ketua tim 2. peran aktif dari auditor inter dalam mereview daftar risiko yang telah disusun 3. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan daftar risiko	1. Monitoring dari pimpinan 2. Keterlibatan Ketua tim sebgai pemilik risiko tekecil dalam penyusunan daftar risiko			1. Melakukan identifikasi risiko semester I dan II tahun 2025 2. Melakukan sosialisasi Sosialisasi penetapan tujuan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dan daftar risiko semester I dan II tahun 2025 3. Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 pada tanggal 15-30 September 2025 4. Desk Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 pada tanggal 10 November 2025					

Bulan Desember 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum: Rencana aksi yang belum selesai	Belum: *Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	93.77	103.90	Realisasi pada akhir November sebesar 93,67% dari target 90,25 %. (Persentase capaian 103,79%)	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak dan ketentuan DO	Melakukan sampling sesuai perencanaan dan DO	Melakukan sampling sesuai perencanaan dan DO	Desember	1.Pelaksanaan Sampling November dan Desember 2. Koordinasi tim sampling dan pengujian 3, Melakukan koordinasi dengan Lab regional dengan cara mengupdate kemampuan uji melalu link yang kemampuan Uji Balai regional 4. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	-	-		Open	IK1.DadukDesember
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26.66	102.54	Realisasi pada akhir November 2025 adalah 26.66 % dari target 26 % (Persentase capaian 102.54%)	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	Seluruh kegiatan yang menunjang keberhasilan agar tetap dilakukan pada tahun berikutnya.	Tahun 2026	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.	-	-	Sarana pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE dan melaporkan PV melalui e-Meso telah sesuai dengan target yang diberikan pada tahun 2025	Close	IK2
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.32	114.49	1. Realisasi pada akhir November sebesar 97,94% dari target 85 %. (Persentase capaian 115,22%) 2. Terdapat peningkatan realisasi penyelesaian pengujian sesuai timeline	1. Seluruh sampel yang disampling telah diperiksa sesuai dengan renlak	1. Sampling dilakukan sesuai renlak 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	Desember	1. Pelaksanaan Sampling Desember 2. Renlak sampling bulan Desember 3. Koordinasi tim inspeksi dan pengujian dalam rangka melaksanakan pengujian dan pelaporan SIPT 4. Melakukan koordinasi dengan lab regional 5. Melakukan Monev sampling tahun 2025	-	-	Sampling Pangan Olahan telah selesai dilakukan dan sampel paangan olahan berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Close	IK3_DatdukDesember
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100.00	100.00	Pada bulan Oktober terdapat pengujian diduga penyebab KLB KP dari MBG yang berasal dari Aceh Utara sebanyak 5 sampel	Pengujian Pangan yang diduga penyebab KLB KP telah dilakukan sesuai pedomaan tatalaksana Pengujian KLB KP sesuai informasi yang diperoleh dari Surat Keterangan KLB KP dari Dinas Kesehatan	Pada bulan Oktober sudah dilakukan pengujian terhadap 5 sampel MBG yang diduga penyebab KLB KP yang berasal dari Dinas Keshatan Kabupaten Aceh Utara. Pengujian telah dilakukan sesuai in formasi dari surat keterangan KLB KP yang telah dikirimkan bersama sampel.	-	-	1. Membuat jejaring dengan SPPI BGN. 2. Membuat video penanganan sampel KLB dan menayangkan di media sosial	-	-	Sudah selesai melaksanakan pengujian sampel dan koordinasi terkait KLB di Tahun 2025	Open	IK4_DatdukDesember
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	Realisasi sampai November sebesar 87.5%, sebanyak 28 sampel telah disampling dan diuji di laboratorium dan target masih tercapai	1. Seluruh target sampel PIRT telah selesai disampling dan diperiksa. 2. Sampel dilakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling secara konsisten. 3. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu sampling berdasarkan evaluasi pusat, karena seluruh sampel PIRT sebanyak 28 sampel wajib disampling TW I, sedangkan realisasi TW I hanya 11 sampel yang disampling dampak efisiensi. Sebanyak 17 sampel disampling pada TW II. 4. Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT dibandingkan bulan sebelumnya karena terdapat sampel yang diroleback karena berdasarkan evaluasi Ditwas terdapat beberapa sampel yang harus diperbaiki dan sudah ditindaklanjuti.	1. Sampling dilakukan sesuai renlak terbaru (buka Blokir) 2. Koordinasi sampling antara Tim Laboratorium dan Tim Inspeksi Pangan berjalan efektif. 3. Monev Ketua tim terkait Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, dan Pelaporan SIPT	Melakukan monev hasil sampling dan penguijan berdasarkan evaluasi pusat	Desember	1. Melakukan Koordinasi pemeriksaan dan pengujian terkait capaian indikator 2. Melaksanakan Monev waktu pelaporan pengujian 3. Monev hasil pengujian dan menindaklanjuti hasil uji TMS	-	-	Sampel PIRT telah selesai dilakukan dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Close	IK5_DatdukDesember
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.30	85.78	102.98	Realisasi pada akhir November 2025 adalah 89.35% (Capaian 107.26 %)	1. Menghubungi sarana yang diberikan surat tindak lanjut secara intensif melalui WA/Telp 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp, telepon dan tatap muka langsung ke kantor. 3. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2, Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan. 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.	Desember	1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait tentang pentingnya memberikan feedback terhadap hasil pemeriksaan 2. Melakukan upaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 3. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	Kegiatan sudah selesai dan capaian 102.98 %	*close*	IK6_DatdukDesember
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100.00	105.26	Realisasi pada akhir November 2025 adalah 100 % (Capaian 105,26%)	1. Melakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi hingga akhir Oktober sebanyak 11 sarana (3sarana produksi Kosmetik dan 8 sarana produksi obat bahan alam). 2. Kesulitan dalam pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam, dari 4 sarana UKOT/UMOT yang diperiksa, keempatnya tidak melakukan kegiatan produksi OT, karena 3 diantaranya telah habis masa berlaku CPOTB dan 1 sarana penanggung jawab telah menggundurkan diri 3. Pelaku usaha UKOT/UMOT kurang komitmen dalam mengurus CPOTB	Melakukan pendataan kembali kondisi sarana produksi OT-Kosmetik	Melanjutkan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif	Desember	1. Melanjutkan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif 2. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi TW IV 3.Melakukan pendataan sarana produksi sediaan farmasi (OBA-Kosmetik) yang masih aktif dan tidak aktif 4. Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha UKOT/UMOT tentang komitmen mereka dalam pengurusan dan penerapan CPOTB 5. Melakukan sampling produk dari sarana UKOT/UMOT yang bermasalah.			Kegiatan sudah selesai dan capaian 105.26 %	*close*	IK7.DadukDesember
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Sampai akhir November, realisasi sebesar 100% dengan sarana yang diperiksa sebanyak 37 sarana MD dan 3 sarana PIRT yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana produksi hingga Desember sebanyak 40 sarana produksi MD dan 4 sarana PIRT yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai pedoman pengawasan produksi pangan olahan.	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Monev ketua tim 3. Adanya komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu	Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman	Desember	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana bulan Desember 2. Melakukan Monev hasil pemeriksaan sampai Bulan Desember	-	-	Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Close	IK8.DadukDesember

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum: Rencana aksi yang belum selesai	Belum: *Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.85	103.20	Realisasi sampai Bulan November adalah 99.95%. (Persentase Capaian 103.31%)	1. Tercapainya semua komponen penilaian IKU yang ada pada DO untuk semua komoditi yang diawasi 2. Melakukan Money pelaksanaan inspeksi distribusi sediaan farmasi, kesesuaian tindak lanjut hasil inspeksi dan pelaporan melalui SIPT	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Money pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	1. Melaksanakan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Money pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder	Desember	1. Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak 2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya 3. Money pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO 5. Pemanfaatan data e-was dan sharing folder			Kegiatan sudah selesai dan capaian 103.20 %	*Close*	IK9_DatdukDesember
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Realisasi sampai November tercapai 100%, dimana sebanyak 107 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dari target 107 sarana telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampai Desember, sebanyak 107 sarana distribusi pangan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu	1. Pemeriksaan sarana sesuai perencanaan 2. Melaksanakan Monev ketua tim 3. Adanya Komitmen petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan	Melakukan monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	Desember	1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Desember 2. Melakukan monev hasil pemeriksaan sampai Bulan Desember	Melaksanakan monev hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Desember	Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	Close	IK10_DatdukDesember
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.80	99.20	110.47	Realisasi pada akhir November 2025 adalah 98.79 %. (Persentase capaian 110.01 %)	Pelaksanaan pengawasan iklan telah sesuai dengan komponen penilaian pada DO	1. Pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Money Ketua Tim 3. Pelaksanaan pengawasan iklan telah memenuhi semua komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	1. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Melaksanakan Monev Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan iklan sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	Desember	1. Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Money Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan iklan sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi 4. Melakukan koordinasi dengan Komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan di media penyiaran lokal	-	-	Pengawasan iklan sudah selesai dan sesuai ketentuan	*Closed*	IK11.dadukDesember2025
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	95.83	119.79	Realisasi di akhir November 100 % (Persentase Capaian 125%), untuk pemenuhan target dan ketepatan waktu pelaporan.	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik telah sesuai DO	1. Ketepatan jumlah label yang diawasi sesuai dengan target 2. Ketepatan waktu pelaporan selama pengawasan bulan November	1. Pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai DO 2. Untuk target tahun berikutnya akan diusulkan kenaikan berdasarkan capaian tahun 2025, sehingga persentase capaian memenuhi kriteria (maks 110 %)	Desember	1. Melakukan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 2. Money Ketua Tim 3. Melakukan pengawasan label sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi	-	-	Pengawasan label produk tembakau/rokok eletronik sudah selesai dan sesuai ketentuan	close	IK12_DatdukDesember
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105.69	105.69	1. Telah melakukan Bimtek AMR pada Agustus 2025 2. Telah melakukan audiensi dan advokasi ke Gubernur Aceh dan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh terkait penerbitan SE Gubernur tentang pengendalian AMR di Provinsi Aceh. Penerbitan SE sedang dalam proses di Dinas Kesehatan Aceh. 3. Telah melakukan publikasi hasil pengawasan penggunaan Antibiotik berdasarkan resep dokter 4. Melaksanakan pengawasan sarana Apotek menggunakan tools AMR telah dilakukan 100 %	1. Pelaksanaan pengawasan Apotek dengan menggunakan tools AMR sesuai ketentuan 2. Melakukan publikasi hasil pengawasan Apotek terkait penggunaan antibiotik dengan resep dokter telah sesuai DO 3. Pelaksanaan Bimtek AMR sesuai DO	1. Pelaksanaan pengawasan Apotek dengan menggunakan tools AMR sesuai ketentuan 2. Melakukan publikasi hasil pengawasan Apotek terkait penggunaan antibiotik dengan resep dokter telah sesuai DO 3. Pelaksanaan Bimtek AMR sesuai DO	1. Pengawasan Apotek menggunakan tools AMR agar selalu dilaksanakan 100 % 2. Melaksanakan Publikasi dan KIE terkait pengendlaian AMR secara berkesinambungan 3. Melakukan Joint Inspection dengan lintas sektor terkait	Desember	1. Pengawasan rutin Apotek menggunakan tools AMR 2. Publikasi hasil pengawasan terkait pengendalian AMR sampai TW 4 3. Bimtek AMR kepada Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek 4. Advokasi dengan Gubernur Aceh dan Sekda Aceh sehingga SE GUbernur Aceh terkait pengendalian AMR diterbitkan pada Desember 2025	-	-	Kegiatan pemenuhan target pengendalian AMR Tahun 2025 sudah selesai	close	IK13
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.0	79.60	109.04	Penilaian Realisasi pada setiap Triwulan Realisasi pada TW 3 = 79.3 % dengan target 72.8 % (capaian 108.93 %) Rincian capaian (4) Komponen pada TW 3 sebagai berikut: **Standard Ruang Lingkup: 84.5** **Peralatan : 80.2** **Standar Kompetensi Laboratorium: 80** **Standar Metode Terverifikasi: 51.8** Nilai Pemenuhan SKL TW 3 (%): 79.5 Target Nilai SKL TW 4 (%): 73.0 Target Tahunan SKL: 73 Pemenuhan terhadap Target TW 4 (%) : 108.9	Capaian pada TW 3 = 79,3 (108.93%) , target TW3 = 72.8 **Persentase Pemenuhan SRL (%) = 84.5** **Persentase Pemenuhan Peralatan (%) = 80,2** **Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) = 80** **Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%) = 51.8** Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%) = 79.5 Kenaikan Capaian disebabkan adanya penambahan pada RL pengujian, verifikasi MA dan nilai kompetensi **PenambahanSRLTW3 sebanyak5ataktif** 1. Lab Kosmetik Penambahan SRL pada TW3 (1) MA : Verifikasi MA Isopropil M. Cresol 2. Mikrobiologi (2) MA : verifikasi Shegella dalam Obat Kuat Kuasi sediaan oral Verifikasi salmonella dalam sedian obat kuasi oaral 3. Lab Obat (1) MA : Verifikasi Pregabalin kapsul 4. Lab Pangan (1) : Verifikasi Natamisin dalam produk keju penambahan SRL secara otomatis meningkatkan nilai kompetensi **PenambahanVerifikasiMA (16) MetodaAnalisa** Lab Kosmetik (4) MA : Diphenhidramin Hcl, 2. Terbinafine	1. Pelatihan Internal 2. Verifikasi Metoda Analisa 3. Pemeliharaan dan Maintanance alat Lab 4. Pengadaan Baku pembanding 5. Pengadaan alat-alat gelas 6. Pengadaan reagensia , suku cadang	Kegiatan akan terus ditingkatkan	November - Desember 2025	Program Kalibrasi alat Pengadaaan alat gelas Usulan anggaran untuk alat, concumable part, suku cadang TA 2026 Pelatihan Laboratorium Uji Propisiensi / Uji Banding / Uji / Koloborasi dengan Hasil semua memuaskan	-	-	Target tahunan sudah tercapai	Close	https://linktr.ee/SKL2025_Tingkat3_dan_Tingkat4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38	15.38	100.00	1. Pengumpulan data NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), mencakup Perencanaan, pelaksanaan pengawasan pre dan post market oleh Pemda serta Inovasi dalam tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (Agustus s.d September 2025) 2. Cakupan kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang didampingi ada 13 Kab/kota dan target pendampingan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie Jaya	1. Advokasi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan secara Daring pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Luring pada tanggal 25 September 2025, 2. Pendampingan pengisian Tools di Kabupaten Aceh Jaya 25 September 2025; 3. Pendampingan pengisian tools penilaian mandiri di Kabupaten Pidie Jaya 29 September 2025	1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyiapan NSPK berjalan baik 2. SKPD yang berkaitan perizinan PSAT, PSAH, PSAI, POSS dan PIRT berkontribusi dengan baik.	Advokasi dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota lainnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	September s.d Desember 2025	1. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah 2. Pendampingan pengisian tools mandiri oleh Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie Jaya (target Tahun 2025) 3. Pendampingan pengisian tools mandiri oleh Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Sabang (target tahun 2026) 4. Pemantauan pengisian tools dan validitas data dukung yang dilampirkan oleh Kabupaten/Kota	Laporan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman yang menjadi tanggungjawabnya (Laporan terdiri dari 2 Laporan / Agustus, September capaian kegiatan dan 1 Laporan keseluruhan pendampingan kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan)	Oktober sd November 2025	1. Penilaian oleh Tim Juri KPPA. 2. Advokasi dan pendampingan wilayah Kab/Kota target 2025 sudah selesai dilakukan.	Close	IK15
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100.00	Pemeriksaan Sarana produksi pangan fortifikasi telah selesai dilakukan pada bulan september sebanyak 3 sarana	Pemeriksaan 3 sarana fortifikasi garam konsumsi dilakukandi wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireuen. Saat pemeriksaan sarana fortifikasi garam di Banda Aceh tutup permanen (permohonan pembatalan NIE) sarana di Aceh Besar tidak aktif melakukan produksi garam konsumsi beryodium, dan hanya sarana produksi garam di Bireuen yang aktif melakukan sarana produksi	Pemeriksaan sarana dilakukan sesuai perencanaan	Pemeriksaan sarana fortifikasi telah selesai dilaporkan, akan dilakukan perencanaan dan pendataan sarana fortifikasi yang aktif untuk tahun berikutnya	Tahun 2026	-	-	-	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	Open	IK16_DatdukDesember
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	96.45	111.45	Nilai efektivitas KIE hingga Triwulan IV adalah 96.45 (jumlah responden 597 orang) dengan target 86,54, terdiri atas: 1. Nilai Efektivitas KIE tatap muka sebesar 96.7 (328 orang responden) 2. Nilai Efektivitas KIE melalui media sebesar 96.21 (269 orang responden)	1. Komitmen dan kerjasama antar petugas yang cukup baik 2. Kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, universitas, dan lintas sektor lainnya 3. Pemilihan tema dan materi yang menarik dan mudah dipahami 4. Narasumber yang kompeten dan komunikatif 5. Pemahaman peserta KIE terhadap beberapa materi yang disampaikan pada saat KIE tatap muka bervariasi.	1. Melaksanakan inovasi Jawab Netizen (Janet) dalam bentuk Podcast Berbisik BPOM Aceh yang tayang setiap bulan 2. Kolaborasi dengan akun lintas sektor di media sosial untuk meningkatkan jangkauan informasi 3. Berkolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, komunitas masyarakat untuk melaksanakan KIE tatap muka dengan *sharing* anggaran 4. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI	Melaksanakan KIE untuk para relawan agar Obat dan Makanan donasi dapat terjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatannya.	Desember 2025	1. Melaksanakan kegiatan KIE sesuai Juknis KIE 2. Melaksanakan inovasi Janet Podcast Berbisik BPOM Aceh bulan Desember 2025 3. Melaksanakan KIE Keamanan Obat dan Makanan kepada Relawan pada tanggal 9 Desember 2025 4. Aktif dalam menayangkan konten informasi baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI 5. Melaporkan kegiatan KIE sesuai timeline	-	-	Kegiatan KIE sudah selesai dilaksanakan	Close	IK17_DatdukDesember
		18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (5 Sekolah)	100.00	100.00	100.00	Target awal masih dihitung sebagai capaian realisasi sementara target pelaksanaan program sekolah berdasarkan anggaran effisiensi	Semua tahapan Sekolah dilaksanakan sesuai timeline yang ditentukan	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimbingan Teknis Kader KP Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 4. Pengawalan 4 sekolah di Kabupaten Simeulu pada tanggal 22 Juli 2025 5. Monitoring sekolah pada 5 sekolah intervensi di Kota Banda Aceh pada tanggal 21 sd 22 Agustus 2025 6. Sertifikasi sekolah dilaksanakan bersamaan dengan Monev terpadu Desa dan Pasar aman pada tanggal 18 November 2025	Sertifikasi sekolah aman di Banda Aceh dan diupayakan sekolah mendapatkan sertifikat laik sehat	Desember 2025	1. Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimbingan Teknis Kader KP Sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 4. Pengawalan 4 sekolah di Kabupaten Simeulu pada tanggal 22 Juli 2025 5. Monitoring sekolah pada 5 sekolah intervensi di Kota Banda Aceh pada tanggal 21 sd 22 Agustus 2025 6. Sertifikasi sekolah dilaksanakan bersamaan dengan Monev terpadu Desa dan Pasar aman pada tanggal 18 November 2025	-	-	Seluruh tahapan sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan telah selesai dilaksanakan	Close	IK18_DatdukDesember
		19. Jumlah desa pangan aman (1 Desa)	100.00	100.00	100.00	Target awal masih dihitung sebagai capaian realisasi sementara target pelaksanaan program desa berdasarkan anggaran effisiensi	Tahapan kegiatan dilakukan sesuai timeline yang ditentukan	1. Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimtek Komunitas Desa telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 4. Pengawalan 1 Desa tanggal 22 Juli 2025	1. Melakukan monev Desa 2. Pengawalan Desa di 3 Kab/kota diupayakan dilakukan oleh Loka POM Aceh Selatan	Desember 2025	1. Advokasi Kelembagaan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 3. Bimtek Komunitas Desa telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 4. Pengawalan 1 Desa tanggal 22 Juli 2025 5. Monitoring dan Evaluasi Desa 18 November 2025	-	-	Seluruh tahapan sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan telah selesai dilaksanakan	close	IK19_DatdukDesember
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (1 Pasar)	100.00	100.00	100.00	Pelaksanaan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PABK) mengikuti progres tahapan effisiensi, dimana seluruh tahapan pasar aman telah diselesaikan pada Bulan Juli 2025	Tahapan kegiatan Pasar Aman dilakukan sebelum bulan Juli 2025	1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 3. Sosialisasi KP bagi Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025 4. Pengawasan KP pasar 5. Pengawalan Pasar Aman pada tanggal 15 Juli 2025	Melaksanakan program Pasar sinergi dengan lintas sektor terkait yang berirsan dengan program Sekolah dan Desa pada tahun berikutnya	Tahun 2026	1. Forum Advokasi Komitmen Pemda dan LIntas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 3. Sosialisasi KP bagi Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025 4. Pengawasan KP pasar 5. Pengawalan Pasar Aman pada tanggal 15 Juli 2025	-	-	Tahapan PPABK tahun 2025 sudah selesai seluruhnya	Close	IK20_DatdukDesember
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100.00	100.00	100.00	Realisasi melebihi target, realisasi pada bulan sebelumnya sudah mencapai 94 %, tahapan yang belum selesai tinggal monev dan pelaporan pada bulan Desember.	Tingkat realisasi jauh melebihi target yang disebabkan penetapan target yang terlalu rendah.	Pendampingan UMKM dilakukan secara intesif	Melakukan monev dan pelaporan	Desember 2025	Melaksanakan fasilitasi pendampingan dan sertifikasi	-	-	Fasilitasi dan sertifikasi sudah selesai seluruhnya	close	IK21_DatdukDesember

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status	Data Dukung
											Rencana aksi yang sudah selesai	Belum				
												Rencana aksi yang belum selesai	*Timeline*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	88.75	95.95	Perkara keempat sudah selesai tahap pemberkasan dan penelitian oleh Jaksa. Selanjutnya terbit P-19 yang harus segera dipenuhi untuk kelengkapan berkas perkara	Proses pemberkasan telah dimulai pada Minggu ketiga bulan November dan baru selesai pada Minggu kedua bulan Desember. Hal yang menyebabkan proses tersebut cukup lama apakah adanya kondisi force majoure dimana terjadi banjir bandang di provinsi Aceh yang menimbulkan tidak berfungsi dengan baik sarana penunjang kinerja dan koordinasi seperti listrik, internet, fasilitas transportasi dan lainnya.	Kondisi force majoure menghambat kelancaran proses pemberkasan	Pemenuhan P-19	Januari 2026	Pemberkasan perkara	1.Pemenuhan P-19 hingga P-21; 2. tahap-2	Januari 2026		Open	IK.19_DatkungPenyelesaian Perkara
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	100.00	111.11	Laporan kegiatan Siber, profiling dan data kerawanan telah dilaporkan tepat waktu. Untuk tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan pada semester-1 perlu ada perbaikan data dukung. Analisa kejahatan Obat dan Makanan masih proses pemilihan tema dan pengumpulan data	Adanya koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan dan staf dan sistem reminder dan pengawalan penyelesaian laporan terkait ketepatan waktu serta sistem back up yang dilakukan oleh anggota tim ketika aplikasi pelaporan inawebcrawler mengalami pengembangan sehingga target dapat dipenuhi	Sistem reminder pelaporan	Penyusunan analisa kejahatan Obat dan Makanan segera direncanakan diawal tahun	Januari 2026	1. Pelaporan kegiatan siber dan profiling bulan Desember 2025; 2. pelaporan kerawanan bulan Desember 2025; 3. pemenuhan tindak lanjut rekomendasi dari cegah tangkal; 4. Pemenuhan tindak lanjut dari Analisa Kejahatan BBPOM Aceh tahun 2024; penyusunan analisa kejahatan Obat dan Makanan	-	-		Open	IK.20_DadukAnalisa Kejahatan
7	Layanan Publik UPT yang prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.96	105.53	Penerapan yang konsisten terhadap 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (Kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan)	1. Terpenuhi seluruh aspek penilaian kinerja pelayanan publik (Nilai maksimal 5 untuk 6 aspek penilaian; 2. Hasil survei dari responden penerima layanan sangat memuaskan; 3. Inovasi pelayanan publik memberikan dampak maksimal	1. Peningkatan Aspek Profesionalisme SDM meliputi waktu pelayanan, kode etik, motivasi, penghargaan dan budaya pelayanan 2. Inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan 3. Capaian Pelayanan Prima	Sistem Informasi Pelayanan Publik ditingkatkan terutama memaksimalkan pemutakhiran berita internal di subsite resmi secara harian dan konsisten dengan meningkatkan varian informasi kegiatan yang telah dilakukan seluruh tim kerja baik lingkup internal maupun eksternal	Januari 2026	1. Upload data dukung F.01 serta Desk wawancara dengan tim penilai 08 Agustus 2025; 2. Melengkapi data dukung tambahan pada 21 s.d 25 Agustus 2025; 3. Exit meeting serta penandatangan berita acara pada 17 September 2025	-	-	Menunggu penyerahan sertifikat pelayanan prima pada saat REN	Open	Datduk IPP
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25	90.24	99.99	1. Melakukan pembentukan Tim kerja pembangunan ZI 2. Monitoring dan evaluasi rencana kerja.	Sudah dilaksanakannya desk terkait WBBM pada Bulan Desember 2025	1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja setiap bulan. 2. Menambah inovasi dalam mendukung kinerja.	-	-	-	-	-	Menunggu hasil dari KemenPANRB terkait desk RB	Close	DatdukZI
		26. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78	81.00	97.85	Nilai AKIP Tahun 2024 sebesar 81.48 dan pada tahun 2025 menurun 0.48 poin	Terjadi penurunan pada komponen capaian kinerja dimana dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024	Adanya aplikasi SIGARANG yang memudahkan dalam pengisian dan pengambilan data capaian kinerja dan realisasi anggaran	-	-	-	-	-	Nilai AKIP menurun 0.48 poin diharapkan tahun 2026 dapat dilakukan perbaikan terkait kinerja	Close	NilaiAKIP
		27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	5	100.00	Nilai NKA tahun 2025 sebesar 92.37	Penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2025 sebesar 99.65%	1. Melakukan monev anggaran secara berkala. 2. Melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA/POK.	-	-	-	-	-	Nilai NKA 92.37 dengan kategori Sangat Baik	Open	NilaiNKA
		28. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2	2.906	90.81	1. Melakukan penyusunan dan identifikasi risiko semester I dan II tahun 2025 2. Melakukan sosialisasi daftar risiko semester I kepada seluruh pegawai pada bulan Maret dan September 2025 3. Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 pada tanggal 15-30 September 2025 4. Desk Manrisk tanggal 10 November 2025	1. Penyusunan identifikasi risiko dilakukan terhadap semua sasaran strategis tahun 2025-2029, melibatkan Pimpinan dan seluruh ketua tim 2. peran aktif dari auditor inter dalam mereview daftar risiko yang telah disusun 3. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan daftar risiko	1. Monitoring dari pimpinan 2. Keterlibatan Ketua tim sebagai pemilik risiko terkecil dalam penyusunan daftar risiko	-	-	-	-	-		Close	NilaiManrisk

TW 3

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	• Kurangnya ketersediaan reagensia dan suku cadang (*sparepart*) alat laboratorium yang sudah habis masa pakainya. • Adanya kerusakan alat yang menghambat kelancaran pengujian. • Kendala Operasional & Manajemen Waktu Beberapa Balai/Loka tidak memenuhi komitmen pengiriman sampel (paling lambat tanggal 10 setiap bulan), sehingga penguji harus	• Melakukan sampling sesuai perencanaan dan DO • Koordinasi tim sampling dan pengujian • Melakukan koordinasi dengan Lab regional dengan cara mengupdate kemampuan uji melalu link yang kemampuan Uji Balai regional • Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline • Petugas secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi sesuai dengan renlak	• Pelaksanaan Sampling September • Koordinasi tim sampling dan pengujian • Melakukan koordinasi dengan Lab regional dengan cara mengupdate kemampuan uji melalu link yang kemampuan Uji Balai regional • Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline • Menyelesaikan aplikasi rasa dari hati web based • Permintaan Kolom dari lab kosmetik dan OBA SKK	Belum Selesai	• Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya • Melaksanakan koordinasi antara inspeksi dan pengujian	Oktober	Y	O-7 , O-8, S-3	• Banyak parameter pengujian yang tidak dapat dilakukan • Terjadi kerusakan insidentil pada instrumen pengujian • Terjadi penghematan anggaran pelaksanaan yang cukup dalam

		menunggu agar sampel dengan jenis yang sama bisa diuji sekaligus demi efisiensi. • Sempat terjadi efisiensi anggaran pada Triwulan I yang membatasi ruang lingkup sampling (hanya di dalam kota), meskipun sudah mulai teratasi dengan relaksasi anggaran di TW II dan III.	terbaru (buka blokir), pedoman sampling dan definisi operasional indikator kinerja. • Komunikasi yang baik dengan tim sampling terkait kemampuan uji dan secara konsisten memantau ketersediaan reagen serta sarana pengujian lainnya.							
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	• Adanya kerusakan alat yang menghambat kelancaran pengujian • Adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I yang sempat membatasi jangkauan lokasi sampling hanya di wilayah Banda Aceh. • Risiko kesalahan pengisian data	• Melaksanakan sampling sesuai renlak • Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling • Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline	• Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling setelah adanya relaksasi anggaran sesuai dengan Pedoman Sampling dengan kembali menjadi target awal. • Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium kurang dari 5 hari kerja sejak sampel	Belum Selesai	• Melakukan sampling sesuai perencanaan untuk bulan selanjutnya • Melaksanakan koordinasi bidang inspeksi dan pengujian • Melakukan koordinasi dengan Lab regional • Melakukan Monev hasil pelaporan SIPT	Oktober	Y	O-7 , O-8, S-3, O-42	• Banyak parameter pengujian yang tidak dapat dilakukan • Terjadi kerusakan insidentil pada instrumen pengujian • Terjadi penghematan anggaran pelaksanaan yang cukup dalam

		hasil uji, baik pada Lembar Catatan Pengujian (LCP) manual maupun pada sistem digital (SIPT), kompetensi penguji yang harus ditingkatkan • Penentuan parameter uji sangat bergantung pada ketersediaan baku dan reagen di laboratorium. Bila reagen tidak lengkap, ada risiko parameter tertentu tertunda atau tidak dapat diuji. Ketepatan waktu pelaporan rendah dipengaruhi keterbatasan alat dan SDM.		disampling oleh petugas. • Pemeriksaan sampel disertai komitmen petugas sampling dalam melakukan penginputan data sampel sesuai dengan Pedoman Sampling. - 59 – • Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan. • Monitoring dan evaluasi terkait kompetensi penguji, sehingga kesalahan hasil uji dapat dihindari dan ketepatan waktu uji juga dapat dipenuhi. • Monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan PPK dan teknisi terkait kondisi instrumen laboratorium seperti HPLC, ICP OES, ELISA Reader,						• Terjadi kesalahan dalam interpretasi hasil uji

				Spektrofotometer, dll, baik kalibrasi/verifikasi alat maupun suku cadang dan spare part yang harus diganti serta pemeliharaan alat, serta percepatan perbaikan alat yang mengalami kerusakan. • Monitoring dan evaluasi pengadaan reagen dan baku pengujian, terutama untuk yang pengadaannya inden dengan waktu tertentu seperti baku Aflatoksin, Okratoksin, Deoksivalenol, dan lain-lain.						
3	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	• 12 sarana TMK, menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. • 3 sarana tidak beroperasi/pindah alamat, menyebabkan izin perlu dicabut.	• Penyusunan rencana dan pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko. • Percepatan penyesuaian pelaksanaan	• Pelaksanaan inspeksi sarana sesuai renlak • Koordinasi dan komunikasi intensif dengan dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi	Belum selesai	• Rencana aksi terus dilakukan secara berkesinambungan • Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan	September	Y	O-1 , O-5,	• Sarana tujuan pengawasan dan sampling menolak pelaksanaan pemeriksaan dan sampling oleh

		• Pemahaman pelaku usaha terhadap CAPA masih lemah sehingga tindak lanjut berjalan lambat. • Variasi kesiapan sarana MD dan PIRT menyebabkan kesenjangan kualitas. • Data sarana kadang tidak akurat, sehingga memerlukan verifikasi lapangan tambahan. • Beban petugas tinggi, komitmen menjadi faktor kunci keberhasilan.	pemeriksaan sarana • Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan. • Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan baik secara mandiri melalui Ideas dan terpadu oleh pusat yaitu pelatihan Food d Inspektur di TW I dan II.	sarana dan tindak lanjutnya • Monev pelaksanaan kegiatan • Melakukan kegiatan pemeriksaan, tindak lanjut dan pelaporan melalui SIPT sesuai DO • Pemanfaatan data e-was dan sharing folder		dengan unit pengampu pusat (inspeksi obat dengan Ditwasdisyanfar) terkait inspeksi sarana dan tindak lanjutnya • Pemanfaatan data e-was dan sharing folder				petugas di wilayah kerja UPT • Sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi /Pangan Olahan yang menjadi target pemeriksaan tutup pada saat petugas akan melakukan pemeriksaan
4.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	• Ketergantungan pada sharing anggaran dan dukungan pihak luarPemblokiran anggaran pada TW I menyebabkan beberapa kegiatan hanya	• Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan Fasilitator CPOTB dan	Fasilitasi pendampingan penerapan cppob pangan olahan	Selesai	-	Oktober s/d September	Y	S-3, K-4, O-18, O-51 O-15 SDM-3	• Terjadi penghematan anggaran pelaksanaan sertifikasi yang cukup dalam

		dapat terlaksana melalui sharing anggaran dengan Orang Tua Angkat (OTA), pelaku usaha, atau pihak lain. Hal ini menunjukkan kerentanan pembiayaan kegiatan UMKM. • Masih perlunya pendampingan intensif kepada UMKM untuk pemenuhan standarBanyak UMKM pangan, OBA, dan kosmetik masih memerlukan bimbingan berkelanjutan terkait CPPOB, CPKB, dan CPOB-AB serta pendampingan sertifikasi. Kepatuhan UMKM sangat dipengaruhi oleh intensitas pendampingan petugas. • Kebutuhan penguatan koordinasi lintas	CPKB, pelatihan Fasilitator IP CPPOB serta pelatihan auditor junior CDOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas. • Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait perizinan di OSS sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui OSS RBS yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing. Selain itu dengan adanya kolaborasi							• Realisasi anggaran rendah • Pelaku usaha pangan tidak memenuhi persyaratan nilai minimal pada penilaian mandiri • UMKM membutuhkan waktu lama untuk sertifikasi CPPOB/CPKB/CPOTB • Pelaku usaha kosmetik/OBA tidak dapat menyelesaikan CAPA audit sertifikasi • Pengembangan kompetensi pegawai belum terlaksana optimal

		instansi daerahProses registrasi produk memerlukan dukungan SKPD daerah. Koordinasi yang belum optimal dapat memperlambat proses registrasi pada sistem terintegrasi dan menghambat pencapaian target UMKM memenuhi standar. • Minimnya pemahaman UMKM terhadap pemenuhan CAPAUMKM masih membutuhkan pendampingan rutin dalam penyusunan CAPA hasil pemeriksaan, sehingga desk CAPA harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian dengan standar.	dengan instansi terkait yang samasama memiliki pembinaan kepada pelaku usaha seperti dinas kesehatan, dinas perindustrian dengan BPOM Aceh saling memberi informasi pelaku usaha yang menjadi binaan instansi terkait. • Kolaborasi dengan lintas sektor seperti perbankan, melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dari sisi hilirisasi produk, dimana pelaku usaha dapat meminjam modal dan mendapat pelatihan terkait bagaimana melakukan							

		• Tantangan peningkatan kompetensi petugas yang bersifat berkelanjutanDinamika regulasi, perubahan standar, serta rotasi pegawai membuat kebutuhan pelatihan menjadi terus-menerus. Kompetensi petugas sertifikasi dan auditor distribusi harus selalu di-update agar layanan pendampingan tetap berkualitas.	• promosi produk kepada masyarakat melalui media sosial, media elektronik, dan lain lain. • Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OBA) sesuai target sarana produksi OBA, Kosmetik dan Pangan							
5	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	• Terdapat satu perkara baru baru bisa diperoleh pada bulan pertengahan September karena selama ini kegiatan intelijen yang dilakukan belum bisa memberikan informasi yang lengkap	• Mengintenskan pengumpulan berbagai informasi dari Inspeksi dan infokom sebagai bahan awal. • Mengintenskan pengumpulkan berbagai informasi dari medsos dan marketplace	• Operasi penindakan bulan September • Operasi intelijen bulan September 2 kali	Belum Selesai	• Operasi penindakan • Operasi Intelijen	Oktober	Y	O-22 SDM-7 O-21	• Ketidaksesuaian hasil intelijen dengan kondisi saat dilakukan penindakan • Kegiatan intelijen tidak optimal • Adanya P-19 yang tidak bisa dipenuhi oleh penyidik

		mengenai target perkara tersebut. Hal ini dapat diketahui dari hasil kegiatan operasi penindakan yang pada awalnya targetnya 2 orang, hanya satu yang diperoleh bukti kejahatan, sedangkan yang yang lain tidak ditemukan bukti kejahatannya karena data intelijennya kurang update. • Untuk perkara carry over belum dilakukan tindak lanjut, karena petugas belum bisa berkoordinasi dengan jaksa terkait.	sebagai bahan awal. • Melakukan pendalaman informasi hasil pengumpulan informasi baik dengan operasi Siber maupun ke lapangan berupa kegiatan intelijen/investigasi • Melaporkan secara rutin hasil pendalaman informasi kepada pimpinan untuk Mendapatkan keputusan apakah ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau tidak.							
6	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	• Komitmen petugas untuk secara rutin mengirimkan pelaporan baik siber dan kerawanan kejahatan secara tepat waktu.	• Menyepakati jumlah target dan deadline penyelesaian Operasi Siber dan Profiling. • Melaporkan secara rutin seluruh informasi yang mengandung	• Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada Bulan September. • Melakukan pelaporan kerawanan bulan September. • Melaksanakan tindak lanjut	Belum Selesai	• Melakukan kegiatan Siber dan Profilling pada Bulan Oktober. • Melakukan pelaporan kerawanan bulan Oktober	Oktober - September	Y	SDM-2 I-4 I-6	• Penyampaian Laporan Siber dan Profiling Kejahatan tidak tepat waktu • Akses internet lambat

		• Koneksi internet yang lancar. Dalam hal ini Tim IT berperan penting, sehingga petugas di Fungsi Penindakan tidak terkendala pada koneksi internet maupun perangkat keras yang digunakan untuk melakukan pelaporan. • Adanya komunikasi yang baik dengan penanggung jawab/pengelola kegiatan BPOM RI sehingga kendala yang ada, tidak sampai mengganggu proses pelaporan. Misalnya : Pengelola kegiatan segera memberitahukan adanya kesalahan Laporan kepada UPT, sehingga segera	unsur kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. • Membuat reminder batas waktu operasi dan pelaporan yang bertujuan agar tidak melewati tenggat waktu yang ditetapkan.	rekomendasi dari Direktorat Cekal • Melakukan analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh		• Mengumpulkan data dukung tindak lanjut rekomendasi SM II dari Direktorat Cekal • Mengumpulkan data dukung analisa Kejahatan Obat dan Makanan di Aceh tahun 2025				• Pengguna tidak dapat mengakses interne

		dilakukan perbaikan tanpa melewati batas waktu pelaporan.								

TW 4

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW 4	Rekomendasi TW 4	Rencana Tindak Lanjut TW 4	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Proses pemberkasan telah dimulai pada Minggu ketiga bulan November dan baru selesai pada Minggu kedua bulan Desember. Hal yang menyebabkan proses tersebut cukup lama apakah adanya kondisi force majoure dimana terjadi banjir bandang di provinsi Aceh yang menimbulkan tidak berfungsi dengan	Melaksanakan Koordinasi dengan pusat terkait target	Pemberkasan Perkara	Tidak Tercapai	• Pemenuhan P-19 hingga P-21; • tahap-2	Januari 2026	Y	KK-3 I-4 I-6 O-36	• Keselamatan Kerja: Terjadi korban jiwa, luka-luka bahkan kematian akibat bencana alam (Secara Umum Akibat Bencana Alam

		baik sarana penunjang kinerja dan koordinasi seperti listrik, internet, fasilitas transportasi dan lainnya.								• Akses internet lambat • Pengguna tidak dapat mengakses internet • Genset rusak atau tidak berfungsi secara normal
2	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	• Tidak terdapat kriteria khusus untuk tim kerja di setiap area perubahan • untuk kegiatan yang belum terlaksana, belum terdapat bukti bahwa rencana aksi telah ditindaklanjuti pada periode berikutnya. • Telah terdapat laporan monev atas program kerja agen perubahan yang mencakup dampak dari program, namun belum	• Menyusun dan menetapkan kriteria khusus penentuan tim untuk setiap area perubahan. • Melaksanakan tindak lanjut atas rencana aksi dan mendokumentasikannya pada laporan pemantauan dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	• Menyusun dan menetapkan kriteria baku pemilihan tim kerja (kompetensi, integritas, pengalaman, dan peran) serta merevisi SK tim kerja sesuai kriteria tersebut. • Menyusun format RTL kegiatan dan mewajibkan PIC untuk mengisi serta mengunggah bukti tindak lanjut secara berkala ke dalam	Tidak Tercapai	Perbaikan dan Rekomendasi Akan dilaksanakan di Tahun 2026	Januari – Desember 2026	Y	O-24 O-29 O-54 SDM-3 O-55 O-56 F-21 O-26	• Rencana kerja berjalan seadanya, sekadar memenuhi LKE • Rencana aksi perbaikan kinerja tidak ditindaklanjuti • Pelaksanaan evaluasi hanya formalitas dan tidak memberikan feedback • Pengembangan kompetens

		terdapat bukti tindak lanjut atas hasil monev tersebut. • Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan, namun pada beberapa SOP belum menyajikan pemenuhan mutu baku terhadap penerapan SOP yang dijalankan. • Belum melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI dalam hal pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pelayanan publik. • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	• Melaksanakan dan mendokumentasikan tindak lanjut atas hasil monev program kerja agen perubahan. • Melakukan reviu atas SOP dan menambahkan mutu baku pada SOP. • Melakukan monev dan evaluasi pemanfaatan TI yang berkaitan dengan pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pelayanan publik secara berkala. • Menambahkan bukti tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan	sistem/arsip digital. • Membuat RTL hasil monev agen perubahan yang berisi rekomendasi, penanggung jawab, target waktu, dan dokumentasi implementasi. • Melakukan revisi SOP dengan menambahkan standar mutu (service level, waktu layanan, kualitas output) pada setiap SOP yang belum memenuhi. • Membentuk tim dan melaksanakan monitoring & evaluasi pemanfaatan TI, mencakup pengukuran kinerja aplikasi, kebutuhan fitur, efektivitas layanan, dan						i pegawai belum optimal • Kurangnya partisipasi dan peran aktif pegawai dalam manajemen risiko • Pedoman maturitas manajemen risiko kurang dipahami • Kebocoran informasi / lemahnya mekanisme penanganan WBS • Inovasi belum mengakomodir kebutuhan Masyarakat

		keterbukaan informasi publik, namun belum terdapat bukti tindak lanjut dari hasil monev tersebut • Belum dilakukan monev atas penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu pada kebutuhan pegawai. • Pemberian reward and punishment telah diimplementasikan, namun belum terdapat dokumentasi proses penilaian pemberian kertas kerja penilaian terhadap pemberian reward dan punishment tersebut. • Sistem Pengendalian	informasi publik.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronikyang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). • Melakukan monev atas penempatan pegawai baru mengacu pada kebutuhan pegawai. • Mengimplementasikan dan mendokumentasikan seluruh proses pemberian reward and punishment sesuai dengan kebijakan	integrasi sistem. • Menyusun dokumen tindak lanjut hasil monev PPID dan melaksanakan perbaikan proses penyediaan informasi publik. • Melakukan monev penempatan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan jabatan, dan kompetensi pegawai. • Menyusun kertas kerja penilaian reward–punishment dan mengintegrasikan ke dalam SOP proses pemberian penghargaan dan sanksi.						

		Intern telah diterapkan, namun sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pihak terkait belum dilakukan secara optimal • Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, namun belum terdapat bukti bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan • Telah terdapat SOP terkait WBS, namun belum terdapat mekanisme penerusan laporan kepada Inspektorat Utama. • .Belum terdapat bukti bahwa sosialisasi pelayanan budaya prima kepada petugas	yang telah ditetapkan. • Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait Sistem Pengendalian Intern lebih lanjut kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif. • Melaksanakan tindak lanjut atas rencana aksi dan mendokumentasikannya pada laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. • Menambahkan mekanisme penerusan laporan kepada Inspektorat Utama pada	• Menyelenggarakan program sosialisasi SPI secara terencana dan berjenjang, dilengkapi materi, daftar hadir, dan dokumentasi. • Menyusun RTL hasil monev pengaduan masyarakat dan memperbaiki mekanisme tindak lanjut serta SLA layanan pengaduan. • Melakukan revisi SOP WBS dengan memasukkan mekanisme verifikasi dan penerusan laporan ke Inspektorat Utama. • Melaksanakan sosialisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas layanan dan						

		pelayanan telah dilakukan. • Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan, namun belum dijelaskan pembobotan untuk setiap kriteria, serta dalam implementasinya belum terdapat kertas kerja penetapan reward • Belum terdapat peta jalan atau rencana pengembangan atau integrasi aplikasi pelayanan publik.	SOP Mikro WBS. • Melakukan sosialisasi pelayanan budaya prima kepada petugas pelayanan. • Menambahkan bobot untuk setiap kriteria penilaian pada kebijakan pemberian reward dan punishment bagi petugas pemberi pelayanan, serta mendokumentasikan proses penilaian pada kertas kerja penetapan reward dan punishment. • Menyusun peta jalan atau rencana pengembangan atau integrasi aplikasi	menyediakan dokumentasi resmi. • Menyusun bobot penilaian layanan dan membuat kertas kerja penetapan reward yang terstandardisasi untuk seluruh petugas. • Menyusun Roadmap Pengembangan & Integrasi Aplikasi Layanan Publik untuk jangka waktu 3–5 tahun.						

			pelayanan publik. • Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.							
3	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	• Telah terdapat pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko inheren dengan level risiko ≥16, namun aktivitas pengendalian pada kertas kerja tidak selaras dengan aktivitas pengendalian pada daftar risiko	• Melakukan pengujian aktivitas pengendalian (*existing control*) terhadap risiko dengan level risiko inheren di atas selera risiko (≥16) sesuai dengan ketentuan yang diatur pada juklak	• Melakukan penyelarasan dan verifikasi ulang aktivitas pengendalian antara daftar risiko dan kertas kerja, serta menerbitkan crosswalk document sebagai bukti kesesuaian.Melakukan pendokumentasian kertas	Tidak tercapai	Akan di perbaiki di Tahun 2026	Januari s/d Desember 2026	**Y**	**O-54** **O-55** **O-56** **O-30**	• Pelaksanaan evaluasi hanya sebagai formalitas dan tidak memberikan feedback bagi perbaikan manajemen risiko • Kurangnya partisipasi dan peran aktif pegawai

		• Telah dilakukan reviu risiko secara periodik oleh unit pemilik risiko, namun kertas kerja reviu belum terdokumentasi secara memadai; • Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain • Telah terdapat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥16, namun	manajemen risiko; • Melakukan pendokumentasian kertas kerja reviu risiko secara memadai; • Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan sebagaimana telah disampaikan pada poin 5.c; • Melakukan reviu terhadap respon risiko agar selaras dengan deskripsi	kerja reviu risiko secara memadai; • Menyusun format baku kertas kerja reviu risiko dan mewajibkan unit pemilik risiko untuk mengisi dan mengunggah kertas kerja reviu secara lengkap setiap periode. • Melakukan penyempurnaan dokumen manajemen risiko (penilaian risiko, penetapan respon risiko, RTP, dan risiko residual) sesuai pedoman dan standar risk management. • Melakukan revisi RTP dengan menetapkan respon risiko yang tepat (reduce) serta menyesuaikan						dalam manajemen risiko • Pedoman penilaian tingkat maturitas manajemen risiko kurang dipahami • Masalah pengumpulan data / validitas data

		terdapat ketidakselarasan respon risiko yang dipilih dengan tindakan mitigasi, yang seharusnya respon risiko adalah reduce; • Progress pelaksanaan aksi mitigasi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu di aplikasi SAPAAPIP belum diisi secara lengkap. • Melakukan pengisian progres atas pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu secara lengkap di aplikasi SAPAAPIP.	tindakan mitigasi;	kembali seluruh tindakan mitigasi agar konsisten dengan respon risiko. • Melakukan pengisian progres mitigasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu pada menu pemantauan/reviu aplikasi SAPAAPIP sesuai ketentuan periode pelaporan.						

4.	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	• belum diformalkan dan belum dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja • Terdapat perbedaan nomenklatur Indikator Kinerja antara PK, RAPK, Manual IKU, dan Draft Renstra • Adanya perbedaan penyajian data capaian kinerja sebagaimana telah disebutkan di atas, menyebabkan adanya ketidakselarasan penyajian analisis atas hasil capaian kinerja pada dokumen pelaporan seperti pada	• Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM; • Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja; • Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1)Keselarasan	• Melakukan finalisasi dan legalisasi Renstra melalui penetapan Keputusan Kepala Balai, serta mengintegrasikan Renstra yang telah diformalkan ke dalam seluruh dokumen kinerja (PK, IKU, RAPK, RKT). • Melakukan penyeragaman nomenklatur IKU melalui revisi dan cross-check antar dokumen, serta menetapkan Daftar IKU Final yang digunakan seragam di semua dokumen. • Menyusun kerangka pendanaan Renstra secara lengkap, mencakup pagu indikatif tiap	Tidak Tercapai	Akan di perbaiki di tahun 2026	Januari s/d Desember 2026	**Y**	**O-24** **O-31** **O-30** **O-29** **O-54**	• Rencana kerja berjalan seadanya, sekedar memenuhi LKE • Data realisasi kinerja berubah-ubah (tidak valid) • Masalah/hambatan tidak dapat dianalisis secara komprehensif dalam laporan evaluasi kinerja • Rencana aksi perbaikan tidak ditindaklanjuti • Evaluasi hanya formalitas

		Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025. • Pelaporan pada Aplikasi e-performance (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib, kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut belum diisi secara lengkap dan detail • Efisiensi penggunaan anggaran telah disajikan dalam Lapkin Interim dan Lapkin Tahunan, namun belum terdapat pembahasan efisiensi anggaran masing-masing indikator	antar dokumen perencanaan; 2)Tidak adanya perbedaan nomenklatur indikator kinerja. • Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja pada tahap perbaikan data pada aktivitas yang memuat proses perbaikan apabila terdapat koreksi dari Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh; • Melengkapi dokumentasi evaluasi kegiatan yang memuat adanya arahan pimpinan terhadap capaian	sasaran strategis, sumber dana (APBN/Non-APBN), serta proyeksi pembiayaan tahunan. • Melakukan revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme perbaikan data berdasarkan arahan Kepala Balai dan prosedur koreksi data yang baku. • Menetapkan format arahan pimpinan yang rinci per indikator, serta memastikan setiap evaluasi Triwulan mencakup seluruh IKU, dengan fokus pada yang tidak mencapai target						

		kinerja seperti belum menjelaskan upaya yang telah dilaksanakan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/hambatan maupun justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya; • Pada Lapkin tahunan 2024 telah menyajikan pemanfaatan informasi kinerja, namun belum dilengkapi dengan analisis yang memadai berkaitan dengan rencana untuk pengusulan perubahan target kinerja di beberapa IKU yang	masing-masing indikator kinerja, termasuk spesifik terhadap indikator yang belum mencapai target; • Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada Aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	• Melaksanakan pengisian rencana aksi dan timeline secara lengkap pada SIMETRIS dan menetapkan PIC per indikator untuk memastikan ketertiban pengisian. • Melakukan rekonsiliasi data kinerja antara SIMETRIS, LEI, dan Lapkin, serta menetapkan mekanisme *validasi dan verifikasi data (V&V)* sebelum penyusunan laporan. • Melakukan pengisian lengkap pada seluruh kolom SIMETRIS, termasuk kendala, hambatan, dan RTL, disertai jadwal						

		dihubungkan dengan rencana pemenuhan capaian target di akhir tahun 2025 dan alokasi anggaran di tahun 2025. • Lapkin yang disusun telah mencantumkan kendala/hambatan dan RTL atas tidak tercapainya IKU tersebut di atas, namun monitoring RTL IKU tersebut belum dilaksanakan secara optimal pada pelaksanaan evaluasi internal TW I 2025. Belum terdapat analisa apakah RTL tersebut telah dilaksanakan atau masih relevan atau tidak. Selain itu belum terdapat penyajian	• Menyajikan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi tindak lanjut periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim dan Tahunan dilengkapi dengan simpulan status rekomendasi/ rencana aksi tindak lanjut (selesai/belum selesai) • Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan dan/atau Laporan Kinerja Interim dengan	penginputan dan pengawasan rutin oleh admin kinerja. • Mengembangkan format analisis efisiensi anggaran per IKU, mencakup pembandingan input-output, faktor penyebab, upaya efisiensi, dan justifikasi ketidakefisienan. • Melakukan analisis pemanfaatan informasi kinerja yang komprehensif, termasuk rekomendasi perubahan target IKU 2025 dan keselarasan dengan alokasi anggaran tahun 2025. • Membuat format monitoring RTL IKU						

		informasi terkait kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan RTL. • Pengisian realisasi dan capaian kinerja dilakukan secara tertib pada Aplikasi SIMETRIS, penyajian pada Aplikasi tersebut dijadikan dasar penyusunan dan penyajian data kinerja pada LEI dan Lapkin Interim, namun terdapat catatan ketidaksesuaian karena penyajian Kendala/Hambatan, RTL dan monitoring RTL pada Aplikasi SIMETRIS sudah selaras dengan penyajian pada Laporan Evaluasi	menambahkan informasi perbandingan realisasi atau capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM. • Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisis yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SD	• Menerapkan penginputan rutin bulanan pada SIMETRIS untuk menjaga kesinambungan data, lengkap dengan *logbook* pembaruan data dan pengawasan mingguan oleh admin.						

		Internal 2024-2025, Laporan Kinerja Interim 2024-2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2024, tetapi belum menunjukkan kesinambungan setiap bulannya	M secara lebih optimal. • Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan. • Melaksanakan penyesuaian penyajian informasi dalam Laporan Kinerja atau melaksanakan evaluasi berdasarkan informasi pada Laporan Kinerja dengan tujuan							

			untuk melakukan perbaikan • Menyusun laporan evaluasi internal secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP di BPOM • Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan							

			pada waktu tertentu • Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala dan memastikan rekomendasi pada evaluasi internal dilaksanakan sehingga mampu mewujudkan peningkatan capaian kinerja.							

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Setiap tahun dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja tahunan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di tahun berikutnya. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid penetapan target Sasaran Kegiatan di tahun berikutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra 2025-2029 dimana masih terdapat beberapa penyesuaian, termasuk nomenklatur sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta perubahan target pada Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja maupun perubahan perhitungan manual IKU. Pada Bulan Agustus 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dengan menambahkan Indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai estándar dan terjadinya perubahan perhitungan pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.

Adapun pemanfaatan informasi kinerja setiap indikator Balai Besar POM di Banda Aceh Aceh, meliputi:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Laporan kinerja tahunan ini juga digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja pada triwulan tahun berikutnya baik pada persentase sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik berisiko dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Laporan ini juga digunakan untuk menyusun rencana kerja yang lebih optimal sehingga setiap proses tahapan pada capaian indikator kinerja akan selalu tercapai.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

   Indikator Kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2025 sehingga belum ada Laporan Kinerja yang digunakan sebagai bahan atau referensi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja di triwulan I. Analisa kinerja dan informasi yang dipaparkan di

laporan kinerja triwulan III telah digunakan sebagai informasi kinerja bagi pelaksanaan kegiatan di triwulan IV. Diantaranya adalah upaya peningkatan kinerja melalui pemantauan pelaporan KTD/ESO dari peserta KIE tahun 2025 sehingga jumlah laporan tercapai sesuai target.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh. Keberhasilan pada pencapaian pada indikator ini terutama dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan dapat dijadikan dasar pengusulan perubahan target kinerja untuk tahun berikutnya. Laporan kinerja ini juga untuk melihat kendala - kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja tahunan ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini hingga tetap mencapai target pada akhir tahun dan perencanaan yang baik kedepannya mulai dari tahap kesesuaian target sampling, penetapan parameter pengujian, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan serta tindak lanjut sesuai pedoman. Setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik. Kendala dalam ketepatan waktu sampling serta didukung komitmen setiap petugas perlu menjadi perhatian khusus agar tidak menghambat pencapaian indikator ini selanjutnya.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan/Dinas Kesehatan untuk menindak lanjuti hasil pengujian terhadap sampel KLB keracunan pangan untuk mencegah kasus serupa terjadi dimasa yang akan datang. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya Balai Besar POM di Banda Aceh juga menjadi informasi yang sangat bermanfaat agar capaian terhadap indikator ini dapat selalu terpenuhi apabila terdapat sampel KLB Keracunan Pangan. Informasi epidemiologi yang jelas sangat diperlukan agar sampel KLB KP dapat diuji sesuai dengan standar yang ditetapkan karena minimnya informasi kajian epidemiologi dapat menyulitkan dalam

penetapan parameter pengujian. Selain itu koordinasi lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan harus terjalin baik untuk percepatan penanganan sampel dan dan pencegahan terjadinya KLB.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Sampel PIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian selama tahun 2025 terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat hasil uji mikrobiologi. Tidak terdapat sampel PIRT yang disampling tidak memiliki izin edar, rusak, maupun kadaluarsa. TIndak lanjut terhadap sampel TMS telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan UPT terkait dimana sarana produksi produk PIRT tersebut berada, dan akan dipantau tindak lanjutnya kembali. Koordinasi dengan lintas sektor terkait sampling produk PIRT dan pembinaan sarana produksi PIRT juga terus dilakukan agar produk-produk PIRT yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang aman dan bermutu.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

   Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target tahun 2025 Capaian ini akan terus ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor dengan melakukan komunikasi aktif untuk meminta respon yang ditindaklanjuti secara administratif. Dengan meningkatnya capaian indikator ini merupakan perwujudan dari kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi, demikian juga dengan lintas sektor, dengan koordinasi yang baik diharapkan kedepannya semakin aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Komunikasi aktif pelaku usaha dan koordinasi dengan lintas sektor yang semakin baik diharapkan tetap dapat dipertahankan agar Indikator ini tetap dapat dicapai pada tahun berikutnya.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, pencapaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 101.01%. Seluruh tahapan terkait pemeriksaan sarana

produksi sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti telah mencapai target yang ditetapkan. Dari laporan kinerja sebelumnya diperoleh informasi bahwa capaian TW I dan TW II berada pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengusulan kenaikan target agar capaian masuk dalam kategori Sangat Baik dan tetap dapat dicapai hingga akhir tahun. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA oleh pelaku usaha. Seluruh tahapan proses terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Pencapaian indikator kinerja ini tercapai sebesar 103.20%, dengan demikian seluruh proses terkait pemeriksaan distribusi fasilitas sediaan farmasi sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi fasilitas sediaan farmasi TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA dari pelaku usaha oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pencapaian indikator ini telah melampaui target tahunan dengan capaian sebesar 109.89%. Walaupun sudah mencapai target tahun 2025, tetapi tantangan untuk pemenuhan ketentuan terhadap pencapaian indikator ini tetap harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang ketat. Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha distribusi pangan olahan juga sangat diperlukan, dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan. Untuk itu masih sangat diperlukan berbagai upaya yang untuk mempertahankan capaian ini dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta komitmen dari petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai ketentuan.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025-2029, sehingga laporan kinerja interim triwulan II ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target pengawasan iklan, pemenuhan target media iklan, kesesuaian penarikan kesimpulan dan ketepatan waktu pelaporan. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja tahun 2025 akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya sepanjang tahun 2025 hingga 2029. Seluruh proses pengawasan berjalan sesuai standar, mulai dari verifikasi label hingga pelaporan hasil pengawasan. Melalui data capaian dan kendala yang terdapat dalam Laporan kinerja TW III tahun 2025, BBPOM Banda Aceh dapat menilai efektivitas pelabelan produk rokok sesuai standar. Dengan pelaporan yang tepat waktu dan terukur,

pengawasan rokok menjadi lebih responsif dan berdampak nyata bagi perlindungan konsumen. Adanya capaian yang sangat tinggi di tahun 2025 ini akan menjadi bahan reviu pelaksanaan pengawasan di tahun 2026 sehingga penetapan target lebih terukur.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

    Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya. Laporan kinerja pengendalian resistensi antimikroba (AMR) bukan sekadar dokumentasi capaian, tetapi menjadi instrumen strategis dalam perbaikan sistem pengawasan dan advokasi kebijakan kesehatan. Balai Besar POM di Banda Aceh telah memanfaatkan laporan ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan empat komponen utama: penggunaan tools pengawasan AMR, pelaksanaan Bimtek, advokasi kebijakan, dan publikasi hasil pengawasan.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

    Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan indikator yang terdapat pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025-2029, sehingga laporan kinerja interim TW IV ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target, pemenuhan target. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

    Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada Renstra 2025-2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya.

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

    Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya. Sarana produksi pangan fortifikasi yang telah diperiksa ini merupakan sarana yang akan dipertimbangkan untuk diperiksa kembali kepatuhannya. Untuk sarana yang direkomendasi pencabutan IP CPPOB dan NIE produk, maka sarana tersebut tidak akan masuk dalam target cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi untuk tahun selanjutnya. Pembinaan berkelanjutan juga akan terus dilakukan kepada pelaku usaha agar menghasilkan pangan olahan fortifikasi yang memenuhi syarat dan sesuai ketentuan.

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

    Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini adalah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

    Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan.

19. Jumlah desa pangan aman

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program Desa Pangan Aman dapat berjalan dan desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program Desa Pangan Aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa. Dengan demikian, semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan.

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

    Berdasarkan laporan kinerja triwulan dan tahunan, dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Diharapkan para pedagang pada pasar yang intervensi akan terus menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, dan menjaga Pangan terbebas dari Bahan Berbahaya yang dilarang pada pangan.

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

    Laporan kinerja Interim triwulan IV dapat digunakan sebagai laporan pada pelaksanaan layanan kepada masyarakat dalam hal pendampingan kepada pelaku usaha salah satu inovasi pelayan publik. Selain itu juga menjadi salah bukti komitmen UPT Balai Besar POM di Banda Aceh dalam hal memenuhi standar pelayanan sehingga apa yang dibahas pada saat pelaksanaan Forum Komunitas Publik terverifikasi dengan baik yang merupakan komitmen nyata dari petugas sertifikasi.

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

    Dari capaian kinerja indikator keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2025, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal, dan selain itu Laporan juga dapat dimanfaatkan pihak eksternal dalam memantau kinerja penindakan.

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai estándar

Dari capaian kinerja yang sudah melampaui pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk tahun-tahun mendatang, sehingga target-target interim selanjutnya dapat tercapai sesuai perencanaan.

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini adalah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

25. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh

Informasi kinerja pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi atas efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada enam area perubahan. Data dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap standar integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, serta untuk mengidentifikasi area yang telah berjalan optimal maupun yang masih memerlukan penguatan.

Laporan kinerja indikator Nilai Pembangunan ZI juga dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam merumuskan tindak lanjut perbaikan, khususnya dalam penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan, pengendalian gratifikasi, dan penguatan pengawasan internal.

Pemanfaatan laporan kinerja indikator Nilai Pembangunan ZI mendukung sinergi antara sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas, serta menjadi instrumen pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian target ZI sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029 dan upaya berkelanjutan menuju predikat WBK/WBBM.

26. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

Hasil penilaian AKIP tahun 2025 dengan capaian 81% menjadi cerminan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di Balai Besar POM di Banda Aceh. Dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 81,48%, terjadi penurunan yang bersumber dari melemahnya nilai pada komponen capaian kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan hasil kinerja memerlukan penguatan tidak hanya pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk mengidentifikasi area perbaikan dan menyusun langkah peningkatan kinerja secara lebih terarah. Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi seluruh pegawai, perbaikan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode penilaian berikutnya.

27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 memenuhi target, namun tahun 2026 tetap diperlukan perbaikan dalam pencapaian target kinerja.

28. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

Laporan kinerja Manajemen Risiko dimanfaatkan sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian penerapan Manajemen Risiko di Balai Besar POM di Banda Aceh, serta untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pelaksanaannya. Laporan Kinerja ini juga menjadi sumber informasi penting dalam peningkatan kualitas pengelolaan risiko pada tahun berikutnya, baik terkait proses identifikasi, analisis, penilaian, maupun mitigasi risiko di seluruh unit kerja.

Melalui laporan ini, pimpinan dan tim Manajemen Risiko dapat menyusun langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran, sehingga penerapan Manajemen Risiko semakin efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, laporan ini juga menjadi

dasar dalam penyusunan rencana kerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya, sehingga setiap tahapan dalam proses Manajemen Risiko dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkontribusi pada peningkatan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

3.4 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp20.121.623.000,- (Dua puluh miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Selama tahun 2025 terdapat beberapa kali revisi DIPA. Revisi yang menyebabkan perubahan pagu DIPA yaitu pada tanggal 21 Maret 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh mengalami kenaikan pagu menjadi Rp20.322.623.000,- (Dua puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025 dan pada tanggal 7 Juli 2025 mengalami penurunan pagu karena telah dilakukan revisi pemotongan anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai existing dan anggaran CASN TA 2025 berupa belanja pegawai sebesar Rp392.325.000.- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan belanja barang sebesar Rp5.993.000.- (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi Rp19.936.291.000.- (Sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Pada tahun 2025 juga terjadi Pergeseran atau perubahan pagu anggaran berupa pemblokiran mandiri (*Selfblocking*) dalam rangka *Automatic Adjustment* sebesar Rp4.011.749.000,- (Empat miliar sebelas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total pagu anggaran menjadi Rp15.924.542.000,- (Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran akhir tahun 2025 sebesar **Rp15.862.701.274,- (99.61%) atau 79.57 persen** terhadap pagu total.

***Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025* Balai Besar POM di Banda Aceh**

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	TARGET PAGU SETELAH REVISI	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.341.536.000	6.341.536.000	6.315.848.370	99.59
Belanja Barang	11.745.533.000	8.034.006.000	7.998.742.804	99.56
Belanja Modal	1.849.222.000	1.549.000.000	1.548.110.100	99.94
Jumlah	**19.936.291.000**	**15.924.542.000**	**15.862.701.274**	**99.61**

Realisasi PNBP Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10.035.500	0
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0	4.208.750	0
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	220.000.000	227.594.709	103.45
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	557.252	0
Penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	0	8.381.600	0
Jumlah	**220.000.000**	**250.777.811**	**113.99**

SELAMAT DATANG KEPALA BADAN POM RI

b. Tingkat Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan

Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka, bukan realisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

0 - 0,2 : 100% (Efisien)

0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)

0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)

0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)

0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)

1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)

1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)

1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)

1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)

> 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Table 132.Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	% Capaian Indikator	% Capaian Anggaran	TE	Kategori
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106.67	98.85	**0.07**	**Efisien**
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100	99.98	**0.00**	**Efisien**
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	102.86	99.95	**0.03**	**Efisien**
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100	99.41	**0.00**	**Efisien**
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	95.95	99.55	**-0.03**	**Tidak Efisien**

6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	111.11	99.98	**0.11**	**Efisien**
7.	Layanan Publik UPT yang prima	105.53	99.78	**0.06**	**Efisien**
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	97.12	99.68	**-0.02**	**Tidak Efisien**

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama yaitu, "Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 5.108.726.531,- atau 32.19% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan serta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah efisien, karena capaian sasaran (106.67%) yang dihasilkan melebihi anggaran (98.85%) yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan petugas sudah melaksanakan perencanaan sampling yang baik, pengujian dilakukan sesuai role dan timeline dan sudah melakukan pengawasan secara intensif terhadap penandaan/label produk yang beredar di Banda Aceh.
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedua yaitu, "Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar Rp. 5.068.000,- atau 0.03% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Pemeriksaan 3 sarana fortifikasi garam konsumsi dilakukan di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireuen. Saat pemeriksaan sarana fortifikasi garam di Banda Aceh tutup permanen (permohonan pembatalan NIE) sarana di Aceh Besar tidak aktif melakukan produksi garam konsumsi beryodium, dan hanya sarana produksi garam di Bireuen yang aktif melakukan sarana produksi. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah efisien, karena capaian sasaran (100%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.98%) yang dikeluarkan.

3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketiga yaitu, "Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT sebesar Rp. 227.109.834,- atau 1.43% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran kegiatan ini. Pada tahun 2025 sebagian anggaran diblokir namun target tidak boleh direvisi sehingga berpengaruh terhadap realisasi jumlah sekolah dan desa yang diintervensi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien, karena capaian sasaran (102,86%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99,95%) yang dikeluarkan. Pada KIE terdapat beberapa jenis program melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan media sosial. Untuk tahapan sekolah, desa dan pasar sudah selesai dilakukan.
4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keempat yaitu, "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar Rp. 32.806.298,- atau 0.21% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pendampingan UMKM secara intensif untuk melakukan perbaikan dan mendorong pelaku usaha untuk terus aktif. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keempat adalah efisien, karena capaian sasaran (100%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.41%) yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan terlaksananya fasilitasi dan sertifikasi secara keseluruhan.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kelima yaitu, "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 471.847.500,- atau 2.97% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan intelijen dan operasi penindakan sarana distribusi kosmetik/OBA ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya. Kegiatan-

kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah tidak efisien. Hal ini dikarenakan pada Bulan November 2025 terjadi bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, sehingga berdampak signifikan terhadap mobilitas petugas, akses transportasi, distribusi logistik, sarana komunikasi, kelistrikan serta aspek keamanan dan keselamatan personel.

6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keenam yaitu, "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 48.856.179,- atau 0,31% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan operasi siber dan profilling serta pelaporan kerawanan. Kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya realisasi dari indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi sasaran kegiatan keenam efisien. Hal ini karena petugas melakukan kegiatan siber dan profiling secara rutin dan disiplin serta memperhatikan tenggat waktu.
7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu, "Layanan Publik UPT yang prima" sebesar Rp. 112.034.660,- atau 0.71% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengambilan data dan survey. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketujuh adalah efisien, karena capaian sasaran (105.53%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.78%) yang dikeluarkan. Tercapainya target indikator ini karena terpenuhinya seluruh aspek penilaian kinerja pelayanan publik, hasil survey dan responden penerima layanan sangat memuaskan dan adanya inovasi pelayanan publik yang memberikan dampak maksimal.
8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu, "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" sebesar Rp. 9.861.830.992,- atau 62.15% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan koordinasi, Bimtek, penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan, kearsipan dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut

berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Meskipun capaian sasaran (97.12%) yang dihasilkan tidak melebihi anggaran (99.68%) yang dikeluarkan, namun Nilai AKIP masih masuk kategori memuaskan (A) dan Nilai RB meskipun tidak mencapai target tahun 2025, namun nilainya mengalami peningkatan dari tahun 2024 (dari 87.49 tahun 2024 menjadi 90.24 di tahun 2025). Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari KemenPANRB.

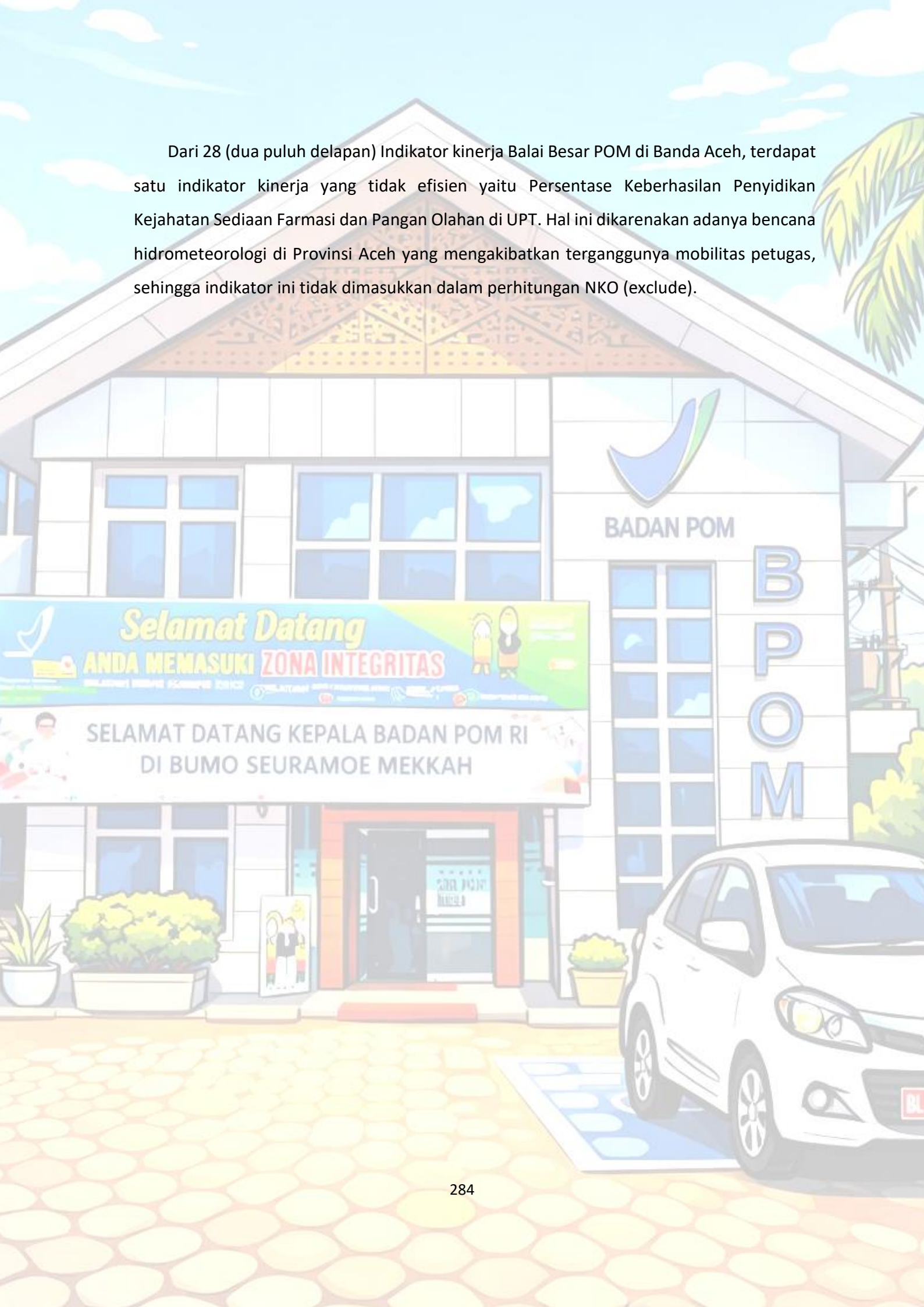
Table 1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Output			Input (Anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	93.77	103.90	613.168.000	612.668.318	99.92
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26.66	102.54	43.550.000	43.208.860	99.22
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.32	114.49	306.277.200	281.374628	91.87
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	22.630.900	22.629.093	99.99
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	22.630.900	22.629.093	99.99
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3	85.78	102.98	13.333.750	13.304.343	99.78
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	95.00	100	105.26	13.333.750	13.304.343	99.78

	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	13.333.750	13.304.343	99.78
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.85	103.20	335.793.600	332.129.219	98.91
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	335.793.600	332.129.219	98.91
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.8	99.20	110.47	314.715.550	311.519.218	98.98
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	95.83	119.79	7.380.000	7.186.100	97.37
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105.69	105.69	94.911.000	94.728.809	99.81
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00	79.60	109.04	2.992.226.000	2.989.248.482	99.90
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	15.38	15.38	100.00	19.638.000	19.362.463	98.60
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100.00	5.069.000	5.068.000	99.98

17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	96.45	111.45	85.642.000	85.556.351	99.90
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100.00	35.017.000	35.016.010	100
19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00	83.926.000	83.829.573	99.89
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	22.708.000	22.707.900	100
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19.40	19.40	100.00	33.000.000	32.806.298	99.41
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	88.75	95.95	473.984.000	471.847.500	99.55
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	100.00	111.11	48.865.000	48.856.179	99.98
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.96	105.53	112.285.000	112.034.660	99.78
25	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25	90.24	99.99	33.243.000	33.092.486	99.55
26	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78	81.00	97.85	1.476.313.050	1.470.764.596	99.62
27.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	5	100.00	7.381.565.250	7.377.464.179	99.94
28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.20	2.90	90.63	984.208.700	980.509.731	99.62

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh, terdapat satu indikator kinerja yang tidak efisien yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Hal ini dikarenakan adanya bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh yang mengakibatkan terganggunya mobilitas petugas, sehingga indikator ini tidak dimasukkan dalam perhitungan NKO (exclude).



Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh
Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25	93.77	103.90	102.47 Tercapai/Melampaui	1. Keterbatasan reagensia. 2. Kurangnya komitmen Balai/Loka dalam pengiriman sampel (tidak tepat waktu)	1. Koordinasi intensif antara fungsi pemeriksaan, pengujian dan lab regional. 2. Melakukan pemeliharaan alat secara berkala.
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26.66	102.54	88.86 Akan Tercapai	Tidak ada kendala	1. Menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE PV untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso secara intensif melalui WA Grup dan telepon. 2. Memberikan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan KTD/ESO melalui e-Meso.
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.32	114.49	104.64 Tercapai/Melampaui	Tidak ada kendala	1. Melaksanakan sampling sesuai renlak 2. Melaksanakan Pengujian sesuai Pedoman sampling 3. Melakukan Pelaporan SIPT sesuai timeline
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100 Tercapai	Tidak ada kendala	1. Meningkatkan kompetensi petugas yang menangani sampel KLB. 2. Melakukan koordinasi dengan tim gerak cepat KLB.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.50	102.94	92.10 Akan Tercapai	Terjadi penurunan realisasi ketepatan waktu pelaporan SIPT karena terdapat sampel yang diroleback. Berdasarkan evaluasi Ditwas terdapat beberapa sampel yang harus diperbaiki dan sudah ditindaklanjuti.	Melakukan monev hasil sampling dan pengujian berdasarkan evaluasi pusat
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.30	85.78	102.98	98.60 Akan Tercapai	Pimpinan instansi terkait lama memberikan respon terhadap surat tindak lanjut yang dikirim.	Melakukan komunikasi aktif dan intensif dengan lintas sektor/instansi terkait baik kepada pimpinan maupun tim teknis secara formal maupun informal
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100	105.26	101.01 Tercapai/Melampaui	1. Kesulitan dalam pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam, dari 4 sarana UKOT/UMOT yang diperiksa, keempatnya tidak melakukan kegiatan produksi OT, karena 3 diantaranya telah habis masa berlaku CPOTB dan 1 sarana penanggung jawab telah menggundurkan diri. 3. Pelaku usaha UKOT/UMOT kurang komitmen dalam mengurus CPOTB.	Melanjutkan koordinasi dengan tim sertifikasi untuk pendataan sarana produksi sediaan farmasi yang aktif dan tidak aktif

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	105.26 Tercapai/Melampaui	Tidak ada kendala	Melakukan Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	99.85	103.20	100.35 Tercapai/Melampaui	Tidak ada kendala	1. Meningkatkan kompetensi petugas. 2. Melakukan monev pelaksanaan kegiatan.
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	105.26 Tercapai/Melampaui	Terdapat sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan sanksi administratif	Melakukan monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.80	99.20	110.47	103.33 Tercapai/Melampaui	Tidak ada kendala	Melakukan pengawasan iklan sesuai komponen penilaian yang ada pada DO setiap komoditi
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	95.83	119.79	114.08 Tercapai/Melampaui	Penetapan target Indikator terlalu rendah sehingga capaian di atas 110%	Diperlukan penyesuaian target tahun 2026 berdasarkan realisasi Agustus s.d Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105.69	105.69	105.69 Tercapai/Melampaui	Tidak ada kendala	1. Melakukan publikasi hasil pengawasan terkait pengendalian AMR. 2. Melaksanakan KIE kepada masyarakat untuk bijak menggunakan antibiotik. 3. Joint Inspection dengan lintas sektor terkait.
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00	79.60	109.04	92.66 Akan Tercapai		1. Peningkatan kompetensi petugas lab melalui pelatihan internal maupun eksternal. 2. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan alat lab secara berkala.
		Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	15.38	15.38	100	18.17 Perlu Upaya Keras		1. Melaksanakan bimtek dan pendampingan teknis. 2. Kolaborasi dengan Pemda/lintas sektor. 3. Melakukan monev terkait Kab/Kota yang telah didampingi.
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	100	75.00 Akan Tercapai	Dari 3 sarana yang diperiksa terdapat 2 sarana yang tidak aktif	Melakukan pendataan sarana fortifikasi yang aktif untuk tahun berikutnya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	96.45	111.45	107.17 Tercapai/Melampaui	Pemberitaan terkait Kinerja KIE Obat dan makanan di berbagai media cetak/online, elektronik dan media sosial berkonotasi negatif	1. Aktif dalam menayangkan konten informasi, baik konten mandiri ataupun repost dari media sosial BPOM RI. 2. Melaksanakan KIE untuk para relawan agar Obat dan Makanan donasi dapat terjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatannya.
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100	83.33 Akan Tercapai	Target awal masih dihitung sebagai capaian realisasi sementara target pelaksanaan program sekolah berdasarkan anggaran effisiensi	Melaksanakan program Sekolah sinergi dengan lintas sektor terkait yang beririsan dengan program Desa dan Pasar pada tahun berikutnya
		Jumlah desa pangan aman	4	4	100	50.00 Perlu Upaya Keras	Target awal masih dihitung sebagai capaian realisasi sementara target pelaksanaan program sekolah berdasarkan anggaran effisiensi	Melaksanakan program Desa sinergi dengan lintas sektor terkait yang beririsan dengan program Sekolah dan Pasar pada tahun berikutnya
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	33.33 Perlu Upaya Keras	Tidak ada permasalahan	Melaksanakan program Pasar sinergi dengan lintas sektor terkait yang beririsan dengan program Sekolah dan Desa pada tahun berikutnya

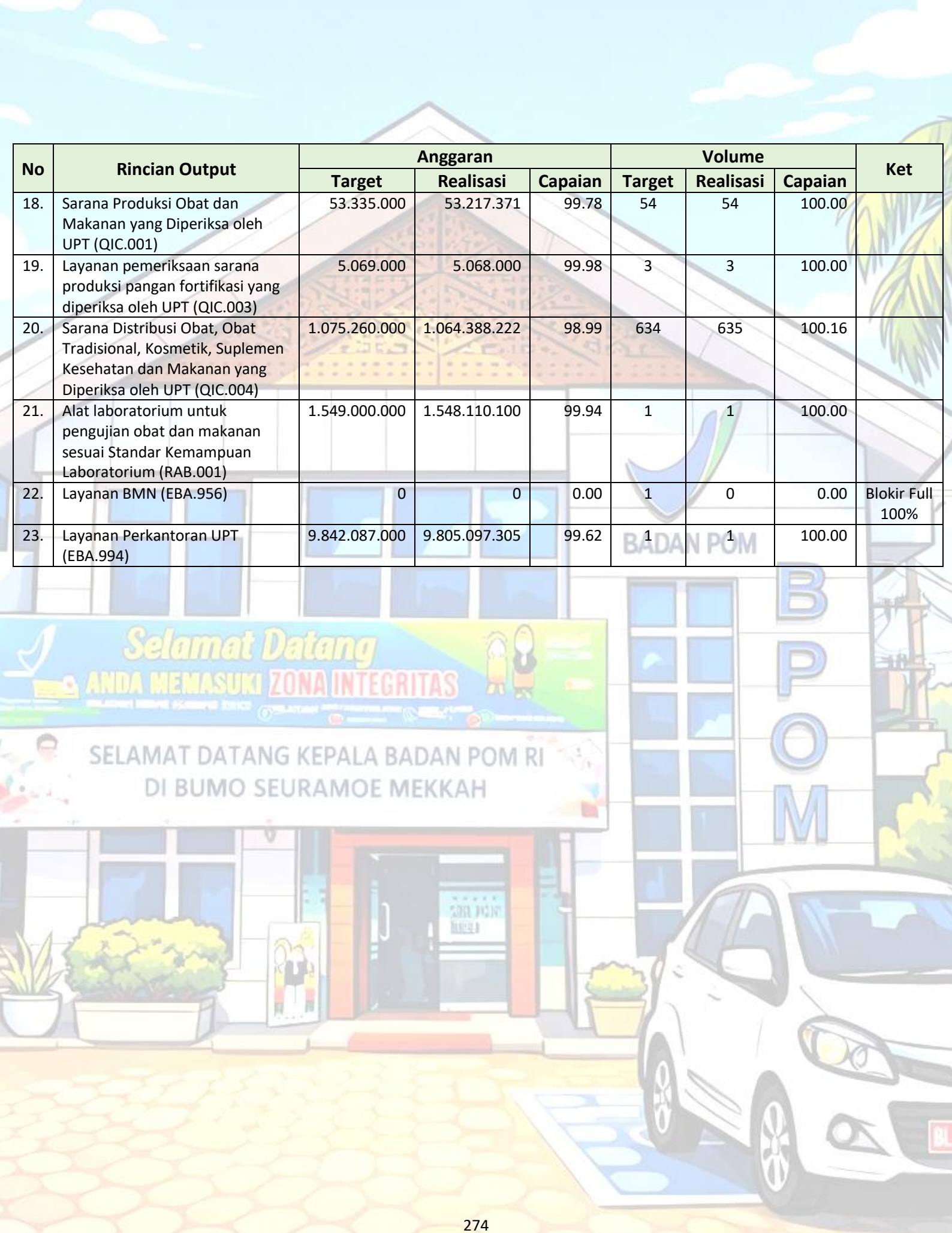
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	19.40	19.40	100	19.40 Perlu Upaya Keras	Penetapan target bulanan terlalu rendah sehingga realisasi tahapan melebihi target	1. Merencanakan penetapan tahapan target tahun 2026 sesuai dengan tren realisasi bulanan tahun 2025
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	88.75	95.95	88.75 Akan Tercapai	Terjadinya bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh berdampak pada movilitas petugas	Melaksanakan pemenuhan P-19 hingga P-21 pada awal tahun 2026
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	100	111.11	106.38 Tercapai/Melampaui	Tidak Ada	Menyusun analisa kejahatan Obat dan Makanan pada awal tahun 2026
7.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.96	105.53	101.22 Tercapai/Melampaui	Tidak ada	Sistem Informasi Pelayanan Publik ditingkatkan terutama memaksimalkan pemutakhiran berita internal di subsite resmi secara harian dan konsisten dengan meningkatkan varian informasi kegiatan yang telah dilakukan seluruh tim kerja baik lingkup internal maupun eksternal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	90.25	90.24	99.99	96.00 Akan Tercapai	1. Belum menetapkan kriteria khusus Tim setiap area perubahan. 2. Belum melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI dalam hal pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pelayanan publik. 3. Belum melaksanakan tindak lanjut atas rencana aksi pembangunan ZI.	Melakukan perbaikan atas rekomendasi dari Inspektorat Utama
		Nilai AKIP UPT	82.78	81.00	97.85	96.54 Akan Tercapai	Nilai komponen capaian kinerja yang menurun sehingga diperlukan komitmen untuk seluruh pegawai agar dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya	1. Meningkatkan kompetensi pegawai. 2. Melakukan monev kinerja secara berkala.
		Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100	100 Tercapai		1. Melakukan monev anggaran secara berkala. 2. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan.
		Indeks Manajemen Risiko	3.20	2.90	90.63	78.54 Akan Tercapai		1. Melakukan evaluasi secara berkala. 2. Lebih melibatkan Ketua Tim dalam mengidentifikasi Risk Event masing-masing fungsi.

Capaian Rincian Output (RO) Balai Besar POM di Banda Aceh
Tahun 2025

No	Rincian Output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA)	48.865.000	48.856.179	99.98	14	14	100.00	
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH)	112.285.000	112.034.660	99.78	188	206	109.57	
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC)	71.390.000	71.332.650	99.92	723	861	119.09	
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB)	33.243.000	33.092.486	99.55	1	1	100.00	
5.	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB)	14.252.000	14.223.701	99.80	24	93	387.50	
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB)	0	0	0.00	1	0	0.00	Blokir Full 100%
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi (CAN)	0	0	0.00	7	0	0.00	Blokir Full 100%
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (CBV)	0	0	0.00	1	0	0.00	Blokir Full 100%
9.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (PDD)	1.443.226.000	1.441.138.382	99.86	1	1	100.00	
10.	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh (QCD.U12)	473.984.000	471.847.500	99.55	4	4	100.00	
11.	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	35.016.010	35.016.010	100.00	10	10	100.00	
12.	Desa Pangan Aman (QDB.002)	83.926.000	83.829.573	99.89	4	4	100.00	
13.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (QDB.003)	22.708.000	22.707.900	100.00	1	1	100.00	
14.	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans (QDC)	43.550.000	43.208.860	99.22	45	45	100.00	
15.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (QDG)	33.000.000	32.806.298	99.41	13	13	100.00	
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	371.177.000	369.636.479	99.58	355	357	100.56	
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.002)	613.168.000	612.668.318	99.92	890	893	100.34	

No	Rincian Output	Anggaran			Volume			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	53.335.000	53.217.371	99.78	54	54	100.00	
19.	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (QIC.003)	5.069.000	5.068.000	99.98	3	3	100.00	
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	1.075.260.000	1.064.388.222	98.99	634	635	100.16	
21.	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (RAB.001)	1.549.000.000	1.548.110.100	99.94	1	1	100.00	
22.	Layanan BMN (EBA.956)	0	0	0.00	1	0	0.00	Blokir Full 100%
23.	Layanan Perkantoran UPT (EBA.994)	9.842.087.000	9.805.097.305	99.62	1	1	100.00	



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh mencatat capaian kinerja yang **sangat baik**, tercermin dari **nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 103,68 dengan predikat "Istimewa"**. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja periodik mampu mencapai atau melampaui target, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program serta konsistensi perencanaan dan monitoring yang kuat.

Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil menunjukkan kinerja organisasi yang unggul pada Triwulan IV 2025. **Tujuan strategis terlaksana dengan sangat baik**, ditandai dengan capaian **nilai pencapaian sasaran kegiatan** 103.82 berpredikat Istimewa. Sebagian besar indikator telah dicapai atau melampaui target. Hasil ini memperlihatkan bahwa organisasi bekerja tepat sasaran dalam mengelola program prioritas dan pengawasan.

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik,** 12 (dua belas) indikator kinerja dengan kategori **Baik, dan 5** (lima) indikator kinerja dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Capaian ini membuktikan bahwa pelaksanaan program pengawasan, pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan di bidang obat dan makanan telah berjalan efektif secara substantif.

a. Indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu:
    1. IKSK1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
    2. IKSK2 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
    3. IKSK5 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
    4. IKSK6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

5. IKSK7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
6. IKSK8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
7. IKSK9 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
8. IKSK10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
9. IKSK13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
10. IKSK14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
11. IKSK24 - Indeks Pelayanan Publik UPT.

b. Indikator kinerja dengan kategori Baik
1. IKSK4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.
2. IKSK15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman.
3. IKSK16 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
4. IKSK18 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
5. IKSK19 - Jumlah desa pangan aman.
6. IKSK20 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
7. IKSK21 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
8. IKSK22 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
9. IKSK25 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
10. IKSK26 - Nilai AKIP UPT.
11. IKSK27 - Nilai Kinerja Anggaran
12. IKSK28 - Indeks Manajemen Risiko.

c. Indikator kinerja dengan kategori cukup, tidak diperoleh di akhir tahun 2025.
d. Indikator kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan, yaitu:
    1. IKSK3 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
    2. IKSK11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
    3. IKSK12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.
    4. IKSK17 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
    5. IKSK23 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Dari komposisi klasifikasi capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) atau 82,14% indikator kinerja telah dinilai dengan kategori sangat baik dan baik. Evaluasi berkala telah mampu menghasilkan pencapaian kinerja yang akurat, konsisten, dan meningkat berkelanjutan mendukung akuntabilitas organisasi secara menyeluruh.

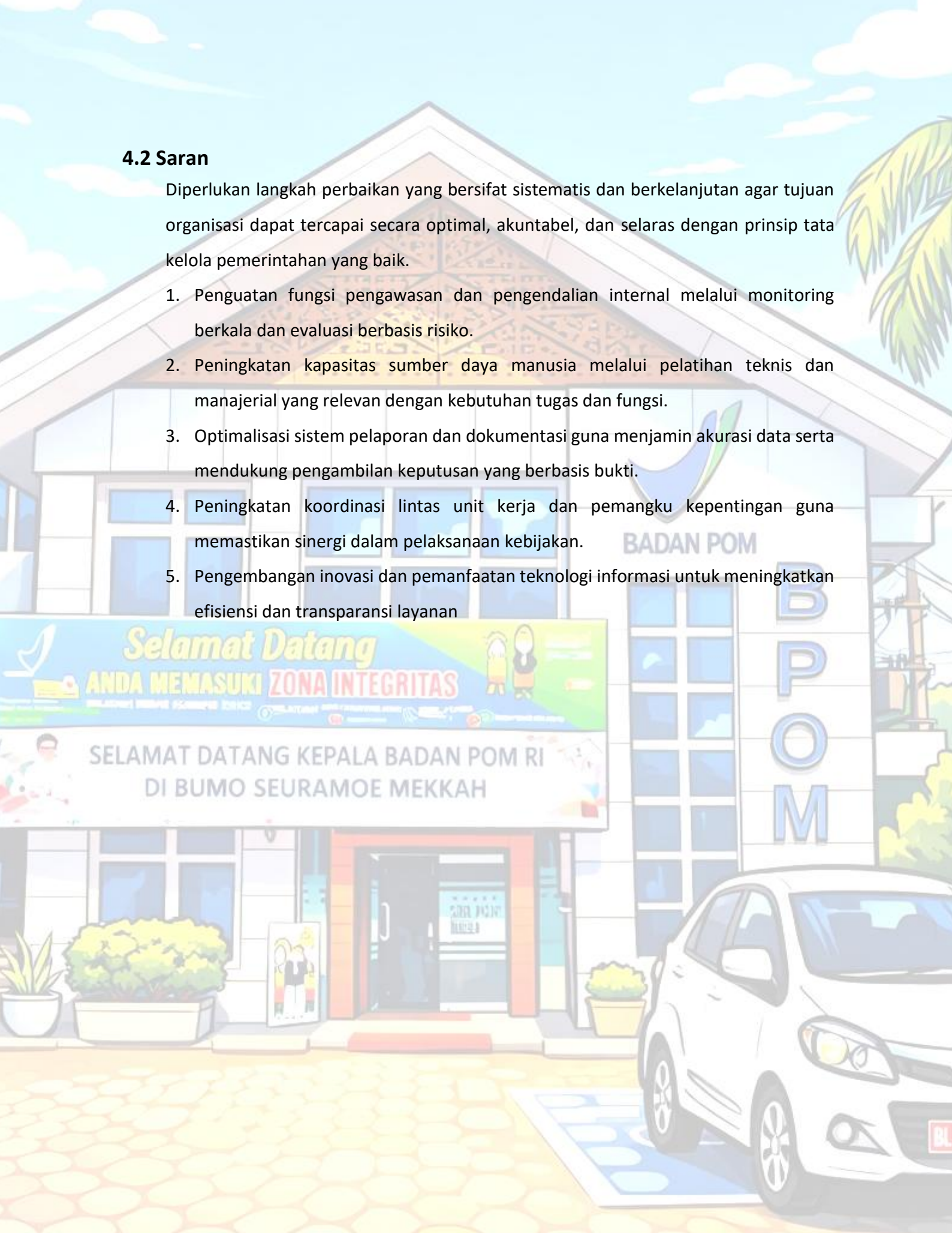
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengalokasikan Anggaran DIPA tahun 2025 sebesar Rp15.924.542.000,- (Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang telah dibelanjakan dengan realisasi anggaran 99,61 persen sebesar Rp15.862.701.274.- (Lima belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan berhasil memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi 103,68** dengan kategori **Istimewa**.

Adapun tantangan utama dalam pelaksanaan anggaran meliputi efisiensi anggaran awal tahun dan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, strategi penguatan akan difokuskan pada sinkronisasi antara perencanaan kegiatan dan realisasi belanja, penguatan pemantauan serta koordinasi intensif antara bidang teknis dan perencanaan.

4.2 Saran

Diperlukan langkah perbaikan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal melalui monitoring berkala dan evaluasi berbasis risiko.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial yang relevan dengan kebutuhan tugas dan fungsi.
3. Optimalisasi sistem pelaporan dan dokumentasi guna menjamin akurasi data serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
4. Peningkatan koordinasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan




BADAN POM
B
P
O
M
Selamat Datang
ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS
SELAMAT DATANG KEPALA BADAN POM RI
DI BUMO SEURAMOE MEKKAH

LAMPIRAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIYANTO
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 01 October 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
RIYANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.8 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	15.38
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	19.4 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	62.5 Persen
6.	07 - Terlaksanannya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilaysh kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.78 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 19,936,291,000 (Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	8,037,762,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,898,529,000

Banda Aceh, 01 October 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



Balai Besar POM di Banda Aceh Telah Meraih Predikat WBBM 2025

BADAN POM

KEMENTERIAN PANRB
WBBM
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
2025
ZONA INTEGRITAS

@bpom.aceh
@bpom.aceh
bpomaceh
@bpomaceh
aceh.pom.go.id
@bpom.aceh
081262123339 (Layanan Sertifikasi)
08116853301 (Layanan Informasi)

Jln. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Bandar Baru
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh